PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PER 31 DESEMBER 2024

AUDITED



TANJUNGPANDAN, 23 MEI 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 telah dapat diselesaikan. Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Tujuan pelaporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Tanjungpandan, Mei 2025

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRAN xii
SISTEMATIKA HASIL LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xvii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 6
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 7
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 9
NERACA 10
LAPORAN OPERASIONAL 12
LAPORAN ARUS KAS 14
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 16
BAB I 17
PENDAHULUAN 17
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 17
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 17
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 19
BAB II 21
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN 21
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 21
2.1 Ekonomi Makro 21
2.1.1 Letak Geografis 21
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi /PDRB 22
2.1.3 Inflasi 23
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 23
2.1.5 Kemiskinan 24
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 24
2.2 Kebijakan Keuangan 25
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 26
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah 27

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD 29
2.4 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 33
BAB III 36
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 36
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 36
3.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 36
3.1.2 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024 37
3.1.3 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 38
3.1.4 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 39
BAB IV 42
Kebijakan Akuntansi 42
4.2 Basis Akuntansi 43
4.3 Kebijakan akuntansi 43
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 60
5.1 Laporan Realisasi Anggaran 60
5.1.1 Pendapatan 60
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 61
5.1.1.1.1 Pajak Daerah – LRA 61
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA 66
5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA 68
5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 69
5.1.1.2 Pendapatan Transfer 71
5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) 72
5.1.1.2.2 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) 73
5.1.1.2.3 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik 74
5.1.1.2.4 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 75
5.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah 78
5.1.1.2.6 Dana Desa 78
5.1.1.2.7 Insentif Fiskal 79
Transfer Antar Daerah 79

5.1.1.2.8 Pendapatan Bagi Hasil 79
5.1.1.2.9 Bantuan Keuangan 80
5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah 81
5.1.2 Belanja 82
5.1.2.1 Belanja Operasi 82
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai 83
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85
5.1.2.1.3 Belanja Subsidi 88
5.1.2.1.4 Belanja Hibah 89
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 109
5.1.2.2 Belanja Modal 110
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga 114
5.1.2.4 Belanja Transfer 114
5.1.3 Pembiayaan (*financing*) 115
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan 115
5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA 115
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan 116
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 116
5.3 Neraca 118
5.3.1 Aset 118
5.3.1.1 Aset Lancar 118
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah 118
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 120
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 120
5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD 120
5.3.1.1.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya 121
5.3.1.1.6 Kas di Bendahara JKN 122
5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOS 122
5.3.1.1.8 Setara Kas 123
5.3.1.1.9 Kas lainnya 123
5.3.1.1.10 Kas Dana BOK Puskesmas 124
5.3.1.1.11 Investasi Jangka Pendek 124
5.3.1.1.12 Piutang Pajak 124

5.3.1.1.13 Piutang Retribusi 126
5.3.1.1.14 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 129
5.3.1.1.15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 130
5.3.1.1.16 Piutang Transfer 131
5.3.1.1.17 Piutang Lainnya 132
5.3.1.1.18 Beban Dibayar Di muka 135
5.3.1.1.19 Persediaan 136
5.3.1.2 Aset Nonlancar 140
5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang 141
5.3.1.2.2 Aset Tetap 146
5.3.1.2.2.1 Tanah 148
5.3.1.2.2.2 Peralatan dan Mesin 158
5.3.1.2.2.3 Gedung dan Bangunan 219
5.3.1.2.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 235
5.3.1.2.2.5 Aset Tetap Lainnya 251
5.3.1.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 262
5.3.1.2.2.7 Akumulasi Penyusutan 265
5.3.1.2.3 Dana Cadangan 272
5.3.1.2.4 Aset Lainnya 272
5.3.1.2.4.1 Tagihan Jangka Panjang 272
5.3.1.2.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 272
5.3.1.2.4.3 Aset Tak Berwujud 281
5.3.1.2.4.4 Aset Lain-Lain 283
5.3.1.2.4.5 Dana Bagi hasil Treasury Deposit Facility (TDF) 290
5.3.1.2.5 Properti Investasi 290
5.3.2 Kewajiban 291
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 291
5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang 295
5.3.3 Ekuitas 295
5.3.3.1 Ekuitas 295
5.4 Laporan Operasional 295
5.4.1 Pendapatan - LO 295
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah 296

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak - LO 296
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi - LO 297
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 300
5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO 301
5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO 303
5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO 305
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO 305
5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO 308
5.4.2 Beban 309
5.4.2.1 Beban Pegawai 310
5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa 312
5.4.2.3 Beban Subsidi 323
5.4.2.4 Beban Hibah 324
5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial 350
5.4.2.6 Beban Penyusutan 351
5.4.2.7 Beban Amortisasi 351
5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang 351
5.4.2.9 Beban Transfer 352
5.4.2.10 Beban Lain-lain 353
5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional 353
5.4.4 Surplus/Defisit Non Operasional 353
5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO 353
5.4.4.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 353
5.4.5 Pos Luar Biasa 354
5.4.6 Surplus/(Defisit) – LO 354
5.5 Laporan Arus Kas 354
5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 354
5.5.1.1 Arus Kas Masuk 354
5.5.1.2 Arus Kas Keluar 355
5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 356
5.5.2.1 Arus Kas Masuk 356

5.5.2.2 Arus Kas Keluar 356
5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 357
5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris 357
5.5.4.1 Arus Kas Masuk 357
5.5.4.2 Arus Kas Keluar 358
5.6 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 360
5.6.1 Ekuitas awal 360
5.6.2 Surplus/Defisit (LO) 360
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 360
5.6.4 Ekuitas akhir 361
BAB VI 365
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 365
6.1 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 365
6.2 Pemimpin Lembaga Eksekutif dan Legislatif 370
6.2.1 Pemimpin Lembaga Eksekutif 370
6.2.2 Pimpinan Lembaga Legislatif 371
BAB VII 372
PENUTUP 372

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2024 22
Tabel 2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, 2022-2024 22
Tabel 3 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjungpandan, 2022-2024 23
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 24
Tabel 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung, 2022-2024 24
Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia 24
Tabel 7 Gini Ratio 25
Tabel 8 Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2024 31
Tabel 9 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 (Belanja Daerah) Secara Umum 33
Tabel 10 Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 38
Tabel 11 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 42
Tabel 12 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 47
Tabel 13 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi 51
Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 60
Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024 61
Tabel 16 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2024 62
Tabel 17 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2024 62
Tabel 18 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2024 63
Tabel 19 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2024 64
Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 65
Tabel 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu TA 2024 66
Tabel 22 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 67
Tabel 23 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 68
Tabel 24 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2024 . 69
Tabel 25 Rincian Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 70
Tabel 26 Rincian Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah 70
Tabel 27 Rincian Realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 71
Tabel 28 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 71
Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 72
Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum 73
Tabel 31 Rincian Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya 74
Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2024 74
Tabel 33 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2024 75

Tabel 34 Realisasi Dana BOS Sekolah Swasta TA 2024 77
Tabel 35 Realisasi Dana Desa TA 2024 78
Tabel 36 Realisasi Dana Insenif Fiskal TA 2024 79
Tabel 37 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2024 80
Tabel 38 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 80
Tabel 39 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 81
Tabel 40 Rekapitulasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN TA 2024 82
Tabel 41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 82
Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 83
Tabel 43 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Pegawai TA 2024 84
Tabel 44 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 85
Tabel 45 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Barang dan Jasa TA 2024 ... 87
Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 88
Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 90
Tabel 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 110
Tabel 49 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 111
Tabel 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 114
Tabel 51 Rincian Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2024 115
Tabel 52 Rincian Transaksi Sisa Kas 117
Tabel 53 Rincian Saldo Kas 119
Tabel 54 Rincian Saldo Kas BLUD 121
Tabel 55 Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya 121
Tabel 56 Saldo Kas Dana Kapitasi Per Puskesmas 122
Tabel 57 Saldo Kas Dana BOS 122
Tabel 58 Saldo Setara Kas 123
Tabel 59 Rincian Pajak yang Belum Disetor 123
Tabel 60 Saldo Kas Dana BOK Per Puskesmas 124
Tabel 61 Rincian Piutang Pajak 125
Tabel 62 Mutasi Piutang Pajak 125
Tabel 63 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Pajak 126
Tabel 64 Rincian Piutang Retribusi 127
Tabel 65 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2024 127
Tabel 66 Rincian Piutang Pelayanan Pendidikan 2024 128
Tabel 67 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Retribusi 2024 128
Tabel 68 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 130
Tabel 69 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 2024 131
Tabel 70 Penyisihan PIutang Tak Tertagih Piutang Transfer 132
Tabel 71 Rincian Piutang Lainnya 2024 133
Tabel 72 Mutasi Piutang Lainnya 2024 134
Tabel 73 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya 135
Tabel 74 Rincian Beban Dibayar Di Muka 2024 136
Tabel 75 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai 2024 137

Tabel 76 Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga 137
Tabel 77 Rincian Mutasi Tambah Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga 138
Tabel 78 Rincian Mutasi Kurang Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga 139
Tabel 79 Rekap Penyertaan Modal 2024 142
Tabel 80 Kekayaan Pemda Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas 143
Tabel 81 Laba Yang Belum Dibagikan Perumda AM Tirta Batu Mentas 2024 143
Tabel 82 Penyertaan Modal Pemda Belitung Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas 143
Tabel 83 Penyertaan Modal Pemda Belitung di PT Belitong Mandiri 144
Tabel 84 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu 146
Tabel 85 Penyertaan Modal di PT Pelabuhan Tanjung Batu 146
Tabel 86 Kekayaan Pemda Belitung Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu 146
Tabel 87 Saldo Aset Tetap Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 dan 2023 .. 147
Tabel 88 Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 148
Tabel 89 Mutasi Peralatan dan Mesin 2024 159
Tabel 90 Mutasi Perbedaan Peralatan dan Mesin 198
Tabel 91 Mutasi Gedung dan Bangunan 2024 219
Tabel 92 Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 235
Tabel 93 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 251
Tabel 94 Mutasi Perbedaan Aset Tetap Lainnya 260
Tabel 95 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 263
Tabel 96 Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 266
Tabel 97 Daftar Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2024 266
Tabel 98 Mutasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 267
Tabel 99 Aset Bersejarah Tahun 2024 271
Tabel 100 Aset Yang Dikerjasamakan Tahun 2024 272
Tabel 101 Aset Kerja Sama Tahun 2024 273
Tabel 102 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024 281
Tabel 103 Rincian Aset Tak Berwujud Per OPD 282
Tabel 104 Daftar Aset Hilang Tahun 2024 283
Tabel 105 Mutasi Aset Rusak Berat Tahun 2024 284
Tabel 106 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Tahun 2024 287
Tabel 107 Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah 289
Tabel 108 Rincian Hutang PFK Tahun 2024 291
Tabel 109 Utang Pajak Tahun 2024 292
Tabel 110 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 292
Tabel 111 Mutasi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2024 292
Tabel 112 Rincian Utang Belanja Tahun 2024 294
Tabel 113 Rincian Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2024 296
Tabel 114 Rincian Pendapatan Pajak - LO 296

Tabel 115 Rincian Selisih Pendapatan Pajak LO dan LRA 297
Tabel 116 Mutasi Perolehan Pendapatan Pajak LO 297
Tabel 117 Rincian Pendapatan Retribusi LO 297
Tabel 118 Rincian Selisih Pendapatan Retribusi LO 298
Tabel 119 Mutasi Pendapatan Retribusi LO 300
Tabel 120 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 300
Tabel 121 Rincian Dividen 2024 300
Tabel 122 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah 301
Tabel 123 Rincian Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah LO dan LRA 301
Tabel 124 Rincian Mutasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah 302
Tabel 125 Rincian Mutasi Pendapatan BLUD 303
Tabel 126 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer - LO 303
Tabel 127 Selisih Pendapatan Transfer LO dan LRA 304
Tabel 128 Mutasi Pendapatan Transfer LO 304
Tabel 129 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO 305
Tabel 130 Rincian Pendapatan Hibah LO 305
Tabel 131 Selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA 306
Tabel 132 Mutasi Pendapatan Hibah LO 307
Tabel 133 Subrincian Pendapatan Hibah LO Per OPD 307
Tabel 134 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO 309
Tabel 135 Rincian Beban LO 309
Tabel 136 Rincian Realisasi Beban Pegawai 310
Tabel 137 Mutasi Selisih Beban Pegawai 310
Tabel 138 Mutasi Beban Pegawai 311
Tabel 139 Rincian Beban Barang dan Jasa 313
Tabel 140 Beban Barang 313
Tabel 141 Rincian Beban Barang 313
Tabel 142 Mutasi Beban Barang 315
Tabel 143 Beban Jasa 316
Tabel 144 Mutasi Beban Jasa 316
Tabel 145 Rincian Beban Jasa 318
Tabel 146 Beban Pemeliharaan 319
Tabel 147 Mutasi Beban Pemeliharaan 319
Tabel 148 Beban Perjalanan Dinas 321
Tabel 149 Mutasi Beban Perjalanan Dinas 321
Tabel 150 Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 321
Tabel 151 Beban Barang dan Jasa BOS 322
Tabel 152 Mutasi Beban Barang dan Jasa BOS 322
Tabel 153 Beban Barang dan Jasa BOSP 322
Tabel 154 Mutasi Beban Barang dan Jasa BOSP 322
Tabel 155 Beban Barang dan Jasa BLUD 322

Tabel 156 Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD 323
Tabel 157 Rincian Beban Subsidi 323
Tabel 158 Beban Hibah 324
Tabel 159 Mutasi Beban Hibah 325
Tabel 160 Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat 329
Tabel 1610 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat 330
Tabel 162 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 330
Tabel 163 Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya 332
Tabel 164 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan/Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 333
Tabel 165 Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 335
Tabel 166 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 343
Tabel 167 Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 345
Tabel 168 Beban Hibah Dana BOS yang Diterima Satdikdas Swasta 347
Tabel 169 Beban Hibah Kepada Partai Politik 348
Tabel 170 Realisasi Beban Bantuan Sosial 350
Tabel 171 Beban Penyusutan Aset Tetap 351
Tabel 172 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 351
Tabel 173 Beban Penyisihan Piutang 352
Tabel 174 Beban Transfer 352
Tabel 175 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO 353
Tabel 176 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 353
Tabel 177 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi 354
Tabel 178 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi 355
Tabel 179 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi 356
Tabel 180 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris 357
Tabel 181 Rincian Pengembalian Belanja Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris 357
Tabel 182 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris 358
Tabel 183 Rincian Penurunan Saldo Kas 358
Tabel 184 Rincian Saldo Akhir Kas 358
Tabel 185 Selisih Saldo Akhir Kas Pada LAK dengan SiLPA 359
Tabel 186 Rekonsiliasi Saldo Kas di Neraca dengan Saldo Kas di LAK 359
Tabel 187 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya 360
Tabel 188 Alokasi dan Penggunaan Dana BOS Satdikdas Swasta 364
Tabel 189 Daftar Organisasi Perangkat Daerah untuk TA. 2024 369

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
Lampiran 2	Transfer DBH Provinsi
Lampiran 3	Ringkasan Realisasi Pendapatan Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
Lampiran 4	Rekap Belanja Pegawai per SKPD
Lampiran 5	Rekap Belanja barang dan jasa per SKPD
Lampiran 6	Daftar Penerima Dana Hibah BOP Tahun 2024
Lampiran 7	Rekap Belanja Modal per SKPD
Lampiran 8	Rekap Belanja Modal berdasarkan Jenis
Lampiran 9	Rekapitulasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2024
Lampiran 10	Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Fungsi, Urusan, Organisasi dan Jenis Belanja
Lampiran 11	Saldo kas Bendahara BOS
Lampiran 11a	Rekap Saldo kas BOS Kinerja per sekolah
Lampiran 12	Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah
Lampiran 13	Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah
Lampiran 14	Rekapitulasi Piutang Transfer
Lampiran 15	Rekapitulasi Piutang lain-lain
Lampiran 16	Rekapitulasi Persediaan
Lampiran 17	Rekapitulasi Persediaan Barang untuk Diserahkan
Lampiran 18	Rekapitulasi Persediaan Kadaluarsa
Lampiran 19	Data Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Lampiran 20	Rincian Mutasi Aset Pemerintah Kabupaten Belitung
Lampiran 21	Mutasi Penambahan BMD
Lampiran 22	Mutasi Pengurangan BMD
Lampiran 23	Rekapitulasi Saldo Barang Milik Daerah
Lampiran 24	Saldo Aset Tetap Berupa Tanah
Lampiran 25	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah
Lampiran 26	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Berupa Tanah dari belanja Modal
Lampiran 27	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Berupa Tanah Dari Klasifikasi Pengalihan antar OPD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Lampiran 28	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Berupa Tanah Dari Klasifikasi Koreksi Kurang Catat (Tahun Sebelumnya)
Lampiran 29	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah Dari Klasifikasi Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah/ Penyertaan Modal dengan Tidak Lanjut Penghapusan
Lampiran 30	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah Dari Klasifikasi Penghapusan atas Pengalihan antar OPD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Lampiran 31	Daftar Rincian Tanah yang masuk dalam kategori Properti Investasi

Lampiran 32	Daftar Rincian Saldo Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin
Lampiran 33	Daftar Rincian Mutasi Peralatan Dan Mesin
Lampiran 34	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Belanja Modal
Lampiran 35	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Belanja Non Modal
Lampiran 36	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Aset Tetap Dari Pendapatan Hibah (Hibah Masuk)
Lampiran 37	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Koreksi Kurang Catat
Lampiran 38	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Belanja Modal BOS APBN
Lampiran 39	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Belanja Modal BOS Kinerja
Lampiran 40	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Belanja Non Modal BOS APBN
Lampiran 41	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
Lampiran 42	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Pengalihan antar OPD
Lampiran 43	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Reklasifikasi Antar Kelompok Aset Tetap
Lampiran 44	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Reklasifikasi Dalam Kelompok Aset Tetap
Lampiran 45	Daftar Rincian Reklasifikasi Antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Penghapusan
Lampiran 46	Daftar Rincian Reklasifikasi Antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Pengalihan Antar OPD
Lampiran 47	Daftar Rincian Reklasifikasi Antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Reklasifikasi Antar Aset Tetap
Lampiran 48	Daftar Rincian Reklasifikasi Dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Lampiran 49	Daftar Rincian Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Lampiran 50	Daftar Rincian Reklasifikasi ke Barang dan Jasa Dari Klasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Lampiran 51	Daftar Rincian Reklasifikasi ke Aset Lainnya Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Perubahan Kondisi Peralatan dan Mesin
Lampiran 52	Daftar Rincian Reklasifikasi ke Persediaan Dari Klasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Lampiran 53	Daftar Rincian Reklasifikasi ke Barang Pakai Habis Dari Klasifikasi Lain-lain Peralatan dan Mesin
Lampiran 53a	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Klasifikasi Lain-lain
Lampiran 54	Saldo Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024
Lampiran 55	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Lampiran 56	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Klasifikasi Belanja Modal
Lampiran 57	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Klasifikasi Belanja Non Modal
Lampiran 58	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Klasifikasi Pendapatan Hibah
Lampiran 59	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Pendapatan Biaya Operasional Pendidikan Kabupaten
Lampiran 60	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Pengalihan Antar OPD
Lampiran 61	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Reklasifikasi Antar Kelompok Aset Tetap
Lampiran 62	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Reklasifikasi Dalam Kelompok Aset Tetap
Lampiran 63	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakompatabel
Lampiran 63a	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Dari Klasifikasi Reklasifikasi dari Persediaan
Lampiran 64	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Koreksi Kurang Catat
Lampiran 65	Dari Klasifikasi Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah dengan Tidak Lanjut Penghapusan
Lampiran 66	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Pengalihan Antar OPD
Lampiran 67	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Reklasifikasi Antar Kelompok Aset Tetap
Lampiran 68	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Reklasifikasi Dalam Kelompok Aset Tetap
Lampiran 69	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel
Lampiran 70	Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Reklasifikasi ke Persediaan
Lampiran 70a	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Klasifikasi Lain-lain
Lampiran 71	Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024
Lampiran 72	Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi
Lampiran 73	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Klasifikasi Belanja Modal
Lampiran 74	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Klasifikasi Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 75	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Dari Klasifikasi Reklasifikasi Antar Kelompok Barang
Lampiran 76	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dari Klasifikasi Pendapatan Hibah
Lampiran 77	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dari Klasifikasi Koreksi Kurang Catat (tahun sebelumnya)
Lampiran 78	Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengalihan Antar OPD
Lampiran 79 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dari Klasifikasi Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah dengan Tidak Lanjut Penghapusan
Lampiran 80 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dari Dari Klasifikasi Reklasifikasi Ke Aset Lainnya (Hilang/ Rb)
Lampiran 81 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dari Dari Klasifikasi Reklasifikasi Dari Belanja Modal Ke Beban Hibah
Lampiran 82 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dari Klasifikasi Belanja Modal ke Persediaan untuk diserahkan
Lampiran 82a Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dari Klasifikasi Lain-Lain
Lampiran 83 Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024
Lampiran 84 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Lampiran 85 Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya dari Klasifikasi Belanja Modal
Lampiran 86 Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya dari Klasifikasi Belanja Barang Dan Jasa
Lampiran 87 Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Dari Klasifikasi Belanja Barang Dan Jasa Bos
Lampiran 88 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya dari Klasifikasi Penghapusan Aset Tetap
Lampiran 89 Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Dari Klasifikasi Belanja Modal BOS
Lampiran 90 Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya dari Klasifikasi Belanja Modal BOS Kinerja
Lampiran 91 Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya dari Klasifikasi Pendapatan Hibah
Lampiran 92 Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Dari Klasifikasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
Lampiran 93 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya dari Klasifikasi Reklasifikasi Antar KIB
Lampiran 94 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Dari Klasifikasi Reklasifikasi Dalam KIB
Lampiran 95 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Dari Klasifikasi Reklasifikasi Antar KIB
Lampiran 96 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Dari Klasifikasi Reklasifikasi Dalam KIB
Lampiran 97 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Dari Klasifikasi Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel
Lampiran 98 Saldo Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024
Lampiran 99 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 100 Daftar Rincian Penambahan Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Klasifikasi Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 101 Daftar Rincian Pengurangan Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam

	Pengerjaan dari Klasifikasi Reklasifikasi Antar Kelompok Aset Tetap Reklasifikasi Antar Kelompok Aset Tetap
Lampiran 102	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024
Lampiran 103	Daftar Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD
Lampiran 104	Rekapitulasi Aset Esktrakompatabel per 31 Desember 2024 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah
Lampiran 105	Daftar Aset Cagar Budaya Kabupaten Belitung
Lampiran 106	Daftar Aset Bersejarah (Benda Bercorak Kebudayaan)
Lampiran 107	Daftar Reklasifikasi Aset Lainnya ya
Lampiran 108	Daftar Aset Tetap Berupa Gedung Dan Bangunan Yang Dipergunakan Oleh Pihak Lain (Status Pinjam Pakai)
Lampiran 109	Daftar Aset Tetap Berupa kendaraan Yang Dipergunakan Oleh Pihak Lain (Status Pinjam Pakai)
Lampiran 110	Daftar Aset Tak Berwujud
Lampiran 111	Rekapitulasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah
Lampiran 112	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah
Lampiran 113	Daftar Rekapitulasi Pendapatan Sewa diterima Dimuka Tahun 2024
Lampiran 114	Rekapitulasi Utang Beban OPD Per 31 Desember 2024
Lampiran 115	Rekapitulasi Utang BLUD dan APBD UPT RSUD dr Marsidi Judono per 31 Desember 2024
Lampiran 116	Rekapitulasi Beban Berdasarkan Klasifikasi Organisasi
Lampiran 117	Daftar Rekapitulasi Beban Penyusutan Aset Tetap per OPD
Lampiran 118	Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan Kabupaten Belitung
Lampiran 119	Mandatory Spending
Lampiran 120	Beban dibayar dimuka

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Belitung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi

akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 95.B/LHP/XVIII.PPG/05/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pangkalpinang, 22 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Flora Anita Diassari, M.M., Ak., CSFA, CFrA
Register CSFA Nomor R.00050

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 95.A/LHP/XVIII.PPG/05/2025 tanggal 22 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan pada RSUD tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Jasa Pelayanan senilai Rp310.064.006,50; dan
2. Kekurangan Volume atas 11 Paket Pekerjaan Bangunan dan Gedung pada Tiga SKPD sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Belitung berisiko menerima aset dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana dan kelebihan pembayaran pada 11 paket pekerjaan Bangunan dan Gedung senilai Rp344.003.000,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Belitung antara lain agar:

1. Memerintahkan Direktur RSUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp310.064.006,50 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke Kas BLUD serta merevisi Peraturan Direktur tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan dari Tarif INA CBG's sesuai ketentuan.
2. Memerintahkan:
   a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp70.816.000,00 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
   b. Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp119.329.000,00 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke Kas BLUD; dan
   c. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp153.858.000,00 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pangkalpinang, 22 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Flora Anita Diassari

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Belitung yang memiliki 31 Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2024;
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan LPSAL per 31 Desember 2024;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LO, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
f. Efektivitas desain dan implementasi SPI termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk SPI terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut.

a. Pemeriksaan Interim dilaksanakan berdasarkan surat tugas nomor 24/ST/XVIII.PPG/02/2025 selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender mulai tanggal 16 Februari s.d. 22 Maret 2025 di Tanjungpandan dan 3 (tiga) hari kerja di Pangkalpinang mulai tanggal 24 Maret s.d. 26 Maret 2025; dan
b. Pemeriksaan Terinci dilaksanakan berdasarkan surat tugas nomor 35/ST/XVIII.PPG/03/2025 selama 30 hari kalender mulai tanggal 10 April s.d. 9

Mei 2025 di Belitung dan 3 (tiga) hari kerja di Pangkalpinang yaitu tanggal 9 April, 10 Mei dan 14 Mei 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak sengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BUPATI BELITUNG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tanjungpandan, Mei 2025

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
Audited

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	(%)	REALISASI 2023
1	**PENDAPATAN**	5.1.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	87.742.429.243,00	95.733.329.497,25	109,11	94.099.943.027,70
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	21.074.509.702,00	28.328.411.252,00	134,42	12.144.612.725,60
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5.566.654.064,00	5.566.654.063,95	100,00	6.035.003.956,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	40.428.962.634,00	55.404.647.823,13	137,04	74.341.948.786,50
7	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA (3 s.d 6)**		**154.812.555.643,00**	**185.033.042.636,33**	**119,52**	**186.621.508.495,80**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	5.1.1.2				
9	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**					
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1	80.736.185.000,00	80.735.062.654,00	100,00	136.611.970.768,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.2	485.449.524.000,00	485.393.500.051,00	99,99	469.430.528.687,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.3	11.226.341.000,00	10.766.768.288,00	95,91	69.464.145.429,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.4	88.916.618.000,00	84.237.114.249,00	94,74	84.872.962.908,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d 13)		666.328.668.000,00	661.132.445.242,00	99,22	760.379.607.792,00
15	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**					
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.5				
17	Dana Otonomi Khusus			-	-	41.029.718.000,00
18	Dana Keistimewaan		-	-		-
19	Dana Desa	5.1.1.2.6	-	-		-
20	Insentif Fiskal		41.717.027.000,00	41.477.591.670,00	99,43	40.466.853.100,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s.d 20)		15.976.321.000,00	15.976.321.000,00	100,00	-
22	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**		57.693.348.000,00	57.453.912.670,00	99,58	81.496.571.100,00
23	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.7	67.305.000.000,00	59.001.661.334,00	87,66	71.558.916.815,00
24	Bantuan Keuangan		10.032.000.000,00	3.971.626.000,00	39,59	6.713.367.500,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (23 s.d 24)		77.337.000.000,00	62.973.287.334,00	81,43	78.272.284.315,00
26	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14+21+25)**		**801.359.016.000,00**	**781.559.645.246,00**	**97,53**	**920.148.463.207,00**
27	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	5.1.1.3				
28	Pendapatan Hibah					
29	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
30	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.1	- 10.997.152.244,00	- 10.777.416.768,00	- 98,00	- 10.669.847.206,00
31	**JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (28 s.d 30)**		**10.997.152.244,00**	**10.777.416.768,00**	**98,00**	**10.669.847.206,00**
32	**TOTAL PENDAPATAN (7+26+31)**		**967.168.723.887,00**	**977.370.104.650,33**	**101,05**	**1.117.439.818.908,80**
33	**BELANJA**	5.1.2				
34	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.1				
35	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	508.271.590.243,63	475.569.482.472,00	93,57	445.534.554.743,00
36	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	407.951.234.350,37	363.320.239.519,78	89,06	363.679.104.935,00
37	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	693.409.628,00	638.399.797,00	92,07	644.159.628,00
38	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	46.960.884.950,00	46.220.077.443,00	98,42	39.760.641.477,00
39	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	345.180.862,00	235.972.000,00	68,36	204.411.000,00
40	**JUMLAH BELANJA OPERASI (35 s.d 39)**		**964.222.300.034,00**	**885.984.171.231,78**	**91,89**	**849.822.871.783,00**
41	**BELANJA MODAL**	5.1.2.2				
42	Belanja Modal Tanah		6.500.000.000,00	4.135.660.290,00	63,63	1.098.020.400,00
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		30.837.407.740,00	26.330.082.535,00	85,38	62.234.547.745,00
44	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		18.878.149.382,00	18.418.277.038,62	97,56	38.123.739.705,00
45	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		15.122.711.886,00	14.696.115.290,00	97,18	46.774.899.000,00
46	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3.483.820.182,00	3.400.250.200,00	97,60	2.800.254.900,00
47	Belanja Modal Aset Lainnya		167.711.000,00	164.983.850,00	98,37	-
48	**JUMLAH BELANJA MODAL (42 s.d 47)**		**74.989.800.190,00**	**67.145.369.203,62**	**89,54**	**151.031.461.750,00**
49	**BELANJA TAK TERDUGA**	5.1.2.3				
50	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	2.500.000.000,00	-	-	-
51	**JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (50)**		**2.500.000.000,00**	-	-	-
52	**BELANJA TRANSFER**	5.1.2.4				
53	Belanja Bagi Hasil		9.753.057.800,00	9.753.057.800,00	100,00	9.131.821.000,00
54	Belanja Bantuan Keuangan		98.335.597.900,00	98.096.162.570,00	99,76	98.462.189.100,00
55	**JUMLAH BELANJA TRANSFER (53 s.d 54)**		**108.088.655.700,00**	**107.849.220.370,00**	99,78	**107.594.010.100,00**
56	**JUMLAH BELANJA (40+48+50+55)**		**1.149.800.755.924,00**	**1.060.978.760.805,40**	**92,28**	**1.108.448.343.633,00**
57	**SURPLUS / (DEFISIT) (32-56)**		**(182.632.032.037,00)**	**(83.608.656.155,07)**	**45,78**	**8.991.475.275,80**

NO. URUT	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	(%)	REALISASI 2023
58	**PEMBIAYAAN**	5.1.3				
59	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.3.1				
60	Penggunaan SiLPA	5.1.3.1.1	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00	176.640.556.760,97
61	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (59)**		**185.632.032.037,00**	**185.632.032.036,77**	**100,00**	**176.640.556.760,97**
62	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.3.2				
63	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
65	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (63 s.d 64)**		**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**100,00**	-
66	**PEMBIAYAAN NETTO (61-65)**		**182.632.032.037,00**	**182.632.032.036,77**	**100,00**	**176.640.556.760,97**
67	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (57+66)**		-	**99.023.375.881,70**	-	**185.632.032.036,77**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI BELITUNG

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Audited

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	185.632.032.036,77	176.668.393.594,32
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		185.632.032.036,77	176.640.556.760,97
3	**Sub Total (1 - 2)**		-	**27.836.833,35**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		99.023.375.881,70	185.632.032.036,77
5	**Sub Total (3+4)**		**99.023.375.881,70**	**185.659.868.870,12**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
7	Lain-lain		-	(27.836.833,35)
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)**		**99.023.375.881,70**	**185.632.032.036,77**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI BELITUNG

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
Audited

No.	URAIAN	REF	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	**ASET**	5.3.1		
2	**ASET LANCAR**	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	14.510.560.075,04	90.570.065.275,40
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	-	-
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	22.477.704.910,66	33.541.904.236,37
7	Kas yang dibatasi penggunaannya	5.3.1.1.5	178.536.273,00	177.643.765,00
8	Kas di Bendahara JKN	5.3.1.1.6	221.461.131,00	90.195.943,00
9	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.7	211.800.588,00	323.507.124,00
10	Setara Kas	5.3.1.1.8	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
11	Kas lainnya	5.3.1.1.9	-	227.500,00
12	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.10	1.603.135.798,00	1.281.452.680,00
13	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.11	-	-
14	Piutang Pajak	5.3.1.1.12	*24.116.925.873,00*	22.195.993.588,00
15	*Penyisihan Piutang Pajak*		*(14.910.346.601,00)*	*(13.198.847.908,50)*
16	Piutang Pajak Netto		*9.206.579.272,00*	8.997.145.679,50
17	Piutang Retribusi	5.3.1.1.13	*15.901.432.340,00*	3.293.747.563,00
18	*Penyisihan Piutang Retribusi*		*(2.686.329.149,00)*	*(2.544.443.099,25)*
19	Piutang Retribusi Netto		*13.215.103.191,00*	749.304.463,75
20	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	5.3.1.1.14	*19.990.000,00*	19.990.000,00
21	*Penyisihan Bagian lancar tagihan penjualan angsuran*		*(19.990.000,00)*	*(19.990.000,00)*
22	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Netto		-	-
23	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	5.3.1.1.15	-	-
24	*Penyisihan Bagian lancar tuntutan ganti rugi*		-	-
25	Bagian lancar tuntutan ganti rugi Netto		-	-
26	Piutang Transfer	5.3.1.1.16	*15.067.479.618,00*	12.091.797.198,00
27	*Penyisihan Piutang Transfer*		-	-
28	Piutang Transfer Netto		15.067.479.618,00	12.091.797.198,00
29	Piutang Lainnya	5.3.1.1.17	*856.704.401,80*	6.483.963.249,64
30	*Penyisihan Piutang Lainnya*		*(793.163.401,80)*	*(748.905.758,55)*
31	Piutang Lainnya Netto		*63.541.000,00*	5.735.057.491,09
32	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.18	27.885.580,84	25.530.913,97
33	Persediaan	5.3.1.1.19	24.296.991.685,15	19.199.420.307,88
34	**JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 33)**		**161.080.779.122,69**	**232.783.252.577,96**
35	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	5.3.1.2		
36	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
37	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		-	-
38	Investasi dalam Obligasi		-	-
39	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
40	Dana Bergulir		-	-
41	Deposito Jangka Panjang		-	-
42	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
43	*JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen (36 s.d 42)*		-	-
44	Investasi Jangka Panjang Permanen			
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	56.937.452.463,29	55.864.882.529,28
46	Investasi Permanen Lainnya		-	-
47	*JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen (45 s.d 46)*		*56.937.452.463,29*	*55.864.882.529,28*
48	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (43 + 46)**		**56.937.452.463,29**	**55.864.882.529,28**
49	**ASET TETAP**	5.3.1.3.2		
50	Tanah	5.3.1.2.2.1	370.676.122.840,53	339.197.970.602,53
51	Peralatan dan Mesin	5.3.1.2.2.2	720.367.617.851,82	697.617.840.076,03
52	Gedung dan Bangunan	5.3.1.2.2.3	785.386.635.067,07	762.036.878.775,11
53	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.2.2.4	2.175.527.297.933,24	2.147.718.601.043,40
54	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.2.2.5	67.445.072.900,35	64.008.029.756,38
55	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.2.2.6	20.050.310.260,68	18.172.375.120,68
56	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.2.2.7	(2.109.621.307.295,71)	(1.945.886.023.322,30)
57	*JUMLAH ASET TETAP (50 s.d 56)*		*2.029.831.749.557,98*	*2.082.865.672.051,83*
58	**DANA CADANGAN**	5.3.1.2.3		
59	Dana Cadangan		-	-
60	*JUMLAH DANA CADANGAN (59)*		-	-
61	**ASET LAINNYA**	5.3.1.2.4		
62	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.2.4.1	-	-
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.2.4.2	8.861.250.276,00	8.861.250.276,00
64	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.2.4.3	*5.855.151.917,00*	*5.680.168.067,00*
65	*Amortisasi Aset Tak Berwujud*		*(5.489.127.812,50)*	*-5.191.662.710,25*
66	Aset Tidak Berwujud Netto		366.024.104,50	488.505.356,75
67	Aset Lain-lain	5.3.1.2.4.4	41.756.965.860,58	54.916.995.264,58
68	*Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat*		(23.614.889.410,60)	(26.356.786.356,60)
69	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.2.4.5	225.005.000,00	-
70	*JUMLAH ASET LAINNYA (62 s.d 69)*		*27.594.355.830,48*	*37.909.964.540,73*
71	**PROPERTI INVESTASI**	5.3.1.2.5		
72	Properti Investasi Tanah	5.3.1.2.5	3.575.471.000,00	-
73	*JUMLAH PROPERTI INVESTASI (72)*		*3.575.471.000,00*	-
73	**JUMLAH ASET (34 + 48 + 57 + 60 + 70+73)**		**2.279.019.807.974,44**	**2.409.423.771.699,80**

No.	URAIAN	REF	31 Desember 2024	31 Desember 2023
74	**KEWAJIBAN**			
75	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	5.3.2.1		
76	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		178.536.273,00	177.871.265,00
77	Utang Bunga		-	-
78	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
79	Pendapatan Diterima Dimuka		1.088.438.935,42	1.476.111.398,75
80	Utang Belanja		12.615.732.245,00	9.890.946.598,00
81	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	173.806.600,00
82	Utang Pajak		-	-
83	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (76 s.d 82)		13.882.707.453,42	11.718.735.861,75
84	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	5.3.2.2		
85	Utang Dalam Negeri		-	-
86	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
87	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (85 s.d 86)		-	-
88	**JUMLAH KEWAJIBAN (83 + 87)**		**13.882.707.453,42**	**11.718.735.861,75**
89	**EKUITAS**			
90	EKUITAS	5.3.3.1	2.265.137.100.521,02	2.397.705.035.838,05
91	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (88 + 90)**		**2.279.019.807.974,44**	**2.409.423.771.699,80**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI BELITUNG

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023
Audited

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	**PENDAPATAN**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	97.654.261.782,25	96.408.172.729,70	1.246.089.052,55	1,29
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	41.311.650.044,33	11.858.504.027,00	29.453.146.017,33	248,37
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	5.566.654.063,95	6.035.003.956,00	(468.349.892,05)	(7,76)
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.4	49.941.062.808,29	76.392.382.039,70	(26.451.319.231,41)	(34,63)
7	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH(3 s.d 6)**		**194.473.628.698,82**	**190.694.062.752,40**	**3.779.565.946,42**	**1,98**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**					
10	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**					
11	Bagi Hasil	5.4.1.2	80.960.067.654,00	136.611.970.768,00	(55.651.903.114,00)	(40,74)
12	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2	485.393.500.051,00	469.430.528.687,00	15.962.971.364,00	3,40
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.2	10.766.768.288,00	69.464.145.429,00	(58.697.377.141,00)	(84,50)
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.2	84.237.114.249,00	84.872.962.908,00	(635.848.659,00)	(0,75)
15	*Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s.d 14)*		661.357.450.242,00	760.379.607.792,00	(99.022.157.550,00)	(13,02)
16	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**					
17	Dana Insentif Daerah					
18	Dana Otonomi Khusus		-	41.029.718.000,00	(41.029.718.000,00)	(100,00)
19	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
20	Dana Desa	5.4.1.2	-	-	-	-
21	Dana Insentif Fiskal	5.4.1.3	15.976.321.000,00	-	15.976.321.000,00	-
22	*Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s.d 21)*		15.976.321.000,00	41.029.718.000,00	(25.053.397.000,00)	(61,06)
23	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**					
24	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2	61.977.343.754,00	70.068.895.770,00	(8.091.552.016,00)	(11,55)
25	Bantuan Keuangan	5.4.1.2	3.971.626.000,00	6.713.367.500,00	(2.741.741.500,00)	(40,84)
26	*Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (24 s.d 25)*		65.948.969.754,00	76.782.263.270,00	(10.833.293.516,00)	(14,11)
27	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 +22 +26)**		**743.282.740.996,00**	**878.191.589.062,00**	**(134.908.848.066,00)**	(15,36)
28						
29	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**5.4.1.3**				
30	Pendapatan Hibah - LO	5.4.2.7	11.266.690.519,50	130.783.721.746,08	(119.517.031.226,58)	(91,39)
31	Pendapatan Dana Darurat - LO		-	-	-	-
32	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3.2	10.777.416.768,00	10.669.847.206,00	107.569.562,00	1,01
33	**JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (30 s.d 32)**		**22.044.107.287,50**	**141.453.568.952,08**	**(119.409.461.664,58)**	**(84,42)**
34	**JUMLAH PENDAPATAN (7 +27+ 33)**		**959.800.476.982,32**	**1.210.339.220.766,48**	**(250.538.743.784,16)**	**(20,70)**
35						
36	**BEBAN**					
37	**BEBAN OPERASI**					
38	Beban Pegawai	5.4.2.1	475.497.347.943,00	447.279.183.240,00	28.218.164.703,00	6,31
39	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	347.045.862.133,99	339.697.639.732,74	7.348.222.401,25	2,16
40	Beban Bunga		-	-	-	-
41	Beban Subsidi	5.4.2.3	638.399.797,00	644.159.628,00	(5.759.831,00)	(0,89)
42	Beban Hibah	5.4.2.4	61.847.287.249,00	106.619.730.912,50	(44.772.443.663,50)	(41,99)
43	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	235.972.000,00	204.411.000,00	31.561.000,00	15,44
44	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.8	2.219.208.425,00	1.903.987.323,50	315.221.101,50	16,56
45	Beban Lain-Lain	5.4.2.10	-	-	-	-
46	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**					
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.6	50.627.260.955,50	50.313.827.104,60	313.433.850,90	0,62
48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.6	16.231.191.204,91	16.268.469.890	(37.278.685,09)	(0,23)
49	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.6	101.325.728.955,00	113.821.243.883,00	(12.495.514.928,00)	(10,98)
50	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	5.4.2.6	40.576.816,00	154.058.066,00	(113.481.250,00)	(73,66)
51	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.7	297.465.102,25	309.919.639,75	(12.454.537,50)	(4,02)
52	**BEBAN TRANSFER**					
53	Beban Bagi Hasil	5.4.2.9	9.753.057.800,00	9.131.821.000,00	621.236.800,00	6,80
54	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.9	56.618.570.900,00	57.995.336.000,00	(1.376.765.100,00)	(2,37)
55	**JUMLAH BEBAN (38 s.d 54)**		**1.122.377.929.281,65**	**1.144.343.787.420,09**	**(21.965.858.138,44)**	**(1,92)**
56	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34-55)**	**5.4.3**	**(162.577.452.299,33)**	**65.995.433.346,39**	**(228.572.885.645,72)**	**(346,35)**

No.	Uraian	Ref	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
57	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**5.4.4**				
58	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-	-	
59	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
60	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	5.4.4.1	(39.285.000,00)	(280.193.345,21)	240.908.345,21	(85,98)
61	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
62	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.2	(2.215.548.871,20)	982.002.526,18	(3.197.551.397,38)	(325,62)
63	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(58 s.d 62)**		**(2.254.833.871,20)**	**701.809.180,97**	**(2.956.643.052,17)**	**(421,29)**
64	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (56 + 63)**		**(164.832.286.170,53)**	**66.697.242.527,36**	**(231.529.528.697,89)**	**(347,14)**
65						
66	**POS LUAR BIASA**	**5.4.5**				
67	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
68	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
69	**POS LUAR BIASA (67-68)**		-	-	-	-
70	**SURPLUS/DEFISIT- LO (64 + 69)**	**5.4.6**	**(164.832.286.170,53)**	**66.697.242.527,36**	**(231.529.528.697,89)**	**(347,14)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI BELITUNG

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
Audited

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	2024	2023
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	5.5.1		
2	**Arus Masuk Kas**	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		95.733.329.497,25	94.099.943.027,70
4	Penerimaan Retribusi Daerah		28.328.429.252,00	12.144.891.525,60
5	Penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.566.654.063,95	6.035.003.956,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang sah		54.319.752.323,13	74.235.879.986,50
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		80.735.062.654,00	136.611.970.768,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		485.393.500.051,00	469.430.528.687,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		10.766.768.288,00	69.464.145.429,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		47.359.587.685,00	46.903.175.088,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	41.029.718.000,00
	Penerimaan Dana Insentif Fiskal		15.976.321.000,00	-
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		59.001.661.334,00	71.558.916.815,00
13	Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan		3.971.626.000,00	6.713.367.500,00
14	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	-
15	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
16	Penerimaan Lainnya		-	-
17	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 16)**		**887.152.692.148,33**	**1.028.227.540.782,80**
18	**Arus Keluar Kas**	5.5.1.2		
19	Pembayaran Pegawai		475.592.481.642,00	445.563.763.177,00
20	Pembayaran Barang		328.060.841.961,78	326.447.594.565,00
21	Pembayaran Subsidi		638.399.797,00	644.159.628,00
22	Pembayaran Hibah		41.600.053.850,00	35.208.309.870,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		235.972.000,00	204.411.000,00
24	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		9.753.057.800,00	9.131.821.000,00
25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes		56.618.570.900,00	57.995.336.000,00
26	Pembayaran Tak terduga		-	-
27	**Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d 26)**		**912.499.377.950,78**	**875.195.395.240,00**
28	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)**		**(25.346.685.802,45)**	**153.032.145.542,80**
29	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	5.5.2		
30	**Arus Masuk Kas**	5.5.2.1	-	-
31	Pencairan Dana Cadangan		-	-
32	Penjualan atas Tanah		-	-
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
36	Penjualan atas Tanah		-	-
37	Penjualan Aset Tetap		-	-
38	Penjualan Aset Lainnya		1.084.877.500,00	105.790.000,00
39	**Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d 38)**		**1.084.877.500,00**	**105.790.000,00**
40	**Arus Keluar Kas**	5.5.2.2		
41	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
42	Perolehan Tanah		4.135.660.290,00	1.098.020.400,00
43	Perolehan Peralatan dan Mesin		22.585.890.296,00	59.377.750.991,00
44	Perolehan Gedung dan Bangunan		18.418.277.038,62	38.123.739.705,00
45	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		14.696.115.290,00	46.774.899.000,00
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya		62.000.000,00	23.773.000,00
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		164.983.850,00	-
48	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		3.000.000.000,00	-
49	**Jumlah Arus Keluar Kas (41 s.d 48)**		**63.062.926.764,62**	**145.398.183.096,00**
50	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 49)**		**(61.978.049.264,62)**	**(145.292.393.096,00)**

No	Uraian	Ref	2024	2023
51	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	5.5.3		
52	**Arus Masuk Kas**			
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
57	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
62	**Jumlah Arus Masuk Kas (53 s.d 61)**		-	-
63	**Arus Keluar Kas**			
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
68	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
69	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
70	**Jumlah Arus Keluar Kas (64 s.d 69)**		-	-
71	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (62 - 70)**		-	-
72	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	5.5.4		
73	**Arus Masuk Kas**	5.5.4.1		
74	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		43.905.049.808,00	45.908.143.900,00
75	Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan		2.901.350.952,00	4.878.165.698,00
76	Penerimaan Pengembalian Belanja Dana BOS/BOP		-	173.806.600,00
77	Penerimaan Sisa kas Bendahara penerimaan tahun lalu		-	362.000,00
78	**Jumlah Arus Masuk Kas (74 s.d 77)**		**46.806.400.760,00**	**50.960.478.198,00**
79	**Arus Keluar Kas**	5.5.4.2		
80	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		43.905.049.808,00	45.908.365.079,00
81	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan		173.806.600,00	-
82	Pemberian Uang Persediaan		2.526.513.811,00	4.785.988.592,00
83	**Jumlah Arus Keluar Kas (80 s.d 82)**		**46.605.370.219,00**	**50.694.353.671,00**
84	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (78 - 83)**		**201.030.541,00**	**266.124.527,00**
85	**Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 50 + 71 + 84)**		**(87.123.704.526,07)**	**8.005.876.973,80**
86	**Saldo Awal Kas BUD**		**184.111.969.511,77**	**176.106.092.537,97**
87	**Saldo Akhir Kas BUD**		**96.988.264.985,70**	**184.111.969.511,77**
88	- Kas di Kas Daerah		74.510.560.075,04	150.570.065.275,40
89	- Kas di Badan Layanan Umum Daerah		22.477.704.910,66	33.541.904.236,37
90	**Kas Bendahara Pengeluaran**		-	-
91	**Kas Bendahara Penerimaan**		-	-
92	**Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN**		**221.461.131,00**	**90.195.943,00**
93	**Kas di Bendahara Pengeluran BOS**		**211.800.588,00**	**323.507.124,00**
	Kas di Bendahara Dana BOK		**1.603.135.798,00**	
94	**Kas lainnya**		-	**1.281.680.180,00**
95	**Saldo Akhir Kas**		**99.024.662.502,70**	**185.807.352.758,77**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI BELITUNG

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Audited

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.6.1	2.397.705.035.838,05	2.329.263.789.922,69
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(164.832.286.170,53)	66.697.242.527,36
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya		32.264.350.853,50	1.744.003.388,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	**2.265.137.100.521,02**	**2.397.705.035.838,05**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI BELITUNG

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan satuan kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung khususnya selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun informasi yang disajikan antara lain informasi tentang posisi keuangan pada satuan kerja/instansi dan pemerintah daerah mengenai aset, utang/kewajiban, dan ekuitas dana serta pendapatan dan belanja pada periode pelaporan.

Dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada publik;
2. Manajerial, membantu dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana bagi pengguna;
3. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung nomor 35);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung);
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 68).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Bab ini memuat informasi tentang keadaan umum Kabupaten Belitung, ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Bab ini menjelaskan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pos pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, perubahan SAL, aset, kewajiban, pendapatan –LO, beban, ekuitas dan komponen-komponen laporan arus kas.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai susunan perangkat daerah dan pemimpin lembaga eksekutif dan legislatif.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Belitung secara geografis terletak antara 107°08’ BT sampai 107°58’ BT dan 02°30’ LS sampai 03°15’ LS dengan luas daratan seluruhnya 229.369 ha. Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari sekitar seratus buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Disamping itu, masih ada pulau besar lainnya, seperti : Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.

Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama BILLITONIT yang bergaris tengah Timur-Barat + 79 km dan garis tengah Utara-Selatan + 77 km. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni:

1. Sebelah Utara oleh DAS Buding
2. Sebelah Selatan oleh DAS Pala dan Kembiri, dan
3. Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk.

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kuarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 km2 atau 5,82 persen dari luas Kabupaten Belitung .

Kabupaten Belitung dengan ibu kota kabupaten di Tanjungpandan merupakan wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan laut. Hingga saat ini, Kabupaten Belitung terdiri dari 42 buah desa dan 7 Kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Membalong, Tanjungpandan, Sijuk, Badau dan Selat Nasik.

Tabel 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Persentase
Kecamatan Membalong	909,55	39,65
Kecamatan Tanjungpandan	378,45	16,50
Kecamatan Badau	458,20	19,98
Kecamatan Sijuk	413,99	18,05
Kecamatan Selat Nasik	133,50	5,82
Jumlah	2.293,69	100,00

Sumber : Belitung Dalam Angka 2025

Terbentuknya Kabupaten Belitung adalah berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi /PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2024 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 27,10 persen dan 12,67 persen.

Tabel 2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, 2022-2024

No.	Uraian	2022	2023	2024
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	12.322,37	13.504,09	14.151,24
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	7.093,36	7.500,36	7.638,73
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,71	5,74	1,84

Sumber : Belitung Dalam Angka 2024

Berdasarkan data Belitung Dalam Angka Tahun 2025, PDRB ADHB Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah 14.151,24 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang nilainya 13.504,09 miliar rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 7.500,36 miliar rupiah di tahun 2023, menjadi 7.638,73 miliar rupiah di tahun 2024.

Setelah mengalami kontraksi ekonomi pada 2020, perekonomian Kabupaten Belitung kembali mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yaitu mencapai 5,74persen. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.3 Inflasi

Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi adalah tingkat inflasi. Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi semestinya masih lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan inflasinya. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari inflasi, maka secara nominal masyarakat meningkat pendapatan perkapitanya, namun secara riil tidak mengalami peningkatan kesejahteraan, karena harga-harga barang pokok mengalami kenaikan di atas kenaikan pendapatan.

Dalam perekonomian, faktor harga sangat menentukan bagi dunia bisnis maupun konsumen. Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen/ inflasi. Inflasi yang tinggi akan membatasi gerak investor dan akan mengurangi daya beli masyarakat, sebaliknya bila tingkat inflasi rendah akan merangsang dunia usaha untuk melakukan investasi.

Inflasi Kota Tanjungpandan sebesar 1,68 persen pada tahun 2024, lebih rendah daripada tahun sebelumnya, yakni sebesar 3,80 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar tahun 2024 adalah rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,24 persen.

Tabel 3 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjungpandan, 2022-2024

Tahun	Inflasi
2022	4,17
2023	3,80
2024	1,68

Sumber : Belitung Dalam Angka 2025.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar 68,18 persen artinya sebesar 68,18 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi.

Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar 3,88 persen artinya dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 38 orang diantaranya merupakan pencari kerja.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2022	4,30	65,25
2023	4,14	68,09
2024	3,88	68,18

Sumber: Belitung Dalam Angka 2025.

2.1.5 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang menurun tidak selalu berarti jumlah penduduk miskin juga menurun.

Tabel 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung, 2022-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk (%)
2022	12,34	6,45
2023	12,51	6,46
2024	11,97	6,11

Sumber : Belitung Dalam Angka 2025.

Dari tabel diatas menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Belitung pada tahun 2022 sebesar 12,34 ribu jiwa mengalami kenaikan sebesar 0,17 ribu jiwa menjadi 12,51 ribu jiwa pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 turun menjadi 11,97 ribu jiwa.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Belitung tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Perkembangan IPM Kabupaten Belitung dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2022	73,83
2023	74,49
2024	74,96

Sumber: Belitung Dalam Angka 2025

Dari tabel diatas menunjukkan IPM Kabupaten Belitung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kabupaten Belitung mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 sebesar 74,96 mengalami peningkatan sebesar 0,47 point dari tahun 2023 sebesar 74,49.

2.1.7 Gini Ratio

Gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai ratio gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai ratio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang tinggi. Ratio gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan uang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan apabila ratio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna yang artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Di Kabupaten Belitung tahun 2024 rasio gini adalah sebesar 0,248 yang artinya turun sebesar 0,005 poin dibandingkan tahun 2023 rasio gini yang bernilai 0,253.

Tabel 7 Gini Ratio

Tahun	Gini Ratio
2022	0,237
2023	0,253
2024	0,248

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung

2.2 Kebijakan Keuangan

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sebagaimana arahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024, maka pemenuhan belanja pelayanan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal tentunya menjadi prioritas utama dalam skema belanja daerah. Disamping itu program prioritas atau inovatif guna implementasi pencapaian visi dan misi kepala daerah juga menjadi prioritas serta pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

Pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024 merupakan implementasi arah dan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 juga menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan pendapatan daerah mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, maka arah kebijakan perencanaan daerah difokuskan kepada peningkatan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

A. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui :
    1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :
        a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
        b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri dari :

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Air Tanah;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) ; dan

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah terdiri dari :
   a. Retribusi jasa umum;
   b. Retribusi jasa usaha;
   c. Retribusi perizinan tertentu.
3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;
4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kekayaan/aset daerah d
6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI);
7. Evaluasi kebijakan dan ketetapan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan peningkatan pendapatan asli daerah.

B. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam mendukung perekonomian daerah memiliki fungsi yang sangat penting karena mampu mempengaruhi tingkat konsumsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu harapan agar kebijakan daerah

menggunakan sumber-sumber produksi dalam negeri diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi produktif dan mampu memperkokoh perekonomian daerah bahkan nasional.

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dilaksanakan dalam upaya pencapaian fokus belanja daerah yang meliputi :

1. Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas melalui pembiayaan belanja tidak langsung;
2. Pembiayaan belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi kemasyarakatan; 4) dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan propinsi; dan 5) pemulihan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat; melalui pembiayaan belanja langsung yang diimplementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah;
3. Pembiayaan belanja daerah berbasis disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas di dalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang less risky dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, sebagai berikut:
   a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
   b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan;
   c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung tahun anggaran 2024 merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2024.

Kebijakan umum tersebut disusun sesuai dengan kebijakan yang tertuang pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 serta mempertimbangkan kan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan Tema Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024 yaitu ”Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Potensi Unggulan Daerah” memedomani RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, serta memperhatikan prioritas pembangunan pusat dan provinsi Tahun 2023, ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penguatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.;

   Dengan sasaran adalah meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengembangan pariwisata dan meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro.
2. Penguatan Pertanian dan Perikanan.

   Dengan sasaran adalah meningkatnya produksi pertanian dan perikanan..
3. Peningkatan Kesehatan.

   Dengan sasaran adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan.

   Dengan sasaran adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
5. Peningkatan Infrastruktur Strategis.

   Dengan sasaran adalah meningkatnya infrastruktur kewilayahan.
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Dengan sasaran adalah terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional, dan birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Secara rinci penjelasan tentang rencana kerja pemerintah daerah tertuang di dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024.

Dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Belitung telah merumuskan tujuan strategis yang berkaitan dengan aspek keuangan daerah yaitu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dari tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terwujudnya efisiensi biaya dalam APBD.

Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja tujuan/sasaran, yaitu dilakukan dengan membandingkan perkembangan dan peningkatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp967.168.723.887,00** dengan realisasi sebesar **Rp977.370.104.650,33** atau mencapai **101,05%**. Capaian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 lebih rendah sebesar **Rp140.069.714.258,47** dari Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.117.439.818.908,80** atau turun sebesar **12,53%**.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar **Rp154.812.555.643,00** dengan realisasi sebesar **Rp185.033.042.636,33** atau **119,52%**. Sedangkan Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar **Rp801.359.016.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp781.559.645.246,00** atau **97,53%**. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar **Rp10.997.152.244,00** dengan realisasi sebesar **Rp10.777.416.768,00** atau sebesar **98,00%**.

Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja APBD dapat dicermati melalui optimalisasi capaian kinerja program. Berdasarkan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024. Belanja Daerah dianggarkan sebesar **Rp1.149.800.755.924,00** dengan realisasi sebesar **Rp1.060.978.760.805,40** atau **92,28%**.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 berasal dari Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar **Rp964.222.300.034,00** dengan realisasi sebesar **Rp885.984.171.231,78** atau **91,89%**, Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp74.989.800.190,00** dengan realisasi sebesar **Rp67.145.369.203,62** atau **89,54%**, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar **Rp2.500.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp108.088.655.700,00** dengan realisasi sebesar **Rp107.849.220.370,00** atau **99,78%**.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **p182.632.032.037,00** dengan realisasi sebesar **Rp182.632.032.036,77** atau **100,00%**. Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan Pembiayaan diangggarkan sebesar **Rp185.632.032.037,00** dengan realisasi sebesar **Rp185.632.032.036,77** atau 100**%**. Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar **Rp185.632.032.036,77**.

2. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp3.000.000.000,00** yang dialokasikan untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada PT. Bank Sumsel Babel dengan realisasi sebesar **Rp3.000.000.000,00** atau **100%**.

Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2024, alokasi belanja daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp285.255.681.649,00** atau **24,81%** dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Sedangkan urusan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp242.775.741.773,00** atau **21,11%**, urusan keuangan alokasi anggaran sebesar **Rp138.583.083.191,00** atau **12,05%**. Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang alokasi anggaran sebesar **Rp66.758.769.875,00** atau **5,81%**.

Berikut adalah gambaran secara rinci alokasi Belanja daerah untuk setiap urusan :

Tabel 8 Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2024

No	Urusan	Jumlah Program	ANGGARAN	REALISASI
I	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		**591.613.926.654,00**	**551.320.383.306,15**
1	Pendidikan	3	242.775.741.773,00	229.353.343.419,00
2	Kesehatan	5	285.255.681.649,00	262.828.023.629,15
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	66.758.769.875,00	60.042.682.638,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2	7.068.447.453,00	6.809.868.036,00
5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	19.702.263.600,00	18.932.806.128,19
6	Sosial	6	8.928.557.353,00	8.401.853.016,00
II	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**		**116.794.800.606,00**	**108.344.581.698,00**
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	1.386.294.700,00	1.119.403.859,00
2	Pangan	3	273.320.978,00	253.510.431,00
3	Tenaga Kerja	2	254.295.000,00	233.014.800,00
4	Pertanahan	2	2.050.007.500,00	1.774.294.805,00
5	Lingkungan Hidup	10	18.121.808.922,00	17.623.859.113,00
6	Administrasi Kependudukan dan Capil	5	6.656.309.000,00	6.272.323.501,00
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	8.245.051.555,00	7.640.247.121,00
8	Pengendalian Penduduk dan	3	3.966.015.550,00	3.542.371.315,00

No	Urusan	Jumlah Program	ANGGARAN	REALISASI
	Keluarga Berencana			
9	Perhubungan	3	24.959.632.600,00	23.642.483.708,00
10	Komunikasi dan Informatika	3	11.194.819.218,00	9.988.731.243,00
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	8.664.150.753,00	7.738.836.004,00
12	Penanaman Modal	5	6.934.839.207,00	6.463.339.834,00
13	Kepemudaan dan Olah Raga	4	12.402.652.862,00	11.438.251.726,00
14	Statistik	1	253.385.752,00	233.053.502,00
15	Persandian	1	226.224.414,00	196.935.939,00
16	Kebudayaan	5	4.852.042.050,00	4.303.751.371,00
17	Perpustakaan	2	6.208.088.345,00	5.747.547.337,00
18	Kearsipan	1	145.862.200,00	132.626.089,00
III	**Urusan Pilihan**		**49.755.787.360,00**	**43.550.236.830,75**
1	Kelautan dan Perikanan	5	13.057.948.350,00	11.706.470.309,00
2	Pariwisata	4	13.533.761.356,00	11.853.211.350,00
3	Pertanian	7	22.065.142.334,00	19.004.077.753,00
4	Perdagangan	3	524.003.950,00	445.164.444,75
5	Perindustrian	1	450.709.370,00	429.683.519,00
6	Kehutanan	1	124.222.000,00	111.629.455,00
IV	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**		**352.760.706.255,00**	**322.715.365.410,31**
1	Administrasi Pemerintahan	10	61.061.380.814,00	54.549.234.243,00
2	Pengawasan	3	12.486.865.880,00	11.951.216.102,00
3	Perencanaan	3	12.322.278.100,00	11.740.422.339,00
4	Keuangan	4	138.583.083.191,00	129.713.814.542,00
5	Kepegawaian	2	11.530.245.123,00	10.508.952.612,31
6	Pendidikan dan Pelatihan	1	1.889.920.200,00	1.673.698.459,00
7	Penelitian dan Pengembangan	1	144.955.000,00	127.914.105,00
8	Sekretariat DPRD	2	49.858.771.578,00	40.871.869.327,00
9	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan	5	32.424.219.909,00	30.289.133.146,00
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	5	32.458.986.460,00	31.289.110.535,00
	Jumlah	**147**	**1.149.800.755.924,00**	**1.060.978.760.805,40**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas), pengadaan buku pelajaran dan kepustakaan, tersedianya meubelair, peralatan kantor untuk menunjang kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan, saluran drainase, peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun 2024.

2.4 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah APBD TA. 2024 Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar Rp932.744.201.063,00 dan Anggaran Belanja TA. 2024 sebesar Rp1.068.510.021.579,00. APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024. Dalam APBD-P TA 2024, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar Rp967.168.723.887,00 atau bertambah sebesar Rp34.424.522.824,00 atau 3,69% dan Anggaran Belanja sebesar Rp1.149.800.755.924,00 atau bertambah sebesar Rp81.290.734.345,00 atau 7,61%.

Tabel 9 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 (Belanja Daerah) Secara Umum

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	496.125.002.288,00	508.271.590.243,63	12.146.587.955,63	Penambahan jumlah Pegawai yaitu Penerimaan dan pelantikan ASN PPPK serta penyesuaian Gaji dan Tunjangan berupa Kenaikan Jabatan, Penyesuaian gaji berkala, pembayaran tpp THR dan tpp Gaji 13 menjadi 100% yg kebijakan tahun sebelumnya 50% dan lain-lain
Belanja Barang dan Jasa	369.091.839.736,00	407.951.234.350,37	38.859.394.614,37	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Subsidi	693.409.628,00	693.409.628,00	0,00	Penyesuaian belanja subsidi terkait subsidi bunga pinjaman bagi KUKM
Balanja Hibah	44.263.409.950,00	46.960.884.950,00	2.697.475.000,00	Penganggaran dana hibah KPU dan Bawaslu untuk Pelaksanaan Pilkada 2024, penyesuaian belanja hibah BOS, dan peningkatan Pendapatan Daerah

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Bantuan Sosial	329.800.000,00	345.180.862,00	15.380.862,00	penyesuaian dari penerimaan pendapatan Insentif Fiskal Daerah
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.149.572.481,00	30.837.407.740,00	10.687.835.259,00	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.392.051.382,00	18.878.149.382,00	(4.513.902.000,00)	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.655.818.389,00	15.122.711.886,00	12.466.893.497,00	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.285.659.625,00	3.483.820.182,00	198.160.557,00	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Aset Lainnya	2.100.000.000,00	167.711.000,00	(1.932.289.000,00)	Penyesuaian belanja daerah terkait penyesuaian belanja blud rsud
Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	Penyesuaian belanja terkait penyesuaian belanja daerah baik dana dari pemerintah pusat dan Provinsi
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	9.644.122.000,00	9.753.057.800,00	108.935.800,00	Penyesuaian belanja bagi hasil dikarenakan

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah
Belanja bantuan keuangan	94.279.336.100,00	98.335.507.000,00	4.056.261.800,00	Penyesuaian alokasi dana desa dari pemerintah pusat

Sumber: Laporan Keuangan OPD 2024 (diolah)

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah APBD TA. 2024 Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Perda Perubahan APBD Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menargetkan Pendapatan Daerah baik sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjang oleh sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp977.370.104.650,33 atau 101,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp967.168.723.887,00.

Realisasi Pendapatan daerah sebesar Rp977.370.104.650,33 tersebut terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	185.033.042.636,33
- Pendapatan Transfer	Rp	781.559.645.246,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	10.777.416.768,00
Jumlah	Rp	977.370.104.650,33

Dari target pendapatan asli daerah sebesar Rp154.812.555.643,00 terealisasi sebesar Rp185.033.042.636,33 atau 119,52 %. Jika dibandingkan dengan TA 2023 terjadi penurunan penerimaan PAD sebesar Rp1.588.465.859,47 di mana pada TA 2023 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp186.621.508.495,80 Lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran.

Pada sektor pendapatan transfer dari target anggaran atas dana bagi hasil (DBH). DBH Pajak Bumi dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp11.969.552.000,00 terealisasi sebesar Rp11.969.552.000,00 atau 100%, DBH PPh Pasal 21 dari target sebesar Rp7.270.573.000,00 terealisasi sebesar Rp7.270.573.000,00 atau 100%, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dari target sebesar Rp416.057.000,00 terealisasi sebesar Rp416.057.000,00 atau 100 %, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dari target sebesar Rp722.426.000,00 terealisasi sebesar Rp722.426.000,00 atau 100%, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dari target sebesar Rp1.127.252.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.127.252.000,00 atau 100%, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty dari target sebesar Rp48.714.397.000,00 terealisasi sebesar Rp48.714.397.000,00 atau 100%, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari target sebesar Rp 6.775.026.000,00 terealisasi sebesar Rp6.773.903.654,00 atau 99,98%, DBH Sumber

Daya Alam (SDA) Perikanan dari target sebesar Rp3.740.902.000,00 terealisasi sebesar Rp3.740.902.000,00 atau 100%.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan wujud perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dari jumlah yang dialokasikan sebesar Rp485.449.524.000,00 terealisasi sebesar Rp485.393.500.051,00 atau 99.99% sampai akhir tahun anggaran 2024. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 terdiri dari DAK Fisik Reguler yang dialokasikan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan KB, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi, dan DAK Fisik Penugasan yang dialokasikan pada bidang industri kecil dan menengah, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang jalan, bidang lingkungan hidup dan kehutanan. DAK Fisik pada Tahun 2024 dari target sebesar Rp11.226.341.000,00 terealisasi 95,91% yaitu sebesar Rp10.766.768.288,00. Sedangkan DAK Non Fisik dialokasikan untuk BOS Reguler, BOS Kinerja, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, BOKKB-BOK, BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, BOKKB- Jaminan Persalinan, PK2UKM, Dana Pelayanan Kepariwisataan, Dana Bantuan BLPS, Fasilitasi Penanaman Modal, BOKB-KB, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp84.237.114.249,00 atau 94,74% dari target sebesar Rp88.916.618.000,00.

Transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar Rp41.717.027.000,00 terealisasi sebesar Rp41.477.591.670,00 atau 99,43%.

Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana pendapatan bagi hasil pajak provinsi ditargetkan sebesar Rp 67.305.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 59.001.661.334,00 atau 87,66 %. Dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan sebesar Rp 10.032.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 3.971.626.000,00 atau 39,59%.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD yang ditargetkan sebesar Rp 10.997.152.244,00 terealisasi sebesar Rp 10.777.416.768,00 atau 98%.

3.1.2 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp1.060.978.760.805,40 atau 92,28% dari anggaran belanja sebesar Rp1.149.800.755.924,00.

Realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp1.060.978.760.805,40 tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp	885.984.171.231,78
- Belanja Modal	Rp	67.145.369.203,62
- Belanja Tak Terduga	Rp	0,00

- Belanja Transfer	Rp	107.849.220.370,00
Jumlah	Rp	**1.060.978.760.805,40**

Belanja daerah pada TA 2024 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.149.800.755.924,00 direalisasikan sebesar Rp1.060.978.760.805,40 berarti terjadi penghematan belanja sebesar Rp88.821.995.118,60 atau 8,37%. Penghematan tersebut terdapat pada belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai yang hanya terealisasi sebesar Rp475.569.482.472,00 atau 93,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp508.271.590.243,63, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp363.320.239.519,78 atau 89,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp407.951.234.350,37, belanja subsidi terealisasi sebesar Rp638.399.797,00 atau 92,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp693.409.628,00, belanja hibah terealisasi sebesar Rp46.220.077.443,00 atau 98,42% dari yang dianggarkan Rp46.960.884.950,00, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp235.972.000,00 atau 68,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp345.180.862,00.

Dari belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah terealisasi sebesar Rp4.135.660.290,00 atau 63,63% dari anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00, belanja modal peralatan mesin terealisasi sebesar Rp26.330.082.535,00 atau 85,38% dari anggaran sebesar Rp30.837.407.740,00, belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp18.418.277.038,62 atau 97,56% dari anggaran sebesar Rp18.878.149.382,00, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar Rp14.696.115.290,00 atau 97,18% dari anggaran sebesar Rp15.122.711.886,00, belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp3.400.250.200,00 atau 97,60% dari anggaran sebesar Rp3.483.820.182,00 dan belanja modal aset lainnya terealisasi sebesar Rp164.983.850,00 atau 98,37% dari anggaran sebesar Rp167.711.000,00.

Belanja tak terduga dari anggaran sebesar Rp 2.500.000.000,00 tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran 2024.

Dari belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil terealisasi sebesar Rp9.753.057.800,00 atau 100% dan belanja bantuan keuangan kepada desa terealisasi sebesar Rp98.096.162.570,00 atau 99,76% dari anggaran sebesar Rp98.335.597.900,00.

3.1.3 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Rincian pembiayaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00
Pengeluaran Pembiayaan			

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	182.632.032.037,00	182.632.032.036,77	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

3.1.4 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 119,52%. Bila dilihat dari target anggaran yang ditetapkan untuk Pajak Daerah, pendapatan retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah telah melampaui anggaran. Namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terjadi penurunan penerimaan ditahun 2024, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat penurunan pendapatan BLUD RSUD dr. H. Marsdidi Judono dari tahun sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer

a. Dana transfer merupakan penerimaan yang masih mendominasi dari sumber pendanaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Belitung, adanya kebijakan pengurangan dana transfer pusat khususnya dana bagi hasil SDA berdampak pada pengurangan dan efisiensi anggaran belanja daerah, sementara itu pendapatan asli daerah belum mampu menopang kebutuhan pelayanan publik.

b. Dana Alokasi Khusus kurang dari target dikarenakan sebagai berikut :

- DAK Fisik realisasi sesuai dengan nilai kontrak
- DAK Non Fisik penyaluran dengan memperhitungkan sisa dana yang ada di RKUD Tahun Anggaran sebelumnya.

c. Dana Desa kurang dari target , sisa pagu merupakan transfer Dana Desa air Ketekok yang tidak disalurkan.

d. Dana Bantuan Khusus Provinsi kurang dari target dikarenakan jumlah dana yang dianggarkan pada APBD setelah perubahan masih mengunakan PAGU sebelum adanya perubahan SK Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 188.44/602/Bakuda/2024 dimana terdapat pengurangan dana bantuan keuangan kepada kabupaten Belitung menjadi Rp4.000.000.000,00 dari PAGU sebelumnya Rp10.032.000.000,00. Adapun realiasi penerimaan dana bantuan keuangan sebesar Rp3.971.626.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 mencapai 98,00% berupa penyaluran dana kapitasi JKN pada FKTP, tidak terdapat kendala dalam hal penyaluran dana.

4. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah tahun 2024 teralisasi sebesar 92,28%, secara persentase penyerapan anggaran tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya

mencapai 89,93%, secara umum tidak terdapat kendala dalam pelaksanan anggaran tahun 2024, penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

Berikut beberapa pejelasan terkait pelakasanaan kegiatan tahun 2024 di SKPD :

a. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), terserap **77,22%** dari alokasi anggaran. Hal ini dikarenakan ada beberapa jenis belanja yang direalisasikan harganya lebih rendah dari Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan dan tercantum dalam DPA, seperti pengisian ulang oksigen pagu yang tercantum adalah 240ribu namun dalam e-katalog adalah 170ribu, kemudian beberapa jenis belanja juga realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan juga melaksanakan efisiensi belanja sesuai dengan edaran dari Bupati Belitung.

b. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, terealisasi sebesar **73,38%** hal ini dikarenakan terdapat beberapa belanja yang tidak terealisasi seperti belanja honorarium panitia, belanja perjalanan dinas dan honorarium narasumber dikarenakan narasumber berasal dari intern Dinas Kesehatan.

c. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, terealisasi sebesar **56,24%** dari nilai anggaran. Dikarenakan Invoice tagihan dari Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) di bawah dari harga yang sudah di anggarkan dan adanya belanja tranpsortasi dan akomodasi Tim Surveyor yang semula dianggarkan untuk 2 orang dari luar daerah namun pada saat pelaksanaan kegiatan hanya satu orang yang berasal dari luar daerah sedangkan satunya berasal dari Surveyor lokal sehingga penyerapan belanja transportasi dan akomodasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan

d. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 untuk mengakomodir penyediaan kendaraan bagi Pimpinan DPRD masa jabatan Tahun 2024-2029 belum dapat terlaksana dikarenakan jenis/type kendaraan yang sesuai kebutuhan Ketua DPRD Kabupaten Belitung belum dapat disediakan oleh vendor/penyedia sampai dengan akhir tahun 2024 karena proses produksi, sedangkan penyediaan kendaraan perorangan dinas bagi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belitung tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan menggunakan fasilitas kendaraan perorangan dinas.

e. Realisasi kinerja sub kegiatan ini sebesar 50% dengan realisasi anggaran sebesar 38,79%. Rendahnya capaian realisasi anggaran tersebut dikarenakan Raperda inisiatif DPRD terkait pertanahan belum terselesaikan pada akhir Tahun 2024 dan sudah selesai pada tahap kajian akademis, sehingga hanya 1 Raperda inisiatif DPRD yang telah selesai pada Tahun 2024. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran kurang maksimal dikarenakan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2024 tentang pencabutan Perpres 53 Tahun 2023 terkait pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas secara lumpsum.

f. Realisasi kinerja sub kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 63,84%. Rendahnya capaian realisasi anggaran tersebut dipengaruhi dari metode pelaksanaan reses yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa Anggota DPRD digabung sekaligus sesuai dengan daerah pemilihannya sehingga mengurangi pengeluaran/belanja pelaksanaan reses yang telah disiapkan sebelumnya untuk per orang Anggota DPRD.

g. Adanya penggunaan dan penerapan aplikasi secara online yang mengakibatkan adanya efisiensi biaya sehingga pengeluaran belanja kegiatan tidak maksimal.

h. Adanya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023 yang mengimbau/mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengadaan Laptop PDN yang telah tersedia di catalog elektronik etalase konsolidasi laptop PDN melalui metode E-Purchasing Katalog akan tetapi ketersediaan barang/unit yang sesuai TKDN terbatas sehingga untuk pemesanan barang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan.

i. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan belanja transportasi dan akomodasi banyak dilakukan secara daring baik ditingkat pusat maupun provinsi.

j. Pelaksanaan koordinasi melalui rapat teknis dan rapat koordinasi yang melibatkan OPD teknis masih dilakukan secara daring.

Spesifikasi barang di DPA sudah terkunci dan tidak dapat dilakukan perubahan sehingga sulit untuk menyesuaikan spesifikasi barang dengan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan dalam Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki Entitas Akuntansi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. OPD di Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Tabel 11 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	RSUD dr. H. Marsidi Judono
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
7.	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Dinas Perhubungan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	Dinas Perikanan
16.	Dinas Pariwisata
17.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23.	Sekretariat Daerah
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25.	Inspektorat Kabupaten Belitung
26.	Kecamatan Tanjungpandan
27.	Kecamatan Membalong
28.	Kecamatan Sijuk
29.	Kecamatan Badau
30.	Kecamatan Selat Nasik
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selain entitas akuntansi berupa OPD sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Belitung juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja RSUD dr. H. Marsidi Judono.

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Kebijakan akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka mengatur kebijakan atas konsesi jasa dan properti investasi sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/ PMK.05/2021 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, maka Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi terkait Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan Properti Investasi.

Basis pengukuran yang mendasari penyajian pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah yang meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Pengelola Uang daerah terdiri dari :

a. BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan umum daerah yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD);

b. Bendahara Penerimaan SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD; dan

c. Bendahara Pengeluaran SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

Kas di kas daerah berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

Kas Pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah (BUD) meliputi :

a. Saldo kas di bendahara penerimaan, apabila bendahara penerimaan bukan bagian dari BUD;

b. Saldo kas di bendahara pengeluaran, apabila bendahara pengeluaran bukan bagian dari BUD;

c. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan;

d. Saldo Kas di BLUD;

e. Saldo Kas Dana BOS;

f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP;

g. Kas Dana BOSP;dan

h. Kas Dana BOK Puskesmas.

Kas di bendahara adalah kas dalam pengelolaan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Penerimaan Kas dicatat berdasarkan bukti transfer, STS/nota kredit atau bukti penerimaan lainnya.

Pengeluaran kas dicatat berdasarkan penerbitan SP2D.

Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

c. Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah pada SKPD.

d. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya akan tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.

e. Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

2. Piutang

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui pada saat :

a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah lainnya misalnya SKP, SKR, SKTJM, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Transfer/Dana Perimbangan/Dana Bagi Hasil (DBH) diakui sebesar nilai definitif sesuai alokasi definitif menurut yang telah ditetapkan dangan Peraturan perundangan/Surat Keputusan Kementerian Keuangan yang menjadi hak tagih pemerintah daerah yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan surat keputusan gubernur namun sampai akhir tahun belum dibayar/ditransfer ke daerah.

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Akun ini merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang jatuh tempo tetapi belum diselesaikan. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan sebagai berikut:

a. Diakui apabila telah diterbitkan/ditetapkan SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

c. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/ Retribusi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Belitung namun belum diterima sampai akhir tahun.

Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar;

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;

c. Kualitas Piutang Diragukan;

d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak baik yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) maupun yang ditetapkan secara jabatan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dangan 1 tahun;

b. Kualitas Kurang Lancar, umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun;

c. Kualitas Diragukan, umur piutang di atas 3 sampai dengan 5 tahun; dan

d. Kualitas Macet, umur piutang diatas 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;

b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;

c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;

d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 12 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

3. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dikeluarkan/dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode namun sebagian dari biaya atau beban tersebut bukan biaya atau beban pada periode berjalan namun merupakan biaya atau beban pada periode yang akan datang.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode.

Persediaan disajikan sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

   Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;

Pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya oleh Pemerintah daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak disajikan sebagai aset tetap melainkan disajikan sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

   Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

   Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Metode Penilaian Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

a. Metode Biaya untuk kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dicatat sebesar nilai perolehan.

b. Metode Ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan/atau kepemilikan 20% atau lebih, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi penyajian aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud. Biaya-biaya yang diatribusikan langsung atau biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset tetap yaitu biaya jasa perencanaan dan biaya jasa pengawasan.

Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;

b. Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya minimal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya berupa alat olah raga, hewan, ternak dan tanaman dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;

Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomptabel dan diungkapkan di CaLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pemeliharaan/ perbaikan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Pengeluaran jasa perencanaan yang belum disertai dengan pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan, sementara diklasifikasikan sebagai KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN dan dikapitalisasi sebagai aset tetap setelah pekerjaan konstruksinya selesai pada tahun berikutnya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method). Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

Selain tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman,seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap berupa buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman dihapuskan pada saat aset tetap tersebut tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi disusutkan dengan perhitungan nilai aset tetap renovasi dibandingkan dengan masa perjanjian pinjam pakai atau sewa.

Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh diawal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan yaitu bulan saat aset tersebut digunakan.

Aset yang pengadaannya diterima 100% sampai dengan 31 Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan penuh selama (1) satu bulan.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

c. Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak digunakan (Idle) untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya terdiri dari:

a. Aset Tak berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud ini meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Perangkat lunak (software) komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi computer.

Software yang diakui sebagai Aset tak berwujud merupakan software yang terpisah dari peralatan komputer.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Penentuan masa manfaat aset tak berwujud mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan. Masa manfaat dan tarif amortisasi sebagai berikut:

Tabel 13 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa manfaat	Tarif amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Masa manfaat dan tarif amortisasi Aset tak berwujud berupa perangkat lunak (software) dikategorikan dalam kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan tarif amortisasi 25% dengan metode garis lurus.

Pelepasan/pemindahtanganan aset tak berwujud dilakukan dengan cara :

- Dijual;
- Dipertukarkan;
- Dihibahkan; atau
- Dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Sedangkan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung adalah bentuk kerjasama pinjam pakai, Bangun, Kelola, Serah (BKS) berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

c. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

d. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TP/TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan/atau diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

e. Aset lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, hilang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) dan atau proses penghapusan. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

8. Properti Investasi

a. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   i. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
   ii. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Aset yang merupakan properti investasi antara lain:
   - tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
   - tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
   - bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   - bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   - properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

c. Aset yang bukan merupakan properti investasi antara lain:
   - properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
   - properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
   - properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
   - properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
   - Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
   - properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
   - properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

d. Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

e. **Pengakuan properti investasi** diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
   - besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
   - biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

f. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah, dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

g. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.

h. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

9. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek

antara lain, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan di terima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

10. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

11. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Belitung.

12. Pendapatan -LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut. Pendapatan LO diakui pada saat:

a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned.* Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat ditetapkannya surat ketetapan untuk pajak, retribusi dan ketetapan lainnya.

b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang diterima pembayarannya secara tunai (*realized*). Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak daerah (SKP) atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk memungut pajak tersebut.

b. Pendapatan Retribusi

Pendapatan retribusi pada prinsipnya diakui pada saat pelayanan jasa telah dilaksanakan. Pengakuan pendapatan dapat diakui secara andal bila surat ketetapan retribusi (SKR) atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk menerima retribusi tersebut. Adapun untuk jenis pendapatan retribusi yang diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya akan diakui pada saat kas telah diterima (karcis telah terjual).

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan (SK) atas pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan. Adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.

Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, yaitu sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku aset yang dijual.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Pendapatan Transfer** dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat diakui pada saat telah ditetapkannya Peraturan Presiden/Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan/Keputusan/Surat Edaran dari pejabat Kementerian Keuangan yang berwenang yang terkait dengan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian.

b. Pendapatan transfer dari Provinsi, seperti dana bagi hasil, diakui pada saat telah ditetapkannya SK Gubernur tentang dana bagi hasil ke Kabupaten.

c. Pendapatan transfer yang bersifat khusus, seperti Dana Alokasi Khusus, diakui pada saat semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi transfer telah dipenuhi oleh pemda.

d. Bantuan keuangan dari pemda lainnya dapat diakui pada saat SK Kepala Daerah Pemda lainnya tentang bantuan keuangan tersebut telah ditetapkan.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer.

Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya.

Pendapatan hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah atau berita acara hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Pendapatan hibah yang tidak menggunakan naskah perjanjian hibah atau berita acara hibah diakui pada saat kas/barang diterima pemerintah daerah.

13. Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
b. diterima oleh SKPD; atau
c. kas atas pendapatan telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD.

14. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban transfer, dan beban luar biasa.

Beban Pegawai diakui pada saat SPP-LS telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa yang dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU selama periode berjalan, pengakuannya pada saat bukti-bukti pengeluaran belanja telah disahkan oleh PA/KPA. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SPP-LS telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

Beban Penyusutan Aset Tetap dihitung secara bulanan, yaitu jika aset diperoleh pada tahun berjalan, maka aset tersebut mulai disusutkan sejak bulan perolehan aset tersebut.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Pengakuan penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.

15. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.

Belanja dicatat sebesar nilai uang yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan BUD/Kuasa BUD.

16. Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

17. Laporan keuangan konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah kabupaten belitung sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).

Proses konsolidasi dilakukan dengan cara menggabungkan saldo akun-akun yang sifatnya sama pada laporan keuangan seluruh entitas akuntansi (OPD) termasuk BLUD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Proses tersebut dilakukan oleh aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan Kabupaten Belitung.

Adapun tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai dengan banyaknya OPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan OPD dan PPKD.

b. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPD yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.

c. Setelah memasukkan neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu akun RK-PPKD lawan RK-SKPD.

d. Berdasarkan Neraca saldo setelah eliminasi, fungsi Akuntansi Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Neraca.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening struktur laporan realisasi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendapatan- LRA dan belanja diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas BUD.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya penerimaan- LRA adalah penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp977.370.104.650,33** atau **101.05%** dari total anggaran pendapatan sebesar **Rp967.168.723.887,00** Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp185.033.042.636,33**, Pendapatan Transfer sebesar **Rp781.559.645.246,00** dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp10.777.416.768,00**.

Realisasi pendapatan daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar **Rp140.069.714.258,47** atau **14.33%**. Di mana jumlah realisasi pendapatan tahun sebelumnya sebesar **Rp1.117.439.818.908,80**.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi Per 31 Desember 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	154.812.555.643,00	185.033.042.636,33	119,52	186.621.508.495,80
2	Pendapatan Transfer	801.359.016.000,00	781.559.645.246,00	97,53	920.148.463.207,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.997.152.244,00	10.777.416.768,00	98,00	10.669.847.206,00
Jumlah		**967.168.723.887,00**	**977.370.104.650,33**	**101,05**	**1.117.439.818.908,80**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah – LRA

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir diklasifikasikan menjadi satu jenis pajak dengan nama PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu).

Dari total anggaran pendapatan pajak daerah sebesar **Rp87.742.429.243,00** terealisasi sebesar **Rp95.733.329.497,25** atau **109,11%**. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi pendapatan pajak sebesar **Rp1.633.386.469,55** atau **1,74%**. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2024 terdapat pemasangan alat rekam transaksi pada objek pajak hotel, restoran dan hiburan, pendaftaran objek pajak baru hasil pendataan/verifikasi, intensifikasi melalui pengawasan/monitoring objek pajak, jemput bola/penagihan langsung kewajiban pajak dan meningkatnya transaksi jual beli lahan serta dibukanya kembali objek wisata dan pelaksanaan event-event nasional dan internasional di Kabupaten Belitung.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Hotel	-	-	-	9.348.814.425,07
2	Pajak Restoran	-	-	-	11.489.196.766,81
3	Pajak Hiburan	-	-	-	440.195.500,30
4	Pajak Reklame	1.050.000.000,00	1.129.618.657,85	107,58	995.366.968,62
5	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	15.278.250.761,00
6	Pajak Parkir	-	-	-	642.689.900,00
7	Pajak Air Tanah	138.063.437,00	140.791.668,00	101,98	129.978.580,80
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.945.000.000,00	115.970.000,00	5,96	147.216.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.065.979.285,00	25.845.285.183,00	112,05	32.760.292.505,05
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.600.000.000,00	8.609.662.611,00	113,29	7.918.036.205,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.153.826.201,00	21.371.176.637,00	124,59	14.949.905.415,05
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT]	36.789.560.320,00	38.520.824.740,40	104,71	-
Jumlah		**87.742.429.243,00**	**95.733.329.497,25**	**109,11**	**94.099.943.027,70**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir diklasifikasikan menjadi satu jenis pajak dengan nama PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Untuk pencatatan realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 disajikan pada akun PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu).

Rincian pendapatan pajak hotel sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2024

No	Pajak Hotel	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Hotel	-	-	-	8.981.837.002,10
2	Pajak Motel	-	-	-	259.530.703,97
3	Pajak Losmen	-	-	-	106.653.719,00
4	Pajak Wisma Pariwisata	-	-	-	793.000,00
Jumlah		**-**	**-**	**-**	**9.348.814.425,07**

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir diklasifikasikan menjadi satu jenis pajak dengan nama PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Untuk pencatatan realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 disajikan pada akun PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu).

Adapun rincian pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2024

No	Pajak Restoran	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	-	8.304.734.445,41
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	-	1.107.676.184,40
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	-	-	-	762.189.682,50
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya	-	-	-	76.312.961,50

No	Pajak Restoran	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	-	-	-	785.029.980,00
6	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	-	-	453.253.513,00
Jumlah		-	-	-	**11.489.196.766,81**

Sumber: data BPKAD (diolah)

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, di mana objek pajaknya adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir diklasifikasikan menjadi satu jenis pajak dengan nama PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Untuk pencatatan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada akun PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu).

Adapun rincian Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2024

No	Pajak Hiburan	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Tontonan Film	-	-	-	299.250,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	-	-	30.900.000,00
3	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	-	-	85.500.473,00
4	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	-	-	-	45.331.949,00
5	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	-	-	166.051.220,87
6	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	77.468.107,43
7	Pajak Pertandingan Olahraga	-	-	-	34.644.500,00
Jumlah		-	-	-	**440.195.500,30**

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, di mana objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame. Pendapatan dari Pajak Reklame TA 2024 terealisasi sebesar **Rp1.129.618.657,85** atau **107,58%** dari anggaran sebesar **Rp1.050.000.000,00**. Realisasi Pajak Reklame ini naik sebesar

Rp 134.251.689,23 atau **13,49%** dari realisasi TA 2023 sebesar **Rp995.366.968,62**.

Adapun rincian Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2024

No	Pajak Reklame	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	882.630.000,00	963.372.592,32	109,15	870.434.869,85
2	Reklame Kain	129.870.000,00	131.871.067,75	101,54	96.094.299,97
3	Reklame Melekat/Stiker	1.500.000,00	1.356.988,96	90,47	1.860.902,48
4	Reklame Selebaran	1.000.000,00	-	-	-
5	Reklame Berjalan	35.000.000,00	33.018.008,82	94,34	26.976.896,32
Jumlah		**1.050,000,000,00**	**1.129.618.657,85**	**107,58**	**995.366.968,62**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang diperoleh dari sumber lain yang wajib pajaknya adalah badan/orang pribadi yang menggunakan tenaga listrik yang besaran pajaknya ditentukan oleh PLN sendiri berdasarkan pemakaian tenaga listrik pelanggan dan data wajib pajaknya ada dipihak PLN. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir diklasifikasikan menjadi satu jenis pajak dengan nama PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Untuk pencatatan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada akun PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu).

Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan TA 2024 terealisasi sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari anggaran sebesar **Rp0,00**. Tidak ada Realisasi Pajak Penerangan Jalan di TA 2024 sedangkan pada TA 2023 terealisasi **Rp15.278.250.761,00**.

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan terkait dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir diklasifikasikan menjadi satu jenis pajak dengan nama PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Untuk pencatatan realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024 disajikan pada akun PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)

Pendapatan dari Pajak Parkir TA 2024 terealisasi sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari anggaran sebesar **Rp0,00**. Tidak ada Realisasi Pajak Parkir di TA 2024 sedangkan pada TA 2023 terealisasi sebesar **Rp642.689.900,00**.

7. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pendapatan dari Pajak Air Tanah TA 2024 terealisasi sebesar **Rp140.791.668,00** atau **101,98 %** dari anggaran sebesar **Rp138.063.437,00**. Realisasi Pajak Air Tanah ini meningkat sebesar **Rp10.813.087,20** atau **8,32%** dari realisasi TA 2023 sebesar Rp**129.978.580,80**.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pendapatan dari Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 terealisasi sebesar **Rp115.970.000,00** atau **5,96%** dari anggaran sebesar **Rp1.945.000.000,00**. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet ini mengalami Penurunan sebesar **Rp31.246.000,00** atau **21,22%** dari realisasi TA 2023 sebesar **Rp147.216.000,00**.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 terealisasi sebesar **Rp25.845.285.183,00** atau **112,05%** dari anggaran sebesar **Rp23.065.979.285,00**. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini turun sebesar **Rp6.915.007.322,05** atau sebesar **21,11%** dari realisasi TA 2023 sebesar **Rp32.760.292.505,05**.

Adapun rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024

No	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Granit/Andesit	240.914.481,00	231.344.330,50	96,03	16.243.787,55
2	Pajak Kaolin	6.185.064.804,00	8.118.962.258,50	131,27	7.747.714.072,50
3	Pajak Pasir dan Kerikil	6.000.000.000,00	5.069.290.383,50	84,49	9.257.288.062,50
4	Pajak Pasir Kuarsa	8.480.000.000,00	8.673.560.714,50	102,28	10.906.745.537,50
5	Pajak Tanah Liat	2.100.000.000,00	3.689.015.496,00	175,67	4.754.027.640,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	60.000.000,00	63.112.000,00	105,19	78.273.405,00
Jumlah		**23.065.979.285,00**	**25.845.285.183,00**	**112,05**	**32.760.292.505,05**

Sumber: data BPKAD (diolah)

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2024 terealisasi sebesar **Rp8.609.662.611,00** atau sebesar **113,29 %** dari anggaran sebesar **Rp7.600.000.000,00**. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini mengalami peningkatan sebesar **Rp691.626.406,00** atau sebesar **8,73%** dari realisasi TA 2023 sebesar **Rp7.918.036.205,00**.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pendapatan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar **Rp21.371.176.637,00** atau sebesar **124,59%** dari anggaran sebesar **Rp17.153.826.201,00**. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini mengalami kenaikan sebesar Rp **6.421.271.221,95** atau sebesar **42,95%** dari realisasi TA 2023 sebesar **Rp14.949.905.415,05**.

12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu TA 2024 terealisasi sebesar **Rp38.520.824.740,40** atau sebesar **104,71%** dari anggaran sebesar **Rp 36.789.560.320,00**. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu ini belum ada realisasi di TA 2023.

Adapun rincian Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu TA 2024

No	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	11.130.376.300,00	11.834.758.312,49	106,33	-
2	PBJT-Tenaga Listrik	15.400.000.000,00	15.907.252.874,00	103,29	-
3	PBJT-Jasa Perhotelan	8.908.633.000,00	9.479.056.211,08	106,40	-
4	PBJT-Jasa Parkir	350.000.000,00	350.378.300,00	100,11	-
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.000.551.020,00	949.379.042,83	94,89	-
Jumlah		**36.789.560.320,00**	**38.520.824.740,40**	**104,71**	-

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Dari jumlah anggaran retribusi daerah TA 2024 sebesar **Rp21.074.509.702,00** terealisasi sebesar **Rp28.328.411.252,00** atau **134,42 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp12.144.612.725,60** terjadi peningkatan realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar

Rp 16.183.798.526,40 atau **133,26%**. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga terdampak dengan dibukanya kembali objek wisata dan pelaksanaan event-event pariwisata dan olah raga, pengelola usaha kuliner yang mulai membuka kembali usahanya seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik di Kabupaten Belitung.

Dari total Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah diluar dari pendapatan BLUD terealisasi sebesar **Rp10.998.952.038,00.**

Selain itu di Tahun 2024 terdapat pengalihan penyajian pencatatan objek Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya dicatat pada objek Lain-lain PAD yang sah sejak perubahan APBD Tahun 2024 adalah senilai **Rp. 17.329.459.214,00**, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi sebagai berikut :

Tabel 22 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024

No	Retribusi	OPD	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum :					
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	RSUD, Dinkes, DLH	13.115.886.449,00	19.333.842.934,00	147,41	1.369.253.900,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	DLH	828.000.000,00	793.916.000,00	95,88	702.203.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dishub	95.000.000,00	138.230.000,00	145,51	125.311.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	KUKMPT,	1.457.424.000,00	1.287.869.751,00	88,37	1.191.219.500,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		-	-	-	115.750.000,00
7	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		-	-	-	17.200.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	DLH	81.600.000,00	86.000.000,00	105,39	74.800.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		-	-	-	41.806.000,00
10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	Dinkes	22.310.228,00	2.044.546,00	9,16	17.323.918,60
11	**Subtotal Retribusi Jasa Umum**		15.600.220.677,00	21.641.903.231,00	138,73	3.654.867.818,60
12	Retribusi Jasa Usaha:					
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dindikbud, Dinkes, DPUPR, DLH, Dishub, KUKMPT, Perikanan, Sekretariat Daerah	805.894.025,00	977.699.525,00	121,32	2.320.129.025,00
14	Retribusi Terminal	Dishub	0,00	54.910.000,00	0,00	98.480.000,00
15	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dindikbud, KUKMPT	123.200.000,00	197.947.000,00	160,67	176.725.000,00
16	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Sekretariat Daerah	74.100.000,00	73.350.000,00	98,99	44.950.000,00
17	Retribusi Rumah Potong Hewan	DKPP,	110.000.000,00	114.715.000,00	104,29	113.770.000,00
18	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dishub, Perikanan	270.000.000,00	435.323.800,00	161,23	326.902.200,00

No	Retribusi	OPD	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
19	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dindikbud, Dispora, Dispar	1.815.660.000,00	2.235.358.708,00	123,12	2.223.798.000,00
20	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	DPUPR, Perikanan	995.426.375,00	1.425.287.225,00	143,18	1.564.110.080,00
21	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	DPUPR	518.008.625,00	446.332.180,00	86,16	-
22	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DKPP, Dishub	62.000.000,00	56.151.000,00	90,57	-
23	**Subtotal Retribusi Jasa Usaha**		4.774.289.025,00	6.017.074.438,00	126,03	6.868.864.305,00
24	Retribusi Perizinan Tertentu :					
25	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		-	-	-	1.570.880.602,00
26	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		-	-	-	50.000.000,00
27	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	DPMPTSPP	700.000.000,00	669.433.583,00	95,63	-
28	**Sub total Retribusi Perizinan Tertentu**		700.000.000,00	669.433.583,00	95,63	1.620.880.602,00
29	**Total Retribusi Daerah**		**21.074.509.702,00**	**28.328.411.252,00**	**134,42**	**12.144.612.725,60**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Jumlah bagian laba/dividen Per 31 Desember 2024 berasal dari pendapatan Dividen dari PT Bank Sumsel Babel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024

No	Objek Pendapatan	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.566.654.064,00	5.566.654.063,95	100,00	6.035.003.956.00
Jumlah		**5.566.654.064,00**	**5.566.654.063,95**	**100,00**	**6.035.003.956.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pembagian dividen dari PT Bank Sumsel Babel merupakan pembagian dividen tahun buku 2024 berdasarkan hasil RUPS pada tahun 2024 sebesar **Rp5.566.654.063,95**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp6.035.003.956,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar **Rp468.349.892,05** atau **7,76%**.

Setoran saham Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung per *cut off* Desember 2024 sebagai berikut :

a. Jenis saham Seri A

b.	Setoran Saham	Rp	24.327.000.000,00
c.	Agio Saham	Rp	9.921.716.000,00
d.	Sisa Setoran Saham	Rp	751.464,77
e.	Jumlah Setoran Saham (b+c+d)	Rp	34.249.467.464,77
f.	Lembar saham yang dimiliki		24.327
g.	Total lembar saham gabungan		1.189.543
h.	Persentase kepemilikan		2,04%

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah untuk menampung pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah. retribusi dan bagian laba dari BUMD dan investasi lainnya yang disetor ke kas daerah. Dari jumlah anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2024 sebesar **Rp40.428.962.634,00** terealisasi sebesar **Rp55.404.647.823,13** atau **137,04%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp74.341.948.786.50** terjadi penurunan realisasi pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar **Rp18.937.300.963.37** atau **25,47%**.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2024

No	Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	34.575.000,00	34.575.000,00	100,00	253.508.000,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	17.000.000,00	15.827.207,00	93,10	14.428.532,00
3	Jasa Giro	2.500.000.000,00	2.522.185.887,00	100,89	3.358.998.830,00
4	Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	1.813.150.725,84	120,88	1.715.342.846,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.000.000.000,00	3.429.707.340,01	171,49	2.826.978.463,72
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	250.552.000,00	792.560.866,99	316,33	477.354.083,78
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.912.200,00	14.055.108,00	203,34	32.803.500,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	260.840.588,00	286.082.588,00	109,68	1.187.573.442,00
10	Pendapatan BLUD	33.859.082.846,00	46.496.503.100,29	137,32	64.474.961.089,00
Jumlah		**40.428.962.634,00**	**55.404.647.823,13**	**137,04**	**74.341.948.786,50**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan objek lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

a. Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan hasil sewa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan sewa rumah dinas	150.000.00
2.	Pendapatan hasil sewa lahan oleh PT Bank Sumsel Babel	34.500.000.00
	Total	**34.575.000.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

b. Hasil Kerja Sama Daerah merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana diatur dengan perjanjian kerja sama/pemanfaatan BMD Antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga. Rincian hasil kerja sama sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan kontribusi sewa kios dari PT Puncak Jaya Lestari	2.051.250.00
2.	Hasil kerja sama pemanfaatan BMD dari Hotel Billiton	13.775.957.00
	Total	**15.827.207.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

c. Penerimaan jasa giro merupakan penerimaan bunga saldo giro yang diberikan oleh bank yang ditunjuk sebagai pemegang rekening kas daerah berupa rekening giro kas daerah dan rekening giro kas pada bendahara dalam mengelola dana APBD.

d. Penerimaan bunga merupakan penerimaan bunga atas deposito yang berjangka dengan masa jatuh tempo 1 bulan. Pembentukan deposito sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

e. Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja atas kelebihan bayar tahun sebelumnya berdasarkan temuan pemeriksaan. denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Akun ini juga menampung penerimaan hasil penjualan aset tetap dengan cara lelang oleh KPKNL material sisa bongkaran gedung dan bangunan. barang inventaris peralatan dan mesin. dan limbah padat (scrap) dengan kandungan besi tua dengan total penerimaan sebesar **Rp1.084.877.500,00**. Sedangkan total Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya Tahun 2024 sebesar **Rp3.429.707.340,01.00.** Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan berupa denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi waktu dari pelaksanaan kontrak.

g. Pendapatan denda pajak merupakan penerimaan berupa sanksi administratif yang dikenakan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang

bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Pengenaan tarif bunga/denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

h. Pendapatan denda retribusi merupakan penerimaan berupa sanksi administratif yang dikenakan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

i. Pendapatan BLUD merupakan pendapatan bukan pajak BLUD pada RSUD dr. H Marsidi Judono yang berasal dari pendapatan jasa layanan, pendapatan hasil kerja sama BLUD, pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas, dan pendapatan BLUD lainnya yang dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD. Selain itu di Tahun 2024 terdapat pengalihan penyajian pencatatan objek Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya dicatat pada objek Lain-lain PAD yang sah sejak perubahan APBD Tahun 2024 adalah senilai Rp17.329.459.214,00, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pendapatan pelayanan Kesehatan BLUD disajikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sejak bulan Oktober 2024 karena mengikuti penyesuaian anggaran yang baru dilakukan pada saat Perubahan Anggaran.

Rincian realisasi pendapatan BLUD sebagai berikut :

Tabel 27 Rincian Realisasi Pendapatan BLUD TA 2024

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan jasa layanan umum BLUD	46.496.503.100,29
2.	Pendapatan hasil kerja sama BLUD	-
3.	Pendapatan lain-lain BLUD	-
	Total	**46.496.503.100,29**

Sumber: Rekap SP2B (diolah)

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan, Insentif Fiskal, Dana Desa (DD) dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Dari jumlah anggaran pendapatan transfer TA 2024 sebesar **Rp801.359.016.000,00** terealisasi sebesar **Rp781.559.645.246,00** atau **97,53%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp920.148.463.207,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan transfer sebesar **Rp138.588.817.961,00** atau **15,06%**.

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	80.736.185.000,00	80.735.062.654,00	100,00	136.611.970.768,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	485.449.524.000,00	485.393.500.051,00	99,99	469.430.528.687,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	11.226.341.000,00	10.766.768.288,00	95,91	69.464.145.429,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.916.618.000,00	84.237.114.249,00	94,74	84.872.962.908,00
5	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	41.029.718.000,00
6	Dana Desa	41.717.027.000,00	41.477.591.670,00	99,43	40.466.853.100,00
7	Insentif Fiskal	15.976.321.000,00	15.976.321.000,00	100,00	-
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1	Pendapatan Bagi Hasil	67.305.000.000,00	59.001.661.334,00	87,66	71.558.916.815,00
2	Bantuan Keuangan	10.032.000.000,00	3.971.626.000,00	39,59	6.713.367.500,00
	Jumlah	**801.359.016.000,00**	**781.559.645.246,00**	**97,53**	**920.148.463.207,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil berasal dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam yang dianggarkan sebesar **Rp80.736.185.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp80.735.062.654,00** atau **100%.** Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp136.611.970.768,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar **Rp 55.876.908.114,00** atau **40,90%**.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024

No	Objek Bagi Hasil Pajak	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	11.969.552.000,00	11.969.552.000,00	100,00	14.690.720.340,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.270.573.000,00	7.270.573.000,00	100,00	7.005.073.659,00

No	Objek Bagi Hasil Pajak	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	416.057.000,00	416.057.000,00	100,00	359.238.065,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	722.426.000,00	722.426.000,00	100,00	1.093.689.922,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.127.252.000,00	1.127.252.000,00	100,00	1.638.599.228,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	48.714.397.000,00	48.714.397.000,00	100,00	99.632.531.867,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.775.026.000,00	6.773.903.654,00	99,98	7.677.319.476,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.740.902.000,00	3.740.902.000,00	100,00	4.514.798.211,00
	Jumlah	**80.736.185.000,00**	**80.735.062.654,00**	**100,00**	**136.611.970.768,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.2 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai transfer DAU kepada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Dari jumlah anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 sebesar **Rp485.449.524.000,00** terealisasi sebesar **Rp485.393.500.051,00** atau **99,99%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp469.430.528.687,00** terjadi peningkatan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar **Rp15.962.971.364,00** atau **3,40%**.

Berikut jumlah anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024:

Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum

Objek Dana Perimbangan	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)
Dana Alokasi Umum	485.449.524.000,00	485.393.500.051,00	99,99	469.430.528.687,00
Jumlah	**485.449.524.000,00**	**485.393.500.051,00**	**99,99**	**469.430.528.687,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sebesar **Rp485.393.500.051,00** terdiri dari :

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditransfer ke Kas Daerah sebanyak 12 bulan dengan total nilai transfer sebesar **Rp432.330.119.000,00.**

DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya

No. Urut	Uraian DAU	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Pendanaan kelurahan	1.400.000.000,00
2.	Penggajian formasi PPPK	5.566.303.051,00
3.	Pendanaan layanan publik bidang Pendidikan	14.942.282.000,00
4.	Pendanaan layanan publik bidang Kesehatan	17.051.066.000,00
5.	Pendanaan layanan publik bidang Pekerjaan Umum	14.103.730.000,00
	Jumlah	**53.063.381.051,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.3 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Alokasi transfer DAK kepada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik).

Realisasi DAK Fisik per 31 Desember 2024 yang ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp10.766.768.288,00** atau **95,91%** dari alokasi DAK Fisik 2024 sebesar **Rp11.226.341.000,00** Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp69.464.145.429,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan DAK Fisik sebesar **Rp58.697.377.141,00** atau **84,50%**.

Penyaluran DAK dilakukan secara triwulanan dengan rincian tahap I sebesar 30%, tahap II dan III sebesar 25% dan tahap IV sebesar 20%. Pengajuan pencairan DAK ke pemerintah pusat diajukan apabila penyerapan SP2D mencapai minimal 75%.

Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik berdasarkan bidang:

Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2024

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	691.159.000,00	675.590.000,00	97,75	615.879.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.049.656.000,00	993.508.527,00	94,65	1.214.484.400,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.048.077.000,00	2.943.484.969,00	96,57	2.062.650.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	-	21.925.822.410,00

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	-	4.563.014.410,00
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-	-	-	5.598.925.800,00
7	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	-	-	-	1.084.172.850,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	-	-	-	29.723.183.059,00
9	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	-	-	2.676.013.500,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	169.249.000,00	169.200.000,00	99,97	-
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.268.200.000,00	5.984.984.792,00	95,48	-
	Jumlah	**11.226.341.000,00**	**10.766.768.288,00**	**95,91**	**69.464.145.429,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.4 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik yang pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya pada transfer ke Daerah yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Realisasi DAK Non Fisik per 31 Desember 2024 yang ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp84.237.114.249,00** atau **94,74%** dari alokasi DAK Non Fisik 2024 sebesar **Rp88.916.618.000,00.** Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp84.872.962.908,00** terjadi kenaikan realisasi pendapatan DAK Non Fisik sebesar **Rp635.848.659,00** atau **0,75%**.

Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik:

Tabel 33 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2024

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.413.220.000,00	26.077.111.359,00	98,73	26.049.739.320,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00	100,00	1.110.000.000,00

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	38.680.469.000,00	37.681.343.000,00	97,42	36.319.933.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	797.966.000,00	797.966.000,00	100,00	1.172.500.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	-	-	2.126.865.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	798.420.000,00	774.375.000,00	96,99	688.770.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00	630.000.000,00	90,00	532.582.062,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-	-	4.981.966.303,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	396.331.000,00	355.601.200,00	89,72	112.293.400,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	-	-	7.994.413.500,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	-	-	-	301.191.592,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	-	-	-	959.048.514,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	300.157.000,00	263.575.500,00	87,81	418.625.776,00
14	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.470.558.000,00	1.690.887.100,00	68,44	1.709.724.925,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanianl	-	-	-	395.309.516,00
16	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	-
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.055.300.000,00	2.050.955.885,00	99,79	-
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	-
19	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.527.660.000,00	5.420.214.885,00	83,03	-
20	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.841.537.000,00	6.560.084.320,00	83,66	-
	Jumlah	**88.916.618.000,00**	**84.237.114.249,00**	**94,74**	**84.872.962.908,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan terkait DAK Non Fisik :

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2024 dialokasikan pada kelompok pendapatan transfer sub rincian objek Dana transfer Khusus – DAK Non Fisik. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa melalui kas daerah (BUD). dana langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima dana BOS. Pencatatan pada LRA berdasarkan SP2B yang disah oleh BUD.

Alokasi DAK Non Fisik-BOS Reguler termasuk didalamnya untuk bantuan operasional sekolah (BOS) pada satuan pendidikan swasta. Adapun jumlah transfer DAK Non Fisik-BOS Reguler ke satuan pendidikan swasta sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Dana BOS Sekolah Swasta TA 2024

No.	Nama Sekolah	TRANSFER BOS OLEH PUSAT		
		Sem I	Sem II	Total
1	SD ANUGRAH TANJUNGPANDAN	125.020.000,00	118.317.553,00	243.337.553,00
2	SD MUHAMMADIYAH TANJUNGPANDAN	63.920.000,00	61.640.600,00	125.560.600,00
3	SD REGINA PACIS TANJUNGPANDAN	134.890.000,00	133.925.560,00	268.815.560,00
4	SD IT BINA INSANI TANJUNGPANDAN	186.120.000,00	186.120.000,00	372.240.000,00
5	SDS MUHAMMADIYAH 2 TANJUNG PANDAN	50.760.000,00	50.760.000,00	101.520.000,00
6	SD KELUARGA UNIVERSAL	206.330.000,00	197.920.800,00	404.250.800,00
7	SD ALAM AQILA	22.560.000,00	22.560.000,00	45.120.000,00
TOTAL SD SWASTA		**789.600.000,00**	**771.244.513,00**	**1.560.844.513,00**
1	SMP YAPERBEL TANJUNGPANDAN	27.360.000,00	24.525.000,00	51.885.000,00
2	SMP REGINA PACIS TANJUNGPANDAN	80.940.000,00	80.694.328,00	161.634.328,00
3	SMP PGRI 2 TANJUNGPANDAN	46.740.000,00	46.538.100,00	93.278.100,00
4	SMP PGRI I TANJUNGPANDAN	39.330.000,00	38.871.300,00	78.201.300,00
5	SMP MUHAMMADIYAH TANJUNGPANDAN	25.650.000,00	25.450.000,00	51.100.000,00
6	SMP ANUGRAH	83.790.000,00	78.765.000,00	162.555.000,00
7	SMP KELUARGA UNIVERSAL	100.320.000,00	100.203.300,00	200.523.300,00
8	SMP IT BINA INSANI	56.430.000,00	56.388.500,00	112.818.500,00
TOTAL SMP SWASTA		**460.560.000,00**	**451.435.528,00**	**911.995.528,00**
TOTAL SD & SMP SWASTA		**1.250.160.000,00**	**1.222.680.041,00**	**2.472.840.041,00**

Sumber: Rekapan SP2B (diolah)

Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah. Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat dialokasikan pada kelompok pendapatan transfer sub rincian objek Dana transfer Khusus – DAK Non Fisik-BOKKB Akreditasi Puskesmas. Penyaluran dana BOK Puskesmas dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Puskesmas, adapun pengelolaan dana BOK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.

5.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 tidak menerima Dana Insentif Daerah.

Berikut rincian anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah (DID):

No	Rincian DID	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dana Insentif Daerah	-	-	-	41.029.718.000,00
	Jumlah	-	-	-	**41.029.718.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.6 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besaran nilai Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2024. KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

Penyaluran dana desa dibagi dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima.
b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh.
c. Insentif Desa untuk 9 (sembilan) desa antara lain : Perawas, Kembiri, Petaling, Sijuk, Air Selumar, Sungai Padang, Badau, Cerucuk, dan Ibul.

Realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Dana Desa TA 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dana Desa Tahap I	21.917.023.800,00	15.277.729.650,00
2.	Dana Desa Tahap II	18.259.923.870,00	13.599.698.300,00

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3.	Insentif Desa	1.300.644.000,00	11.589.425.150,00
	Jumlah	**41.477.591.670,00**	**40.466.853.100,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Desa dari RKUN hanya mencapai **99,43%**dari pagu Dana Desa sebesar **Rp41.717.027.000,00** sisa pagu merupakan transfer Dana Desa air ketekok yang tidak disalurkan sebesar **Rp239.435.330,00.** Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp40.466.853.100,00** terjadi peningkatan realisasi pendapatan Dana Desa sebesar **Rp 1.010.738.570,00** atau **2,50%**.

5.1.1.2.7 Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat menurut provinsi/Kabupaten/Kota yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penghapusan kemiskinan ekstrem,penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah.

Besaran nilai Dana Insentif Fiskal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dan PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.

Tabel 36 Realisasi Dana Insenif Fiskal TA 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dana Insentif Fiskal Tahap I	7.988.160.500,00	0,00
2.	Dana Insentif Fiskal Tahap II	7.988.160.500,00	0,00
	Jumlah	**15.976.321.000,00**	**0,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Insentif Fiskal dari RKUN mencapai **100%** dari pagu Dana Insentif Fiskal sebesar **Rp15.976.321.000,00**

Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan perhitungan pembagian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB, BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, hasil pajak rokok serta bantuan keuangan dari provinsi dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.8 Pendapatan Bagi Hasil

Penerimaan atas pendapatan bagi hasil pajak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB, BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. serta bagi hasil pajak rokok. Tata cara pembagian sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011. Pada Tahun 2024 penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dianggarkan sebesar **Rp67.305.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp59.001.661.334,00** atau **87,66%** yang merupakan pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2024 dan kurang bayar pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp71.558.916.815,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar **Rp12.557.255.481,00** atau **17,55%**.

Realisasi penerimaan transfer bagi hasil pajak provinsi sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2024

No	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.098.117.903,00	14.094.802.688,00	99,98	13.473.639.257,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.204.005.324,00	5.199.621.087,00	72,18	10.183.477.527,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.411.250.326,00	28.309.804.590,00	90,13	33.346.699.139,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.578.711.360,00	2.478.456.566,00	96,11	2.492.270.253,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	12.012.915.087,00	8.918.976.403,00	74,24	12.062.830.639,00
	Jumlah	**67.305.000.000,00**	**59.001.661.334,00**	**87,66**	**71.558.916.815,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun rincian pendapatan transfer bagi hasil pajak provinsi masing-masing objek pajak dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.1.2.9 Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2024 dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/73/BAKUDA/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.

Dari jumlah alokasi sebesar **Rp10.032.000.000,00** hanya terealisasi sebesar **Rp.3.971.626.000,00** atau **39,59%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan TA 2024

Bantuan Keuangan dari Provinsi	PAGU Dana Sesuai SK Gubernur	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)
Bantuan pendidikan ke satuan pendidikan nonformal	80.000.000,00	-	-	70.000.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi	PAGU Dana Sesuai SK Gubernur	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)
Insentif guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di pulau	360.000.000,00	-	-	302.600.000,00
Insentif guru honorer dan tenaga kependidikan honorer bagi satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama	1.989.600.000,00	-	-	575.200.000,00
Insentif guru paud dan tenaga kependidikan (TK. RA. BA. PAUD non formal) non PNS	816.000.000,00	-	-	355.800.000,00
Insntif guru untuk madrasah diniyah taklimiyah se-provinsi Kep Bangka Belitung	175.200.000,00	-	-	109.500.000,00
Insentif tutor. Pamong belajar dan tenaga kependidikan	144.000.000,00	-	-	64.300.000,00
Insntif ustadz. Ustadzah	1.783.200.000,00	-	-	890.250.000,00
Pembangunan Monumen Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.000.000.000,00	3.971.626.000,00	99,29	-
Insentif Pemuka Agama Non Muslim	24.000.000,00	-	-	
Insentif Pemuka Agama	660.000.000,00	-	-	660.000.000,00
Insentif Pemuka Adat (masing-masing 1 orang setiap Kelurahan/Desa)	-	-	-	294.000.000,00
Pembangunan Listirk Non Jaringan	-	-	-	3.307.000.000,00
Bantuan Keuangan untuk pemberian makanan tambahan ibu hamil, anak stunting, anak gizi kurang serta honorarium kader Posyandu	-	-	-	84.717.500,00
Jumlah	**10.032.000.000,00**	**3.971.626.000,00**	**39,59**	**6.713.367.500,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan berupa penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2024 penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar **Rp10.997.152.244,00** dan terealisasi sebesar **Rp10.777.416.768,00** atau **98,00%**.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar **Rp10.669.847.206,00** terjadi kenaikan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp107.569.562,00** atau **1,01%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Objek Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.997.152.244,00	10.777.416.768,00	98,00	10.669.847.206,00
	Jumlah	**10.997.152.244,00**	**10.777.416.768,00**	**98,00**	**10.669.847.206,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan dana Kapitasi JKN merupakan penerimaan atas pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan

jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP tanpa melalui kas daerah. Pendapatan dana kapitasi JKN digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP yang diterbitkan oleh PPKD selaku BUD.

Berikut daftar rekapitulasi pendapatan Dana Kapitasi JKN per- FKTP:

Tabel 40 Rekapitulasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN TA 2024

No.	Nama FKTP	Jumlah Penerimaan Dana Kapitasi JKN
1.	Puskesmas Tanjungpandan	2.510.526.596,00
2.	Puskesmas Air Saga	2.149.537.370,00
3.	Puskesmas Perawas	1.100.181.145,00
4.	Puskesmas Sijuk	925.357.811,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	981.549.354,00
6.	Puskesmas Badau	893.595.629,00
7.	Puskesmas Simpang Rusa	791.410.326,00
8.	Puskesmas Membalong	915.870.791,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	509.387.746,00
	Total	**10.777.416.768,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi pendapatan menurut klasifikasi ekonomi. organisasi dan fungsi dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2 Belanja

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggaraan operasional pemerintah daerah. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan menurut jenis belanja menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial. Pada Tahun 2024 belanja operasi dianggarkan sebesar **Rp 964.222.300.034,00** dan terealisasi sebesar **Rp885.984.171.231,78** atau **91,89%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp849.822.871.783,00** terjadi peningkatan realisasi belanja operasi sebesar **Rp36.161.299.448,78** atau **4,26%**.

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	508.271.590.243,63	475.569.482.472,00	93,57	445.534.554.743,00
2	Belanja Barang dan Jasa	407.951.234.350,37	363.320.239.519,78	89,06	363.679.104.935,00
3	Belanja Subsidi	693.409.628,00	638.399.797,00	92,07	644.159.628,00
4	Belanja Hibah	46.960.884.950,00	46.220.077.443,00	98,42	39.760.641.477,00
5	Belanja Bantuan Sosial	345.180.862,00	235.972.000,00	68,36	204.411.000,00
	Total Belanja Operasi	**964.222.300.034,00**	**885.984.171.231,78**	**91,89**	**849.822.871.783,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara dan ASN.

Belanja pegawai mencakup antara lain: Belanja Gaji dan Tunjangan. Belanja Tambahan Penghasilan ASN. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Belanja Pegawai dana BOS dan Belanja Pegawai BLUD.

Pada Tahun 2024 belanja pegawai dianggarkan sebesar **Rp508.271.590.243,63** dan terealisasi sebesar **Rp475.569.482.472,00** atau **93,57 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp445.534.554.743,00** terjadi kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar **Rp30.034.927.729,00** atau **6,74%** Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan belanja pegawai BLUD, Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK dan tambahan penghasilan berdasarka petimbangan objektif lainnya ASN pada tahun 2024.

Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024

No	Objek Belanja Pegawai	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	249.900.034.417,00	233.031.430.698,00	93,25	219.145.255.179,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	167.089.846.027,00	155.968.439.956,00	93,34	142.762.506.862,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.929.573.941,00	42.843.419.399,00	97,53	41.045.199.192,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.145.750.000,00	12.869.165.644,00	97,90	13.156.912.652,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	522.583.674,00	446.691.471,00	85,48	760.138.532,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	808.000.000,00	784.800.000,00	97,13	765.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	32.875.802.184,63	29.625.535.304,00	90,11	27.898.942.326,00

No	Objek Belanja Pegawai	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Total Belanja Pegawai	**508.271.590.243,63**	**475.569.482.472,00**	**93,57**	**445.534.554.743,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan belanja pegawai sebagai berikut:

	Dalam rupiah
Nilai SP2D Belanja Pegawai	445.966.946.338.00
Ditambah :	
SP2B Belanja Pegawai BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	29.625.535.304.00
SP2B Belanja Pegawai Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Pegawai (CP)	(22.999.170.00)
Jumlah Belanja Pegawai	475.569.482.472.00

Pengembalian belanja (*contra pos*) pada belanja pegawai sebesar Rp22.999.170,00 terdiri dari:

Tabel 43 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Pegawai TA 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian gaji dan tunjangan	22.999.170.00
2.	Pengembalian belanja tambahan penghasilan PNS	-
	Jumlah	22.999.170.00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Penjelasan lainnya terkait belanja pegawai:

1. Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) merupakan tambahan penghasilan bagi PNS dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemberian tambahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Dengan adanya peraturan ini maka honor-honor kegiatan bagi PNS yang melekat pada kegiatan sudah ditiadakan dan dialihkan penganggarannya pada belanja TPP tersebut.
2. Belanja pegawai BLUD merupakan belanja pegawai pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono yang sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan BLUD. Belanja pegawai dibukukan berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas,dan pemulangan pegawai. Akun ini juga menampung objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari dana DAK BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan di bidang pendidikan seperti kelompok belajar TPA PAUD.

Pada Tahun 2024 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar **Rp407.951.234.350,37** dan terealisasi sebesar **Rp363.320.239.519,78** atau **89,06%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp363.679.104.935,00** terjadi penurunan realisasi belanja barang dan jasa sebesar **Rp358.865.415,22** atau **0,10%**.

Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	71.414.147.300,00	62.654.241.648,00	87,73	62.941.554.908,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Barang	**71.414.147.300,00**	**62.654.241.648,00**	**87,73**	**62.941.554.908,00**
3	Belanja Jasa Kantor	105.923.478.890,00	87.297.486.826,00	82,42	96.271.522.205,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.530.119.502,00	33.252.595.612,00	96,30	30.692.198.839,00
5	Belanja Sewa Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.965.426.600,00	2.405.622.126,00	81,12	2.363.983.600,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.111.283.150,00	1.007.354.000,00	90,65	1.286.822.500,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	98.200.000,00	88.560.000,00	90,18	85.590.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.959.473.400,00	5.551.682.749,00	93,16	6.950.787.112,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.370.840.000,00	1.143.267.710,00	83,40	1.172.723.113,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	49.999.150,00	16.074.000,00	32,15	2.997.000,00

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.418.500.000,00	1.378.777.596,00	97,20	1.045.218.943,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.646.187.500,00	2.523.394.134,00	69,21	2.040.195.007,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	369.000.000,00	269.136.103,00	72,94	238.207.131,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	32.484.458,00	31.993.092,00	98,49	19.008.000,00
	Jumlah Belanja Jasa	**157.478.992.650,00**	**134.969.943.948,00**	**85,71**	**142.169.253.450,00**
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	77.400.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.840.807.950,00	17.407.060.267,00	92,39	12.764.560.207,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.361.982.320,00	10.516.524.162,06	92,56	12.483.205.102,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan. dan Irigasi	19.168.832.298,00	18.834.560.958,72	98,26	16.315.817.294,00
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	225.400.000,00	208.469.687,00	92,49	-
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	**49.597.022.568,00**	**46.966.615.074,78**	**94,70**	**41.640.982.603,00**
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.704.654.419,00	45.354.751.107,00	82,91	40.794.611.147,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00	126.895.607,00	63,45	443.274.850,00
21	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.649.123.500.00	8.180.432.000,00	94,58	15.188.787.435,00
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.359.603.905,00	8.279.670.500,00	99,04	3.067.088.000,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.599.958.701,00	18.304.974.839,00	98,41	19.367.617.911,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOSP	378.405.460,00	378.405.460,00	100,00	-
25	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	182.780.000,00	182.310.000,00	99,74	-
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.386.545.847,37	37.921.999.336,00	98,79	38.065.934.631,00
	Total Belanja Barang dan Jasa	**407.951.234.350,37**	**363.320.239.519,78**	**89,06**	**363.679.104.935,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan belanja barang dan jasa sebagai berikut:

	dalam rupiah
Nilai SP2D Belanja Barang dan Jasa	290.138.842.625,78
Ditambah :	
SP2B Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	37.921.999.336,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.363.026.580,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	18.304.974.839,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	560.715.460,00
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.238.401.202,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Barang dan Jasa (CP)	(207.720.523,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	363.320.239.519,78

Pengembalian belanja (*contra pos*) pada Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp207.720.523,00** terdiri dari:

Tabel 45 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Barang dan Jasa TA 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian kelebihan pembayaran belanja pengadaan BMHP YANKES pada Dinas Kesehatan	180.090.000,00
2.	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Susanty	160.000.00
3.	Setoran pengembalian belanja pengadaan kertas	26.366.250,00
4.	Setoran pengembalian belanja Insentif Non ASN an. Rifki dan Yola	291.873,00
5.	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran plakat dan selempang bujang dayang Belitong kecamatan Badau	812.400,00
	Jumlah	**207.720.523,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Daftar nama penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari DAK BOP PAUD TA 2024 pada **Lampiran 6.**

Penjelasan lainnya terkait belanja barang dan jasa:

1. Belanja barang dan jasa dana BOS merupakan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikelola satuan pendidikan dasar (SD/SMP Negeri). Pencatatan belanja barang dan jasa berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Bantuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran. Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/ Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

2. Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono yang sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan BLUD. Belanja barang dan jasa dibukukan berdasarkan SP2BP yang disahkan oleh BUD.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah (BUMD dan /atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi diberikan kepada Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) berupa subsidi biaya bunga kredit pada Bank Sumsel Babel dan biaya pengikatan Jaminan Notarial. Pemberian subsidi ini sebagai pendukung pelaksanaan program pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Tata cara pembayaran subsidi bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Belitung tentang Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Perkuatan Koperasi. Usaha Mikro. Usaha Kecil. dan Menengah Addendum Kedua Nomor 009/TJP/PKS/2016 dan Nomor 181/004/PK/II/2016. Selain itu belanja Subsidi juga diberikan kepada PDAM dalam rangka membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung.

Pada Tahun 2024 belanja subsidi dianggarkan sebesar **Rp693.409.628,00** dan terealisasi sebesar **Rp638.399.797,00** atau **92,07%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp644.159.628.00** terjadi penurunan realisasi belanja subsidi sebesar **Rp5.759.831,00** atau **0,89%**.

Anggaran dan realisasi belanja subsidi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2024

No	Objek Belanja Subsidi	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja subsidi kepada BUMD	636.899.797,00	636.899.797,00	100,00	643.409.628,00
2	Belanja subsidi kepada koperasi	56.509.831,00	1.500.000,00	2,65	750.000,00

	Jumlah	**693.409.628,00**	**638.399.797,00**	**92,07**	**644.159.628,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran Belanja Subsidi pada tahun anggaran 2024 sebesar **Rp693.409.628,00** direncanakan untuk 2 (dua) jenis pembiayaan. yaitu:

1. Belanja Subsidi kepada BUMD diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung.

   Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.

   Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh *(full cost recovery)* Pemerintah Daerah akan menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

   Besaran subsidi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung.

2. Belanja subsidi berupa subsidi biaya bunga bank untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan surat Keputusan Bupati Belitung tentang pemberian hibah daerah. Hibah berupa uang/barang dianggarkan di OPD pada kelompok belanja operasi yang diuraikan dalam jenis belanja hibah objek belanja hibah kepada pemerintah dan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan.

Mekanisme pemberian hibah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2024 belanja hibah dianggarkan sebesar **Rp46.960.884.950,00** dan terealisasi sebesar **Rp46.220.077.443,00** atau **98,42%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp39.760.641.477,00** terjadi kenaikan realisasi belanja hibah sebesar **Rp6.459.435.966,00** atau **16,25%**. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan belanja hibah sebagai akibat adanya bantuan pendanaan penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung, Kepolisian Resort Belitung, Komando Distrik Militer 0414/Belitung.

Selain itu pada tahun 2024 ini belanja Dana BOS untuk sekolah swasta dicatat sebagai belanja hibah berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja hibah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024

No	Objek Belanja Barang	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	22.701.415.600,00	22.701.415.600,00	100,00	12.378.362.400,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.576.415.000,00	12.093.903.552,00	96,16	3.715.763.892,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.583.099.350,00	3.432.099.500,00	95,79	9.419.213.706,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.100.000.000,00	4.058.115.000,00	98,98	10.484.951.200,00
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.592.820.000,00	2.565.340.041,00	98,94	2.428.625.279,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.407.135.000,00	1.369.203.750,00	97,30	1.333.725.000,00
	Jumlah	**46.960.884.950,00**	**46.220.077.443,00**	**98,42**	**39.760.641.477,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Hibah tahun 2024 diberikan kepada lembaga pemerintah non kementerian yang berada dalam daerah Kabupaten Belitung yaitu Kepolisian Resort Belitung, Komando Distrik Militer 0414/Belitung KPU Kab. Belitung dan BAWASLU Kab. Belitung. Sedangkan hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Perhitungan realisasi belanja hibah sebagai berikut:

	dalam rupiah
Nilai SP2D/BP Belanja hibah	41.600.053.850,00
Ditambah :	
Nilai SP2B Belanja Hibah Dana BOS dan BOP	4.764.141.041,00
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Hibah(CP)	(144.117.448,00)
Jumlah Belanja hibah	46.220.077.443,00

Berikut rincian belanja hibah tahun 2024:

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
A.	**Hibah Kepada pemerintah Pusat**			
1.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/ 2024 M dan Pengamanan Natal 2024 serta Tahun Baru 2025 NPHD No. 100.3.4/111/KEP/BKBP/2024 Tanggal 26 Februari 2024	Sekretariat Daerah	325.000.000,00	-
2.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk KPU Kab. Belitung) dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada NPHD No. 100.3.4/611/KEP/BKBP/2023 Tanggal 30 Oktober 2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.194.640.800,00	-
3.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk BAWASLU Kab. Belitung) dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada NPHD No. 100.3.4/610/KEP/BKBP/2023 30 Oktober 2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.885.402.800,00	-
4.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) dalam rangka Pengamanan Pilkada NPHD No. 100.3.4/149/KEP/BKBP/2024 22 Maret 2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.106.682.000,00	-
5.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Komando Distrik Militer 0414/Belitung) dalam rangka Pengamanan Pilkada NPHD No.100.3.4/148/KEP/BKBP/2024 22 Maret 2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.189.690.000,00	-
	Sub Jumlah		**22.701.415.600,00**	**-**
B.	**Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**			
1	Belanja Hibah Uang kepada DPD KNPI Kab. Belitung Naskah Hibah Nomor:400.4.8/01/NPHD/DISPORA/2024 Tanggal 29 Januari 2024	Dinas Pemuda dan Olahraga	200.000.000,00	112.800,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Pramuka Kab. Belitung Naskah Hibah SK Bupati No.100.3.4/032/KEP/DISPORA/2024 Tanggal 29 Januari 2024	Dinas Pemuda dan Olahraga	400.000.000,00	76.302.597,00
3	Belanja Hibah Uang kepada KONI Kab. Belitung Naskah Hibah SK Bupati No. 100.3.4/088/KEP/DISPORA/2024 Tanggal 12 Februari 2024	Dinas Pemuda dan Olahraga	800.000.000,00	-
4	Belanja Hibah Uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kab.Belitung Naskah Hibah Keputusan Bupati Belitung No: 100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	5.745.000.000,00	1.993.488,00

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
5	Belanja Hibah Uang kepada PMI Kab. Belitung Naskah Hibah No. 440/107/NPHD/DINKES/2024 tanggal 24 Februari 2024	Dinas Kesehatan	1.200.000.000,00	490.400,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Ikatan Da'i Indonesia Kab.Belitung Naskah Hibah Keputusan Bupati Belitung No: 100.3.4/023/KEP/II/2024	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	-
7	Belanja Hibah Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional Kab.Belitung Naskah Hibah Keputusan Bupati Belitung No: 100.3.4/023/KEP/II/2024	Sekretariat Daerah	380.000.000,00	-
8	Belanja Hibah Uang kepada Majelis Ulama Indonesia Kab.Belitung NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	23.433.163,00
9	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Tarbiyatul Athfal Air Malik Desa Bantan Kec.Membalong Naskah Hibah Keputusan Bupati Belitung No: 100.3.4/023/KEP/II/2024	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	-
10	Belanja Hibah Uang kepada BOP SMP Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 400.2.5/82/KEP/DISDIKBUD/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.780.000,00	-
11	Belanja Hibah Uang kepada BOP SD Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 400.2.5/85/KEP/DISDIKBUD/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101.460.000,00	-
12	Belanja Hibah Uang kepada BOP Reg PAUD Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 462/P/2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	799.490.000,00	-
13	Belanja Hibah Uang kepada BOP Kinerja PAUD Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 211/P/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.000.000,00	-
14	Belanja Hibah Uang kepada BOP Kesetaraan Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 462/P/2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	290.670.000,00	-
15	Belanja Hibah Uang kepada BOP Kesetaraan PKBM - Semester 1 Naskah Hibah No. 900.1.15.5/81/KEP/DISDIKBUD/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.125.000,00	-
16	Belanja Hibah Uang kepada BOP SD Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 400.2.5/85/KEP/DISDIKBUD/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101.700.000,00	-
17	Belanja Hibah Uang kepada BOP SMP Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 400.2.5/82/KEP/DISDIKBUD/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.780.000,00	-
18	Belanja Hibah Uang kepada BOP Kesetaraan PKBM - Semester 2 Naskah Hibah No. 900.1.15.5/81/KEP/DISDIKBUD/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.125.000,00	-
19	Belanja Hibah Uang kepada BOP Reg PAUD Swasta - Semester 2 Naskah Hibah No. 462/P/2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	795.146.000,00	-
20	Belanja Hibah Uang kepada BOP Kesetaraan Swasta - Semester 2Naskah Hibah No. 462/P/2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	268.495.000,00	-
21	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Padang Arafah Desa Keciput	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	-
22	Belanja Hibah Uang kepada Gerakan Pramuka Kwarcab Belitung	Dinas Pemuda dan Olahraga	197.465.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
	Sub Jumlah		**12.196.236.000,00**	**102.332.448,00**
C.	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**			
1.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Muara Baro Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Naskah Hibah No. 01-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	143.000.000,00	-
2.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Suak Parak Mangrove Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Naskah Hibah No. 500.4.1/633/NPHD-PKPIK/PERIK.III/2024	Dinas Perikanan	34.196.000,00	-
3.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Camar Laut Desa Membalong Kecamatan Membalong Naskah Hibah No. 01-BK/PPTK-PKSUPT/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	34.650.000,00	-
4.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Karang Suge Desa Pegantungan Kecamatan Badau Naskah Hibah No. 01-JK/PPTK-PKSUPT/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	92.000.000,00	-
5.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Karang Teregak Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Naskah Hibah No. 01-JI/PPTK-PKSUPT/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	75.000.000,00	-
6.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Suak Parak Mangrove Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Naskah Hibah No. 500.4.1/633/NPHD-PKPIK/PERIK.III/2024	Dinas Perikanan	5.000.000,00	-
7.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Suak Parak Mangrove Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Naskah Hibah No. 500.4.1/633/NPHD-PKPIK/PERIK.III/2024	Dinas Perikanan	1.000.000,00	-
8.	Belanja Hibah Barang kepada TK Stannia Tanjungpandan Kabupaten Belitung (Uang Muka 30% Rehab Bangunan) Naskah Hibah No. 000.2.6.1/030/PERSEDIAAN/ DISDIKBUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	202.677.000,00	-
9.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Tengkuyong Desa Pegantungan Kecamatan Badau Naskah Hibah No. 000.2.6.1/05-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	150.000.000,00	-
10.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Karang Timbul Desa Pegantungan Kecamatan Badau Naskah Hibah No. 000.2.6.1/04-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	150.000.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
11.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Telok Baran Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik Naskah Hibah No. 000.2.6.1/03-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	120.000.000,00	-
12.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Batu Dinding Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik Naskah Hibah No. 000.2.6.1/02-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	150.000.000,00	-
13.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Bina Pangkalan Kapor Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk Naskah Hibah No.000.2.6.1/01-FF/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	34.400.000,00	-
14.	Belanja Hibah Barang kepada UB Kerapu Sunok Desa Tanjung Tinggi Kecamatan Sijuk Naskah Hibah No. 000.2.6.1/03-FF/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	94.600.000,00	-
15.	Belanja Hibah Barang kepada KUB Intan Samudra Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk Naskah Hibah No. 000.2.6.1/02-FF/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	86.000.000,00	-
16.	Belanja Hibah Barang kepada TK Stannia Tanjungpandan (Pembayaran termin pertama sebesar 50% dikurangi uang muka sebesar 15% dari Rehabilitasi Bangunan) Naskah Hibah No. 000.2.6.1/030/PERSEDIAAN/ DISDIKBUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	236.456.500,00	-
17.	Belanja Hibah Barang kepada TK Stannia Tanjungpandan (Pembayaran termin pertama sebesar 50% dikurangi uang muka sebesar 15% dari Rehabilitasi Bangunan) Naskah Hibah No. 000.2.6.1/030/PERSEDIAAN/ DISDIKBUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	236.456.500,00	-
18.	Belanja Hibah Barang kepada Poltekkes D.III Keperawatan Pangkal Pinang (Kampus Belitung) BAST No.400.11.26/001/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
19.	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 3 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/002/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
20.	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 7 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/003/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
21.	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 5 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/004/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
22.	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 4 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/005/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
23.	Belanja Hibah Barang kepada SMP PGRI I Tanjungpandan BAST No.400.11.26/006/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
24.	Belanja Hibah Barang kepada SMK Negeri 1 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/007/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
25.	Belanja Hibah Barang kepada SMK Negeri 3 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/008/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
26.	Belanja Hibah Barang kepada Direktur Politeknik Belitung BAST No.400.11.26/009/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
27.	Belanja Hibah Barang kepada SMA Negeri 1 Membalong BAST No.400.11.26/010/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
28.	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 1 Membalong BAST No.400.11.26/011/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
29.	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 2 Membalong BAST No.400.11.26/012/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
30.	Belanja Hibah Barang kepada SMK Negeri 1 Sijuk BAST No.400.11.26/013/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
31.	Belanja Hibah Barang kepada SMA Negeri 1 Sijuk BAST No.400.11.26/014/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
32.	Belanja Hibah Barang kepada Desa Keciput BAST No.400.11.26/015/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
33.	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 3 Sijuk BAST No.400.11.26/016/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
34.	Belanja Hibah Barang kepada Desa Sijuk BAST No.400.11.26/017/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
35.	Belanja Hibah Barang kepada Desa Tanjung Tinggi BAST No.400.11.26/018/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
36	Belanja Hibah Barang kepada Desa Tanjung Binga BAST No.400.11.26/019/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
37	Belanja Hibah Barang kepada Desa Cerucuk BAST No.400.11.26/020/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
38	Belanja Hibah Barang kepada Desa Badau BAST No.400.11.26/021/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
39	Belanja Hibah Barang kepada Desa Air Batu Buding BAST No.400.11.26/022/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
40	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 2 Badau BAST No.400.11.26/023/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
41	Belanja Hibah Barang kepada Desa Suak Gual BAST No.400.11.26/024/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
42	Belanja Hibah Barang kepada Desa Petaling BAST No.400.11.26/025/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
43	Belanja Hibah Barang kepada Desa Pegantungan BAST No.400.11.26/026/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.980.000,00	-
44	Belanja Hibah Barang kepada KUB Patin Desa Pegantungan Kecamatan Badau Naskah Hibah No.000.2.6.1/06-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	150.000.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
45	Belanja Hibah Barang kepada KUB Patin Desa Pegantungan Kecamatan Badau Naskah Hibah No.000.2.6.1/06-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	Dinas Perikanan	150.000.000,00	-
46	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Gapoktan Serba Usaha BAST No. 000.2.6.1/938/BAST-CABAI 2024/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	40.500.000,00	-
47	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Maju BAST No. 000.2.6.1/939/BAST-CABAI INSENTIF 2024/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	81.775.000,00	-
48	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Maju Suga Ketakong Makmur BAST No. 000.2.6.1/940/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.035.000,00	-
49	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Tani BAST No. 000.2.6.1/940.a/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.717.500,00	-
50	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Manda Maju Bersama BAST No. 000.2.6.1/941/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.052.500,00	-
51	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Bersama BAST No. 000.2.6.1/942/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.435.000,00	-
52	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Bakul BAST No. 000.2.6.1/943/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.718.750,00	-
53	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Licin BAST No. 000.2.6.1/938/BAST-CABAI 2024/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.435.000,00	-
54	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Betik BAST No. 000.2.6.1/945/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	21.740.000,00	-
55	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sri Rezeki BAST No. 000.2.6.1/946/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.717.500,00	-
56	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kelekak Titang Sejahtera BAST No. 000.2.6.1/947/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.718.750,00	-
57	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sejahtera Bersama BAST No. 000.2.6.1/948/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.717.500,00	-
58	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia BAST No. 000.2.6.1/949/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.943.750,00	-
59	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suka Makmur BAST No. 000.2.6.1/950/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.035.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
60	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Iding-iding Bahagia BAST No. 000.2.6.1/951/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.087.500,00	-
61	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia Kawan BAST No. 000.2.6.1/952/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.087.500,00	-
62	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Mengkanang BAST No. 000.2.6.1/953/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.435.000,00	-
63	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Ibul Makmur BAST No. 000.2.6.1/954/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.435.000,00	-
64	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Simpor BAST No. 000.2.6.1/955/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.717.500,00	-
65	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Agro Kenupu BAST No. 000.2.6.1/956/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.631.250,00	-
66	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Fajar Rezeki BAST No. 000.2.6.1/957/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.717.500,00	-
67	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sawah Harapan Baru BAST No. 000.2.6.1/958/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.435.000,00	-
68	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Bina Usaha BAST No. 000.2.6.1/1357/BAST-PBT/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.332.000,00	-
69	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Bersama BAST No. 000.2.6.1/1358/BAST-PBT/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.332.000,00	-
70	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Millineal BAST No. 000.2.6.1/1359/BAST-PBT/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.332.000,00	-
71	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Gapoktan Karya Mandiri BAST No. 000.2.6.1/1361/BAST-PBT/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	94.590.000,00	-
72	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia Kawan BAST No. 000.2.6.1/952/BAST-PADI/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	139.257.500,00	-
73	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Medang BAST No. 000.2.6.1/1362/BAST-PBT/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	107.727.500,00	-
74	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sijuk Bersatu BAST No. 000.2.6.1/1363/BAST-PBT/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	126.120.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
75	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Laskar Hijrah BAST No. 000.2.6.1/1364/BAST-PBT/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	84.080.000,00	-
76	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Gendang BAST No. 000.2.6.1/1365/BAST-PBT/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	78.825.000,00	-
77	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Terang Jaya Abadi BAST No. 000.2.6.1/1366/BAST-PBT/DKPP/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	82.000.000,00	-
78	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Harapan Bersama BAST No. 000.2.6.1/1011/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.500.000,00	-
79	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Gapoktan Panca Sakti BAST No. 000.2.6.1/1012/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.500.000,00	-
80	Belanja Hibah Barang kepada Gapoktan Tunas Baru BAST No. 000.2.6.1/1013/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.500.000,00	-
81	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sawah Harapan Baru BAST No. 000.2.6.1/1014/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.000.000,00	-
82	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Fajar Rezeki BAST No. 000.2.6.1/1015/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.500.000,00	-
83	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Agro Kenupu BAST No. 000.2.6.1/1016/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.000.000,00	-
84	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Simpor BAST No. 000.2.6.1/1017/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.000.000,00	-
85	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Mengkanang BAST No. 000.2.6.1/1018/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.500.000,00	-
86	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Telinsing Jaya BAST No. 000.2.6.1/1019/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.250.000,00	-
87	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suga Ketakong Makmur BAST No. 000.2.6.1/1020/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.500.000,00	-
88	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Manda Maju Bersama BAST No. 000.2.6.1/1021/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.500.000,00	-
89	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Tani BAST No. 000.2.6.1/1022/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.000.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
90	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Bakul BAST No. 000.2.6.1/1023/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.000.000,00	-
91	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Licin BAST No. 000.2.6.1/1024/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.000.000,00	-
92	Belanja Hibah Barang kepada Gapoktan Bertuah BAST No. 000.2.6.1/1025/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.500.000,00	-
93	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia BAST No. 000.2.6.1/1026/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.500.000,00	-
94	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kelekak Titang Sejahtera BAST No. 000.2.6.1/1027/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.500.000,00	-
95	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sejahtera Bersama BAST No. 000.2.6.1/1028/BAST-PUPUK HAYATI/2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.250.000,00	-
	Sub Jumlah		**3.432.099.500,00**	**-**
D.	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**			
1.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Albarkah Piakair Desa Sijuk Kecamatan Sijuk NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	6.290.000,00
2.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Atthohiroh Bebute Desa Terong Kecamatan Sijuk Naskah Hibah Keputusan Bupati Belitung No: 100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	-
3.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Mesjid Al Jariah Membalong Kab.Belitung NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	-
4.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Anni'mah Batu Itam Kecamatan Sijuk Kab.Belitung NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	-
5.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Amanah Jabal Nur Pangkallalang Tanjungpandan Kab.Belitung NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	-
6.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Alikhlash Belitung Desa Aik Rayak Tanjungpandan NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
7.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Nurul Huda Gunungriting Desa Gunungriting Kecamatan Membalong NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	300.000.000,00	-
8.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Fathul Khair Peduli Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	-
9.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Alhilal Aik Kalak Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	300.000.000,00	-
10.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Misbahul Khoir Kel Paal Satu Kec Tanjungpandan NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	-
11.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Al Ikhlas Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	11.350.000,00
12.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Hidayah Nurul Iman Desa Lassar Kecamatan Membalong NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	300.000.000,00	-
13.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Nurul Hidayah Air Nangka Desa Simpangrusa Membalong NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	-
14.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Khoirulhuda Rejomulyo Membalong NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	120.000,00
15.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Nurul Jannah Sabong Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	-
16.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Sabilul Falah Perawas Kecamatan Tanjungpanda NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	-
17.	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Air Seruk Kecamatan Sijuk NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	-
18.	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Huria Kristen Batak Protestan NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	24.025.000,00
	Sub Jumlah		**4.000.000.000,00**	**41.785.000,00**

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
E.	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**			
1	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	Badan Kesbangpol	217.530.000,00	-
2	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Nasdem NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	Badan Kesbangpol	107.763.750,00	-
3	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Persatuan Pembangunan NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	Badan Kesbangpol	107.831.250,00	-
4	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Gerindra NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	Badan Kesbangpol	67.511.250,00	-
5	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Hanura NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	Badan Kesbangpol	108.213.750,00	-
6	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Amanat Nasional NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	Badan Kesbangpol	62.730.000,00	-
7	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Golongan Karya NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	Badan Kesbangpol	118.361.250,00	-
8	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Kebangkitan Bangsa NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	Badan Kesbangpol	90.472.500,00	-
9	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Keadilan Sejahtera NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	Badan Kesbangpol	61.053.750,00	-
10	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Demokrat NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	Badan Kesbangpol	58.826.250,00	-
11	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Bulan Bintang NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	24.075.000,00	-
12	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Nasional Demokrat NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	40.878.750,00	-
13	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Hati Nurani Rakyat NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	34.215.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
14	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Golongan Karya NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	38.835.000,00	-
15	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Demokrat NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	24.067.500,00	-
16	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Solidaritas Indonesia NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	11.403.750,00	-
17	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Solidaritas Indonesia NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	18.363.750,00	-
18	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Persatuan Pembangunan NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	30.742.500,00	-
19	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk artai Keadilan Sejahtera NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	26.790.000,00	-
20	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai amanat Nasional NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	26.013.750,00	-
21	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Kebangkitan Bangsa NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	38.126.250,00	-
22	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	Badan Kesbangpol	55.398.750,00	-
	Sub Jumlah		**1.369.203.750,00**	**-**
F.	**Belanja Hibah Barang Dana BOS untuk Satdikdas Swasta**			
1	BOS Reguler SD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.560.844.513,00	**-**
2	BOS Reguler SMP Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	911.995.528,00	**-**
3	BOS Kinerja SD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.500.000,00	**-**
4	BOS Kinerja SMP Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.000.000,00	**-**
	Sub Jumlah		**2.565.340.041,00**	**-**
G.	**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**			

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
1	Belanja Hibah Barang kepada Desa Air Seruk Kec. Sijuk BAST No. 400.11.26/001/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
2	Belanja Hibah Barang kepada Desa Pelepak Pute Kec. Sijuk BAST No. 400.11.26/002/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
3	Belanja Hibah Barang kepada Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk BAST No. 400.11.26/003/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
4	Belanja Hibah Barang kepada Kelurahan Parit Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/004/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
5	Belanja Hibah Barang kepada Kelurahan Kota Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/005/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
6	Belanja Hibah Barang kepada Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/006/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
7	Belanja Hibah Barang kepada Desa Buluh Tumbang Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/007/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
8	Belanja Hibah Barang kepada Desa Dukong Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/008/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
9	Belanja Hibah Barang kepada Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/009/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
10	Belanja Hibah Barang kepada Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan No. 400.11.26/010/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
11	Belanja Hibah Barang kepada Desa Petaling Kec. Selat Nasik BAST No. 400.11.26/011/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
12	Belanja Hibah Barang kepada Desa Padang Kandis Kec. Membalong BAST No. 400.11.26/012/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
13	Belanja Hibah Barang kepada Desa Membalong Kec. Membalong BAST No. 400.11.26/013/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
14	Belanja Hibah Barang kepada Desa Tanjung Rusa Kec. Membalong BAST No. 400.11.26/014/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
15	Belanja Hibah Barang kepada Desa Badau Kec. Badau BAST No. 400.11.26/015/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
16	Belanja Hibah Barang kepada Desa Pegantungan Kec. Badau BAST No. 400.11.26/016/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
17	Belanja Hibah Barang kepada Desa Cerucuk Kec. Badau BAST No. 400.11.26/017/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
18	Belanja Hibah Barang kepada Desa Cerucuk Kec. Badau BAST No. 400.11.26/018/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
19	Belanja Hibah Barang kepada Desa Ibul Kec. Badau BAST No. 400.11.26/019/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
20	Belanja Hibah Barang kepada Desa Sungai Samak Kec. Badau BAST No. 400.11.26/020/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.995.000,00	-
	Sub Jumlah		**99.900.000,00**	**-**
	Jumlah		**46.364.194.891,00**	**144.117.448.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Hibah kepada Partai Politik diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Belitung. Alokasi belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik TA. 2024 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/047/KEP/BKBP/2024 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Partai Politik TA. 2024.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan kepada partai politik yang mendapatkan jatah kursi di DPRD. Partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya kepada BPK RI sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melebihi batas waktu dan/ atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban akan dikenakan sanksi yaitu tidak diberikan bantuan keuangan sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh BPK RI.

Berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah bahwa belanja Dana BOS pada satdikdas maupun satdikmen dicatat sebagai belanja hibah.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp345.180.862,00** terealisasi sebesar **Rp235.972.000,00** atau **68,36%** sampai dengan 31 Desember 2024. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp204.411.000.00** terjadi kenaikan realisasi belanja bantuan sosial sebesar **Rp31.561.000,00** atau **15,44%**.

Bantuan sosial diberikan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022. Bantuan sosial juga ditujukan dalam rangka membantu pemerintah dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2024. Selain itu mekanisme Belanja Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/355/KEP/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Besaran Nominal Bantuan Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Tidak tercapainya target belanja bantuan sosial di tahun 2024 ini dikarenakan adanya kegiatan bantuan sosial tunai dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem yang bersumber dari Dana Insentif Daerah tidak dapat berjalan dikarenakan waktu pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di tahun 2024 ini. Selain itu belum tersedianya perangkat aturan yang mengatur tentang pemberian bantuan kepada individu dan keluarga yang terdaftar dalam data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan kepada Individu	130.000.000,00	23.500.000,00	18,08	-
2	Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang direncanakan kepada Individu	215.180.862,00	212.472.000,00	98,74	196.911.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan kepada keluarga	-	-	-	7.500.000,00
	Jumlah	**345.180.862,00**	**235.972.000,00**	**68,36**	**204.411.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Klasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari belanja tanah. belanja peralatan dan mesin. belanja gedung dan bangunan. belanja jalan. irigasi. dan jaringan. dan belanja aset tetap lainnya.

Penganggaran Belanja Modal pada APBD TA 2024 adalah mencakup anggaran terkait perolehan/terbentuknya fisik aset tetap tersebut. dan biaya lainnya. baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan diatribusikan ke nilai aset tetap tersebut.

Adapun komponen biaya lainnya tersebut terbagi menjadi dua penganggaran. yaitu:

1. Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa terkait biaya langsung. yaitu biaya yang langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap. seperti biaya

konsultan perencanaan dan konsultan pengawas. biaya pematangan lahan dan biaya sertifikasi untuk tanah.

2. Dianggarkan pada Belanja Modal terkait biaya administrasi. yaitu biaya penunjang kegiatan perolehan aset tetap. seperti honorarium panitia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang. biaya ATK dokumen tender/lelang. biaya pengumuman lelang dan biaya lainnya dalam rangka menunjang perolehan aset tetap.

Pada Tahun 2024 belanja modal dianggarkan sebesar **Rp74.989.800.190,00** dan terealisasi sebesar **Rp67.145.369.203,62** atau **89,54%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp151.031.461.750,00** terjadi penurunan realisasi belanja modal sebesar **Rp83.886.092.546,38** atau **55,54%**.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	**Belanja Modal Tanah**				
2	Belanja Modal Tanah Persil	6.500.000.000,00	4.135.660.290,00	63,63	1.098.020.400,00
3	**Sub Jumlah**	**6.500.000.000,00**	**4.135.660.290,00**	**63,63**	**1.098.020.400,00**
4	**Belanja Peralatan dan Mesin**				
5	Belanja Modal Alat Besar Darat	70.575.840,00	69.800.000,00	98,90	-
6	Belanja Modal Alat Bantu	151.050.000,00	90.000.000,00	59,58	30.800.000,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.592.547.720,00	4.785.175.450,00	63,02	5.776.674.000,00
8	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	2.950.000,00	98,33	4.995.000,00
9	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	25.735.000,00	25.735.000,00	100,00	-
10	Belanja Modal Alat Ukur	16.431.000,00	15.506.000,00	94,37	979.502.940,00
11	Belanja Modal Alat Pengolahan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	92.692.000,00
12	Belanja Modal Alat Kantor	1.260.343.632,00	1.175.067.000,00	93,23	2.480.708.150,00
13	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.293.776.816,00	5.025.688.560,00	94,94	8.491.593.700,00
14	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	132,000,000,00	132,000,000,00	100,00	-
15	Belanja Modal Alat Studio	660.778.828,00	613.281.000,00	92,81	492.897.000,00
16	Belanja Modal Alat Komunikasi	97.121.500,00	94.300.000,00	97,09	8.800.000,00
17	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.900.000.000,00	1.760.000.000,00	92,63	180.819.000,00
18	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.368.919.184,00	1.927.057.092,00	81,35	20.398.288.101,00

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
19	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	188.800.100,00	176.045.694,00	93,24	-
20	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	342.935.000,00	342.850.000,00	99,98	313.132.100,00
21	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	129.627.000,00	129.600.000,00	99,98	1.401.871.000,00
23	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
24	Belanja Modal Komputer Unit	3.471.057.540,00	3.155.793.000,00	90,92	10.385.663.200,00
25	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.655.923.600,00	1.509.316.500,00	91,15	823.471.500,00
26	Belanja Modal Sumur	49.000.000,00	47.600.000,00	97,14	-
27	Belanja Modal Alat SAR	-	-	-	17.500.000,00
28	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
29	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.195.960.000,00	1.190.910.000,00	99,58	7.280.195.800,00
30	Belanja Modal Peralatan Olahraga	97.990.000,00	97.740.000,00	99,74	-
31	Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	3.568.534.980,00	3.428.167.239,00	96,07	2.628.030.254,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	34,300,000,00	32,900,000,00	95,92	-
33	Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	425.000.000,00	396.600.000,00	93,2	446.914.000,00
34	**Sub Jumlah**	**30.837.407.740,00**	**26.330.082.535,00**	**85,38**	**62.234.547.745,00**
35	**Belanja Gedung dan Bangunan**				
36	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.494.749.382,00	6.135.285.292,62	94,47	34.332.354.773,00
37	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	2.527.163.000,00
38	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	4.000.000.000,00	3.971.626.000,00	99,29	-
39	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.383.400.000,00	1.365.338.746,00	98,69	125.998.900,00
40	Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD	7.000.000.000,00	6.946.027.000.00	99.23	1.138.223.032,00
41	**Sub Jumlah**	**18.878.149.382,00**	**18.418.277.038,62**	**97,56**	**38.123.739.705,00**
42	**Belanja Jalan.**				

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
	Irigasi dan Jaringan				
43	Belanja Modal Jalan	9.828.221.600,00	9.599.644.811,00	97,67	44.597.878.000,00
44	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	778.962.079,00	777.501.000,00	99,81	102.347.000,00
45	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.537.065.207,00	1.406.207.700,00	91,49	1.390.655.000,00
46	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	75.003.000,00	74.776.500,00	99,70	-
47	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	200,000,000,00	139,705,779,00	69,85	-
48	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.494.710.000,00	1.492.665.500,00	99,86	678.580.000,00
49	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	290.000.000,00	289.500.000,00	99,83	-
50	Belanja Modal Jaringan Air Minum	918.750.000,00	916.114.000,00	99,71	-
51	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	5.439.000,00
52	**Sub Jumlah**	**15.122.711.886,00**	**14.696.115.290,00**	**97,18**	**46.774.899.000,00**
53	**Belanja Aset Tetap Lainnya**				
54	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	62.000.000,00	62.000.000,00	100,00	-
55	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	23.773.000,00
56	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.421.820.182,00	3.338.250.200,00	97,56	2.776.481.900,00
57	**Sub Jumlah**	**3.483.820.182,00**	**3.400.250.200,00**	**97,60**	**2.800.254.900,00**
58	**Belanja Modal Aset Lainnya**				
59	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	167.711.000,00	164.983.850,00	98,37	-
60	**Sub Jumlah**	**167.711.000,00**	**164.983.850,00**	**98,37**	**-**
61	**Total Belanja Modal**	**74.989.800.190,00**	**67.145.369.203,62**	**89,54**	**151.031.461.750,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan Belanja Modal sebagai berikut:

	Dalam Rupiah
Nilai SP2D Belanja Modal	52.720.299.764,62
Ditambah :	
SP2BP Belanja Modal BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	7.342.627.000,00

SP2B Belanja Modal Dana Kapitasi JKN pada FKTP	283.125.000,00
SPB Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	3.335.252.699,00
SPB Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	3.338.250.200,00
SPB Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOP	125.814.540,00
Dikurangi :	
Jumlah Belanja Modal	67.145.369.203,62

Anggaran dan realisasi belanja modal tahun anggaran 2024 berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 7** dan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam. bencana sosial. dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp2.500.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp0,00**.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil ke pemerintah desa oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pada Tahun 2024 belanja transfer dianggarkan sebesar **Rp108.088.655.700,00** dan terealisasi sebesar **Rp107.849.220.370,00** atau **99,78%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar **Rp107.594.010.100,00** terjadi kenaikan realisasi belanja transfer sebesar **Rp.255.210.270,00** atau **0,24%**.

Anggaran dan realisasi belanja transfer tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024

No	Objek Belanja Transfer	Tahun Anggaran 2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bagi Hasil	9.753.057.800,00	9.753.057.800,00	100,00	9.131.821.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	98.335.597.900,00	98.096.162.570,00	99,76	98.462.189.100,00
	Jumlah	**108.088.655.700,00**	**107.849.220.370,00**	**99,78**	**107.594.010.100,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Bagi hasil merupakan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten belitung kepada desa sebesar 100% dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung. Besaran pembagian dana bagi hasil sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

Transfer bantuan keuangan desa diberikan kepada 42 desa yang tersebar pada lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung. Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa terdiri dari Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD dan alokasi dana APBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Besaran bagian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

Alokasi dan realisasi transfer bagi hasil dan bantuan keuangan masing-masing desa dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Adapun ringkasan belanja menurut fungsi dan klasifikasi, urusan pemerintahan, dapat dilihat pada **Lampiran 10** sedangkan pencapaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024.

5.1.3 Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Jumlah anggaran dan realisasi pembiayaan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00	176.640.556.760,97
Jumlah	**185.632.032.037,00**	**185.632.032.036,77**	**100,00**	**176.640.556.760,97**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Realisasi penerimaan SiLPA Tahun 2024 terdiri dari:

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
1. Saldo anggaran lebih pada BUD	150.396.479.854,40
2. Saldo anggaran lebih BLUD dr. H Marsidi Judono	33.541.904.236,37
3. Saldo anggaran lebih dana Kapitasi JKN pada FKTP	90.195.943,00
4. Saldo anggaran lebih Dana BOS Reguler	307.120.882,00
5. Saldo anggaran lebih Dana BOS Kinerja	14.878.326,00
6. Saldo anggaran lebih Dana BOP	115,00
7. Saldo anggaran lebih Dana BOK	1.281.452.680,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.

Pada tahun anggaran 2024 pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp3.000.000.000,00** dalam rangka penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung dan terealisasi **sebesar Rp3.000.000.000,00**.

Penambahan penyertaan modal modal sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar **Rp185.632.032.036,77**.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL Tahun 2024 sebesar **Rp185.632.032.036,77**.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp99.023.375.881,70** yang berasal dari:

a. pelampauan target anggaran pendapatan daerah sebesar **Rp10.201.380.763,33**;

b. sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar **Rp88.821.995.118,60**;

c. sisa pelaksanaan pembiayaan **Rp(0,23)**;

4. Lain-lain

Tidak terdapat koreksi lain-lain pada Laporan Perubahan SAL Tahun 2024.

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp99.023.375.881,70** yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
a. Saldo anggaran lebih pada BUD	74.510.781.254,04
b. Saldo anggaran lebih BLUD dr. H Marsidi Judono	22.477.704.910,66
c. Saldo anggaran lebih dana Kapitasi JKN pada FKTP	221.461.131,00
d. Saldo anggaran lebih Dana BOS Reguler	208.491.012,00
e. Saldo anggaran lebih Dana BOS Kinerja	1.801.776,00
f. Saldo anggaran lebih Dana BOK	1.603.135.798,00
Jumlah	**99.023.375.881,70**

SiLPA per 31 Desember 2024 jika disandingkan dengan saldo akhir kas pada LAK sebesar **Rp99.024.662.502,70** terdapat perbedaan saldo sebesar **Rp1.286.621,00**, saldo tersebut merupakan sisa kas yang berasal dari transaksi kas namun tidak mempengaruhi transaksi Perubahan SAL yang terdiri dari :

Tabel 52 Rincian Transaksi Sisa Kas

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Saldo kas BOS dikarenakan sekolah buka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021.	150.000,00
2. Penyesuaian penambahan Kas BOS pada SDN 25 Tanjungpandan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023	1.357.800,00
3. Kelebihan setoran atas potongan PFK dari kas daerah ke RKUN Tahun 2023.	(221.179,00)
Total	**1.286.621,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Saldo anggaran lebih pada BUD sebesar **Rp74.510.781.254,04** termasuk didalamnya sisa dana transfer pusat antara lain :

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
a. SiLPA DAU BG	-

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
b. SiLPA DAU SG (Ditentukan Penggunaannya)	
• Sisa tahun sebelumnya	461.885.914,00
• Sisa tahun 2024	4.586.021.360,00
c. SiLPA DBH SG (Ditentukan Penggunaannya)	
d. SiLPA DBH BG	
e. DAK Fisik (BA Rekon Sisa DAK Fisik s.d TA 2023 antara KPPN dengan Pemkab. Belitung)	3.147.120.413,00
f. DAK Non Fisik	
g. Insentif Fiskal	1.860.696.832,00

5.3 Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Total aset yang disajikan di neraca per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp2.279.019.807.974,44** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp161.080.779.122,69** dan aset non lancar sebesar **Rp2.117.939.028.851,75**. Jika dibandingkan dengan nilai aset tahun 2023 sebesar **Rp2.409.423.771.699,80** mengalami penurunan sebesar **Rp(130.403.963.725,36)** atau **5,41%**.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Saldo kas di kas daerah adalah saldo rekening giro pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Rekening kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor

100.3.4/718/KEP/BPKAD/2023 tanggal 21 Desember 2023 Tentang Penetapan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024. Adapun rekening untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah sebagai berikut:

1. Rekening giro **Nomor 146.300.0001** pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan, rekening ini digunakan untuk transaksi pembayaran SP2D kepada OPD maupun Pihak ketiga.
2. Rekening giro **Nomor 146.300.0004** pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
3. Rekening giro **Nomor 0131.01.000262.30.8** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan.
4. Rekening giro **Nomor 0131.01.000964.30.8** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Penunjukan bank sebagai pemegang rekening kas umum daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/713/KEP/BPKAD/2023 Tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Bank Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah, Pemegang Rekening Penerimaan Dan Pemegang Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Sisa kas pada rekening giro milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 sebesar **Rp14.510.560.075,04** yang merupakan saldo kas dari rekening giro yang dikelola BUD**.** Jika dibandingkan dengan nilai kas di kas daerah tahun 2023 sebesar **Rp90.570.065.275,40** mengalami penurunan sebesar **Rp76.059.505.200,36** atau **83,97%**.

Adapun rincian saldo kas daerah yang berupa rekening giro pada bank yang dikelola oleh BUD sebagai berikut:

Tabel 53 Rincian Saldo Kas

Rekening Giro	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan		
146.300.0001	7.316.174.295,09	38.451.354.025,49
146.300.0004	7.194.385.779,95	52.118.711.249,91
BRI Cabang Tanjungpandan		
0131-01-000262-30-8	-	-
0131-01-000964-30-8	-	-
Jumlah	**14.510.560.075,04**	**90.570.065.275,40**

Sumber: Rekening Koran Bank

1. Saldo kas daerah per 31 Desember 2024 menurut laporan bank pada rekening giro Nomor 146.300.0001 sebesar **Rp7.316.174.295,09**, tidak terdapat perbedaan dengan saldo kas menurut BUD.
2. Saldo kas daerah per 31 Desember 2024 menurut laporan bank pada rekening giro Nomor 146.300.0004 sebesar **Rp7.194.385.779,95**, tidak terdapat perbedaan dengan saldo kas menurut BUD.

Adapun sisa kas dana BOS dan dana BOP sebesar **Rp 173.806.600,00** yang tahun lalu tercatat pada RKUD berupa setoran pengembalian dana BOS dan dana BOP, telah disetorkan melalui proses pemindah bukuan ke RKUN pada tanggal 11 Juni 2024 sebesar **Rp74.705.000,00** dan pada tanggal 5 September 2024 sebesar **Rp 99.101.600,00.**

3. Saldo kas daerah per 31 Desember 2024 menurut laporan bank pada rekening giro nomor 0131-01-000262-30-8 sebesar **Rp0,00**, rekening ini sebelumnya digunakan untuk menampung setoran penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Bunga Jasa Giro.
4. Saldo kas daerah per 31 Desember 2024 menurut laporan bank pada rekening giro nomor 0131-01-000964-30-8 sebesar **Rp0,00**, rekening ini sebelumnya digunakan untuk menampung setoran penerimaan PBB namun rekening ini tidak digunakan lagi sejak tahun 2018.
5. Tidak terdapat pembentukan maupun pencairan dana cadangan pada tahun 2023.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Rekening kas untuk menampung penerimaan pada Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/717/KEP/BPKAD/2023 tanggal 21 Desember 2023 Tentang Penetapan Rekening Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp0,00**, seluruh saldo kas di bendahara penerimaan telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/717/KEP/BPKAD/2023 tanggal 21 Desember 2023 Tentang Penetapan Rekening Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar **Rp0,00** seluruh saldo kas di bendahara pengeluaran telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024. Tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang berada dibawah tanggung jawab bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BLUD atas jasa pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan. Saldo

kas di BLUD terdapat pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono dengan rincian saldo kas per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Saldo Kas BLUD

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Kas dibendahara Penerimaan BLUD (Rekening Bank Sumsel Babel Cab. Tanjungpandan Nomor 146.302.0019)	-	-
2.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD (Rekening Bank Sumsel Babel Cab. Tanjungpandan Nomor 146.302.0020)	22.477.704.910,66	**33.541.904.236,37**
	Jumlah	**22.477.704.910,66**	**33.541.904.236,37**

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo kas BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp33.541.904.236,37** terjadi penurunan sebesar **Rp11.064.199.325,71** atau **32,99%**.

5.3.1.1.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar **Rp178.536.273,00** yang terdiri dari bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan yang merupakan hak pihak ketiga yang tercatat pada rekening 146.301.0374 dan rekening 146.301.0093 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan total sebesar **Rp178.236.273,00**. Jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan saldo bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan hal ini dikarenakan penerimaan jasa giro pada rekening 146.30.10374 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2024.

Berikut perbandingan saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2024:

Tabel 55 Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Kas yang dibatasi penggunaannya atas Bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan	178.536.273,00	177.643.765,00
	Jumlah	**178.536.273,00**	**177.643.765,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp177.643.765,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp892.508,00** atau **0,50%**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara JKN

Kas di Bendahara JKN merupakan sisa kas yang berasal dari pengelolaan dana JKN pada FKTP yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP terkait dengan pengelolaan Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2024 sebesar **Rp221.461.131,00**, dengan rincian saldo kas sebagai berikut:

Tabel 56 Saldo Kas Dana Kapitasi Per Puskesmas

No	Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Puskesmas Tanjungpandan	182.811.647,00	10.648.442,00
2.	Puskesmas Air Saga	16.013.308,00	42.356.237,00
3.	Puskesmas Perawas	1.663.644,00	13.144.477,00
4.	Puskesmas Sijuk	1.000.440,00	3.542.480,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	969.082,00	3.365.643,00
6.	Puskesmas Badau	-	13.857.378,00
7.	Puskesmas Simpang Rusa	12.788.188,00	50.212,00
8.	Puskesmas Membalong	6.091.252,00	93.620,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	123.570,00	3.137.454,00
	Jumlah	**221.461.131,00**	**90.195.943,00**

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo kas pada bendahara JKN jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp90.195.943,00** terjadi kenaikan saldo kas sebesar **Rp131.265.188,00** atau **145,53%**.

5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas yang berasal dari pengelolaan dana BOS yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer **langsung** ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan dan digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS. Saldo kas pada bendahara pengelola dana BOS pada per 31 Desember 2024 sebesar **Rp211.800.588,00,** jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp323.507.124,00** terjadi penurunan sebesar **Rp111.706.536,00** atau **34,52%**, yang terdiri dari :

Tabel 57 Saldo Kas Dana BOS

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Saldo Dana BOS Reguler	209.998.812,00	308.628.683,00
2.	Saldo Dana BOS Afirmasi dan Kinerja	1.801.776,00	14.878.326,00

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
3.	Saldo Dana BOP	-	115,00
	Total	**211.800.588,00**	**323.507.124,00**

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo kas tersebut terdiri saldo kas di Bendahara BOS Reguler pada Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp116.225.964,00, pada Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) sebesar Rp93.772.848,00. Rekapitulasi saldo kas BOS Reguler per sekolah pada **Lampiran 11** dan Rekapitulasi saldo kas BOS Kinerja per sekolah pada **Lampiran 11a.**

Saldo kas di bendahara BOS jika dibandingkan dengan SiLPA dana BOS pada LRA tahun 2024 sebesar Rp210.292.788,00 terdapat selisih sebesar Rp1.507.800,00. Selisih tersebut berasal dari penambahan Kas BOS pada SDN 25 Tanjungpandan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023 sebesar Rp1.357.800,00 dan saldo kas BOS dikarenakan sekolah membuka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021 sebesar Rp150.000,00.

5.3.1.1.8 Setara Kas

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Belitung ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa deposito berjangka dengan masa jatuh tempo 1 bulan, sampai dengan akhir tahun 2024 saldo setara kas per 31 Desember 2024 sebesar **Rp60.000.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Saldo Setara Kas

Rekening Giro/Deposito	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Deposito 1 Bulan		
Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan		
146-41-02022	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
146-41-02122	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
146-41-00723	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
146-41-00823	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Jumlah	**60.000.000.000,00**	**60.000.000.000,00**

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo setara kas jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp60.000.000.000,00** tidak terjadi kenaikan/penurunan nilai setara kas.

5.3.1.1.9 Kas lainnya

Kas Lainnya merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak pemerintah yang belum disetor ke rekening RKUN. Pada tahun 2024 tidak terdapat potongan pajak yang belum disetor ke RKUN.

Tabel 59 Rincian Pajak yang Belum Disetor

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)				Jumlah (Rp)
		PPh ps 21	PPh ps 23	PPN	PFK lainnya	
1	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3.1.1.10 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas sebesar **Rp1.603.135.798,00** yang disajikan di Neraca merupakan Kas di Bendahara dana Bantuan Operasional Kesehatan pada UPT Puskesmas yang berupa sisa saldo kas atas pengelolaan dana BOK tahun 2024.

Saldo kas dana Bantuan Operasional Kesehatan pada puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Saldo Kas Dana BOK Per Puskesmas

No	Puskesmas	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Puskesmas Tanjungpandan	244.293.857,00	238.288.210,00
2.	Puskesmas Air Saga	306.533.226,00	180.347.842,00
3.	Puskesmas Perawas	141.757.930,00	83.850.707,00
4.	Puskesmas Sijuk	130.752.376,00	141.516.703,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	163.667.289,00	127.921.471,00
6.	Puskesmas Badau	135.435.879,00	86.441.406,00
7.	Puskesmas Simpang Rusa	111.877.695,00	159.691.979,00
8.	Puskesmas Membalong	257.688.817,00	262.664.943,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	111.128.729,00	729.419,00
	Jumlah	**1.603.135.798,00**	**1.281.452.680,00**

Sumber: Rekening Koran Bank

5.3.1.1.11 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

Pada tahun 2024 tidak terdapat investasi jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Belitung.

5.3.1.1.12 Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang pajak dapat diakui pada saat:

1. diterbitkan surat ketetapan pajak/dokumen yang sah lainnya;
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Akun ini menampung saldo piutang pokok pajak daerah yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan penambangan bahan galian golongan C serta piutang pajak bumi dan bangunan. Tunggakan atas pajak galian golongan C merupakan tunggakan dari tahun 1998 s.d. tahun 2011 namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum tertagih. Rincian piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 61 Rincian Piutang Pajak

Objek Piutang	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Pajak Hotel	-	51.313.795,00
Pajak Restoran	70.540.000,00	74.874.381,00
Pajak Hiburan	17.610.950,00	17.610.950,00
Pajak Reklame Papan/ Billboard/V ideotron/ Megatron	5.983.562,00	
Pajak Air Bawah Tanah	17.562.000,00	19.365.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	348.009.138,00	348.009.138,00
Pajak Bumi dan Bangunan	23.657.220.223,00	21.684.820.324,00
Jumlah	**24.116.925.873,00**	**22.195.993.588,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah piutang pajak sebesar **Rp24.116.925.873,00** berasal dari tagihan pajak tahun 2024 yang belum dibayar oleh wajib pajak sampai akhir tahun 2024 sebesar **Rp3.483.825.006,00** dan sisanya sebesar **Rp20.633.100.867,00** piutang pajak tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan terdapat kenaikan saldo piutang pajak sebesar **Rp1.920.932.285,00**, kenaikan tersebut berasal dari penambahan piutang pajak tahun berjalan sebesar **Rp3.483.825.006,00** sedangkan pengurangan piutang pajak tahun sebelumnya sebesar **Rp(1.562.892.721,00)**. Secara umum mutasi piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 62 Mutasi Piutang Pajak

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	**22.195.993.588,00**
Pengurangan	
1. Pelunasan piutang pajak hotel	(51.313.795,00)
2. Pelunasan piutang pajak restoran	(4.334.381,00)
3. Pelunasan piutang pajak air bawah tanah	(1.803.000,00)
4. Pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	(1.505.441.545,00)
Penambahan	
1. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.983.562,00
2. Piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	3.477.841.444,00
Saldo Piutang akhir	**24.116.925.873,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 63 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Pajak

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 3 thn)	Diragukan (di atas 3 s/d 5 thn)	Macet (di atas 5 thn)	
1	Pajak Hotel	-	-	-	-	-
2	Pajak Restoran	-	-	-	70.540.000,00	70.540.000,00
3	Pajak Hiburan	-	-	-	17.610.950,00	17.610.950,00
4	Pajak Reklame Papan/ Billboard/V ideotron/ Megatron	5.983.562,00	-	-	-	5.983.562,00
5	Pajak Air Bawah Tanah	-	3.424.800,00	4.286.400,00	9.850.800,00	17.562.000,00
6	Pajak Galian Golongan C	-	-	-	348.009.138,00	348.009.138,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan	3.477.841.444,00	5.007.337.794,00	3.925.078.241,00	11.246.962.744,00	23.657.220.223,00
	Sub jumlah	**3.483.825.006,00**	**5.010.762.594,00**	**3.929.364.641,00**	**11.692.973.632,00**	**24.116.925.873,00**
	% penyisihan piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	**1.252.690.648,50**	**1.964.682.320,50**	**11.692.973.632,00**	**14.910.346.601,00**
	Piutang Netto	3.483.825.006,00	3.758.071.945,50	1.964.682.320,50	-	9.206.579.272,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih tahun 2024 sebesar **Rp14.910.346.601,00**, sedangkan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar **Rp13.198.847.908,50** terjadi kenaikan sebesar **Rp1.711.498.692,50** atau **12,97%**.

Mutasi penyisihan piutang sebagai berikut:

Saldo awal	**13.198.847.908,50**
Pelunasan piutang tak tertagih	(296.631.066,75)
Beban penyisihan piutang tahun 2024	2.008.129.759,25
Saldo akhir	**14.910.346.601,00**

Status penagihan atas piutang pajak yang belum tertagih masih ditangani pemerintah daerah dan belum diserahkan ke PUPN/KPKNL. Tabel rincian piutang pajak dapat dilihat pada **Lampiran 12** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.13 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan. Piutang retribusi timbul dikarenakan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang retribusi dapat diakui pada saat :

1. diterbitkan surat ketetapan retribusi/dokumen yang sah lainnya;
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang retribusi daerah terdiri dari saldo piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2024, dan piutang retribusi tahun berjalan yang belum dibayar/dilunasi oleh pihak ketiga. Dasar pengenaan kewajiban pihak ketiga berdasarkan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pengelola dan penetapan nilai kontrak/setoran yang menjadi kewajiban pihak ketiga selaku pengelola/pemakai tempat usaha kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Rincian Piutang Retribusi

Objek Piutang Retribusi	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	234.381.600,00	152.119.600,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	12.260.995.039,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.912.500,00	14.912.500,00
Retribusi tempat khusus parkir	46.670.000,00	37.390.000,00
Retribusi parkir di tepi jalan umum	96.261.000,00	102.131.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	12.085.000,00	22.310.228,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	4.000.000,00	4.972.000,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	164.825.342,00	173.526.593,00
Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	85.019.000,00	68.589.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.405.322.014,00	2.261.926.522,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	19.100.000,00	27.900.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	541.095.845,00	411.205.120,00
Retribusi Izin Gangguan	16.765.000,00	16.765.000,00
Jumlah	**15.901.432.340,00**	**3.293.747.563,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah piutang retribusi sebesar **Rp15.901.432.340,00** berasal dari tagihan retribusi tahun 2024 yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar **Rp12.990.852.151,00** dan sisanya sebesar **Rp2.910.580.189,00** merupakan piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp3.293.747.563,00** terdapat kenaikan saldo piutang retribusi sebesar **Rp12.607.684.777,00**, atau **382,78%**. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan piutang tahun berjalan sebesar **Rp12.990.852.151,00** sedangkan pelunasan piutang retribusi tahun berjalan sebesar **Rp383.167.374,00**.

Secara umum mutasi piutang retribusi sebagai berikut:

Tabel 65 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	**3.293.747.563,00**

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengurangan	
1. Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan	(152.119.600,00)
2. Pelunasan piutang retribusi tempat khusus parkir	(27.090.000,00)
3. Pelunasan piutang retribusi parkir di tepi jalan umum	(20.730.000,00)
4. Pelunasan piutang penyelenggaraan pendidikan	(10.225.228,00)
5. Pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium	(972.000,00)
6. Piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan/sewa petak toko	(13.041.251,00)
7. Pelunasan piutang retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(24.800.000,00)
8. Pelunasan piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah	(125.389.295,00)
9. Piutang retribusi tempat rekreasi dan olah raga	
10. Piutang retribusi pelayanan tempat olah raga	(8.800.000,00)
Penambahan	
1. Piutang retribusi pelayanan kesehatan-Dinas Kesehatan	234.381.600,00
2. Piutang retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dr . H. Marsidi Judono	12.260.995.039,00
3. Piutang retribusi tempat khusus parkir	36.370.000,00
4. Piutang retribusi parkir di tepi jalan umum tahun berjalan	14.860.000,00
5. Piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan/sewa petak toko	4.340.000,00
6. Piutang retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	41.230.000,00
7. Piutang retribusi tempat rekreasi dan olah raga	143.395.492,00
8. Piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah	255.280.020,00
Saldo Piutang akhir	**15.901.432.340,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pencatatan piutang pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dr . H. Marsidi Judono yang sebelumnya dicatat pada akun piutang lainnya pada tahun 2024 direklasifikasi ke akun piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar **Rp12.260.995.039,00**

Pungutan objek penerimaan retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Rincian piutang pelayanan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 66 Rincian Piutang Pelayanan Pendidikan 2024

Uraian	Jumlah
1. Biaya penyelenggaraan kuliah tetap	3.750.000,00
2. Biaya penyelenggaraan kuliah tidak tetap	1.585.000,00
3. Biaya praktik klinik	1.750.000,00
4. Pengembangan Pendidikan	5.000.000,00
Total	**12.085.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 67 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Retribusi 2024

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.495.376.639,00	-	-	-	12.495.376.639,00
2	Retribusi Pelayanan	-	-	-	14.912.500,00	14.912.500,00

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
	Persampahan/Kebersihan					
	Retribusi tempat khusus parkir	36.370.000,00	10.300.000,00	-	-	46.670.000,00
3	Retribusi parkir di tepi jalan umum	14.860.000,00	700.000,00	400.000,00	80.301.000,00	96.261.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	-	-	-	12.085.000,00	12.085.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	4.340.000,00	28.840.000,00	-	131.645.342,00	164.825.342,00
7	Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	41.230.000,00	-	4.580.000,00	39.209.000,00	85.019.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	143.395.492,00	56.472.000,00	60.851.000,00	2.144.603.522,00	2.405.322.014,00
9	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	-	-	-	19.100.000,00	19.100.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	255.280.020,00	134.804.280,00	35.996.660,00	115.014.885,00	541.095.845,00
11	Retribusi Izin Gangguan	-	-		16.765.000,00	16.765.000,00
	Sub Jumlah	**12.990.852.151,00**	**231.116.280,00**	**101.827.660,00**	**2.577.636.249,00**	**15.901.432.340,00**
	% Penyisihan Piutang	**0%**	**25%**	**50%**	**100%**	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**	**57.779.070,00**	**50.913.830,00**	**2.577.636.249,00**	**2.686.329.149,00**
	Piutang Netto	**12.990.852.151,00**	**173.337.210,00**	**50.913.830,00**	**-**	**13.215.103.191,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih atas piutang retribusi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp2.686.329.149**, jika dibandingkan dengan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2023 sebesar **Rp2.544.443.099,25** terjadi kenaikan sebesar **Rp141.886.049,75** atau **5,58%**.

Mutasi penyisihan piutang sebagai berikut:

Saldo awal	**2.544.443.099,25**
Pelunasan piutang tak tertagih	(24.203.422,75)
Beban penyisihan piutang tahun 2024	166.089.472,50
Saldo akhir	**2.686.329.149,00**

Rincian saldo piutang retribusi tercantum pada **Lampiran 13** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.14 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan penjualan angsuran/cicilan yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari satu periode akuntansi berikutnya disajikan sebagai tagihan penjualan angsuran pada kelompok aset lainnya.

Akun ini merupakan bagian lancar tagihan penjualan kendaraan roda empat berdasarkan SK Nomor 01375/Kep/IV/2004 tanggal 25 November 2004.

Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Total harga penjualan	304.799.500,00	304.799.500,00
Pelunasan	(284.809.500,00)	(284.809.500,00)
Jumlah	19.990.000,00	19.990.000,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran:		
Jatuh Tempo s.d Desember 2022	-	-
Tunggakan	19.990.000,00	19.990.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	**19.990.000,00**	**19.990.000,00**
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran	**-**	**-**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tunggakan atas penjualan kendaraan dinas roda empat yang belum dibayar/dilunasi per 31 Desember 2024. Tunggakan tersebut merupakan tunggakan penjualan angsuran mobil minibus *Isuzu* dengan Plat Nomor BN 3077 BZ kepada Desa Suak Gual sebesar **Rp19.990.000,00**.

Penyelesaian tagihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran masih ditangani pemerintah daerah.

Adapun penyisihan piutang tak tertagih atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran adalah sebagai berikut:

Tabel 68 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Bagian Lancar TPA				19.990.000,00	19.990.000,00
	Sub Jumlah				**19.990.000,00**	**19.990.000,00**
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	-	-	19.990.000,00	19.990.000,00
	Piutang Netto	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3.1.1.15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Semester II TA 2022 Nomor 23/LHPt/XVIII.PPG/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 diketahui terdapat 470 kasus

senilai **Rp9.458.365.298,48** yang telah ditetapkan dan telah dilunasi seluruhnya sehingga nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Rp0,00 (nihil).

5.3.1.1.16 Piutang Transfer

Piutang transfer merupakan piutang yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan dana bagi hasil pajak provinsi yang merupakan bagian pemerintah daerah namun belum ditransfer ke kas daerah. Jumlah piutang transfer per 31 Desember 2024 sebesar **Rp15.067.479.618,00**, yang terdiri dari:

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat DBH PBB dan SDA

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Sumber Daya Alam (SDA) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Pada tahun 2024 tidak terdapat piutang transfer DBH.

2. **Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun sampai akhir tahun belum dibayar/ditransfer ke daerah.

Piutang transfer dana bagi hasil pajak provinsi yang belum ditransfer ke kas daerah Kabupaten Belitung sebesar **Rp15.067.479.618,00.** Jumlah tersebut sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Tahun 2025.

Berikut tabel piutang dana bagi hasil pajak provinsi:

Tabel 69 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 2024

No	Jenis Pajak	Keputusan Gubernur Babel	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	188.4/23/BAKUDA/2025	19 Feb 2025	6.120.855.774,00	Bagi Hasil PBBKB Triwulan IV Tahun 2024
		188.4/33/BAKUDA/2025	27 Feb 2025	967.353.731,00	Over Target Bagi Hasil PBBKB TW. I s.d TW.IV 2024
2	Pajak Kendaraan Bermotor	188.4/23/BAKUDA/2025	19 Feb 2025	3.262.982.986,00	Bagi hasil PKB Triwulan IV Tahun 2024
		188.4/33/BAKUDA/2025	27 Feb 2025	1.062.393.782,00	Over Target Bagi Hasil PKB Tw. III S.D TW.IV 2024
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	188.4/23/BAKUDA/2025	19 Feb 2025	1.142.917.691,00	Bagi hasil BBNKB Triwulan IV

No	Jenis Pajak	Keputusan Gubernur Babel	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
					Tahun 2024
		188.4/33/BAKUDA/2025	27 Feb 2025	32.487.449,00	Over Target Bagi Hasil PKB TW.IV 2024
4	Pajak Air Permukaan	188.4/23/BAKUDA/2025	19 Feb 2025	542.676.642,00	Bagi hasil PAP Triwulan IV Tahun 2024
		188.4/33/BAKUDA/2025	27 Feb 2025	224.829.643,00	Over Target Bagi Hasil PAP TW. I s.d TW.IV 2024
5	Pajak Rokok	188.4/16/BAKUDA/2025	16 Jan 2025	1.710.981.920,00	Bagi hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2024
		Jumlah		**15.067.479.618,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban penyisihan piutang tak tertagih atas dana transfer sebagai berikut :

Tabel 70 Penyisihan PIutang Tak Tertagih Piutang Transfer

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
3	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	**15.067.479.618,00**	-	-	-	**15.067.479.618,00**
	Sub Jumlah	**15.067.479.618,00**	**-**	**-**	**-**	**15.067.479.618,00**
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	-	-	-	-
	Piutang Netto	**15.067.479.618,00**	**-**	**-**	**-**	**15.067.479.618,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian saldo piutang transfer tercantum pada **Lampiran 14** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.17 Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/Retribusi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Belitung namun belum diterima sampai akhir tahun.

Piutang Lainnya yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023 merupakan piutang yang timbul karena adanya tunggakan pungutan Pendapatan Asli Daerah selain pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Akun ini menampung piutang atas denda keterlambatan pembayaran pajak, retribusi daerah, dan piutang atas kontribusi aset yang dikerjasamakan.

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 menyajikan saldo sebesar **Rp856.704.401,80**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71 Rincian Piutang Lainnya 2024

Objek Piutang Lainnya	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Denda keterlambatan pembayaran Pajak :	**367.384.497,80**	**367.384.497,80**
Pajak Galian golongan C	363.370.269,80	363.370.269,80
Pajak Hiburan	4.014.228,00	4.014.228,00
Denda keterlambatan pembayaran Retribusi	**239.822.837,00**	**235.032.276,00**
Retribusi izin gangguan/keramaian	2.833.600,00	2.833.600,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	-	-
Retribusi Pemakaian Tempat Usaha (UPTD Taman Hiburan)	235.036.837,00	229.734.576,00
Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	737.800,00	1.153.300,00
Retribusi parkir di tepi jalan umum	1.199.600,00	1.295.800,00
Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000,00	15.000,00
Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	**215.355.888,00**	**5.839.055.249,00**
Piutang Lain-lain PAD yang sah Lainnya	**33.920.000,00**	**34.051.250,00**
Kontribusi hasil kerjasama – PT Puncak Jaya Lestari	1.920.000,00	2.051.250,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	32.000.000,00	32.000.000,00
Piutang kelebihan setoran potongan PFK ke RKUN	**221.179,00**	**221.179,00**
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	**-**	**8.218.797,84**
Jumlah	**856.704.401,80**	**6.483.963.249,64**

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. Piutang Kontribusi kerjasama operasional aset Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Puncak Jaya Lestari berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana telah diaddendum dengan addendum terakhir Nomor 181/01/PK/II/2008, di mana pada pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa dalam hal pihak kedua menyewakan dan/atau mensubkontrakkan sebagian dari bangunan gedung kepada pihak lain harus dengan persetujuan pihak pertama dengan memberikan uang kontribusi sebesar 2,5% dari harga sewa atau sub kontrak perbulan.

   Jumlah hak atas kontribusi Pemerintah Kabupaten Belitung di tahun 2024 yang belum diterima per 31 Desember 2024 sebesar **Rp2.051.250,00** dengan perhitungan sebagai berikut:

   Jumlah harga sewa kios yang diterima: Rp76.800.000,00

   Setoran untuk Pemkab. Belitung: Rp76.800.000,00 x 2,5% = 2.051.250,00.

   Kontribusi tersebut baru disetor ke kas daerah pada tanggal 10 Januari 2024.

2. Denda keterlambatan pembayaran Pajak Galian sebesar **Rp363.370.269,80**, jumlah ini tidak terjadi pengurangan dari tahun sebelumnya, Pajak Hiburan sebesar **Rp4.014.228,00** tidak ada pengurangan dari tahun lalu karena tidak diketahui lagi alamat masing-masing wajib pajak yang bersangkutan, sehingga upaya penagihan yang dilakukan belum berhasil.
3. Piutang kelebihan setoran potongan PFK ke RKUN merupakan piutang yang timbul akibat adanya kelebihan setoran ke RKUN atas potongan PFK sebesar **Rp221.179,00** dengan rincian sebagai berikut:
    a. Potongan PPh ps.21 atas pembayaran gaji bulan oktober pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp88.184,00.
    b. Iuran jaminan kesehatan PPPK bulan Desember 2023 pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp132.995,00

Adapun piutang retribusi perizinan tertentu (iuran tetap) sebelumnya tercatat pada Ex. Dinas Pertambangan disajikan pada laporan keuangan PPKD.

Piutang lainnya berupa tunggakan atas pungutan lain-lain PAD yang sah, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp6.483.963.249,64** terjadi penurunan saldo piutang sebesar **Rp5.627.258.847,84**, atau **86,79%**. penuruan tersebut karena adanya pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar **Rp5.634.642.308,84** sedangkan untuk penambahan piutang lainya tahun berjalan sebesar **Rp7.383.461,00.** penyesuaian pencatatan piutang pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dr . H. Marsidi Judono yang sebelumnya dicatat pada akun piutang lainnya pada tahun 2024 direklasifikasi ke akun piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar **Rp12.260.995.039,00**, sedangkan untuk penambahan piutang lainya tahun berjalan sebesar **Rp7.383.461,00**.

Secara umum mutasi piutang lainnya sebagai berikut:

Tabel 72 Mutasi Piutang Lainnya 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	**6.483.963.249,64**
Pengurangan	
Pelunasan piutang denda retribusi terminal	(415.500,00)
Pelunasan piutang denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(257.400,00)
Pelunasan piutang jasa layanan BLUD	(5.623.699.361,00)
Pelunasan piutang lan-lain PAD yang sah (kontribusi hasil kerja sama pada PT. Puncak jaya Lestari)	(2.051.250,00)
Pelunasan Piutang Bunga Deposito Bank Sumsel Babel	(8.218.797,84)
Penambahan	
Denda Retribusi Pemakaian Tempat Usaha (UPTD Taman Hiburan)	5.302.261,00
Denda Retribusi parkir di tepi jalan umum	161.200,00
Piutang lan-lain PAD yang sah (kontribusi hasil kerja sama pada PT. Puncak jaya Lestari)	1.920.000,00
Saldo Piutang akhir	**856.704.401,80**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lainnya sebagai berikut:

Tabel 73 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah	-	-	-	367.384.497,80	367.384.497,80
2	Denda keterlambatan pembayaran retribusi daerah	5.463.461,00	11.063.340,00	9.335.480,00	213.960.556,00	239.822.837,00
3	Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan	-	38.591.171,00	28.166.063,00	148.598.654,00	12.476.350.927,00
4	Lain-lain PAD yang sah lainnya	1.920.000,00	-	-	32.000.000.00	33.920.000,00
5	Piutang PFK	-	221.179,00	-	-	221.179,00
	Sub Jumlah	7.383.461,00	49.875.690,00	37.501.543,00	761.943.707.80	856.704.401,80
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	12.468.922,50	18.750.771,00	761.943.707,80	793.163.401,80
	Piutang Netto	**7.383.461,00**	**37.406.767,50**	**18.750.771,50**	**-**	**63.541.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar **Rp793.163.401,80**, sedangkan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar **Rp748.905.758,55**, terjadi kenaikan sebesar **Rp44.257.643,25** atau **5,91%** dari tahun sebelumnya.

Status penagihan atas piutang lainnya yang belum tertagih masih ditangani pemerintah daerah belum diserahkan ke PUPN.

Rincian saldo piutang lainnya tercantum pada **Lampiran 15** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.18 Beban Dibayar Di muka

Beban Dibayar Di muka adalah pengeluaran satker/pemerintah daerah yang telah dibayarkan namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati oleh satker/pemerintah daerah.

Mutasi beban di bayar dimuka sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal	**25.530.913,97**
Penambahan :	
Biaya sewa dibayar di muka tahun 2024	27.885.580,84
Pengurangan :	
Biaya sewa dibayar dimuka tahun sebelumnya yang menjadi beban tahun 2024	(25.530.913,97)
Saldo per 31 Desember 2024	**27.885.580,84**

Beban Dibayar Di muka per 31 Desember 2024 sebesar **Rp27.885.580,84** merupakan biaya sewa rumah dinas dokter pada RSUD, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp25.530.913,97** terjadi kenaikan sebesar **Rp2.354.666,87** atau **9,22%**.

Rincian beban dibayar di muka sebagai berikut:

Tabel 74 Rincian Beban Dibayar Di Muka 2024

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Masa berlaku	Terhitung Mulai	Nilai Per hari (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Beban Dibayar Di muka (Rp)
1	Sewa Rumah dinas dokter spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (dr. Christian Sunur Sp. JP)	17.777.778,00	1 tahun/ 12 bln	01/07/2024	48.573,16	17.802.130,75	8.840.315,84
2	Sewa Rumah dinas dokter spesialis Bedah (dr. Andi Fatmawati Sp.B)	17.777.778,00	1 tahun/ 12 bln	01/02/2024	48.440,81	16.227.672,02	1.550.105,98
3	Sewa Rumah dinas dokter spesialis Orthopedi (dr. Dwi Kartika Sari Sp.OT)	17.777.778,00	1 tahun/ 12 bln	01/05/2024	48.573,16	11.900.425,16	5.877.352,84
4	Biaya sewa menyewa TLD BADGE BARC GAMMA	18.405.576,00	1 tahun/ 12 bln	01/07/2024	50.426,24	17.922.454,69	9.127.148,65
5	Biaya sewa menyewa Evaluasi TLD Mata Soca Dosimeter	3.330.000,00	1 tahun/ 12 bln	01/10/2024	9.123,29	3.332.293,29	2.490.657,53
	Total	**75.068.910,00**				**67.184.975,91**	**27.885.580,84**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3.1.1.19 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat dengan menggunakan sistem periodik di mana nilai persediaan yang disajikan berdasarkan berita acara hasil *stock opname* per 31 Desember 2024.

Persediaan dinilai dengan menggunakan :

1. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
2. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp24.296.991.685,15** yang terdiri dari:

1. Persediaan barang habis pakai untuk kegiatan operasional sebesar **Rp16.235.445.601,95**. Rekapitulasi persediaan barang habis pakai berdasarkan jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel 75 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan Kimia	648.988.106,75	603.969.299,37
2	Bahan Bakar dan Pelumas	249.412.500,00	-
3	Bahan/Bibit Tanaman	34.553.350,00	12.771.000,00
4	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	5.369.500,00	200.000,00
5	Bahan Lainnya	128.098.241,00	125.157.372,00
6	Suku Cadang Alat Laboratorium	175.000,00	-
7	Alat Tulis Kantor	459.973.115,00	437.321.117,00
8	Kertas dan Cover	105.269.300,00	29.425.600,00
9	Bahan Cetak	645.087.293,00	625.510.612,00
10	Benda Pos	4.030.000,00	3.600.000,00
11	Bahan Komputer	157.509.000,00	187.718.000,00
12	Alat Listrik	174.007.006,00	562.976.076,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.564.697.909,00	2.822.397.952,00
14	Obat	6.839.283.668,83	5.916.467.297,39
15	Obat-obatan Lainnya	3.975.270.112,37	3.933.580.673,92
16	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	235.360.000,00	235.360.000,00
17	Natura	2.911.500,00	6.398.978,00
18	Pakan	5.450.000,00	29.610.000,00
	Jumlah	**16.235.445.601,95**	**15.532.463.977,68**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

2. Persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga berasal dari belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga dan reklasifikasi dari belanja modal yang sampai dengan akhir tahun belum diserahkan/diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang sebesar **Rp8.061.546.083,20** yang terdiri dari:

Tabel 76 Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah, bangunan dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum	7.492.719.700,00	3.227.323.597,00
2	Pengadaan kursi roda untuk bantuan sosial kepada individu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.895.000,00	5.895.000,00
3	Persediaan logistik dan bahan bantuan untuk penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	109.718.567,20	162.362.401,20
4	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	206.112.816,00	271.375.332,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
5	Pengadaan sumur resapan	47.600.000,00	-
6	Pembangunan pembangunan tanggul/Dam penahan ROB Sungai	199.500.000,00	-
	Jumlah	**8.061.546.083,20**	**3.666.956.330,20**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian Persediaan Barang yang Akan Diserahkan pada **Lampiran 17.**

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan persediaan barang untuk diserahkan, dikarenakan adanya penambahan pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang belum diserahterimakan ke masyarakat/pihak ketiga dari OPD ke penerima barang.

Mutasi persediaan barang untuk diserahkan sebagai berikut:

Saldo awal	**3.666.956.330,20**
Mutasi Tambah	
- Pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	7.241.362.000,00
Mutasi Kurang	
- Persediaan barang yang telah diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	(2.846.772.247,00)
Saldo akhir	**8.061.546.083,20**

Mutasi tambah persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sebagai berikut:

Tabel 77 Rincian Mutasi Tambah Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Rehabilitasi Pagar Kantor Polisi Militer Belitung	149.833.000,00
2	Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung	2.590.115.000,00
3	Pembangunan shelter dan bangunan pelengkap lapangan tembak Astra Jingga	179.646.000,00
4	Rehabilitasi Kantor Kodim	497.350.000,00
5	Rehabilitasi Kantor Koramil	185.341.000,00
6	Rehabilitasi Rumah Dinas Kasdim	199.267.000,00
7	Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	2.894.844.000,00
8	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung	98.990.000,00
9	Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	99.456.000,00
10	Pembuatan DED renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Kabupaten Belitung	99.420.000,00
11	Pengadaan sumur resapan	47.600.000,00
12	Pembangunan pembangunan tanggul/Dam penahan ROB Sungai	199.500.000,00
	Jumlah	**7.241.362.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi kurang persediaan barang untuk di serahkan kepihak ketiga dikarenakan persediaan barang tersebut telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sesuai dengan BAST, barang yang telah diserahkan sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Mutasi Kurang Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Ganti rugi bangunan An. Erdiansyah wakil garga Ds. Pelepak Pute yang terkena pemeliharaan berkala jln. Simpang Empat Sijuk	140.031.000,00
2	Ganti rugi bangunan An. Suhandi mewakili warga bantan yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan	292.788.000,00
3	Ganti rugi bangunan An. Syamsul Basroni mewakili warga Ds. Cerucuk yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan	132.795.000,00
4	Ganti rugi bangunan An. Yahya mewakili warga Ds. Perawas yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan	421.671.000,00
5	Ganti rugi bangunan An. Nasri mewakili warga Ds. Sijuk yang terkena pemeliharaan berkala jalan Simpang Empat Sijuk	302.537.000,00
6	Ganti rugi bangunan An. Syamsul Basroni mewakili warga Ds. Cerucuk yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan	214.209.000,00
7	Ganti rugi bangunan An. Hairil mewakili warga Ds. Buluh Tumbang yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan perawas buding	136.981.000,00
8	Jaringan listrik Rumah Dinas Dandim 0414	10.497.792,00
9	Meja Tambahan Rumah Dinas Dandim 0414	21.606.150,00
10	Renovasi Rumah Dinas Dandim 0414	403.902.955,00
11	Pembangunan jalan mess perumahan Polres Belitung	651.847.000,00
12	Persediaan Logistik dan Bahan Bantuan Untuk Penggulangan Bencana	52.643.834,00
13	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat	65.262.516,00
	Jumlah	**2.846.772.247,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Catatan terkait dengan persediaan adalah sebagai berikut:

1) Pada tahun 2024 terdapat persediaan bahan bakar sebanyak 18.285 liter senilai **Rp249.412.500,00** pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian Dexlite sebanyak 17.445 liter senilai **Rp238.996.500,00** dan Pertamax sebanyak 840 liter senilai **Rp10.416.000,00**. Stock bahan bakar tersebut berada pada SPBU 24.334.160 milik PT. Biliton Jasa Semesta (BJS) yang beralamat Jln. Sudirman Km. 7 Desa Perawas Tanjungpandan.

2) Barang untuk diserahkan ke pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berupa ganti rugi bangunan yang terkena pembebasan lahan bangunan untuk pelebaran jalan pada tahun 2024 telah selesai proses BAST atas ganti rugi lahan bangunan kepada masyarakat melalui perwakilan warga pada masing-masing desa yang terkena pelebaran jalan yaitu Desa Pelepak Pute, Desa Bantan, Desa Cerucuk, Desa Perawas, Desa Sijuk dan Desa Buluh Tumbang.

3) Barang milik daerah hasil pengadaan tahun 2023 berupa 1 paket pembangunan jalan mess perumahan Polres Belitung senilai **Rp651.847.000,00** telah diserahterimakan kepada Kepolisian Resor Belitung berdasarkan berita acara serah terima (BAST) Nomor: 030/151/DPUPR.V/2024 tanggal 2 Januari 2024.

4) Persediaan barang pakai habis yang telah kedaluwarsa/*expired* tidak disajikan pada neraca, nilai persediaan barang pakai habis yang telah kedaluwarsa/ *expired* per 31 Desember 2024 sebesar **Rp706.702.420,70** berupa persediaan dalam kondisi kedaluwarsa/ rusak.

   Pada tahun 2024 telah dilakukan pemusnahan barang milik daerah berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai kondisi kedaluwarsa/expired pada UPT RSUD dr H Marsidi Judono, Gudang Farmasi dan UPT Puskesmas Dinas Kesehatan sebagai berikut:

   a) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai kondisi kedaluwarsa/*expired* dibawah Pengelolaan UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono Kabupaten Belitung, sebanyak 59.674 buah senilai Rp325.430.110,88 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/118/KEP/BPKAD/2024 tanggal 30 Desember 2024.

   b) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Obat-Obatan dan vaksin kondisi kedaluwarsa/*expired* dibawah Pengelolaan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, sebanyak 757.960 buah senilai Rp367.463.282,51 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor : 188.46/117/KEP/BPKAD/ 2024 tanggal 30 Desember 2024.

   c) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Barang Persediaan Berupa Bahan Kimia kedaluwarsa/*expired* dibawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, sebanyak 84.851,34 gram senilai Rp305.802.367,17 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor : 188.46/122/KEP/BPKAD/ 2024 tanggal 30 Desember 2024

   Rekap persediaan barang kedaluwarsa/ *expired* dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.2 Aset Nonlancar

Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya..

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi jangka panjang permanen pada badan usaha milik daerah (BUMD) dan pada lembaga keungan perbankan.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. **Metode biaya**

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. **Metode ekuitas**

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

3. **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Nilai penyertaan modal per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 79 Rekap Penyertaan Modal 2024

No.	Nama Perusahaan/Badan Usaha	Nilai Penyertaan Modal	
		Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	**Perumda AM Tirta Batu Mentas**	**8.639.151.508,29**	**9.577.395.403,98**
2.	**PT. Belitong Mandiri**	**1.895.025.485,19**	**2.607.100.449,11**
3.	**BPR Syari'ah Bangka Belitung**		
	- Setoran modal yang telah diterbitkan sertifikat sahamnya	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	- Agio Saham	10.000.000,00	10.000.000,00
	Jumlah Penyertaan modal pada BPR Syari'ah Bangka Belitung	**7.010.000.000,00**	**7.010.000.000,00**
4.	**PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
5.	**PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia**	**143.808.005,05**	**420.919.211,43**
6.	**PT Bank Sumsel Babel**		
	- Setoran Modal yang telah diterbitkan sertifikat saham	24.327.000.000,00	22.264.000.000,00
	- Agio Saham	9.921.716.000,00	8.985.114.000,00
	- Sisa yang belum dijadikan saham	751.464,77	353.464,77
	Jumlah Penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel	**34.249.467.464,77**	**31.249.467.464,77**
	Total Penyertaan Modal Pemda	**56.937.452.463,29**	**55.864.882.529,28**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah dengan menggunakan metode ekuitas untuk BUMD PT Belitong Mandiri, Perumda AM Tirta Batu Mentas, dan PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sedangkan penyajian nilai penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel, Bank Syariah Bangka Belitung dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode biaya (*cost*). Perhitungan penyajian sebagai berikut:

1. Perumda AM Tirta Batu Mentas

Nilai total penyertaan modal pada Perumda AM Tirta Batu Mentas per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp30.417.346.549,00**. Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya.

Penilaian investasi/penyertaan modal pada **Perumda AM Tirta Batu Mentas** menggunakan **metode ekuitas** di mana nilai penyertaan modal yang disajikan di Neraca adalah sebesar **nilai kekayaan bersih** yaitu nilai total penyertaan modal ditambah/dikurangi dengan proporsi keuntungan/kerugian.

Berdasarkan laporan keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas tahun 2024 (*Audited*), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2024 sebesar sebesar **Rp66.128.631.320,93 (100%)** yang terdiri dari:

Tabel 80 Kekayaan Pemda Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	30.417.346.548,93	46,00
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	731.225.000,00	1,10
- Pemerintah Pusat (termasuk penyertaan yang belum ditetapkan statusnya)	34.980.059.772,00	52,90
Jumlah	**66.128.631.320,93**	**100,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dalam Laporan keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas Tahun 2024 (*Audited*), disajikan laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian) sebesar **Rp(45.306.958.113,32)** dan Rugi tahun berjalan sebesar **Rp(2.039.782.943,18)**.

Tabel 81 Laba Yang Belum Dibagikan Perumda AM Tirta Batu Mentas 2024

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	Akumulasi Kerugian (Rp)	Kerugian Tahun Berjalan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	30.417.346.548,93	(20.839.951.144,95)	(938.243.895,69)	46,00
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	731.225.000,00	(500.986.936,89)	(22.555.136,15)	1,10
- Pemerintah Pusat	34.980.059.772,00	(23.966.020.031,48)	(1.078.983.911,34)	52,90
Jumlah	**66.128.631.320,93**	**(45.306.958.113,32)**	**(2.039.782.943,18)**	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Perumda AM Tirta Batu Mentas dengan **Metode Ekuitas** sebagai berikut.

Tabel 82 Penyertaan Modal Pemda Belitung Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas

Keterangan	Nilai (Rp)
- Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2024	30.417.346.548,93
- Laba yang Belum dibagikan (akumulasi Kerugian)	(20.839.951.144,95)
- Laba/(Rugi) tahun berjalan	(938.243.895,69)
Jumlah Kekayaan Bersih	**8.639.151.508,29**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada Perumda AM Tirta Batu Mentas disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp8.639.151.508,29** terjadi penurunan nilai kekayaan bersih dari tahun sebelumnya sebesar **Rp(938.243.895,69)**.

Laporan Keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas tahun 2024 belum diaudit KAP.

2. PT Belitong Mandiri

Pada tahun 2024 tidak terjadi penambahan nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri **total modal PT. Belitong Mandiri sebesar Rp10.601.636.328,00 (100%)** terdiri dari **Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar Rp10.401.636.328,00 (98,11%)** dan **Zulkifli sebesar Rp200.000.000,00 (1,89%).** Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri menggunakan **metode ekuitas**.

Dalam Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Audited*) PT Belitong Mandiri melaporkan adanya kerugian tahun berjalan sebesar Rp359.276.483,00 sehingga proporsi kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung tahun berjalan adalah sebesar Rp352.498.727,72 (Rp359.276.483,00 x 98,11%). Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Belitong Mandiri dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Tabel 83 Penyertaan Modal Pemda Belitung di PT Belitong Mandiri

Keterangan	Nilai (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2024	10.401.636.328,00
Laba/(rugi) yang belum dibagikan (akumulasi kerugian)	(8.154.112.115,09)
Laba/(rugi) tahun berjalan	(352.498.727,72)
Jumlah Kekayaan Bersih	**1.895.025.485,19**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp1.895.025.485,19,** terjadi penurunan nilai kekayaan bersih dari tahun sebelumnya sebesar **Rp(712.074.963,92) hal ini disebabkan adanya proporsional perhiutngan nilai kekayaan bersih akibat kerugian tahun berjalan sebesar Rp359.276.483,00 dan kerugian tahun 2023 sebesar Rp359.576.237,18.**

Laporan Keuangan PT Belitong Mandiri tahun 2024 merupakan hasil Audit KAP dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

3. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung**

Nilai total penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp7.010.000.000,00 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar 14,73%**. Pada tahun 2024 tidak terjadi penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung terakhir pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung TA 2015. Penilaian investasi/penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung menggunakan **metode biaya (*cost*).**

4. **PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung**

PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bangka Belitung adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjamin kredit milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pembentukan BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pada TA 2013 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada PT Jamkrida Kepulauan Bangka Belitung guna

menunjang pendirian dan operasional dengan nilai penyertaan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang dialokasi dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp5.000.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 14,29%,** tidak terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Penilaian investasi/penyertaan modal menggunakan **metode biaya (*cost*).**

5. **PT Bank Sumsel Babel**

Nilai total penyertaan modal saham pada PT Bank Sumsel Babel sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp34.249.467.464,77 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar 2,04%**. Pada TA 2024 terjadi penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar 3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penambahan penyertaan modal berupa lahan seluas 708 m^2 yang berada di jalan Kapten Pierre Tendean Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Belitung senilai Rp1.776.100.000,00 telah dicatat sebagai penambahan penyertaan modal tahun 2023 dan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000.000,00 yang disetor pada tahun 2024.

Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel menggunakan **metode biaya (*cost*).**

6. **PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia**

PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia merupakan badan usaha pelabuhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2015. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung dengan **Metode Ekuitas.**

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia **berdasarkan data laporan keuangan tahun 2024** Un-Audited dikarenakan sampai dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah ini PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia belum di audited oleh KAP.

Berdasarkan Surat Keterangan Audit Nomor : 0477/04/2025/AUD/MHP/PHY tanggal 30 April dari Rekan Kantor Akuntan Publik Prakarsa, Hanum & Yudhistiro menerangkan bahwa saat ini Kantor Akuntan Publik Prakarsa, Hanum & Yudhistiro sedang melakukan audit atas laporan keuangan PT. Pelabuhan Tanjong Batu Belitung Indonesia Tahun 2024.

Berdasarkan laporan keuangan PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia tahun 2024 (*Un-Audited*), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp5.250.000.000,00 (100%) yang terdiri dari:

Tabel 84 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	5.000.000.000,00	95,24
- Dalai Kosim Kwok	250.000.000,00	4,76
Jumlah	**5.250.000.000,00**	**100,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sampai dengan selesai penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini, PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia belum menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2024 hasil Audit KAP.

Tabel 85 Penyertaan Modal di PT Pelabuhan Tanjung Batu

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	Akumulasi Kerugian (Rp)	Kerugian Tahun Berjalan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	5.000.000.000,00	(4.977.566.321,56)	121.374.326,61	95,24
- Dalai Kosim Kwok	250.000.000,00	(248.878.316,08)	6.068.716,33	4,76
Jumlah	**5.250.000.000,00**	**(5.226.444.637,64)**	**127.443.042,94**	**100,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia dengan **Metode Ekuitas** sebagai berikut.

Tabel 86 Kekayaan Pemda Belitung Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu

Keterangan	Nilai (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2020	5.000.000.000,00
- Laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian)	(4.977.566.321,56)
- Laba/(Rugi) tahun berjalan	121.374.326,61
Jumlah Kekayaan Bersih	**143.808.005,05**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp143.808.005,05.**

5.3.1.2.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*Audited)* adalah senilai Rp4.139.453.056.853,69 mengalami peningkatan senilai Rp110.701.361.479,56 atau meningkat 2,75% dibandingkan saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 senilai Rp4.028.751.695.374,13**.**

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 87 Saldo Aset Tetap Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Barang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Prosentase Kenaikan/ Penurunan
1	Tanah	339.197.970.602,53	370.676.122.840,53	31.478.152.238,00	9,28
2	Peralatan dan Mesin	697.617.840.076,03	720.367.617.851,82	22.749.777.775,79	3,26
3	Gedung dan Bangunan	762.036.878.775,11	785.386.635.067,07	23.349.756.291,96	3,06
4	Jalan, Jaringan dan irigasi	2.147.718.601.043,40	2.175.527.297.933,24	27.808.696.889,84	1,29
5	Aset Tetap Lainnya	64.008.029.756,38	67.445.072.900,35	3.437.043.143,97	5,37
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.172.375.120,68	20.050.310.260,68	1.877.935.140,00	10,33
Jumlah		**4.028.751.695.374,13**	**4.139.453.056.853,69**	**110.701.361.479,56**	**2,75**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024, aset tetap diklasifikasikan dan disajikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Adapun rincian atas kenaikan/penurunan saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan saldo akhir per 31 Desember 2023 (*audited*) adalah sebagai berikut:

1. Saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp370.676.122.840,53 mengalami kenaikan senilai Rp31.478.152.238,00 atau meningkat 9,28% dibandingkan saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 (*audited*) senilai Rp339.197.970.602,53.
2. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 720.367.617.851,82 mengalami kenaikan senilai Rp22.749.777.775,79 atau meningkat 3,26% dibandingkan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 (*audited*) senilai Rp697.617.840.076,03.
3. Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp785.386.635.067,07

mengalami kenaikan senilai Rp23.349.756.291,96 atau meningkat 3,06% dibandingkan saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 (*audited*) senilai Rp762.036.878.775,11.

4. Saldo aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.175.527.297.933,24 mengalami peningkatan senilai Rp27.808.696.889,84 atau sebesar 1,29% dari saldo akhir 31 Desember 2023 (*Audited*) yaitu Rp2.147.718.601.043,40.
5. Saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp67.445.072.900,35 mengalami kenaikan senilai Rp3.437.043.143,97 atau sebesar 5,37% dari saldo akhir 31 Desember 2023 (*Auditted*) yaitu Rp64.008.029.756,38.
6. Saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp20.050.310.260,68 mengalami kenaikan senilai Rp1.877.935.140,00 atau meningkat 10,33% dibandingkan saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 (*audited*) senilai Rp18.172.375.120,68.

Data rincian mutasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 19 - Lampiran 23.**

5.3.1.2.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pajak dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Aset tetap tanah tidak ada batasan nilai minimal kapitalisasi.

Saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp370.676.122.840,53 mengalami kenaikan senilai Rp31.478.152.238,00 atau meningkat 9.28 % dibandingkan saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 (*audited*) senilai Rp339.197.970.602,53.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2024 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tanah, dengan perhitungan:

Tabel 88 Mutasi Aset Tetap Tahun 2024

Uraian		Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa tanah per 1 Januari 2024	Rp	339.197.970.602,53

-	Mutasi penambahan aset tetap berupa tanah tahun 2024:	Rp	36.425.927.290,00
-	Mutasi pengurangan aset tetap berupa tanah tahun 2024:	Rp	(4.947.775.052,00)
-	Saldo akhir aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2024	Rp	370.676.122.840,53

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi penambahan aset tetap berupa tanah tahun 2024 senilai Rp36.425.927.290,00 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

1. Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp4.135.660.290,00
   Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa tanah untuk jembatan sebanyak 1 (satu) bidang senilai Rp4.135.660.290,00. Pengadaan tanah ini merupakan pembebasan lahan dan bangunan yang terdampak pada kegiatan pembangunan Jembatan di Desa Dukong dan Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjungpandan yang akan dibangun oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN Babel).
   Daftar rincian penambahan aset tetap berupa tanah dari klasifikasi belanja modal disajikan dalam **Lampiran 26.**
2. Pengalihan antar OPD dengan total nilai Rp1.354.122.000,00.
   Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (konsolidasi), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) dan Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:
   1. Pengalihan ini berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 2 (dua) bidang dengan total nilai Rp1.261.194.000,00 berupa tanah bangunan Puskesmas/Posyandu untuk Dinas Kesehatan (konsolidasi) dan Tanah Lapangan Lainnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/364/KEP/BPKAD/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah bangunan Puskesmas/ Posyandu dan tanah lapangan lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungpandan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
   2. Pengalihan ini berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung sebanyak 1 (satu) bidang senilai Rp92.928.000,00 berupa tanah

bangunan kantor pemerintah untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/555/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa tanah dari pengalihan antar OPD disajikan dalam **Lampiran 27.**

3. Koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) dengan total nilai Rp30.936.145.000,00.

   Penambahan ini untuk menampung pencatatan atas perolehan yang belum tercatat pada tahun sebelumnya.

   1) Penambahan ini berasal dari aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga-huruf b. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah-PT. Belitung Inti Permai.

      Penambahan ini terdapat pada OPD Sekretariat Daerah (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) bidang berupa tanah kosong yang sudah diperuntukkan, kode barang 1.3.1.01.002.002.002, register 12, alamat Jalan Pantai Tanjung Kelayang Desa Keciput Kecamatan Sijuk, dokumen kepemilikan sertifikat hak guna bangunan nomor 00383/Desa Keciput Kecamatan Sijuk tanggal 01 Agustus 2023, NIB 29.03.04.08.01203, luas 42.800 m², keterangan pemisahan/pemecahan dari Hak Guna Bangunan nomor: 00042/Keciput atas nama Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai diatas hak pengelolaan nomor 03/Belitung. Adapun riwayat tanah sebagai berikut:

      Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Belitung Inti Permai. Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan kedalam Perjanjian kerjasama nomor: 181/05/PK/II2010 dan nomor: 8001/BIP/PEJ/DIR/IV/2010 tanggal 15 April 2010, dokumen kepemilikan adalah Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor: 00003/Belitung, Desa Keciput tanggal 20 April 2010 an Pemerintah Kabupaten Belitung, Luas 121.700 m².

      Atas pelaksanaan kerjasama tersebut, diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) yaitu Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai dengan luas 121.700 m².

      Pemerintah Kabupaten Belitung telah memberikan beberapa surat peringatan untuk segera melakukan pembangunan kepada

PT Belitung Inti Permai dengan surat terakhir nomor: 005/0819/III/2020 tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Peringatan ke-3.

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung Inti Permai tentang Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan *Billiton Beach Hotel* dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung nomor: 181/1003/PK/I/2021 dan nomor: 8002/PERJ/DIR-BIP/IX/2021 tanggal 10 November 2021.

Sampai dengan tahun 2023, tidak adanya itikad baik dari pihak PT. Belitung Inti Permai untuk pembangunan billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung tersebut.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Belitung menginisiasi untuk melakukan pengakhiran kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Belitung Inti Permai tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung nomor: 181/05/PK/II2010 dan nomor: 8001/BIP/PEJ/DIR/IV/2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung nomor: 703KEP/BPKAD/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Atas pengakhiran kerjasama tersebut, dilakukan pemisahan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai dari total luas 121.700 m² dengan total nilai Rp608.500.000,00 menjadi yaitu:

- Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput dengan luas 78.340 m², an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai

  Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan, maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp608.500.000,00/121.700) adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jadi perhitungan nilai perolehan saat perjanjian saat pemisahan adalah (78.340 m² x Rp.5000,00) adalah Rp394.500.000,00.
- Hak Guna Bangunan No. 383/ Keciput dengan luas 42.800 m², an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai, melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh notaris Andrias Tjahya, S.H.,M.Kn (Hak atas Tanah ini hapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

  Secara otomatis Hak Guna Bangunan No. 383/ Keciput dengan luas 42.800 m² kembali ke Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor: 00003/Belitung, Desa Keciput tanggal 20 April 2010 an Pemerintah Kabupaten Belitung.

Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan, maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku pada tahun 2023 adalah Rp464.000,00/ m².

Jadi perhitungan nilai perolehan saat pemisahan tahun 2023 adalah (42.800 m² x Rp464.000,00) adalah Rp19.859.200.000,00.

2) Penambahan ini berasal dari hasil inventarisasi Dinas Kesehatan (konsolidasi) yang semula belum tercatat pada UPT Puskesmas Selat Nasik senilai Rp76.945.000,00 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/151/KEP/BPKAD/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebidang Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu Seluas ± 15.389 m² Alamat Jalan Selat Nasik Desa Petaling Kecamatan Selat Nasik yang diperuntukan untuk lahan Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Selat Nasik Menjadi Barang Milik Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Selat Nasik.

3) Penambahan ini berasal dari hasil perolehan penguasaan lahan berupa tanah untuk prasarana dan sarana Pemerintah Kabupaten Belitung Kecamatan Sijuk senilai Rp11.000.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/886/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa tanah dari koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) disajikan dalam **Lampiran 28**

Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, tidak terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa tanah (LRA)	Rp 4.135.660.290,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	-
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa Tanah dari Realisasi Belanja Modal	Rp 4.135.660.290,00

Mutasi pengurangan nilai aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar Rp4.947.775.052,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah dengan tidak lanjut penghapusan dengan total nilai Rp18.182.052,00.

   Pengurangan aset tetap tanah sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI). Atas hibah tersebut ditindaklajuti dengan penghapusan. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) bidang tanah senilai Rp18.182.052,00. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan dari daftar barang milik daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.46/952.1/KEP/BPKAD/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang penghapusan barang milik daerah tindak lanjut pemindahtanganan barang milik pemerintah Kabupaten Belitung dalam bentuk hibah berupa tanah dan bangunan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI).

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa tanah dari hibah dengan tidak lanjut penghapusan disajikan dalam **Lampiran 29.**

2. Penghapusan atas pengalihan antar OPD dengan total nilai Rp1.354.122.000,00.

   Pengurangan atas pengalihan antar OPD ini tidak mengurangi nilai total aset tetap berupa tanah secara keseluruhan. Pengurangan ini untuk membebaskan tanggung jawab pengguna barang atas pencatatan aset tetap berupa tanah yang semula menjadi kewenangannya akibat dari penegasan hak atas barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai berikut:

   - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total nilai Rp1.261.194.000,00

     Pengalihan ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) bidang senilai Rp897.532.000,00 berupa tanah lapangan lainnya. Atas pengalihan ini dilakukan penghapusan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang Nomor: 000.2.6.1/127/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berupa Tanah Lapangan Lainnya dari Daftar Barang Pengguna dan pengalihan kepada Dinas Kesehatan (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) bidang senilai Rp363.662.000,00 berupa tanah bangunan puskesmas/ posyandu. Atas pengalihan ini dilakukan penghapusan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku pengelola barang Nomor: 000.2.6.1/126/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berupa Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu dari Daftar Barang Pengguna.

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
  Pengalihan ini kepada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 1 (satu) bidang senilai Rp92.928.000,00 berupa tanah bangunan kantor pemerintah. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/128/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa tanah dari Penghapusan atas Pengalihan antar OPD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan dalam **Lampiran 30.**

3. Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi dengan total nilai Rp3.575.471.000,00.
   Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan inventarisasi data tanah dan/ atau bangunan yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk memperoleh kenaikan nilai yang dapat dikategorikan sebagai properti investasi. Data awal yang bersumber dari daftar barang pengguna terdapat beberapa aset tanah dan/ atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal/ *idle*.. Namun Aset tanah tersebut telah dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke kelompok Properti Investasi. Adapun jumlah tanah yang memenuhi kategori Properti Investasi adalah 6 (enam) bidang pada OPD sebagai berikut :

   - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan nilai Rp1.474.450.000,00 berupa Tanah Kawasan Industri.
   - Sekretariat Daerah dengan total nilai Rp. 2.101.021.000,00 berupa:
     - Tanah Bangunan Hotel/ Penginapan/ Motel (Penginapan dan Restoran (HARLIKA) senilai Rp47.415.000,00
     - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Stasiun Relay Mini) Rp157.950.000,00,
     - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Eks Tanah Bangunan STM, SMEA, SMA, SMP Yaperbel &SPG senilai Rp1.306.228.000,00,
     - Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Barata Dept Store) senilai Rp515.700.000,00

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Eks. Asrama Karyawan Timah/SPM/STAIN) senilai Rp73.728.000,00

Dalam Aplikasi Sistem Implementasi Pengelolaan Daerah (SIMDA BMD) Aset Tetap Tanah yang telah direklasikasi ke Properti Investasi belum bisa diakomodir, sehingga dilakukan pencatatan secara terpisah. Namun Properti Investasi disajikan/ dicatat dalam struktur laporan keuangan.

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa tanah dari properti investasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 31.**

Beberapa perubahan data aset tetap berupa tanah yang terjadi untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan Pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI). Tanah bangunan puskesmas/ posyandu, sebanyak 1 (satu) bidang kode barang 1.3.1.01.001.004.006 register 3, bukti kepemilikan sertifikat hak pakai nomor 0015/Lesung Batang/Th.2013, dengan luas yang dihibahkan ± 966 m², senilai perolehan Rp18.182.052,00.
2. Atas pelaksanaan pemindahtanganan dalam bentuk hibah telah dilakukan pemecahan luas dan penyerahan bukti kepemilikan tanah yaitu:
    1) Penyerahan bukti kepemilikan sertifikat nomor 0015/Lesung Batang/Th.2013, luas tanah yang dihibahkan keseluruhan ±966 m² kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI).
    2) Pelepasan sebagian luas Sertifikat Hak Pakai No.143/Kel.Kota/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dengan luasan awal ±10.687 m² sebagai berikut:
        - Luas tanah yang dilepaskan adalah ±1.265 m², kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
        - Luas tanah yang dilepaskan adalah ±750 m², kepada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
        - Luas tanah yang dilepaskan adalah ±82 m², kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

          Sisa luasan tanah yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Pakai No.143/Kel.Kota/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung adalah ±8.576 m².

3) Pemecahan sebagian luas Sertifikat Hak Pakai No.1/Badau/1999 tanggal 14 Oktober 1999 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan luasan awal ±19.639m². Luas tanah yang dilakukan pemecahan adalah seluas ±7.849m² peruntukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Badau dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atas pemecahan sertifikat tersebut, timbul menjadi 2 (dua) sertifikat yang masing-masing sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Pakai No.00065/Badau tanggal 14 Mei 2024 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seluas ±11.790m² peruntukan SMP Negeri 1 Badau.
- Sertifikat Hak Pakai No.00064/Badau tanggal 14 Mei 2024 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seluas ±7.688m² peruntukan SMK Negeri 1 Badau.

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024, yaitu:

1. Terhadap temuan BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 atas aset tetap tanah yang tercatat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dengan alamat di Jalan A.Yani, Tanjungpandan (Kode Barang 01.01.11.04.01) seluas 10.486 m^2.

   Objek tersebut telah dilakukan pengukuran bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Peta Bidang Tanah Yang Digunakan Untuk Bangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. Adapun sebagian luasan lahan berdasarkan hasil pengukuran adalah ± 3.967,76 m² dari total seluas 10.486 m^2. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan kejelasan proses hibah atas lahan tersebut dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah, Nomor: 030/1136/BPKAD tanggal 25 Juli 2022.

   Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan permohonan ulang Hibah berdasarkan Surat Bupati Belitung nomor: 000.2.6.1/830/BPKAD tanggal 28 Februari 2023, Hal Permohonan Ulang Hibah Berupa Tanah Peruntukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. Atas permohonan itu, dilakukan rapat koordinasi

kembali pada hari Selasa, 30 Mei 2023 sekaligus peninjauan kembali lahan yang dimohonkan hibah bersam tim Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tim Pemerintah Kabupaten Belitung. Sampai dengan penyampaian laporan ini, telah dilakukan pertemuan lanjutan bersama tim dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Staf Khusus Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil pertemuan disepakati yaitu Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menjaga aset ini bersama dan akan dilakukan rekonsiliasi aset antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan inventarisasi data tanah dan/ atau bangunan yang belum optimal dilakukan pemanfaatan aset (*idle*). Pemanfaatan ini dalam rangka untuk menunjang pendapatan daerah. Hasil inventarisasi akan dimanfaatkan untuk menentukan bentuk kebijakan pemanfaatan atas aset (*idle*) ini yang akan dikategorikan menurut jenis pemanfaatannya, seperti Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) atau pemanfaatan lain untuk menunjang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Hal ini untuk memastikan penggunaan tertinggi dan terbaik *(Highest and Best Used)* atas pemanfaatan aset yang lebih optimal untuk menunjang pendapatan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan inventarisasi data tanah dan/ atau bangunan yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk memperoleh kenaikan nilai yang dapat dikatagorikan sebagai properti investasi. Data awal yang bersumber dari daftar barang pengguna terdapat beberapa aset tanah dan/ atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal/ *idle.* Adapun jumlah tanah yang memenuhi kategori Properti Investasi adalah 6 (enam) bidang. Aset tanah tersebut telah dilakukan reklasifikasi pencataannya dari aset tetap ke kelompok Properti Investasi. Daftar properti investasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 31.**
4. Pemerintah Kabupaten Belitung terus melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung terkait pengamanan barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung dan mengikuti program/kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebagai tindak lanjut program *Monitoring Center for Prevention* (*MCP*) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
   Sertifikat yang terbit tahun 2024 adalah sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) persil. Pengamanan atas aset tetap tanah milik

Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Jumlah aset tetap berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 885 (delapan ratus delapan puluh lima) persil.

5. Pada tahun 2024 terdapat pengadaan tanah untuk kepentingan umum nama kegiatan Pembangunan Jembatan nomor DPPA: 1.03.10.2.01.0040. Kegiatan ini adalah *cost sharing* antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dimana untuk pembangunan jembatan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembebasan lahan untuk akses jalan menuju jembatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.
   Pembebasan lahan terdapat di 2 (dua) desa yaitu desa Dukong dan desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan. Di desa Dukong terdapat 8 (delapan) bidang tanah yang terdampak pembebasan lahan dan 4 (empat) bidang tanah di desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan dan pendukung pelaksanaan kegiatan dengan total nilai Rp4.135.660.290,00 dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
   Tanah yang telah dibebaskan tersebut akan diserahkan dalam bentuk hibah kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN Babel)**.** Atas pengadaan tanah tersebut diketahui bahwa belum terdapat pencatatan atas luasan tanah pada KIB Tanah.

   Selain itu diketahui juga masih terdapat dua bidang tanah yang tercatat dengan dengan luas '-' m2, yaitu berupa Tanah untuk jalan dan jembatan. Tanah tersebut tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan informasi sebagai berikut:

   a. Tanah untuk jalan dan jembatan tanggal perolehan 22/12/2023 dengan asal usul pembelian senilai Rp63.444.000,00.
   b. Tanah untuk jalan dan jembatan tanggal perolehan 19/12/2023 dengan asal usul pembelian senilai Rp489.740.500,00.

5.3.1.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, pajak serta biaya yang terkait langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan

batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah senilai Rp1.000.000,00 per unit peralatan dan mesin.

Aset tetap berupa peralatan dan mesin dikelompokkan menjadi alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/ produksi, rambu-rambu, dan peralatan olahraga.

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp720.367.617.851,82** mengalami kenaikan senilai **Rp22.749.777.775,79** atau meningkat **3,26%** dibandingkan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 (*audited*) senilai **Rp697.617.840.076,03**.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2024 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin, dengan perhitungan:

Tabel 89 Mutasi Peralatan dan Mesin 2024

Uraian		Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap peralatan dan mesin per 1 Januari 2024	Rp	697.617.840.076,03
- Mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024:	Rp	31.924.875.709,00
- Mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024:	Rp	(9.175.097.933,21)
- Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024	Rp	720.367.617.851,82

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 32 - Lampiran 37.**

Mutasi penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 senilai Rp31.924.875.709,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Alat Besar dengan total nilai Rp238.141.000,00

   Untuk penambahan alat besar terdiri dari:

   1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp159.800.000,00.
      Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
      Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan (konsolidasi), terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp109.800.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat besar yaitu *hand palet truck danportable generating set.*
b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp50.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat besar yaitu *tractor four wheel* (dengan kelengkapannya)

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa BOS dengan total nilai Rp1.000.000,00
Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00 berupa alat besar yaitu pompa air.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja non modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 35.**

3) Aset tetap peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp1.300.000,00.
Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.888.600,00 berupa pompa air.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 41.**

4) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp22.866.000,00
Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:
a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp20.257.500,00 yaitu pompa air. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/168/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 April 2024 tentang

Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

b. Kecamatan Membalong.
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp2.608.500,00 yaitu pompa air. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/222/KEP/BPKAD/2024 tanggal 17 Juni 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari pengalihan antar organisasi perangkat daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 42.**

5) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp53.175.000,00.
Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp20.000.000,00 ke kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat besar dari alat laboratorium yaitu *concrete vibrator*.

b. Dinas Kesehatan (konsolidasi)
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp24.875.000,00 ke kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat besar yaitu pompa air.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)
Reklasifikasi ini sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp8.300.000,00 ke kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat besar yaitu pompa air dan tandu lipat.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 44.**

2. Alat Angkutan dengan total nilai Rp5.813.355.345,00
Untuk penambahan alat angkutan terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp5.184.725.450,00
Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dengan total nilai Rp4.788.125.450,00 dan

belanja modal peralatan dan mesin BLUD dengan total nilai Rp396.600.000,00.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi)
   Terdapat 15 (lima belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.727.750.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu gerobak dorong, *pick up* dan sepeda motor.

b. Dinas Perhubungan (konsolidasi)
   Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp75.315.825,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu Sepeda Motor.

c. Dinas Kesehatan (konsolidasi)
   Terdapat 23 (dua puluh tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.822.430.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu mobil ambulance dan sepeda motor.

d. UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
   Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp396.600.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu mini bus (penumpang 14 orang kebawah).

e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
   Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp51.020.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
   Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp24.620.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
   Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp80.474.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu roda tiga/ gerobak kayuh berinsulasi.

h. Inspektorat
   Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp290.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan

mesin berupa alat angkutan yaitu mini bus (penumpang 14 orang kebawah).

i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp49.820.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp369.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu mini bus (penumpang 14 orang kebawah).

k. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Terdapat 5 (lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp118.400.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

l. Kecamatan Tanjungpandan (Konsolidasi)
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp52.420.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

m. Kecamatan Badau
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp40.400.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

n. Kecamatan Sijuk
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp63.100.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

o. Kecamatan Selat Nasik
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp23.375.625,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp13.719.895,00
Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja

modal dengan total nilai Rp11.779.895,00 dan belanja barang dan jasa BLUD dengan total nilai Rp1.940.000,00.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebangai berikut:

a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi). Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 23 (dua puluh tiga) senilai Rp11.779.895,00. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk alat angkutan yaitu sepeda motor dan mobil ambulance.

b. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono. Jumlah belanja barang dan jasa BLUD ini sebanyak 2 (dua) dengan total nilai Rp1.940.000,00. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk alat angkutan yaitu mini bus (penumpang 14 orang kebawah).

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja non modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 35.**

3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp36.800.000,00.
Penambahan ini berasal dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Hibah ini berasal dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai Rp36.800.000,00 berupa alat angkutan yaitu sepeda motor. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/241/KEP/BPKAD/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara atas Hibah dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor Roda Dua dan Tenda Pengungsi menjadi Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari pendapatan hibah tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 36.**

4) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp578.110.000,00
Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah (konsolidasi)
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp176.110.000,00 yaitu mini bus (penumpang 14 orang kebawah). Atas pengalihan ini

telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/166/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

b. Dinas Perikanan
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp402.000.000,00 yaitu *pick up*. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/110/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 Februari 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung.

3. Alat bengkel dan alat ukur dengan total nilai Rp42.241.000,00

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp41.241.000,00
Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp25.735.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu *test press/strenght test*dan*saw machine for concret*.

b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp7.550.000,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu alat ukur universal lainnya (dst).

c. Kecamatan Badau
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp7.956.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu *Global Positioning System*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp1.000.000,00
Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit

senilai Rp1.000.000,00 ke kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur yaitu ukuran tinggi orang.

4. Alat Pertanian dengan total nilai Rp103.000.000,00

   1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp35.000.000,00
   Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
   Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Perikanan sebanyak 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp35.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok alat pertanian berupa *processing multiguna*.

   Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

   2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp68.000.000,00
   Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.
   Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp68.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat peraga ke alat pertanian yaitu alat laboratorium lainnya dan dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat besar ke alat pertanian yaitu *tractor four wheel* (dengan kelengkapannya).

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan total nilai Rp12.582.791.464,00

   1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp6.332.755.560,00.
   Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

   Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

   a. Sekretariat DPRD
   Terdapat 25 (dua puluh lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp141.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu kursi rapat pejabat lainnya dan rak besi.

   b. Sekretariat Daerah (konsolidasi)
   Terdapat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.296.710.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, *a.c. standing*, alat kantor lainnya, alat pemadam/ *portable*, alat penyimpanan kantor lainnya, cctv - *camera control television system*, dispenser, *external/ portable hardisk*, *filling cabinet* besi, kasur/ *spring bed*, kompor gas (alat dapur), kursi besi/metal, kursi putar, kursi tamu,

lemari es, lemari kayu, meja kerja besi/metal, meja kerja kayu, mesin cuci, televisi dan *unit power supply*.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terdapat 33 (tiga puluh tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp76.120.000,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, alat pemadam/*portable*, alat penghancur kertas dan cctv - *camera control television system*.

d. Dinas Perhubungan (Konsolidasi)
Terdapat 71 (tujuh puluh satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp364.000.000,00 sudah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu lampu.

e. Dinas Kesehatan (konsolidasi)
Terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) unit pengadaan dengan total nilai Rp618.022.160,00 sudah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, alat kantor lainnya, alat pemadam/*portable*, alat penyimpanan kantor lainnya, bangku tunggu, *cctv - camera control television system*, dispenser, kursi kerja pejabat lainnya, kursi putar, *LCD projector/infocus*, lemari besi/metal, lemari es, lemari kaca, lemari kayu, *loudspeaker*, meja 1/2 biro, meja rapat, mesin antrian, mesin cuci, monitor, papan nama instansi, pompa air, *sound system*, televisi, *unit power supply* dan *vertikal blind*.

f. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
Terdapat 271 (dua ratus tujuh puluh satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.064.175.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, alat pembersih lainnya, kursi besi/metal, kursi putar, kursi rapat, lemari kaca, *locker*, meja 1/2 biro, meja rapat, meja resepsionis, meubeleur lainnya, rak besi, rak server dan televisi.

g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)
Terdapat 317 (tiga ratus tujuh belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp603.984.600,00. sudah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu a.*c. split*, kursi besi/metal, kursi putar, kursi tamu, lemari besi/metal, lemari kaca, meja 1/2 biro, meja kerja kayu, meja rapat, meja sekolah, mesin absensi, pompa air, sofa, *sound system*, tangki air, *unit power supply* dan *white board*.

h. Dinas Pemuda dan Olahraga

Terdapat 34 (tiga puluh empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp152.481.500,00. sudah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu a.*c. split*, alat penghancur kertas, alat rumah tangga lain-lain, *cctv*, *laptop*, meja rapat, mesin pemotong rumput, tangga aluminium dan televisi.

i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terdapat 93 (sembilan puluh tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp418.060.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, alat pemadam/*portable*, *audio mixing console*, *cctv - camera control television system*, dispenser, *external/ portable hardisk*, *focusing screen*/layar *LCD projector*, kasur/spring bed, kursi besi/metal, kursi putar, kursi tamu, *LCD projector/infocus*, lemari besi/metal, lemari es, *loudspeaker*, meja 1/2 biro, meja kerja kayu, meja makan kayu, meja rapat, mesin cuci, *microphone table stand*, rak besi, rak piring alumunium, sofa, televisi dan *unit power supply*.

j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
Terdapat 118 (seratus delapan belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp339.768.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, alat kantor lainnya, *cctv - camera control television system*, *hard disk*, lemari es, meja rapat, *portable air conditioner* (alat pendingin), sofa, televisi dan *vertikal blind*.

k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terdapat 24 (dua puluh empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp182.195.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu a.c. sentral, alat kantor lainnya, kursi besi/metal, meja bundar dan papan pengumuman.

l. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp29.100.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu sofa.

m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Terdapat 49 (empat puluh sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp171.232.750,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu peta digital, rak besi dan *vertikal blind*.

n. Dinas Perikanan
Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp34.050.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, alat pendingin lainnya dan *portable air conditioner* (alat pendingin).

o. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
Terdapat 10 (sepuluh) unit pengadaan dengan total nilai Rp28.800.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *cctv - camera control television system*dan monitor.

p. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terdapat 19 (sembilan belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp145.250.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, brandkas, dispenser, *LCD projector/infocus*, lemari besi/metal, meja komputer dan sofa.

q. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Terdapat 4 (empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp94.145.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu papan nama instansi, rak besi dan televisi.

r. Inspektorat
Terdapat 10 (sepuluh) unit pengadaan dengan total nilai Rp63.709.000,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu dispenser, lemari besi/metal, lemari kaca, meja rapat, meja resepsionis, partisi dan sofa.

s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terdapat 22 (dua puluh dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp138.623.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, kursi kerja pejabat eselon III, *LCD projector/infocus*, meja 1/2 biro, mimbar/podium, televisi dan *unit power supply*.

t. Dinas Lingkungan Hidup
Terdapat 9 (sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp55.150.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, *LCD projector/infocus*, mesin pemotong rumput, papan pengumuman, televisi dan*unit power supply*.

u. Dinas Pariwisata (konsolidasi)

Terdapat 13 (tiga belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp82.160.750,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, alat pembersih lainnya, kasur/*spring bed*, lemari besi/metal, mesin pemotong rumput dan televisi.

v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terdapat 6 (enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp24.600.000,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu lemari besi/metal.

w. Dinas Komunikasi dan Informatika
Terdapat 10 (sepuluh) unit pengadaan dengan total nilai Rp32.150.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split,* lemari besi/ metal, meja 1/2 biro dan *unit power supply*.

x. Kecamatan Badau
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp12.615.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *focusing screen/*layar *LCD projector dan LCD projector/ infocus*.

y. Kecamatan Sijuk
Terdapat 25 (dua puluh lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp52.495.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu kursi putar dan mimbar/podium.

z. Kecamatan Membalong
Terdapat 17 (tujuh belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp97.488.800,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *a.c. split*, *cctv - camera control television system*, *hard disk*, kursi kerja pejabat lainnya, meja rapat, monitor, *portable air conditioner* (alat pendingin) dan *vertikal blind*.

aa. Kecamatan Selat Nasik
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp14.670.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *LCD projector/ infocus* dan *loudspeaker.*

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

2) Aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan total nilai Rp2.763.285.239,00

dan belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dengan total nilai Rp32.900.000,00
Dana BOS yang diterima satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan yang digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah belanja modal BOS ini sebanyak 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) unit senilai Rp2.796.185.239,00 berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu:

- A.c. split sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan total nilai Rp133.050.000,00
- Alat Basket sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp17.000.000,00
- Alat Musik Tradisional/Daerah sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp6.850.000,00
- Alat Pemadam/Portable sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp4.366.200,00
- Alat Pemotong Kertas sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp500.000,00
- Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst) sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp12.800.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp68.830.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Bola Kaki) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp550.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Bola Volly) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp550.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (timbangan badan) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp100.000,00
- Alat Tenis Meja sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp8.500.000,00
- Amplifier sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp14.400.000,00
- Bak Penyimpanan/Tower Air Baku sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.000.000,00
- Bangku Panjang Kayu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00
- Bangku Sekolah sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan total nilai Rp5.000.000,00
- Bel Listrik sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.500.000,00
- Brandkas sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.500.000,00
- *Camera Digital* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp28.500.000,00

- *CCTV - Camera Control Television System* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp96.250.000,00
- Dispenser sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan total nilai Rp18.550.000,00
- *External/ Portable Hardisk* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
- Filing Cabinet Besi sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp8.000.000,00
- *Focusing Screen*/Layar *LCD Projector* sebanyak 14 (empat belas) unit dengan total nilai Rp24.350.000,00
- Gordyin/Kray sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp15.000.000,00
- *Headmachine* Besar sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp5.997.000,00
- *Heater* (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp800.000,00
- Kipas Angin sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit dengan total nilai Rp114.349.999,00
- Kit Olahraga/atletik sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.000.000,00
- Kompor Gas (Alat Dapur) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp500.000,00
- Kursi Besi/Metal sebanyak 52 (lima puluh dua) unit dengan total nilai Rp31.500.000,00
- Kursi Kayu sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan total nilai Rp12.000.000,00
- Kursi Lipat sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.750.000,00
- Kursi Putar sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp4.500.000,00
- Kursi Rapat sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan total nilai Rp23.400.000,00
- Lap Top sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit dengan total nilai Rp637.790.000,00
- Layar Proyektor sebanyak 3 (tiga) unit senilai Rp2.400.000,00
- *LCD Projector/Infocus* sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan total nilai Rp251.412.000,00
- Lemari Arsip Pejabat lainnya sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.000.000,00
- Lemari Besi/Metal sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit dengan total nilai Rp146.270.700,00
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.500.000,00
- Lemari Display sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp1.300.000,00

- Lemari Kaca sebanyak 12 (dua belas) unit dengan total nilai Rp39.200.000,00
- Lemari Kayu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.300.000,00
- Lemari Penyimpan sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp7.000.000,00
- Lemari Sorok sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.500.000,00
- Line Printer sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.600.000,00
- *Locker* sebanyak 16 (enam belas) unit dengan total nilai Rp46.399.000,00
- *Loudspeaker* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp102.552.000,00
- Matras sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.626.800,00
- *Megaphone* sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp3.000.000,00
- Meja 1/2 Biro sebanyak 14 (empat belas) unit dengan total nilai Rp25.600.000,00
- Meja Bundar sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp1.200.000,00
- Meja Kerja Kayu sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp16.664.540,00
- Meja Komputer sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp1.803.200,00
- Meja Resepsionis sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp7.000.000,00
- Meja Sekolah sebanyak 118 (seratus delapan belas) unit dengan total nilai Rp89.520.000,00
- Mesin Absensi sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp8.200.000,00
- Mesin Pemotong Rumput sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp6.250.000,00
- Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.200.000,00
- Microphone sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp5.700.000,00
- *Microphone/Wireless MIC* sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp2.500.000,00
- Model Torso Mini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.200.000,00
- *P.C Unit* sebanyak 11 (sebelas) unit dengan total nilai Rp129.500.000,00
- Papan Nama Instansi sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp18.950.000,00
- Papan Pengumuman sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00

- Papan Tulis sebanyak 15 (lima belas) unit senilai Rp11.800.000,00
- Papan Visual/Papan Nama sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp14.100.000,00
- Pompa Air sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp4.850.000,00
- Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 60 (enam puluh) unit dengan total nilai Rp248.480.000,00
- *Proyector Spider Bracket* sebanyak 14 (empat belas) unit dengan total nilai Rp9.400.000,00
- *Proyektor Romad Complet* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp7.400.000,00
- *Pull Master* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.500.000,00
- Rak Besi sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan total nilai Rp60.500.000,00
- Rak Kayu sebanyak 3(tiga) unit dengan total nilai Rp1.950.000,00
- Rak Piring Alumunium sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.500.000,00
- *Router* sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp6.920.000,00
- *Scanner* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.200.000,00
- Serial Printer sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.600.000,00
- Server sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp15.600.000,00
- Sofase banyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp11.000.000,00
- *Sound System* sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp10.500.000,00
- *Speaker Komputer* sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp990.000,00
- *Tablet PC* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp10.000.000,00
- Tandu sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp4.250.000,00
- Tandu Lipat sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.000.000,00
- Tangga Aluminium sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.650.000,00
- Tangki Air sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.200.000,00
- Televisi sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp15.250.000,00
- Tempat Tidur Besi sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.970.000,00
- Tenda sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp19.700.000,00
- Tensimeter sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp540.000,00
- Teralis sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp37.750.000,00

- Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain) sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp1.500.000,00
- Timbangan Barang sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp880.000,00
- Timbangan Orang sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp2.623.800,00
- Tripod Camera sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00
- Ukuran Tinggi Orang sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00
- *Uninterruptible Power Supply (UPS)* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp950.000,00
- Unit Power Supply sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp3.200.000,00
- *Up Right Chiller/Frezzer* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.000.000,00
- White Board sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total nilai Rp21.150.000,00

3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp16.000.000,00.
Penambahan ini berasal dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
Hibah ini berasal dari Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan sebanyak 16 (enam belas) unit dengan total nilai Rp16.000.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu kipas angin.

4) Aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dengan total nilai Rp664.882.000,00.
Dana BOS yang diterima satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan yang digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS Kinerja.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah belanja modal BOS ini sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) unit senilai Rp664.882.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu:

- Alat Kesenian Lain-lain sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp4.900.000,00
- Alat Musik Modern/Band sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.600.000,00
- Alat Musik Tradisional/Daerah sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.400.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan total nilai Rp7.950.000,00

- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Hardisk Eksternal) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.500.000,00
- Alat Tenis Meja sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp12.000.000,00
- Bel sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.750.000,00
- Camera Digital sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.800.000,00
- Dispenser sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp500.000,00
- *Focusing Screen/*Layar *LCD Projector* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp4.150.000,00
- Genset sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp9.000.000,00
- Keranjang Bola/Ring sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp7.000.000,00
- Kipas Angin sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp23.500.000,00
- Kursi Besi/Metal sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp2.400.000,00
- Kursi Putar sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp1.500.000,00
- Lap Top sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dengan total nilai Rp288.750.000,00
- *LCD Projector/Infocus* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp32.920.000,00
- Lemari Besi/Metal lainnya sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp32.000.000,00
- Lemari Kaca sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.000.000,00
- Lemari Penyimpan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.000.000,00
- *Loudspeaker* sebanyak 18 (delapan belas) unit dengan total nilai Rp82.000.000,00
- Mesin Barcode sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.050.000,00
- *Microphone Floor Stand* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp700.000,00
- Microphone/Wireless MIC sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp4.100.000,00
- Palang Sejajar sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.000.000,00
- Peralatan Olahraga lainnya (dst) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
- *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 15 (lima belas) unit senilai Rp63.900.000,00
- *Proyector Spider Bracket* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp312.000,00
- *Scanner* (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.200.000,00

- *Scanner* (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.000.000,00
- *Tablet PC* sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp8.450.000,00
- Televisi sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp34.500.000,00
- Tripod Camera sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp800.000,00
- *White Board* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp750.000,00
- *Wireless* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.000.000,00

5) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp848.215.000,00.

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah (Konsolidasi)
Terdapat 15 (lima belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp44.853.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *summersible pump,* alat rumah tangga lain – lain, meja 1/2 biro, rak sepatu (almunium), kompor gas (alat dapur), *rice cooker* (alat dapur), rak piring alumunium, *blender, mixer* dan alat dapur lainnya.

b. Dinas Perhubungan (konsolidasi)
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp756.470.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu lampu.

c. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
Terdapat 12 (dua belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp7.140.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu meja rapat dan televisi.

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp21.700.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *cctv - camera control television system* dan televisi.

e. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.999.500,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga papan visual/papan nama.

f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp3.052.500,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu alat rumah tangga lain-lain.

g. Dinas Lingkungan Hidup
Terdapat 4 (empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp10.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu papan pengumuman.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja non modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 35.**

6) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN dengan total nilai Rp19.600.000,00
Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) sebanyak 11 (sebelas) unit senilai Rp19.600.000,00 berupa belanja barang dan jasa BOS APBN yaitu rak besi, *focusing screen*/layar *LCD projector*, *sound system*, alat rumah tangga lain-lain dan tangki air.

7) Aset tetap peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp231.680.000,00.
Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp231.680.000,00 berupa belanja barang dan jasa BOP yaitu:

- *A.c. split* sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp24.000.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.000.000,00
- *Amplifier* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.460.000,00
- *CCTV - camera control television system* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.950.000,00

- *Dispenser* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.900.000,00
- *Focusing Screen*/Layar *LCD Projector* sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
- Kipas angin sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp6.250.000,00
- Kursi Kayu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.250.000,00
- Kursi tamu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.600.000,00
- *LCD Projector/Infocus* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp13.660.000,00
- Lemari besi/metal sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp18.150.000,00
- Lemari Display sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.100.000,00
- Lemari kaca sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp26.770.000,00
- Lemari kayu sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp22.700.000,00
- *Loudspeaker* sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp19.090.000,00
- Meja 1/2 biro sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp11.650.000,00
- Meja Kerja Kayu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.600.000,00
- Meja panjang sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp13.600.000,00
- Mesin absensi sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp7.800.000,00
- Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner* sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.300.000,00
- Papan Nama Instansi sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.750.000,00
- Papan pengumuman sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp8.000.000,00
- Papan Tulis sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.400.000,00
- Papan visual/papan nama sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.000.000,00
- Rak besi sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp7.000.000,00
- Sofa sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp4.000.000,00
- Sound System sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp7.900.000,00
- Tangga aluminium sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
- Tangki air sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.800.000,00
- Tempat tidur kayu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00

- Teralis sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.000.000,00

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2024 disajikan pada Lampiran 41.

8) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp433.098.116,00

Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Terdapat 15 (lima belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp309.119.849,00 yaitu *amplifier*, *loudspeaker*, meja resepsionis, papan nama instansi, penangkal petir, tangga, tangki air dan tombol kebakaran/alarm. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/168/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 April 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Terdapat 6 (enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp38.958.400,00 yaitu alat rumah tangga lain-lain, *cctv - camera control television system*, papan visual/papan nama dan teralis. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/555/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

c. Kecamatan Membalong

Terdapat 10 (sepuluh) unit pengadaan dengan total nilai Rp85.019.867,00 yaitu alat hiasan, lampu, papan nama instansi, partisi, penangkal petir, tangga dan tangki air. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/222/KEP/BPKAD/2024 tanggal 17 Juni 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi

dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari pengalihan antar organisasi perangkat daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 46**

9) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp396.009.399,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp396.009.399,00 yaitu sebagai berikut:

- Alat Rumah Tangga Lain-lain sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp2.450.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain (gambar presiden) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp450.000,00
- Amplifier sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.000.000,00
- Focusing Screen/Layar LCD Projector sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp20.500.000,00
- Kipas Angin sebanyak 12 (dua belas) unit dengan total nilai Rp15.678.000,00
- Kit Olahraga / Atletik sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.000.000,00
- Kursi Putar sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.500.000,00
- LCD Projector/Infocus sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan total nilai Rp102.000.000,00
- Lemari Besi/Metal sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp19.466.000,00
- Loudspeaker sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp19.000.000,00
- Megaphone sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.000.000,00
- Meja 1/2 Biro sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan total nilai Rp28.785.399,00
- Meja Kerja Kayu sebanyak 14 (empat belas) unit dengan total nilai Rp27.830.000,00
- Meja Panjang sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp37.650.000,00
- Meja Sekolah sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan total nilai Rp14.599.000,00

- Papan Tulis sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp3.000.000,00
- Proyektion Polariscope sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.000.000,00
- Rak Besi sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp34.800.000,00
- Sound System sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp5.100.000,00
- Televisi sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp18.000.000,00
- White Board sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total nilai Rp30.201.000,00

10) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp822.760.000,00.
Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Perhubungan (konsolidasi)
Reklasifikasi ini sebanyak 302 (tiga ratus dua) unit dengan total nilai Rp792.760.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa rambu-rambu ke alat kantor dan rumah tangga yaitu lampu.

b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp30.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar kealat kantor dan rumah tangga yaitu *sound system.*

11) Lain-lain senilai Rp21.606.150,00
Penambahan ini untuk menampung penambahan maupun perpindahan akun di luar kondisi normal lainnya yaitu berupa reklasifikasi dari kelompok persediaan – barang yang akan diserahkan kepada masyarakat menjadi aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor rumah tangga pada Sekretariat Daerah (konsolidasi). Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp21.606.150,00 yaitu Meja Tambahan. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/222.A/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 17 Juni 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari lain-lain tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 53a.**

6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan total nilai Rp2.556.887.464,00.

    1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp2.467.581.000,00.
    Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
    Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

        a. Sekretariat DPRD
        Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp37.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *video switcher*.

        b. Sekretariat Daerah (konsolidasi)
        Terdapat 19 (sembilan belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp196.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *audio mixing console, chairman/ audio conference, microphone/ wireless mic dan power supply microphone*.

        c. Dinas Perhubungan (Konsolidasi)
        Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp5.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *telephone mobile.*

        d. Dinas Kesehatan (Konsolidasi)
        Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.760.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *solar cell.*

        e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
        Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp30.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *sound system*.

        f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
        Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp39.500.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *telephone mobile*.

        g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
        Terdapat 11 (sebelas) unit pengadaan dengan total nilai Rp102.900.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi

dan pemancar yaitu *chairman/audio conference* dan *power supply microphone*.

h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp4.107.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *microphone/wireless mic*.

i. Dinas Lingkungan Hidup
Terdapat 7 (tujuh) unit pengadaan dengan total nilai Rp110.499.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu camera conference, *camera digital*, kamera udara dan tripod camera.

j. Satuan Polisi Pamong Praja
Terdapat 11 (sebelas) unit pengadaan dengan total nilai Rp49.800.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst) dan *handy talky (HT)*.

k. Dinas Komunikasi dan Informatika
Terdapat 5 (lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp117.050.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitualat studio lainnya, camera film, kamera udara dan lensa kamera.

l. Kecamatan Badau
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp15.725.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *camera digital*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp6.756.464,00
Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (konsolidasi) sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp6.756.464,00 berupa belanja barang dan jasa yaitu *solar cell.*

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja non modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 35.**

3) Aset tetap dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp9.700.000,00.
Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp9.700.000,00 berupa *audio amplifier, LCD monitor,* mesin barcode dan*microphone/wireless MIC.*

4) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp5.000.000,00
Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.000.000,00 ke alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *camera digital*.

5) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp67.850.000,00.
Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)
Reklasifikasi ini sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan total nilai Rp55.950.000,00 ke kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *microphone/wireless mic, camera digital, tripod camera, genset* dan mesin *barcode*.

b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp11.900.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *audio mixing console*.

7. Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan total nilai Rp2.116.452.786,00

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp2.103.102.786,00.
Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi)
Terdapat 49 (empat puluh sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp115.217.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan yaitu alat kesehatan umum lainnya dan tensimeter.

b. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
Terdapat 56 (lima puluh enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.987.885.786,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan yaitu *alat* kedokteran gigi lainnya (dst), alat kedokteran umum lainnya, *dental chair*, *dental ultra sonic*, *electro stimulation & analgesia*, *film viewer*, *infra red & ultraviolet*, *mayo table stand mobile*, *stainles steel*, *microscope*, *operating table* bedah, *quadricerps table*, *shoulder whell exercise*, spirometer (alat kedokteran bagian penyakit dalam), standar infus dan tang ektrasi (dewasa, anak).

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp13.350.000,00.
Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp13.350.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan yaitu operating table bedah.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja non modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 35.**

8. Alat Laboratorium dengan total nilai Rp735.381.000,00

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp525.450.000,00
Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Terdapat 48 (empat puluh delapan) unit pengadaan dengan total nilai Rp171.900.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu alat laboratorium aspal, cat dan kimia lainnya (dst), cetak kubus beton, *concreta mixer*/penumbuk beton, *concrete vibrator*, *digital analitical balance*, *drying oven*, *field scale*, *sieve shaker* (alat laboratorium oceanografi), *specify gravity balance system* dan timbangan elektronik.

b. Dinas Kesehatan (konsolidasi)
Terdapat 12 (dua belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp339.200.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu alat

laboratorium makanan lainnya (dst), alat laboratorium tekanan dan suhu lainnya (dst) dan *refrigerator/ freezer*.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp8.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu bangunan tempat bermain anak.

d. Dinas Perikanan
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp950.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu termometer standar.

e. Dinas Lingkungan Hidup
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp5.400.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst).

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN dengan total nilai Rp3.600.000,00
Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp3.600.000,00 telah sesuai pengadaan belanja barang dan jasa BOS APBN berupa alat laboratorium yaitu model torso mini dan alat peraga praktek sekolah lainnya lainnya (dst).

3) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp122.735.000,00.
Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp25.735.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukurke alat laboratorium yaitu *test press/strenght test* dan *saw machine for concret*.

b. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp82.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kedokteran ke alat laboratorium yaitu *microscope*.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)
Reklasifikasi ini sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp15.000.000,00 ke kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu model torso mini dan alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst).

4) Koreksi Kurang Catat (Tahun Sebelumnya) dengan total nilai Rp83.596.000,00
Hasil inventarisasi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) yang semula belum tercatat pada PAUD Percontohan sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dengan total nilai Rp83.596.000,00 berupa alat laboratorium yaitu alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst), berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Paud Percontohan Kabupaten Belitung hasil Hibah Bantuan Unit Gedung Baru termasuk Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Paud dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 000.2.5.3/2244/DISDIKBUD/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari Koreksi Kurang Catat (Tahun Sebelumnya) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 37.**

9. Pada tahun 2024, tidak terdapat penambahan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa alat persenjataan.

10. Komputer dengan total nilai Rp6.206.288.850,00

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp4.665.109.500,00
Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah (konsolidasi)
Terdapat 34 (tiga puluh empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp255.920.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *laptop* dan *printer* (peralatan personal komputer).

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terdapat 13 (tiga belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp127.168.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *hard disk, p.c unit, printer* (peralatan personal komputer) dan *tablet pc*.

c. Dinas Kesehatan (konsolidasi)
Terdapat 42 (empat puluh dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp403.210.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top*, modem, *p.c unit* dan *printer* (peralatan personal komputer).

d. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
Terdapat 63 (enam puluh tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp809.775.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top*, monitor, *p.c unit, printer* (peralatan personal komputer) dan *server*.

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)
Terdapat 23 (dua puluh tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp356.850.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top, p.c unit* dan *printer* (peralatan personal komputer).

f. Dinas Pemuda dan Olahraga
Terdapat 7 (tujuh) unit pengadaan dengan total nilai Rp45.200.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top, printer* dan *scanner*.

g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terdapat 14 (empat belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp136.820.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *external/ portable hardisk, laptop, p.c unit, printer* (peralatan personal komputer) dan *tablet pc.*

h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
Terdapat 9 (sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp91.605.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top, p.c unit, printer* (peralatan personal komputer) dan *tablet pc.*

i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terdapat 7 (tujuh) unit pengadaan dengan total nilai Rp169.800.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *external/ portable hardisk* dan *printer* (peralatan personal komputer).

j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terdapat 8 (delapan) unit pengadaan dengan total nilai Rp120.800.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu printer (peralatan personal komputer).

k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Terdapat 4 (empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp55.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di

kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit*, *lap top* dan *scanner* (peralatan personal komputer).

l. Dinas Perikanan
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp2.580.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *printer* (peralatan personal komputer).

m. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Terdapat 16 (enam belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp180.100.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit*, *lap top*, *printer* (peralatan personal komputer) dan *scanner* (peralatan personal komputer).

n. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Terdapat 7 (tujuh) unit pengadaan dengan total nilai Rp243.200.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top*, *printer* (peralatan personal komputer), *server* dan *tablet pc.*

o. Inspektorat
Terdapat 5 (lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp55.250.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *printer* (peralatan personal komputer), *scanner* (peralatan personal komputer) dan *tablet pc*.

p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terdapat 35 (tiga puluh lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp485.550.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *printer* (peralatan personal komputer), *lap top* dan *p.c unit*.

q. Dinas Lingkungan Hidup
Terdapat 11 (sebelas) unit pengadaan dengan total nilai Rp137.400.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top, printer* (peralatan personal komputer) dan *tablet pc*.

r. Dinas Pariwisata (konsolidasi)
Terdapat 7 (tujuh) unit pengadaan dengan total nilai Rp68.454.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top, p.c unit*, *printer* (peralatan personal komputer) dan *scanner* (peralatan personal komputer).

s. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Terdapat 4 (empat) unit pengadaan dengan total nilai Rp45.400.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di

kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top, p.c unit* dan *printer* (peralatan personal komputer).

t. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp32.900.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *p.c unit* dan *printer* (peralatan personal komputer).

u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Terdapat 29 (dua puluh sembilan) unit pengadaan dengan total nilai Rp487.160.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top* dan *scanner* (peralatan personal komputer).

v. Dinas Komunikasi dan Informatika
Terdapat 10 (sepuluh) unit pengadaan dengan total nilai Rp243.450.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top, p.c unit, printer* (peralatan personal komputer), *scanner* (peralatan personal komputer) dan *server*.

w. Kecamatan Tanjungpandan (konsolidasi)
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp14.800.000,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *printer* (peralatan personal komputer).

x. Kecamatan Badau
Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp25.650.000,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top, p.c unit* dan *scanner* (peralatan personal komputer).

y. Kecamatan Sijuk
Terdapat 5 (lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp9.967.500,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *printer* (peralatan personal komputer).

z. Kecamatan Membalong
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp16.950.000,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top*.

aa. Kecamatan Selat Nasik
Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp44.150.000,00 telah sesuai penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top* dan *printer*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp3.650.000,00.

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.650.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *server*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja non modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 35.**

3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp18.700.000,00.

Penambahan ini berasal dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Hibah ini berasal dari Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp18.700.000,00 berupa komputer yaitu P.C Unit dan Printer (Peralatan Personal Komputer).

4) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN dengan total nilai Rp6.000.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modaluntuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp6.000.000,00 berupa belanja barang dan jasa BOS APBN yaitu *wireless access point*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 38.**

5) Aset tetap dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp27.100.000,00.

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 7

(tujuh) unit senilai Rp27.100.000,00berupa belanja barang dan jasa BOP yaitu *printer* (peralatan personal komputer), *hard disk* dan *p.c unit*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 41.**

6) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp8.000.000,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 6 (satu) unit dengan total nilai Rp8.000.000,00 ke komputer yaitu peralatan personal komputer lainnya dan *router*.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari Reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 43.**

7) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp1.477.729.350,00.

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah (konsolidasi)
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.100.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *external/ portable hardisk*.

b. Dinas Kesehatan (konsolidasi)
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.700.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu monitor.

c. UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp15.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu rak server.

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).
Reklasifikasi ini sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) unit dengan total nilai Rp1.422.870.000,00ke kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *external/ portable hardisk*, *laptop*, line printer, *p.c unit*, *printer* (peralatan personal komputer), *router*, *scanner* (peralatan mini komputer), *scanner*

(peralatan personal komputer), *serial printer*, *server* dan *tablet pc*.

e. Dinas Pemuda dan Olah Raga
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp14.458.350,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *laptop*.

f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.600.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *external/ portable hardisk*.

g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp6.500.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *hard disk*.

h. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.801.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu monitor.

i. Kecamatan Membalong
Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp6.700.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *hard disk* dan monitor.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 44.**

11. Pada tahun 2024, tidak terdapat penambahan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi dan alat pengeboran.

12. Alat produksi, pengolahan dan pemurnian dengan total nilai Rp47.600.000,00

    1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp47.600.000,00.

    Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
    Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup.

    Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp47.600.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan dan pemurnian yaitu paket pengadaan sumur resapan.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

13. Pada tahun 2024, tidak terdapat penambahan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa alat bantu eksplorasi.

14. Alat Keselamatan Kerja dengan total nilai Rp115.345.000,00

    1) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp91.395.000,00. Penambahan ini berasal dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

       Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

       a. Satuan Polisi Pamong Praja.
          Hibah ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp36.395.000,00 berupa alat keselamatan kerja yaitu tenda. Hibah ini dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor: 000.3.3.2/2208/BAK dan Nomor: 900/012.1/ST-Barang/POL-PP/2024 tanggal 14 November 2024, yang diserahkan dan digunakan dibawah pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja.

       b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
          Hibah ini berasal dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai Rp55.000.000,00berupa alat keselamatan kerjayaitu tenda. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/241/KEP/BPKAD/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara atas Hibah dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor Roda Dua dan Tenda Pengungsi menjadi Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

       Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari pendapatan hibah tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 36.**

    2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp23.950.000,00.

       Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.
       Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 9 (sembilan) unit dengan

total nilai Rp23.950.000,00 ke kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat keselamatan kerja yaitu tandu dan tenda.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 44.**

15. Alat Peraga dengan total nilai Rp18.000.000,00
    1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp18.000.000,00
    Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
    Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp18.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat peraga yaitu alat laboratorium lainnya.

    Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

16. Peralatan Proses/ Produksi dengan total nilai Rp2.415.000,00
    1) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp2.415.000,00

    Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Perikanan.
    Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp2.415.000,00 telah sesuai penganggaran belanja barang dan jasa di kelompok peralatan dan mesin berupa peralatan proses/produksi yaitu aerator.

    Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja non modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 35.**

17. Rambu–Rambu dengan total nilai Rp1.190.910.000,00
    1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp1.190.910.000,00

    Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
    Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Perhubungan (konsolidasi) sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) unit pengadaan dengan total nilai Rp1.190.910.000,00.
    Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan. Sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp321.779.142,00 telah sesuai penganggaran di kelompok peralatan dan mesin berupa rambu–rambu yaitu rambu cermin, rambu jalan, rambu-rambu larangan, rambu-rambu peringatan, traffic light. Sedangkan 303 (tiga ratus tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp869.130.858,00 dilakukan

reklasifikasi dari kelompok peralatan dan mesin berupa rambu–rambu ke kelompok alat kantor dan rumah tangga sebanyak 302 (tiga ratus dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp792.760.000,00 yaitu lampu dan ke barang pakai habis sebanyak 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp76.370.858,00 yaitu pekerjaan pengecatan marka jalan dan pita pengadu.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

18. Peralatan Olahraga dengan total nilai Rp156.066.800,00

    1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp97.740.000,00

       Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.
       Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pemuda dan Olahraga.
       Terdapat 113 (seratus tiga belas) unit pengadaan dengan total nilai Rp97.740.000,00,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa peralatan olahraga yaitu matras, lempar lembing, tolak peluru dan star block.

       Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan olahraga dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 34.**

    2) Aset tetap peralatan dan mesin dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp6.200.000,00.

       Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

       Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp6.200.000,00 berupa keranjang bola/ring.

       Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan olahraga dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 41.**

    3) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp52.126.800,00

       Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk dalam kelompok aset tetap.
       Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

       Reklasifikasi ini sebanyak 11 (sebelas) unit dengan total nilai Rp52.126.800,00 kekelompok peralatan dan mesin berupa peralatan olahraga yaitu matras, alat tenis meja, alat basket, pull master, palang sejajar, peralatan olahraga lainnya (dst) dan keranjang bola/ring.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa peralatan olahraga dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 44.**

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakompatabel tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 90 Mutasi Perbedaan Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa peralatan dan mesin (LRA)	Rp 26.330.082.535,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	Rp 7.099.034.074,00
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dari Realisasi Belanja Modal	Rp 19.231.048.461,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp7.099.034.074,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas :

1. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp45.220.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).
2. Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp2.689.326.150,00 pada Dinas Kesehatan (Konsolidasi), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi), Dinas Perhubungan (Konsolidasi), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan Membalong, Sekretariat Daerah (Konsolidasi), dan UPT. RSUD dr. H. Marsidi Judono.
3. Reklasifikasi ke aset ekstra kompatabel senilai Rp417.881.150,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan (Konsolidasi), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pemuda Dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi), Dinas Perikanan, Kecamatan Membalong, dan Sekretariat Daerah (Konsolidasi).
4. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp72.625.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

5. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya senilai Rp3.742.511.916,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan (Konsolidasi), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata (Konsolidasi), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi), Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan (Konsolidasi), Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Tanjungpandan (Konsolidasi), Sekretariat Daerah (Konsolidasi) dan UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono.
6. Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp53.600.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) dan Dinas Lingkungan Hidup.
7. Lain-lain senilai Rp77.869.858,00 pada Dinas Pariwisata (Konsolidasi), Dinas Perhubungan (Konsolidasi), dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mutasi pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 senilai Rp9.175.097.933,21 dengan perincian sebagai berikut :

1. Alat Besar dengan total nilai Rp461.606.000,00
    1) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp22.866.000,00
    Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
    Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
    Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp22.866.000,00 berupa Pompa Air. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/123/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Nomor : 000.2.6.1/124/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tidak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.

    Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 46.**

    2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp50.000.000,00

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit dengan senilai Rp50.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat besar ke alat pertanian dan peternakan yaitu *Tractor Four Wheel* (dengan kelengkapannya).

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 48.**

3) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) dengan total nilai Rp388.740.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp388.740.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat besar yaitu *macadan roller/three wheel roler*.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 51.**

2) Alat Angkutan dengan total nilai Rp4.071.256.829,00

1) Penghapusan barang milik daerah tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tanpa lelang barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Mantan Wakil Bupati Belitung periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 atas nama Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si. berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/090/KEP/ BPKAD/2024 tanggal 20 Juni 2024 pada Sekretariat Daerah (Konsolidasi) berupa *Station Wagon* senilai Rp669.864.663,00.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas Penghapusan barang milik daerah tindak lanjut pemindahtanganan tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 45.**

2) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp578.110.000,00
Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada sebagai berikut :
a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi)

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp176.110.000,00 yaitu mini bus (penumpang 14 orang kebawah). Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/089.1/KEP/BPKAD/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung berupa Kendaraan Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna.

b. Sekretariat Daerah (konsolidasi)

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp402.000.000,00 yaitu *pick up*. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/089/KEP/BPKAD/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berupa Kendaraan Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengguna.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 46.**

3) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) dengan total nilai Rp2.823.282.166,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Reklasifikasi ini sebanyak 7 (tujuh) unit senilai Rp94.438.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp14.630.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu sepeda motor.

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Reklasifikasi ini sebanyak 6 (enam) unit senilai Rp90.049.700,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) dan sepeda motor.

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp174.452.000,00 dari kelompok

aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu mini bus (penumpang 14 orang kebawah).

e. Dinas Kesehatan (Konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 9 (sembilan) unit senilai Rp352.785.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu bus (penumpang 30 orang keatas) dan sepeda motor.

f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Reklasifikasi ini sebanyak 14 (empat belas) unit senilai Rp197.965.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) dan sepeda motor.

g. Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi ini sebanyak 5 (lima) unit senilai Rp189.398.600,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) dan sepeda motor.

h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Reklasifikasi ini sebanyak 9 (sembilan) unit senilai Rp88.020.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan yaitu alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) dan sepeda motor.

i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp14.560.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa sepeda motor.

j. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Reklasifikasi ini sebanyak 4 (empat) unit senilai Rp59.075.400,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa sepeda motor.

k. Dinas Perhubungan (Konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit senilai Rp426.040.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa bus (penumpang 30 orang keatas) dan sepeda motor.

l. Kecamatan Selat Nasik. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp25.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa pick up.

m. Kecamatan Sijuk. Reklasifikasi ini sebanyak 6 (enam) unit senilai Rp91.646.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa sepeda motor.

n. Kecamatan Tanjungpandan (Konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp11.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa sepeda motor.

o. Sekretariat Daerah (Konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 21 (dua puluh satu) unit senilai Rp915.518.666,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa bus (penumpang 30 orang keatas), micro bus (penumpang 15 s/d 29 orang), mini bus (penumpang 14 orang kebawah), sedan, dan sepeda motor.

p. UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono. Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit senilai Rp78.703.800,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) dan sepeda motor.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 51.**

3. Alat Bengkel dan Alat Ukur dengan total nilai Rp25.735.000,00**.**

   1) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp25.735.000,00**.**

      Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

      Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp25.735.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur ke alat laboratorium yaitu *Test Press/Strenght Test* dan *Saw Machine For Concret.*

      Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 48.**

4. Alat pertanian dan peternakan dengan total nilai Rp82.134.000,00**.**

   1) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) dengan total nilai Rp82.134.000,00**.**

      Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

      Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp82.134.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat pertanian dan peternakan yaitu *container.*

      Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 51.**

5. Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan total nilai Rp3.090.469.416,00

   1) Penghapusan aset tetap dengan total nilai Rp177.649.000,00

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukukan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor : 188.46/097/KEP/BPKAD/ 2024 tanggal 10 Juni 2024. Penghapusan aset tetap terdapat pada Sekretariat Daerah (Konsolidasi) sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dengan total nilai Rp177.649.000,00 dengan rincian yaitu:

a. Nama barang alat dapur lainnya sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.025.000,00.
b. Nama barang alat hiasan sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp4.500.000,00.
c. Nama barang alat pemanas ruangan sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp12.300.000,00.
d. Nama barang alat rumah tangga lain-lain sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp108.225.000,00.
e. Nama barang dispenser sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp9.700.000,00.
f. Nama barang kipas angin sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp3.400.000,00.
g. Nama barang kompor gas (alat dapur) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.650.000,00.
h. Nama barang lemari es sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.450.000,00.
i. Nama barang mesin cuci sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.800.000,00.
j. Nama barang rak besi sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.850.000,00.
k. Nama barang televisi sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp18.549.000,00.
l. Nama barang tempat tidur besi sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.200.000,00.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas penghapusan aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 45.**

2) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp433.098.116,00

Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut :

a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dengan total nilai Rp394.139.716,00 berupa Penangkal Petir, Papan Nama Instansi, Meja Resepsionis, Amplifier, Loudspeaker, Tangga, Tangki Air, Tombol Kebakaran/Alarm, Partisi, Alat Hiasan dan Lampu. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/123/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Nomor : 000.2.6.1/124/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tidak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.

b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Terdapat 6 (satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp38.958.400,00 yaitu alat rumah tangga lain-lain , *cctv - camera control television system* , papan visual/papan nama dan teralis. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/128/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas pengalihan antar organisasi perangkat daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 46.**

3) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp45.220.000,00

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut :

a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 3 (tiga) unit senilai Rp26.470.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke kelompok bahan perpustakaan yaitu peta digital.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) sebanyak 12 (dua belas) unit senilai Rp18.750.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke kelompok bangunan air yaitu bak penyimpanan/tower air baku dan ke kelompok barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yaitu alat kesenian lain-lain, alat musik modern/band, alat musik tradisional/daerah.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 47.**

4) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp1.670.831.150,00.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan (Konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp26.575.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat besar yaitu pompa air dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu monitor.

b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp5.801.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu monitor.

c. Dinas Pemuda dan Olahraga. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp14.458.350,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *lap top.*

d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp6.500.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *hard disk.*

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) unit dengan total

nilai Rp1.579.196.800,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke kelompok :

- Alat besar sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp8.300.000,00 yaitu pompa air dan tandu lipat
- Alat bengkel dan alat ukur sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp1.000.000,00 yaitu ukuran tinggi orang
- Alat studio, komunikasi dan pemancar sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan total nilai Rp55.950.000,00 yaitu *camera digital*, genset, mesin barcode, *microphone/wireless mic*, dan tripod camera
- Alat laboratorium sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp15.000.000,00 yaitu alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst) dan model torso mini.
- Komputer sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) unit dengan total nilai Rp1.422.870.000,00 yaitu *external/ portable hardisk, laptop, line printer, p.c unit, printer* (peralatan personal komputer), scanner (peralatan mini komputer), *scanner* (peralatan personal komputer), serial printer, server, dan tablet pc.
- Alat Keselamatan Kerja sebanyak 9 (sembilan) unit senilai Rp23.950.000,00 yaitu tandu dan tenda.
- Peralatan Olahraga sebanyak 11 (sebelas) unit dengan total nilai Rp52.126.800,00 yaitu alat basket, alat tenis meja, keranjang bola/ring, matras, palang sejajar, peralatan olahraga lainnya (dst), dan pull master

f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp14.500.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu *audio mixing console* dan dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *external/ portable hardisk.*

g. Kecamatan Membalong. Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp6.700.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *hard disk* dan monitor.

h. Sekretariat Daerah (Konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.100.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu *external/ portable hardisk.*

i. UPT. RSUD dr. H. Marsidi Judono. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp15.000.000,00 dari kelompok aset tetap

peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga ke komputer yaitu rak server.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 48.**

5) Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel dengan total nilai Rp333.431.150,00

Pengurangan ini disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut tidak memenuhi kriteria atau dibawah batasan nilai kapitalisasi. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Reklasifikasi ini sebanyak 11 (sebelas) unit dengan total nilai Rp8.650.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu kursi putar dan *microphone table stand* ke kelompok aset ekstrakomptabel.

b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 14 (empat belas) unit dengan total nilai Rp9.870.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *cctv - camera control television system,* kursi putar, dan *unit power supply* ke kelompok aset ekstrakomptabel.

c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp898.950,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *vertikal blind* ke kelompok aset ekstrakomptabel.

d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Reklasifikasi ini sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp4.250.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu sofa ke kelompok aset ekstrakomptabel.

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) unit dengan total nilai Rp292.862.200,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu alat pemadam/portable, alat pemotong kertas, alat rumah tangga lain-lain, bangku sekolah, *cctv - camera control television system*, dispenser, *focusing screen/layar lcd*

projector, *heater* (alat rumah tangga lainnya (home use), kipas angin, kompor gas (alat dapur), kursi besi/metal, kursi kayu, kursi putar, kursi rapat, layar proyektor, lemari display, *loudspeaker*, megaphone, meja bundar, meja komputer, meja sekolah, *microphone floor stand*, papan tulis, pompa air, *proyector spider bracket*, rak kayu, *router, sound system*, speaker komputer, tablet pc, tensimeter, teralis, timbangan badan (alat kesehatan umum lain), timbangan barang, timbangan orang, tripod camera, *uninterruptible power supply (ups), unit power supply*, dan *white board* ke kelompok aset ekstrakomptabel.

f. Kecamatan Membalong

Reklasifikasi ini sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit dengan total nilai Rp14.960.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *vertikal blind* ke kelompok aset ekstrakomptabel.

g. Sekretariat Daerah (Konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp1.940.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu kompor gas (alat dapur) ke kelompok aset ekstrakomptabel.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 49.**

6) Reklasifikasi ke barang dan jasa dengan total nilai Rp72.625.000,00.

Pengurangan ini akibat perpindahan ketidaksesuaian penganggaran awal untuk menghasilkan aset tetap. Penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Setelah dilakukan verifikasi pengadaan tersebut di reklasifikasi ke barang dan jasa.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 200 (dua ratus) unit dengan total nilai Rp72.625.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu alat rumah tangga lain-lain, alat rumah tangga lain-lain (bola kaki), alat rumah tangga lain-lain (bola volly), alat rumah tangga lain-lain (gambar presiden), alat rumah tangga lain-lain (hardisk eksternal), alat rumah tangga lain-lain (timbangan badan), kit olahraga / atletik, dan timbangan barang.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke barang dan jasa tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 50.**

7) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) dengan total nilai Rp350.695.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Reklasifikasi ini sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dengan total nilai Rp123.585.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu papan visual/papan nama.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp49.970.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu alat rumah tangga lain-lain.

c. Dinas Pariwisata (Konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp99.910.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu alat hiasan.

d. Dinas Pemuda dan Olahraga

Reklasifikasi ini sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan total nilai Rp63.270.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu a.c. split, a.c. window, dispenser, dan mesin pemotong rumput.

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Reklasifikasi ini sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp13.960.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu alat rumah tangga lain-lain, kursi besi/metal, kursi tamu, papan visual/papan nama dan televisi.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 51.**

8) Reklasifikasi ke persediaan dengan total nilai Rp6.000.000,00

Pengurangan ini akibat perpindahan ketidaksesuaian penganggaran awal untuk menghasilkan aset tetap. Penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Setelah dilakukan verifikasi pengadaan tersebut di reklasifikasi ke persediaan.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp6.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu mesin absensi.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke persediaan tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 52.**

9) Lain-lain dengan total nilai Rp920.000,00.

Pengurangan ini akibat perpindahan ketidaksesuaian penganggaran awal untuk menghasilkan aset tetap. Penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Setelah dilakukan verifikasi pengadaan menjadi barang pakai habis.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp920.000,00 yaitu barang pakai habis/ pemeliharaan/ tabung gas

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas lain-lain tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 53.**

6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dengan total nilai Rp30.000.000,00

1) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp30.000.000,00.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.
Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp30.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga yaitu *sound system*.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 48.**

7. Alat Kedokteran dan Kesehatan dengan total nilai Rp202.514.250,00

1) Penghapusan aset tetap dengan total nilai Rp110.014.250,00

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukukan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya. Penghapusan aset tetap terdapat pada Dinas Kesehatan (konsolidasi) sebanyak 54 (lima puluh

empat) unit dengan total nilai Rp110.014.250,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan yaitu tensimeter.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas penghapusan aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 45.**

2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp82.000.000,00.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.
Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada UPT. RSUD dr. H. Marsidi Judono. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp82.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan ke alat laboratorium yaitu *microscope*.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 44.**

3) Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel dengan total nilai Rp10.500.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut tidak memenuhi kriteria atau dibawah batasan nilai kapitalisasi.
Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Kesehatan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total nilai Rp10.500.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan yaitu tensimeter ke kelompok aset ekstrakomptabel.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 49.**

8. Alat Laboratorium dengan total nilai Rp28.950.000,00

1) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp20.000.000,00.

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.
Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp20.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat laboratorium ke alat besar yaitu *concrete vibrator.*

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 44.**

2) Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel dengan total nilai Rp8.950.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut tidak memenuhi kriteria atau dibawah batasan nilai kapitalisasi.
Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp8.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu bangunan tempat bermain anak ke kelompok aset ekstrakomptabel..

b. Dinas Perikanan. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit dengan senilai Rp950.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yaitu termometer standar ke kelompok aset ekstrakomptabel.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 49.**

9. Pada tahun 2024 tidak terdapat pengurangan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa Alat Persenjataan

10. Komputer dengan total nilai Rp98.239.750,00

1) Reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) dengan total nilai Rp97.660.750,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat padan Dinas Pemuda dan Olahraga. Reklasifikasi ini sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan total nilai Rp97.660.750,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer yaitu *lap top*, *note book*, p.c unit, dan printer (peralatan personal komputer).

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset lainnya (hilang/ rusak berat) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 51.**

2) Lain-lain dengan total nilai Rp579.000,00.
Pengurangan ini akibat perpindahan ketidaksesuaian penganggaran awal untuk menghasilkan aset tetap. Penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah

tangga. Setelah dilakukan verifikasi pengadaan menjadi barang pakai habis.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Pariwisata (Konsolidasi) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp579.000,00 yaitu barang pakai habis/ pemeliharaan/ modem (orbit / star n1).

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas lain-lain tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 51.**

11. Pada tahun 2024 tidak terdapat pengurangan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi dan alat pengeboran.

12. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dengan total nilai Rp47.600.000,00

    1) Reklasifikasi ke persediaan dengan total nilai Rp47.600.000,00

       Pengurangan ini akibat perpindahan ketidaksesuaian penganggaran awal untuk menghasilkan aset tetap. Penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan dan pemurnian. Setelah dilakukan verifikasi pengadaan tersebut di reklasifikasi ke persediaan.

       Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp47.600.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan dan pemurnian yaitu paket pengadaan sumur resapan.

       Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke persediaan tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 52.**

13. Pada tahun 2024 tidak terdapat pengurangan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa alat bantu eksplorasi dan alat keselamatan kerja.

14. Alat Peraga dengan total nilai Rp18.000.000,00

    1) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp18.000.000,00.

       Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.

       Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Reklasifikasi ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp18.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat peraga ke alat pertanian dan peternakan yaitu alat laboratorium lainnya.

       Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 48.**

15. Pada tahun 2024 tidak terdapat pengurangan pada kelompok aset peralatan dan mesin berupa Peralatan Proses/Produksi

16. Rambu - Rambu dengan total nilai Rp953.592.688,21

    1) Penghapusan aset tetap dengan total nilai Rp84.461.830,21

       Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut pemusnahan barang milik daerah. Penghapusan bertujuan untuk menghapusbukukan barang dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya. Penghapusan aset tetap terdapat pada Dinas Perhubungan (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp84.461.830,21 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa rambu-rambu yaitu rambu tidak bersuar lainnya (dst).

       Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas Penghapusan aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 45.**

    2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp792.760.000,00.

       Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal, setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan direklasifikasi berdasarkan sub kelompok barang yang sesuai.
       Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Perhubungan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 302 (tiga ratus dua) unit dengan total nilai Rp792.760.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa rambu-rambu ke alat kantor dan rumah tangga yaitu lampu.

       Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 48.**

    3) Lain-lain dengan total nilai Rp76.370.858,00.

       Pengurangan ini akibat perpindahan ketidaksesuaian penganggaran awal untuk menghasilkan aset tetap. Penganggaran awal belanja modal di kelompok peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga. Setelah dilakukan verifikasi pengadaan menjadi barang pakai habis.
       Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Perhubungan (Konsolidasi) sebanyak 1 (satu) paket senilai Rp76.370.858,00 yaitu barang pakai habis/ pemeliharaan/ pekerjaan pengecatan marka jalan dan pita pengadu.

       Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas lain-lain tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 53.**

17. Peralatan Olah Raga dengan total nilai Rp65.000.000,00

1) Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel dengan total nilai Rp65.000.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut tidak memenuhi kriteria atau dibawah batasan nilai kapitalisasi.
Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Reklasifikasi ini sebanyak 100 (seratus) unit dengan total nilai Rp65.000.000,00 dari kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa peralatan olahraga yaitu matras ke kelompok aset ekstrakomptabel.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin atas reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 49.**

Beberapa perubahan data aset tetap berupa peralatan dan mesin yang terjadi untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penghapusan aset tetap kelompok peralatan dan mesin berupa Barang Inventarisasi sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan. Pemerintah Kabupaten Belitung bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang melaksanakan penjualan dimuka umum secara online. Pelaksanaan lelang ditetapkan dengan Risalah Lelang 87/0404/2024-01 tanggal 22 Februari 2024. Untuk menindaklanjuti atas pelaksanan lelang tersebut, dilakukan penghapusan barang inventaris yang telah terjual pada saat pelaksanaan lelang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/097/KEP/BPKAD/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan Berupa Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Belitung pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung tanggal 10 Juni 2024.

   Adapun jumlah barang inventaris yang dihapuskan adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) unit barang merk dan jenis dengan total nilai Rp291.683.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdapat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

2. Penghapusan aset tetap kelompok peralatan dan mesin berupa Kendaraan Dinas Operasional sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan. Pemerintah Kabupaten Belitung bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang melaksanakan penjualan dimuka umum secara online. Pelaksanaan lelang ditetapkan dengan Risalah Lelang 88/0404/2024-01 tanggal 22 Februari 2024. Untuk menindaklanjuti atas pelaksanan lelang tersebut, dilakukan penghapusan kendaraan yang telah terjual pada saat pelaksanaan lelang

berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/096/KEP/BPKAD/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung tanggal 10 Juni 2024.

Adapun jumlah barang inventaris yang dihapuskan adalah sebanyak 17 (tujuh belas) unit barang merk dan jenis dengan total nilai Rp1.822.269.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.

3. Penghapusan aset tetap kelompok peralatan dan mesin berupa Barang Inventaris sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan. Pemerintah Kabupaten Belitung bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang melaksanakan penjualan dimuka umum secara online. Pelaksanaan lelang ditetapkan dengan Risalah Lelang 374/0404/2024-01 tanggal 21 November 2024. Untuk menindaklanjuti atas pelaksanan lelang tersebut, dilakukan penghapusan kendaraan yang telah terjual pada saat pelaksanaan lelang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan Kelompok Barang Peralatan dan Mesin Berupa Barang Inventaris dan Alat Besar Milik Pemerintah Kabupaten Belitung tanggal 29 November 2024.

   Adapun jumlah barang inventaris yang dihapuskan adalah sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) unit barang merk dan jenis dengan total nilai Rp1.828.170.400,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Belitung.

4. Penghapusan aset tetap kelompok peralatan dan mesin berupa Kendaraan Dinas Operasional sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan. Pemerintah Kabupaten Belitung bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang melaksanakan penjualan dimuka umum secara online. Pelaksanaan lelang ditetapkan dengan Risalah Lelang 375/0404/2024-01 tanggal 21 November 2024. Untuk menindaklanjuti atas pelaksanan lelang tersebut, dilakukan penghapusan kendaraan yang telah terjual pada saat pelaksanaan lelang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/115/KEP/BPKAD/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan Berupa Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Belitung tanggal 29 November 2024.

   Adapun jumlah barang inventaris yang dihapuskan adalah sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit barang merk dan jenis dengan total nilai

Rp2.812.332.166,00 (dua milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Belitung.

5. Penghapusan aset tetap kelompok peralatan dan mesin berupa Kendaraan Dinas Operasional sebagai tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tanpa lelang. Pelaksanaan penjualan tanpa lelang ditetapkan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 000.2.6.1/577/BPKAD/2024 tanggal 5 Juni 2024 Untuk menindaklanjuti atas pelaksanan penjualan tanpa lelang tersebut, dilakukan penghapusan kendaraan yang telah terjual berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/090/KEP/BPKAD/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Dalam Bentuk Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Mantan Wakil Bupati Belitung Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 atas nama Isyak Meirobie, S.Sn. M.Si tanggal 20 Juni 2024.

   Adapun jumlah barang inventaris yang dihapuskan adalah sebanyak 1 (satu) unit barang merk dan jenis senilai Rp669.864.663,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdapat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024, yaitu:

1. Data kendaraan yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai per 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit mobil berbagai merk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada berbagai instansi seperti Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjungpandan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung, Komando Operasi TNI Angkatan Udara H.AS. Hanandjoeddin, Komandan Distrik Militer 0414/ Belitung, Detasemen Polisi Militer II/4 Subdenpom Persiapan Belitung, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, Pengadilan Agama Tanjungpandan, Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kejaksaan Negeri Belitung, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dan Kepolisian Resor Belitung.

   Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) unit peralatan dan mesin dengan total nilai Rp2.744.530.281,00 berupa Ultra violet viewing box and Lampu Ultra violet, berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 543.2/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/895/BPKAD tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor:

513.3/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/896/BPKAD tanggal 12 Juli 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.

5.3.1.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, jasa perencanaan, jasa pengawasan, biaya pengurusan IMB, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan, biaya notaris, dan pajak

Aset tetap berupa gedung dan bangunan terdiri dari beberapa jenis kelompok barang seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti.

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah senilai Rp10.000.000,00.

Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp785.386.635.067,07 mengalami kenaikan senilai Rp23.349.756.291,96 atau meningkat 3,06% dibandingkan saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 (*audited*) senilai Rp762.036.878.775,11.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2024 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan, dengan perhitungan:

Tabel 91 Mutasi Gedung dan Bangunan 2024

Uraian		Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa gedung dan bangunan per 1 Januari 2024	Rp	762.036.878.775,11
- Mutasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan tahun 2024:	Rp	35.556.269.688.96
- Mutasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan tahun 2024:	Rp	(12.206.513.397,00)
- Saldo akhir aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2024	Rp	785.386.635.067.07

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 54 – Lampiran 70a.**

Aset tetap berupa gedung dan bangunan terdiri dari beberapa jenis seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti**.** Berikut rincian atas mutasi penambahan gedung dan bangunan yang terjadi pada tahun 2024 senilai Rp35.556.269.688,96 berdasarkan kelompok aset tetap sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung senilai Rp29.820.896.981,54

   Untuk penambahan bangunan gedung terdiri dari:

   1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp13.081.312.292,62

      Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dengan total nolai Rp6.135.285.292,62 dan belanja modal gedung dan bangunan BLUD senilai Rp6.946.027.000,00.

      Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

      a. Dinas Perhubungan (konsolidasi).

         Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp99.600.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.

      b. Dinas Kesehatan (konsolidsi).

         Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp563.564.429,43 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung instalasi lain-lain.

      c. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono.

         Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp6.946.027.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor permanen.

      d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

         Terdapat 901 (sembilan ratus satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp5.372.366.234,00 penganggaran awal belanja modal di kelompok barang gedung dan bangunan berupa bangunan gedung laboratorium permanen, bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan gedung perpustakaan permanen dan bangunan tempat parkir.

      e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

         Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp99.754.629,19 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok

gedung dan bangunan berupa bangunan gudang terbuka semi permanen.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 56.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp2.220.849.957,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Perhubungan (konsolidasi).
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp39.798.000,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan halte/ shelter.

b. Dinas Kesehatan (konsolidasi).
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp451.294.342,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan gedung instalasi lain-lain dan bangunan klinik/ puskesmas. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.

c. UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono.
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) unit dengan senilai Rp304.434.750,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan gedung kantor permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan total nilai Rp1.315.765.865,00. Pengadaan bangunan gedung berupa bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan gedung laboratorium permanen, rumah negara golong II tipe A permanen, bangunan gedung perpustakaan permanen, bangunan rumah sakit lain-lain, bangunan tempat parkir dan bangunan tempat pertemuan lain-lain (dst). Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk

e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp109.557.000,00 pengadaan bangunan gedung berupa bangunan gedung kantor permanen. Nilai penambahan tersebut dikapitalisasi ke nilai induk.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari belanja non modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 57.**

3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp1.729.572.143,92.

Penambahan asat tetap ini bersumber dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

a. Hibah ini berasal dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp1.609.572.143,92 berupa bangunan gedung yaitu bangunan gedung pendidikan permanen, gedung garasi/pool permanen dan bangunan gedung perpustakaan permanen. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan status penggunaan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/550/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Dasar Negeri 3 Selat Nasik menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
b. Hibah ini berasal dari Komite Sekolah SD Negeri 47 Tanjungpandan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp120.000.000,00 berupa bangunan gedung yaitu bangunan gedung tempat ibadah permanen. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 001/KOMITE SDN47TP/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari hibah tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 58.**

4) Aset tetap dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan total nilai Rp15.420.000,00.

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah dana BOP ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp15.420.000,00 berupa bangunan gedung tempat kerja lainnya.

5) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp10.393.298.208,00

Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

   Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp7.057.479.994,00 yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/168/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 April 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

b. Dinas Lingkungan Hidup.

   Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp833.856.231,00 yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Kantor Lain-lain dan Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst). Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/555/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

c. Kecamatan Membalong.

   Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp2.501.961.983,00 yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/222/KEP/BPKAD/2024 tanggal 17 Juni 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari Klasifikasi Pengalihan Antar OPD tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 66.**

6) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp386.840.725,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).
   Reklasifikasi ini sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan total nilai Rp188.819.125,00 ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan gedung laboratorium permanen, bangunan gedung perpustakaan permanen, bangunan rumah sakit lain-lain, bangunan tempat parkir dan bangunan tempat pertemuan lain-lain (dst).
b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.
   Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp99.797.100,00 dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor permanen.
c. Kecamatan Membalong.
   Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp98.224.500,00 dari kelompok aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor permanen.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 61.**

7) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp306.885.000,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp306.885.000,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa tugu titik kontrol/pasti.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 62.**

8) Reklasifikasi dari aset ekstrakomptabel ke aset intrakomptabel dengan total nilai Rp3.780.000,00

Penambahan ini berasal dari penggabungan nilai yang semula di bawah batasan kapitalisasi, setelah dilakukan renovasi atau

peningkatan sehingga nilai menjadi diatas batasan kapitalisasi. Aset tersebut disajikan menjadi kelompok aset intrakomptabel.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp3.780.000,00 dari kelompok aset ekstrakomptabel ke kelompok aset bangunan gedung berupa gedung garasi/pool permanen.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari aset ekstrakomptabel ke aset intrakomptabel tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 63**

9) Reklasifikasi dari persediaan ke aset intrakomptabel dengan total nilai Rp303.174.700,00.

Penambahan ini berasal dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berupa rehabilitasi Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen Danlanud H.A.S. Hanandjoedin. Atas aset tersebut merupakan pengalihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 030/1405/DPUPR.IV/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Sekretariat Daerah (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp303.174.700,00 dari kelompok persediaan ke kelompok aset tetap bangunan gedung berupa Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen Danlanud H.A.S. Hanandjoedin.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari asetekstrakomptabel ke asetintrakomptabel tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 63a.**

10) Koreksi Kurang Catat (Tahun Sebelumnya) dengan total nilai Rp975.861.000,00

Penambahan ini berasal dari OPD yaitu sebagai berikut:

a. Hasil inventarisasi Dinas Kesehatan (konsolidasi) yang semula belum tercatat pada UPT Puskesmas Tanjungpandan senilai Rp79.008.000,00 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/205/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 Juni 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungpandan.
b. Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) yang semula belum tercatat pada PAUD Percontohan sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp896.853.000,00 berupa bangunan gedung yaitu bangunan gedung pertemuan permanen, bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan tempat pendidikan lain-lain (dst) dan bangunan gedung perpustakaan permanen, berdasarkan

Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Paud Percontohan Kabupaten Belitung hasil Hibah Bantuan Unit Gedung Baru termasuk Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Paud dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 000.2.5.3/2244/DISDIKBUD/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 64.**

11) Lain-lain senilai Rp403.902.955,00

Penambahan ini untuk menampung penambahan maupun perpindahan akun di luar kondisi normal lainnya yaitu berupa reklasifikasi dari kelompok persediaan – barang yang akan diserahkan kepada masyarakat menjadi aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung pada Sekretariat Daerah (konsolidasi). Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp403.902.955,00 yaitu Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/222.A/KEP/BPKAD/2024 tanggal 17 Juni 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan dari lain-lain tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 70a.**

2. Monumen dengan total nilai Rp4.211.397.100,00

Untuk penambahan Monumen terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp3.971.626.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp3.971.626.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok monumen berupa monumen/bangunan bersejarah lainnya.

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp239.771.100,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp239.771.100,00 yaitu pengadaan monumen berupa monomen/bangunan bersejarah lainnya.

3. Untuk kelompok aset gedung dan bangunan berupa bangunan menara tidak terdapat penambahan pada tahun 2024.

4. Tugu Titik Kontrol/ Pasti dengan total nilai Rp1.523.975.607,42
   Untuk penambahan Tugu Titik Kontrol/Pasti terdiri dari:
   1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp1.365.338.746,00
      Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:
      a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
         Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp319.495.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok tugu titik kontrol/ pasti berupa pagar permanen.
      b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).
         Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp571.625.005,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok tugu titik kontrol/ pasti berupa pagar permanen.
      c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
         Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp306.885.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok tugu titik kontrol/ pasti berupa Bangunan Gedung Kantor Lain-lain.
      d. Dinas Komunikasi dan Informatika.
         Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp167.333.741,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok tugu titik kontrol/ pasti berupa Pagar Permanen.
   2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp7.956.400,00
      Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.
      Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) yaitu sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp7.956.400,00 yaitu pengadaan tugu titik kontrol/ pasti berupa pagar permanen.
   3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp140.740.461,42

Penambahan asat tetap ini bersumber dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Hibah ini berasal dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp140.740.461,42 berupa Tugu Titik Kontrol/Pasti yaitu pagar permanen. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan status penggunaan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/550/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Dasar Negeri 3 Selat Nasik menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

4) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp9.940.000,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi).

Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp9.940.000,00 ke kelompok aset tetap gedung dan bangunan berupa pagar permanen.

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakomptabel tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	**Jumlah (Rp)**
- Realisasi belanja modal berupa gedung dan bangunan (LRA)	18.418.277.038,62
- Selisih Perbedaan Pengakuan	1.734.207.189,00
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa gedung dan bangunan dari Realisasi Belanja Modal	16.684.069.849,62

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp1.734.207.189,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas:

1. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap senilai Rp212.959.399,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).
2. Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap senilai Rp306.885.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
3. Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel senilai Rp520.876.390,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).
4. Lain-lain (reklasifikasi ke barang pakai habis dan beban pemeliharaan) senilai Rp693.486.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang terjadi selama tahun 2024 adalah senilai Rp12.206.513.397,00 sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung dengan total nilai Rp11.899.628.397,00
   Untuk pengurangan bangunan gedung terdiri dari:

   1) Pemindahtanganan dalam bentuk hibah dengan tidak lanjut penghapusan dengan total nilai Rp79.008.000,00
      Pengurangan ini berasal dari tindak lanjut dari pemindahtanganan dalam bentuk hibah/ atau penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada pemerintah pusat/ pemerintah provinsi/ pemerintah desa serta instansi lainnya.
      Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (konsolidasi).
      Hibah ini kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp79.008.000,00 yaitu bangunan gedung berupa Bangunan Klinik/Puskesmas. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188.46/952.1/KEP/BPKAD/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung dalam bentuk Hibah berupa Tanah dan Bangunan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI).

      Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan hibah keluar tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 65.**

   2) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp10.393.298.208,00. Pengurangan atas pengalihan antar OPD ini tidak mengurangi nilai total aset tetap berupa

bangunan gedung secara keseluruhan. Pengurangan ini untuk membebaskan tanggung jawab pengguna barang atas pencatatan aset tetap berupa bangunan gedung yang semula menjadi kewenangannya akibat dari penegasan hak atas barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
   Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp9.559.441.977,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/123/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Nomor : 000.2.6.1/124/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.
2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.
   Terdapat 3 (tiga) unit pengadaan dengan total nilai Rp833.856.231,00 yaitu bangunan gedung. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/128/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.

3) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp212.959.399,00

Pengurangan ini akibat reklasifikasi antar kelompok aset tetap dilakukan karena aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan (aset tetap definitif) dimana aset tersebut telah selesai dan memberikan manfaat/ jasa sesuai tujuan perolehannya.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 100 (seratus) unit senilai Rp212.959.399,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan ke kelompok peralatan dan mesin sub alat kantor dan rumah tangga yaitu alat rumah tangga lain-lain, kipas angin,

kursi putar, lemari besi/metal, meja 1/2 biro, meja kerja kayu, meja panjang, meja sekolah, rak besi dan white board.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan antar kelompok tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 67.**

4) Reklasifikasi ke aset ekstra kompatabel senilai Rp520.876.390,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya reklasifikasi bangunan gedung ke aset ekstra kompatabel.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) unit dengan total nilai Rp520.876.390,00 dari kelompok aset tetap gedung dan bangunan menjadi aset ekstrakompatabel.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan ke aset ekstrakompatabel tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 69.**

5) Reklasifikasi ke Persediaan dengan total nilai Rp693.486.400,00

Pengurangan ini untuk menampung perpindahan barang yang disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap ataupun aset lancar.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Terdapat 1 (satu) unit senilai Rp693.486.400,00 yang di reklasifikasi dari kelompok aset bangunan gedung ke kelompok persediaan.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan ke persediaan tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 70.**

2. Untuk kelompok aset gedung dan bangunan berupa monumen dan bangunan menara tidak terdapat pengurangan pada tahun 2024.

3. Tugu Titik Kontrol/ Pasti dengan total nilai Rp306.885.000,00
Untuk pengurangan tugu titik kontrol/ pasti terdiri dari:

1) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp306.885.000,00

Pengurangan ini akibat reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dari kelompok gedung dan bangunan sub tugu titik kontrol/pasti ke sub bangunan gedung.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sejumlah 1 (satu) unit senilai Rp306.885.000,00

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 68.**

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024, yaitu:

1. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Belitung, namun berdiri diatas tanah milik pihak lain, yaitu:
   1) Bangunan Polindes di Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan (kode barang 03.11.01.06.10.0001) seluas 30 m^2 pengadaan tahun 1995 senilai Rp16.500.000,00. Bangunan berdiri diatas tanah milik Pemerintah Desa Dukong dan proses untuk penghibahan terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukumnya.

      Telah dilakukan survei lapangan pada tanggal 17 April 2024. Setelah dilakukan verifikasi pencatatan dan kondisi fisik dilapangan, bangunan yang semula diperuntukan untuk Polindes desa Dukong telah digunakan menjadi Rumah Dinas Bidan desa Dukong yang tidak difungsikan lagi dan berdiri di atas tanah desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan. Pemerintah desa Dukong berencana akan memanfaatkan gedung tersebut untuk mendukung Program Desa Bersih Narkoba bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menindaklanjuti pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan.
   2) Bangunan Polindes Sungai Samak berdiri di atas Kawasan Hutan Lindung Pantai. Untuk menyelesaikan status hukum atas tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung telah berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XIII Pangkalpinang, Jalan Raya Pasir Padi, Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung terkait objek yang diusulkan untuk dilakukan pensertifikatan masuk dalam program lahan-lahan yang dilepaskan dari kawasan hutan. Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, telah melaksanakan inventarisasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang telah dituangkan ke dalam berita acara untuk selanjutnya akan dilakukan pembuatan alas hak dan ditingkatkan menjadi sertipikat hak pakai selama dipergunakan. Inventarisasi aset tanah ini merupakan langkah dan upaya pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai tindaklanjut untuk pensertifikatan aset tanah yang telah dipergunakan sebagai sarana dan prasarana seperti bangunan sekolah, rumah dinas dan bangunan fasilitas

kesehatan yang akan ditingkatkan status tanah menjadi hak pakai selama dipergunakan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan pengukuran ulang berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang Puskesmas Pembantu Sungai Samak, UPT Puskesmas Badau Nomor: 445/199/PKM.BD/2022 tanggal 11 Agustus 2022, dengan luasan ±672 m².

3) Bangunan Sekolah SDN 30 Membalong di Kecamatan Membalong, berdiri diatas Hak Guna Usaha PT Foresta Lestari Dwikarya, Tbk., sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Pada awal pembangunannya, komitmen dari pihak Pemerintah Daerah dan pihak perusahaan adalah menyiapkan sarana pendidikan yang terjangkau untuk anak-anak usia sekolah yang orang tuanya bekerja dan tinggal di lokasi perumahan dan sekitar perkebunan. Untuk memperjelas status hukumnya, telah dilakukan koordinasi lanjutan dengan pihak PT Foresta Lestari Dwikarya, Tbk pada tanggal 30 November 2022, bertempat di Sekolah Dasar 30 Membalong, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong. Pihak perusahaan bersedia menyerahkan sebagian luas lahan yang diperuntukkan Sekolah Dasar 30 Membalong, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong. Sampai dengan pemeriksaan Laporan Keuangan *unaudited* belum ada tindak lanjut atas pelaksanaan ini.

4) Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki tanah dan bangunan yang dibangun untuk Pasar Rakyat Kecamatan Membalong namun belum dimanfaatkan secara optimal. Terhadap objek tersebut Pemerintah Kabupaten Beltung telah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Membalong terkait Gedung dan Bangunan Pasar Rakyat Membalong yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

   Pemerintah Kabupaten Belitung berencana akan melakukan kerjasama pengelolaan/ pemanfaatan bangunan tersebut kepada pihak Pemerintah Desa Membalong dan telah melakukan pengkajian terhadap subjek dan objek pengelolaan/ pemanfaatan bangunan serta survei lapangan bersama yang dihadiri oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, BPKAD Kabupaten Belitung, Kecamatan Membalong dan Pemerintah Desa Membalong, dengan pertimbangan bangunan tersebut dalam kondisi baik, sehingga bisa digunakan dan lebih optimal apabila dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Membalong untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sarana dan prasana untuk meningkatkan, memberdayakan perekonomian

masyarakat serta sekaligus sebagai sumber pendapatan Pemerintah Desa Membalong.

2. Hasil inventarisasi yang disajikan dalam pos koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp896.853.000,00 berupa bangunan gedung yaitu bangunan gedung pertemuan permanen, bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan tempat pendidikan lain-lain (dst) dan bangunan gedung perpustakaan permanen disebabkan belum adanya penyerahan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar Pencatatan Barang Milik Daerah tersebut menggunakan Berita Acara hasil Inventarisasi yang kemudian akan ditetapkan menggunakan Keputusan Bupati Belitung terkait penetapan status penggunaan tahun 2025. Pelaksanaan Pekerjaan ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 014/UGB.Percontohan/Sarpras/C2.3/2019 antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung tentang Pemberian Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Percontohan Termasuk Mebelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019.
3. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 6 (enam) unit gedung dan bangunan dengan rincian 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp4.019.145.780,00 berupa tugu lainnya dan sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp3.993.294.303,00 berupa bangunan fasilitas umum lainnya, berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 543.2/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/895/BPKAD tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/896/BPKAD tanggal 12 Juli 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.
4. Data gedung dan bangunan yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai per 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 1 (satu) unit bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

5.3.1.2.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak ada batasan nilai kapitalisasi aset tetap.

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan tidak ada batasan minimal kapitalisasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.175.527.297.933,24 mengalami peningkatan senilai Rp27.808.696.889,84 atau sebesar 1,29% dari saldo akhir 31 Desember 2023 (*Audited*) yaitu Rp2.147.718.601.043,40.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2024 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, dengan perhitungan:

Tabel 92 Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024

	Uraian		Jumlah (Rp)
-	Saldo awal aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 1 Januari 2024	Rp	2.147.718.601.043,40
-	Mutasi penambahan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024:	Rp	29.484.348.013,84
-	Mutasi pengurangan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024:	Rp	(1.675.651.124,00)
-	Saldo akhir aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024	Rp	2.175.527.297.933,24

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 71 – lampiran 82a.**

Aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan terdiri dari beberapa jenis kelompok barang seperti jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Berikut data mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang terjadi pada tahun 2024 senilai Rp29.484.348.013,84 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jalan dan Jembatan total nilai Rp21.799.696.309,00

   Untuk penambahan jalan dan jembatan terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp9.599.644.811,00

   Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 12 (dua belas) unit dengan total nilai Rp9.599.644.811,00. Pengadaan jalan dan jembatan telah sesuai penganggaran belanja modal yaitu jalan kabupaten lokal dan jalan desa.

   Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan dan jembatan dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 73.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp7.922.890.079,00

   Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

   Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp7.922.890.079,00. Atas pengadaan ini dikapitalisasi ke nilai induk Jalan Desa, Jalan Kabupaten Arteri dan Jalan Khusus Perorangan.

   Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan dan jembatan dari belanja barang dan jasa tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 74.**

3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp3.958.414.935,00

   Penambahan aset tetap ini bersumber dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

   Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp3.958.414.935,00

   a. Hibah ini berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp1.879.551.000,00 yaitu berupa jalan desa. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/507/KEP/BPKAD/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan BMD atas Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
   b. Hibah ini berasal dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) unit senilai

Rp2.078.863.935,00 yaitu berupa jalan khusus kompleks. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/351/KEP/BPKAD/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan BMD atas Hibah dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan dan jembatan dari perolehan hibah tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 76.**

4) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp318.746.484,00

Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp251.746.484,00 yaitu jalan khusus lain-lain. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/168/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 April 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

b. Dinas Lingkungan Hidup.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp67.000.000,00 yaitu jalan lainnya. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/555/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jalan dan jembatan dari Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 78.**

2. Bangunan Air dengan total nilai Rp4.989.859.708,84

Untuk penambahan Bangunan Air terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp3.890.856.479,00

   Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp3.616.579.979,00

      Terdapat 27 (dua puluh tujuh) unit dengan total nilai Rp2.817.528.979,00 pengadaan bangunan air telah sesuai penganggaran belanja modal yaitu Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi), Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai), Saluran Pembuang Air Buangan Domestik dan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya. Setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan dilakukan reklasifikasi menjadi beban pemeliharaan sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp799.051.000,00.

   b. Dinas Kesehatan (Konsolidasi) senilai Rp74.776.500,00.

      Terdapat 1 (satu) unit senilai Rp74.776.500,00 Pengadaan bangunan air telah sesuai penganggaran belanja modal yaitu Sumur Artetis.

   c. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp199.500.000,00.

      Terdapat 1 (satu) unit senilai Rp199.500.000,00 Pengadaan bangunan air telah sesuai penganggaran belanja modal akan tetapi setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan di reklasifikasi menjadi beban pemeliharaan sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp199.500.000,00.

   Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa bangunan air dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 73.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp13.358.935,00.

   Penambahan ini berasal dari belanja barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

   Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp13.358.935,00 berupa sumur artetis.

   Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa bangunan air dari Aset tetap dari belanja barang dan jasa tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 74.**

3) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total nilai Rp951.266.266.84

   Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai Rp729.294.000,00. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/507/KEP/BPKAD/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah Antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Pembangunan Jalan Poros Lokasi Desa Perepat dan Desa Padang Kandis Kawasan Kecamatan Membalong dan Dukungan Prasarana dan Sarana dasar Bagi Kawasan Kumuh Menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

b. Penambahan ini berasal dari OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp221.972.266,84 berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), Sumur Artetis, Bangunan Pembuang Air Bersih Lain-lain dan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penetapan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/550/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Hibah dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Dasar Negeri 3 Selat Nasik menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa bangunan air dari Aset tetap pendapatan hibah tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 76.**

4) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp38.231.028,00

Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp18.388.228,00 yaitu Sumur Artetis. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/168/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 April 2024

tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

b. Dinas Lingkungan Hidup.

Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp19.842.800,00 yaitu Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK). Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/555/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa bangunan air dari Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 78.**

5) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan senilai Rp2.000.000,00.

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) Reklasifikasi ini sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp2.000.000,00 berupa bak penyimpanan/tower air baku.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa bangunan air dari Aset Tetap Dari Belanja Modal BOS tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 75.**

6) Koreksi Kurang Catat (Tahun Sebelumnya) dengan total nilai Rp94.147.000,00

Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Konsolidasi) yang semula belum tercatat pada PAUD Percontohan sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp94.147.000,00 berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK). berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Paud Percontohan Kabupaten Belitung hasil Hibah Bantuan Unit Gedung Baru termasuk Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Paud dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 000.2.5.3/2244/DISDIKBUD/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa bangunan air dari Koreksi Kurang Catat (tahun sebelumnya) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 77.**

3. Instalasi dengan total nilai Rp323.631.062,00

Untuk penambahan Instalasi terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp289.500.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (Konsolidasi).

Terdapat 1 (satu) unit senilai Rp2.817.528.979,00 pengadaan instalasi telah sesuai penganggaran belanja modal yaitu Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS).

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa instalasi dari Aset tetap belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 73.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa senilai Rp6.756.462,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Kesehatan (konsolidasi) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp6.756.462,00 berupa Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS).

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa instalasi dari Aset tetap belanja barang dan jasa tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 74.**

3) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp27.374.600,00

Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup.

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp27.374.600,00 yaitu sumur gali (SGL) dan instalasi PLTA Kapasitas Sedang. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/555/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa instalasi dari Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 78.**

4. Jaringan dengan total nilai Rp2.371.160.934,00

   Untuk penambahan Jaringan terdiri dari:

   1) Aset Tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp916.114.000,00

      Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

      Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai Rp916.114.000,00 berupa jaringan air minum lainnya.

      Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jaringan dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 73.**

   2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp1.172.501.130,00

      Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

      Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

      a. Dinas Perhubungan (konsolidasi) sebanyak 15 (lima belas) unit dengan total nilai Rp1.125.975.000,00 berupa Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA.
      b. Dinas Kesehatan (konsolidasi) sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp46.526.130,00 berupa Jaringan listrik lainnya.

      Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jaringan dari belanja barang dan jasa tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 74.**

   3) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp272.048.012,00

      Pengalihan ini disebabkan dalam rangka penegasan hak penggunaan atas barang milik daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut:

      a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

         Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp202.135.662,00 yaitu Jaringan listrik lainnya. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/168/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 April 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

b. Dinas Lingkungan Hidup.
Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp25.900.850,00 yaitu Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA dan Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/555/KEP/BPKAD/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian menjadi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

c. Kecamatan Membalong.
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp44.011.500,00 yaitu Jaringan listrik lainnya. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/222/KEP/BPKAD/2024 tanggal 17 Juni 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jaringan dari Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 79.**

4) Lain-lain senilai Rp10.497.792,00
Penambahan ini untuk menampung penambahan maupun perpindahan akun di luar kondisi normal lainnya yaitu berupa reklasifikasi dari kelompok persediaan – barang yang akan diserahkan kepada masyarakat menjadi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berupa jaringan pada Sekretariat Daerah (konsolidasi). Terdapat 1 (satu) unit pengadaan senilai Rp10.497.792,00 yaitu Jaringan listrik lainnya. Atas pengalihan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/222.A/KEP/BPKAD/2024 tanggal 17 Juni 2024 tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
Rekapitulasi penambahan aset tetap berupa jaringan dari Lain-lain tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 82a.**

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakomptabel tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa jalan, jaringan dan irigasi (LRA)	Rp 14.696.115.290,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	Rp 998.551.000,00
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari Realisasi Belanja Modal	Rp 13.697.564.290,00

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp998.551.000,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas :

1. Reklasifikasi belanja modal ke beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya dengan rincian pada sub kelompok barang Bangunan Air dengan total nilai Rp799.051.000,00 terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Reklasifikasi belanja modal ke persediaan - Barang yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat/ pihak ketiga dengan rincian pada sub kelompok barang bangunan air senilai Rp199.500.000,00 terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang terjadi selama tahun 2024 adalah senilai Rp1.675.651.124,00 sebagai berikut:

2. Jalan dan Jembatan dengan total nilai Rp318.746.484,00
   Untuk pengurangan jalan dan jembatan terdiri dari:

   1) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp318.746.484,00. Pengurangan atas pengalihan antar OPD ini tidak mengurangi nilai total aset tetap berupa jalan dan jembatan secara keseluruhan. Pengurangan ini untuk membebaskan tanggung jawab pengguna barang atas pencatatan aset tetap berupa jalan dan jembatan yang semula menjadi kewenangannya akibat dari penegasan hak atas barang milik

daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
   Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp251.746.484,00 berupa Jalan Khusus Lain-lain. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/123/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Nomor : 000.2.6.1/124/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tidak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.
2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.
   Terdapat 1 (satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp67.000.000,00 yaitu Jalan lainnya. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/128/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa jalan dan jembatan atas Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 78.**

3. Bangunan Air dengan total nilai Rp1.036.782.028,00
   Untuk pengurangan bangunan air terdiri dari:

   1) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp38.231.028,00. Pengurangan atas pengalihan antar OPD ini tidak mengurangi nilai total aset tetap berupa bangunan air secara keseluruhan. Pengurangan ini untuk membebaskan tanggung jawab pengguna barang atas pencatatan aset tetap berupa bangunan air yang semula menjadi kewenangannya akibat dari penegasan hak atas barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp18.388.228,00 berupa Sumur Artetis. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/123/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Nomor : 000.2.6.1/124/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tidak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.

b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.
Terdapat 1 (satu) unit pengadaan dengan total nilai Rp19.842.800,00 yaitu Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK). Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/128/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa bangunan air atas Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 78.**

2) Reklasifikasi Belanja Modal Ke Beban Hibah dengan total nilai Rp799.051.000,00.
Pengurangan ini untuk menampung perpindahan barang yang disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut telah diserahkan/ hibah kepada Pemerintah Desa.
Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai Rp799.051.000,00.
Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa bangunan air atas Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban Persediaan tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 81.**

3) Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan dengan total nilai Rp199.500.000,00.

Pengurangan ini untuk menampung perpindahan barang yang disebabkan karena setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan, nilai tersebut merupakan bagian dari kelompok aset lancar. Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup, sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp199.500.000,00.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa bangunan air atas Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 82.**

4. Instalasi dengan total nilai Rp48.074.600,00

Untuk pengurangan instalasi terdiri dari:

1) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp27.374.600,00. Pengurangan atas pengalihan antar OPD ini tidak mengurangi nilai total aset tetap berupa Instalasi secara keseluruhan. Pengurangan ini untuk membebaskan tanggung jawab pengguna barang atas pencatatan aset tetap berupa Instalasi yang semula menjadi kewenangannya akibat dari penegasan hak atas barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

   Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp27.374.600,00 yaitu Sumur Gali (SGL) dan Instalasi PLTA Kapasitas Sedang. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/128/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.

   Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa instalasi atas pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 78.**

2) Reklasifikasi Aset tetap ke Aset Lainnya dengan total nilai Rp20.700.000,00

   Pengurangan ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi barang yang semula baik menjadi rusak berat/ atau hilang.

   Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

   Terdapat 2 (dua) unit dengan total nilai Rp20.700.000,00 yaitu Sumur Gali (SGL).

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa instalasi atas reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 80.**

5. Jaringan dengan total nilai Rp272.048.012,00
   Untuk pengurangan jaringan terdiri dari:

   1) Pengalihan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total nilai Rp272.048.012,00. Pengurangan atas pengalihan antar OPD ini tidak mengurangi nilai total aset tetap berupa jaringan secara keseluruhan. Pengurangan ini untuk membebaskan tanggung jawab pengguna barang atas pencatatan aset tetap berupa jaringan yang semula menjadi kewenangannya akibat dari penegasan hak atas barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai berikut:
      a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
         Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp246.147.162,00 berupa Jaringan listrik lainnya. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/123/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Nomor : 000.2.6.1/124/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tidak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.
      b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.
         Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp25.900.850,00 yaitu Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA dan Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil. Atas pengalihan ini telah dilakukan penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 000.2.6.1/128/KEP/BPKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung berupa Tanah, Peralatan dan Mesin,

Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan dari Daftar Barang Pengguna.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap berupa jaringan atas pengalihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 78.**

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024, yaitu:

1. Terkait dengan permasalahan yang termuat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 atas huruf b. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti) angka 1) Melengkapi informasi yang tercatat pada database atas Aset Tetap Jalan agar menggambarkan kondisi ruas dan sub ruas jalan yang sebenarnya. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti, Luas dan nilai Aset Tetap Jalan dalam Buku Inventaris Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan masih belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati.

   Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan penyesuaian atas 242 ruas dari jumlah 360 ruas yang terdapat pada SIMDA KIB D atau sebesar 67,22% per 31 Desember 2021. Masih terdapat sisa sebanyak **118** (**360-242**) atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A. Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset/Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pendampingan rutin dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terkait permasalahan jalan ini. Adapun kendala yang dihadapi terkait Penyesuaian Jalan dan Tanah Bawah Jalan tahap II tahun 2022, adanya pemaketan kegiatan waktu pembangunan jalan dahulu sehingga harus dipastikan jalan yang dibangun baru kemudian disesuaikan dengan ruas berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten.

   Atas temuan ini terus dilakukan proses tindak lanjutnya, sisa yang belum ditindaklanjuti yaitu 118 ruas jalan atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A.

   Sampai dengan pemeriksaan pendahuluan ini, terus dilakukan penyesuaian tersebut dikarenakan terdapat penambahan dan pemuktahiran jalan di dalam surat keputusan ruas jalan kabupaten.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerima hibah jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) paket pekerjaan jalan yaitu jalan tembus Buluh Tumbang-Aik Mungkui di Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan dan jalan Pasir Panjang Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik. Akan tetapi penyerahan atas pelaksanaan hibah belum dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui satker jalan, balai pemantapan jalan nasional. Atas rencana penyerahan ini belum dilakukan pencatatan ke dalam buku inventaris, disebabkan pemerintah kabupaten Belitung belum menerima Naskah Hibah dan Berita acara serah terima sebagai dasar pencatatan.
3. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) unit jalan khusus komplek dengan total nilai Rp1.351.500.000,00 berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 1740/PKS/Dr/2024 dan Nomor: 000.2.4/110/BPKAD.V tanggal 18 Desember 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 1740/PKS/Dr/2024 dan Nomor: 000.2.4/111/BPKAD tanggal 18 Desember 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.
4. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 6 (enam) unit jalan, jaringan dan irigasi dengan total nilai Rp18.554.756.861,00 berupa Saluran Drainage dan Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 543.2/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/895/BPKAD tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/896/BPKAD tanggal 12 Juli 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.
5. Hasil inventarisasi yang disajikan dalam pos koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp94.147.000,00 berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) disebabkan belum adanya penyerahan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar Pencatatan Barang Milik Daerah tersebut

menggunakan Berita Acara hasil Inventarisasi yang kemudian akan ditetapkan menggunakan Keputusan Bupati Belitung terkait penetapan status penggunaan tahun 2025. Pelaksanaan Pekerjaan ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 014/UGB.Percontohan/Sarpras/C2.3/2019 antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung tentang Pemberian Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Percontohan Termasuk Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019.

5.3.1.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal senilai Rp1.000.000,00. Batas minimal kapitalisasi aset tetap lainnya dikecualikan untuk perolehan aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp67.445.072.900,35** mengalami kenaikan senilai **Rp3.437.043.143,97** atau sebesar **5,37%** dari saldo akhir 31 Desember 2023 yaitu **Rp64.008.029.756,38**.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2024 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya, dengan perhitungan:

Tabel 93 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

Uraian		Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa aset tetap lainnya per 1 Januari 2024	Rp	64.008.029.756,38
- Mutasi penambahan aset tetap berupa aset tetap lainnya tahun 2024	Rp	3.710.743.143,97
- Mutasi pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya tahun 2024	Rp	(273.700.000,00)
- Saldo akhir aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2024	Rp	67.445.072.900,35

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi saldo aset tetap lainnya beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 83 – Lampiran 97.**

Aset tetap berupa aset tetap lainnya terdiri dari beberapa jenis seperti bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi.Mutasi penambahan aset tetap lainnya yang terjadi pada tahun 2024 berdasarkan kelompok aset tetap dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bahan Perpustakaan dengan total nilai Rp3.490.605.643,97

   Untuk penambahan bahan perpustakaan terdiri dari:

   1) Aset tetap dari belanja modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) dengan total nilai Rp2.930.966.000,00

      Dana BOS yang diterima satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan yang digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS.

      Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

      Jumlah belanja modal BOS ini sebanyak 88.219 (delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas) unit senilai Rp2.930.966.000,00. Pengadaan bahan perpustakaan terdiri dari:

      - Buku agama Budha sebanyak 58 eksemplar dengan total nilai Rp7.670.000,00
      - Buku agama Hindu sebanyak 17 eksemplar dengan total nilai Rp2.038.000,00
      - Buku agama Islam sebanyak 8879 eksemplar dengan total nilai Rp284.904.100,00
      - Buku agama Kristen sebanyak 42 eksemplar dengan total nilai Rp2.582.000,00
      - Alat Musik Modern/Band sebanyak 10 unit dengan total nilai Rp4.950.000,00
      - Alat Musik Tradisional/Daerah sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp7.500.000,00
      - Alat Rumah Tangga Lain-lain (gambar presiden) sebanyak 1 unit senilai Rp450.000,00
      - Arsitektur sebanyak 70 eksemplar dengan total nilai Rp3.850.000,00
      - Bahan perpustakaan tercetak lainnya sebanyak 2711 eksemplar dengan total nilai Rp89.986.800,00
      - Biografi sebanyak 17 eksemplar dengan total nilai Rp765.000,00
      - Biologi, Antropologi sebanyak 239 eksemplar dengan total nilai Rp5.231.900,00

- buku agama lainnya (dst) sebanyak 14 eksemplar dengan total nilai Rp1.275.500,00
- Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain sebanyak 4921 eksemplar dengan total nilai Rp226.219.550,00
- Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain sebanyak 1 eksemplar seilai Rp130.000,00
- Buku Ilmu Bahasa Lain-lain sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp129.500,00
- Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) sebanyak 1493 eksemplar dengan total nilai Rp69.209.200,00
- Buku Ilmu Sosial Lain-lain sebanyak 3.623 eksemplar dengan total nilai Rp107.215.900,00
- buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst) sebanyak 3691 eksemplar dengan total nilai Rp103.547.200,00
- Buku Umum Lain-lain sebanyak 10.384 eksemplar dengan total nilai Rp414.629.500,00
- Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi sebanyak 21 eksemplar dengan total nilai Rp2.464.400,00
- Focusing Screen/Layar LCD Projector sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp4.500.000,00
- Fotografi, Senimatografi sebanyak 40 eksemplar dengan total nilai Rp1.485.100,00.
- Ilmu Kerumah Tanggaan sebanyak 21 eksemplar dengan total nilai Rp908.200,00.
- Ilmu Pengetahuan Umum sebanyak 3.400 eksemplar dengan total nilai Rp113.619.200,00.
- Ilmu Perpustakaan sebanyak 3 eksemplar dengan total nilai Rp248.000,00
- Industri Konstruksi dan Perdagangan sebanyak 1 eksemplar senilai Rp78.400,00
- Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Art Original) sebanyak 1 eksemplar senilai Rp69.500,00
- Karya Seni Lain-lain sebanyak 75 eksemplar dengan total nilai Rp3.384.000,00
- Kit Olahraga / Atletik sebanyak 1 eksemplar senilai Rp2.000.000,00
- Matematika sebanyak 14915 eksemplar dengan total nilai Rp355.908.900,00
- Monograf sebanyak 6 eksemplar dengan total nilai Rp150.000,00
- Musik sebanyak 794 eksemplar dengan total nilai Rp31.475.300,00
- Musik lainnya sebanyak 3 eksemplar dengan total nilai Rp230.000,00

- Papan Tulis sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp3.000.000,00
- Pendidikan sebanyak 5050 eksemplar dengan total nilai Rp152.277.150,00
- Pengetahuan Bahasa Indonesia sebanyak 8608 eksemplar dengan total nilai Rp245.200.100,00
- Pengetahuan Bahasa Inggris sebanyak 8505 eksemplar dengan total nilai Rp171.167.800,00
- Permainan dan Olah Raga sebanyak 5894 eksemplar dengan total nilai Rp311.781.200,00
- Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebanyak 204 eksemplar dengan total nilai Rp8.766.100,00
- Referensi sebanyak 50 eksemplar dengan total nilai Rp2.250.000,00
- Router sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp3.500.000,00
- Seni Gambar, Grafika sebanyak 2511 eksemplar dengan total nilai Rp110.681.300,00
- Seni Lukis, Ukir sebanyak 259 eksemplar dengan total nilai Rp11.339.100,00
- Seni Pahat sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp139.000,00
- Software Lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp10.000.000,00
- Teknik Industri dan Kerajinan sebanyak 339 eksemplar dengan total nilai Rp14.642.500,00
- Teknologi sebanyak 1327 eksemplar dengan total nilai Rp37.416.600,00

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal BOS tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 89.**

2) Aset tetap dari Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dengan total nilai Rp407.284.200,00

Dana BOS Kinerja yang diterima satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung ke rekening pengelolaan dana BOS Kinerja sekolah setiap triwulan yang digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS Kinerja.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)
Jumlah belanja modal BOS ini sebanyak 6.113 (enam ribu seratus tiga belas) unit senilai Rp407.284.200,00. Pengadaan bahan perpustakaan terdiri dari:

- Buku agama Islam sebanyak 520 eksemplar dengan total nilai Rp14.810.400,00
- Buku agama Kristen sebanyak 1 eksemplar senilai Rp63.100,00
- Alat Musik Modern/Band sebanyak 5 eksemplar dengan total nilai Rp31.200.000,00

- Alat Musik Tradisional/Daerah sebanyak 3 eksemplar dengan total nilai Rp3.700.000,00
- Amplifier sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp2.000.000,00
- Bahan perpustakaan tercetak lainnya sebanyak 153 eksemplar dengan total nilai Rp4.073.500,00
- Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain sebanyak 120 eksemplar dengan total nilai Rp6.521.500,00
- Buku Ilmu Bahasa Lain-lain sebanyak 47 eksemplar dengan total nilai Rp672.200,00
- buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) sebanyak 57 eksemplar dengan total nilai Rp2.622.000,00
- Buku Ilmu Sosial Lain-lain sebanyak 211 eksemplar dengan total nilai Rp4.250.100,00
- buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst) sebanyak 1128 eksemplar dengan total nilai Rp25.028.100,00
- Buku Umum Lain-lain sebanyak 567 eksemplar dengan total nilai Rp20.715.800,00
- Camera Digital sebanyak 1 unit dengan total nilai Rp5.000.000,00
- Focusing Screen/Layar LCD Projector sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp16.000.000,00
- Ilmu Pengetahuan Umum sebanyak 95 eksemplar dengan total nilai Rp2.141.600,00
- LCD Projector/Infocus sebanyak 13 unit dengan total nilai Rp102.000.000,00
- Loudspeaker sebanyak 3 eksemplar dengan total nilai Rp19.000.000,00
- Matematika sebanyak 874 eksemplar dengan total nilai Rp27.690.300,00
- Megaphone sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp3.000.000,00
- Musik sebanyak 52 eksemplar dengan total nilai Rp2.123.800,00
- Pendidikan sebanyak 294 eksemplar dengan total nilai Rp9.241.300,00
- Pengetahuan Bahasa Indonesia sebanyak 771 eksemplar dengan total nilai Rp15.993.600,00
- Pengetahuan Bahasa Inggris sebanyak 478 eksemplar dengan total nilai Rp13.508.100,00
- Peralatan Personal Komputer lainnya sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp2.000.000,00
- Permainan dan Olah Raga sebanyak 172 eksemplar dengan total nilai Rp8.176.900,00
- Prector Prable Model Ust 507 EP 35 sebanyak 2 unit dengan total nilai Rp1.900.000,00
- Proyektion Polariscope sebanyak 1 unit senilai Rp8.000.000,00

- Referensi sebanyak 15 eksemplar dengan total nilai Rp1.453.000,00
- Router sebanyak 4 unit dengan total nilai Rp6.000.000,00
- Seni Gambar, Grafika sebanyak 73 eksemplar dengan total nilai Rp3.387.700,00
- Seni Lukis, Ukir sebanyak 8 eksemplar dengan total nilai Rp508.000,00
- Service Umum Sosial sebanyak 189 eksemplar dengan total nilai Rp4.638.700,00
- Sound System sebanyak 5 unit dengan total nilai Rp5.100.000,00
- Teknologi sebanyak 241 eksemplar dengan total nilai Rp6.764.500,00
- Televisi sebanyak 3 unit dengan total nilai Rp18.000.000,00

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 89.**

3) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) dengan total nilai Rp2.497.500,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 5 (lima) dengan total nilai Rp2.497.500,00 yaitu buku umum lain-lain, pendidikan dan peta (map).

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 87.**

4) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total Rp77.015.843,97.

Penambahan asat tetap ini bersumber dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Hibah ini berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2024 triwulan 3 nomor surat : Manual.0394/3/BS.01.00/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebanyak 12.582 (dua belas ribu lima ratus delapan puluh dua) unit dengan total nilai Rp77.015.843,97 yaitu buku umum lain-lain dan umum.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari hibah tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 91.**

5) Aset tetap dari dana BOP dengan total nilai Rp46.372.100,00

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.
Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) yaitu sebanyak 392 (tiga ratus sebilan puluh dua) unit pengadaan bahan perpustakaan dengan total nilai Rp46.372.100,00. Pengadaan bahan perpustakaan terdiri dari:

a. Buku Agama Islam sebanyak 6 eksemplar dengan total nilai Rp473.300,00
b. Bahan perpustakaan tercetak lainnya sebanyak 6 eksemplar dengan total nilai Rp1.680.000,00
c. Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain sebanyak 10 eksemplar dengan total nilai Rp739.300,00
d. Buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst) sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp199.400,00
e. Buku Umum Lain-lain sebanyak 284 eksemplar dengan total nilai Rp29.426 000,00
f. Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi sebanyak 10 eksemplar dengan total nilai Rp2.305.000,00
g. Ilmu Pengetahuan Umum sebanyak 6 eksemplar dengan total nilai Rp1.320.000,00
h. Matematika sebanyak 8 eksemplar dengan total nilai Rp643.600,00
i. Pendidikan sebanyak 12 eksemplar dengan total nilai Rp1.206.100,00
j. Pengetahuan Bahasa Indonesia sebanyak 6 eksemplar dengan total nilai Rp641.400,00
k. Pengetahuan Bahasa Inggris sebanyak 6 eksemplar dengan total nilai Rp456.900,00
l. Permainan dan Olah Raga sebanyak 5 eksemplar dengan total nilai Rp346.100,00
m. Referensi sebanyak 14 eksemplar dengan total nilai Rp3.920.000,00
n. Sejarah sebanyak 9 eksemplar dengan total nilai Rp2.520.000,00
o. Serial Lain-lain (dst) sebanyak 6 eksemplar dengan total nilai Rp335.000,00
p. Service Umum Sosial sebanyak 2 eksemplar dengan total nilai Rp160.000,00

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari dana BOP tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 92.**

6) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp26.470.000,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Reklasifikasi ini sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp26.470.000,00 dari kelompok aset tetap alat kantor dan rumah tangga ke kelompok aset tetap bahan perpustakaan berupa peta digital.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 93.**

2. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga dengan total nilai Rp220.137.500,00

Untuk penambahan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga terdiri dari:

1) Aset tetap dari belanja modal dengan total nilai Rp62.000.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung dan sumber perolehan lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Terdapat 2 (dua) unit pengadaan dengan total nilai Rp45.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok aset tetap lainnya berupa maket/miniatur/replika.

g. Dinas Pariwisata (konsolidasi)

Terdapat 5 (lima) unit pengadaan dengan total nilai Rp17.000.000,00 telah sesuai penganggaran belanja modal di kelompok aset tetap lainnya berupa alat bercorak kebudayaan lainnya.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 85.**

2) Aset tetap dari belanja barang dan jasa dengan total nilai Rp15.600.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Sekretariat Daerah (konsolidasi) sebanyak 4 (empat) unit senilai Rp15.600.000,00 berupa lukisan lain-lain.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja barang dan jasa tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 86.**

3) Aset tetap dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) dengan total nilai Rp4.200.000,00

Penambahan ini berasal dari belanja barang yang dikeluarkan untuk mendukung pengadaan yang bersumber dari belanja selain belanja modal.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Jumlah belanja barang dan jasa ini sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp4.200.000,00 yaitu alat musik modern/band.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 87.**

4) Aset tetap dari pendapatan hibah dengan total Rp46.037.500,00.

Penambahan asat tetap ini bersumber dari hibah oleh masyarakat, instansi pemerintah pusat/ provinsi dan sumber lainnya.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Hibah ini berasal dari Dana Komite Tahun 2024 triwulan 4 nomor berita acara serah terima : 001/07/SDN38TP/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit dengan total nilai Rp46.037.500,00 yaitu alat musik modern/band.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari pendapatan hibah tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 91.**

5) Aset tetap dari dana BOP dengan total nilai Rp18.200.000,00

Penambahan aset tetap ini berasal dari APBD Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi) yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) unit pengadaan barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga dengan total nilai Rp18.200.000,00 yaitu alat musik modern/band dan alat musik tradisional/daerah.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari dana BOP tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 92.**

6) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp16.750.000,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan/ kapitalisasi nilai untuk penambahan ke nilai induk antar kelompok aset tetap.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 11 (sebelas) unit dengan total nilai Rp16.750.000,00 ke kelompok aset tetap lainnya berupa alat musik tradisional/daerah, alat musik modern/band dan alat kesenian lain-lain.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 93.**

7) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp57.350.000,00

Penambahan ini berasal dari pemindahan antar sub dalam kelompok barang.

Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 23 (satu) unit dengan total nilai Rp57.350.000,00 dari kelompok aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan ke barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga yaitu alat musik tradisional/daerah dan alat musik modern/band.

Rekapitulasi penambahan aset tetap lainnya dari reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 94.**

3. Untuk kelompok aset tetap lainnya berupa hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya dan aset tetap dalam renovasi tidak terdapat penambahan pada tahun 2024.

Untuk penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 94 Mutasi Perbedaan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal, belanja modal BOS dan belanja modal BOS kinerja berupa aset tetap lainnya (LRA)	Rp 3.400.250.200,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	Rp 268.800.000,00
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap aset tetap lainnya dari Realisasi Belanja Modal	Rp 3.131.450.200,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp268.800.000,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas reklasifikasi antar kelompok aset tetap, reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dan reklasifikasi ke aset ekstra kompatabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya yang terjadi pada tahun 2024 adalah senilai Rp273.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahan Perpustakaan dengan total nilai Rp268.800.000,00

   Untuk pengurangan bahan perpustakaan terdiri dari:

   1) Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp206.050.000,00

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 45 (empat puluh lima) unit dengan total nilai Rp206.050.000,00 dari kelompok aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan menjadi kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga yaitu *proyektion polariscope*, *focusing screen*/layar *LCD projector, sound system, LCD projector/infocus*, televisi, *loudspeaker*, *amplifier*, papan tulis, *megaphone*, alat rumah tangga lain-lain (gambar presiden) dan kit olahraga / atletik, menjadi kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi dan pemancar yaitu camera digital, menjadi kelompok aset tetap peralatan dan mesin berupa komputer yaitu peralatan personal komputer lainnya dan *router*, serta menjadi kelompok aset tidak berwujud yaitu software lainnya.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap lainnya atas reklasifikasi antar kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 95.**

2) Reklasifikasi dalam kelompok aset tetap dengan total nilai Rp57.350.000,00

Pengurangan ini akibat dari ketidaksesuaian penganggaran awal setelah dilakukan verifikasi hasil pengadaan.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi). Reklasifikasi ini sebanyak 23 (satu) unit dengan total nilai Rp57.350.000,00 dari kelompok aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan ke barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga yaitu alat musik tradisional/daerah dan alat musik modern/band.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap lainnya atas reklasifikasi dalam kelompok aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 96.**

3) Reklasifikasi ke aset ekstra kompatabel senilai Rp5.400.000,00

Pengurangan ini disebabkan karena adanya reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset ekstra kompatabel.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

Pengurangan atas reklasifikasi ini sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai Rp5.400.000,00 dari kelompok aset tetap lainnya menjadi aset ekstrakompatabel yaitu *router* dan *prector prable model ust 507 EP 3*5.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap lainnya atas aset ekstrakompatabel tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 97.**

2. Untuk kelompok aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga tidak terdapat pengurangan pada tahun 2024.

3. Hewan dengan total nilai Rp4.900.000,00

Untuk pengurangan hewan terdiri dari:

1) Penghapusan aset tetap sebagai tindak lanjut hewan yang mati dengan total nilai Rp4.900.000,00

Pengurangan ini berasal dari penghapusan aset tetap yang berada di pengguna barang dengan tujuan untuk menghapusbukukan catatan dari daftar barang pengguna/ atau pengelola serta membebaskan tanggung jawab pengguna barang/ atau pengelola yang menjadi kewenangannya.

Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut Dinas Perikanan. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut atas kematian hewan sebanyak 1 (satu) ekor senilai Rp4.900.000,00 yaitu hewan piaraan lainnya.

Rekapitulasi pengurangan aset tetap lainnya atas penghapusan aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 88.**

Untuk Aset tetap lainnya yaitu hewan Ternak Potong yang terdapat pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebagaimana tujuannya untuk pembibitan hewan bahwa hewan ternak tersebut sudah berkembang biak dan anakannya yang berjumlah 51 ekor masih berproses dilakukan pencatatan untuk diakui sebagai aset tetap lainnya hal ini dikarenakan masih terkendala untuk teknis penilaian dan pencatatan yang memerlukan perencanaan yang tepat dan waktu yang cukup panjang untuk penilaian.

4. Untuk kelompok aset tetap lainnya berupa biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya dan aset tetap dalam renovasi tidak terdapat pengurangan pada tahun 2024.

5.3.1.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap yang bersangkutan atau aset definitifnya.

Saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp20.050.310.260,68 mengalami kenaikan senilai Rp1.877.935.140,00 atau meningkat 10,33 % dibandingkan saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 (*audited*) senilai Rp18.172.375.120,68.

Kenaikan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2024 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tanah, dengan perhitungan:

Tabel 95 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2024	18.172.375.120,68
Mutasi penambahan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2024	2.274.715.865,00
Mutasi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2024	(396.780.725,00)
Saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024	20.050.310.260,68

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 98 – Lampiran 102.**

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang terjadi pada tahun 2024 senilai Rp2.274.715.865,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa dengan total nilai Rp2.274.715.865,00

   Penambahan ini berasal dari reklasifikasi belanja barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendukung nilai perolehan aset tetap. Penambahan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD sebagai berikut yaitu:

   1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

      Jumlah reklasifikasi belanja barang dan jasa ini sebanyak 10 (sepuluh) dokumen *Detail Engineering Design* (DED) dengan total nilai Rp1.071.162.365,00 dengan rincian:

      - Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebanyak 1 (satu) Dokumen Rp79.750.000,00 berupa Dokumen DED Tugu Perjuangan H.A.S. Hanadjoeddin.
      - Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan sebanyak 9 (sembilan) Dokumen dengan total nilai Rp991.412.365,00 berupa DED Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sijuk, DED Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM Batu Mentas, DED Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Industri Tanjung Batu, DED Peningkatan Ruas Jalan Suak Kemang Selat Nasik (DAU EARMARK), DED Pembangunan Jalan Lingkar TPU – Pilang, DED Pembangunan Jalan Lingkar Murai Dalam, Dokumen Lingkungan Pelebaran Jalan Membalong – Gunung Beluru, DED Pelebaran Jalan Limbung Buntar – Mentigi dan DED Pelengkap Jalan untuk Zoss Di Wilayah Tanjungpandan.

   2) Dinas Perhubungan (konsolidasi)

      Jumlah reklasifikasi belanja barang dan jasa ini sebanyak 5 (lima) dokumen dengan total nilai Rp464.267.500,00 dengan rincian:

- Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan sebanyak 1 (satu) dokumen DED senilai Rp74.647.500,00 yaitu DED ATCS (*Adaptive Traffic Control System*) Pada ruas jalan di kabupaten belitung.
- Jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 4 (empat) dokumen DED dengan total nilai Rp389.620.000,00 yaitu DED Darurat Dermaga Tanjung Paku, DED pembangunan pulau buntar, DED pembangunan pulau sumedang dan DED Dermaga Plengsengan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung RU.

3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono

Jumlah reklasifikasi barang dan jasa ini sebanyak 2 (dua) dokumen DED dengan total nilai Rp168.305.500,00 fengan rincian:

- Gedung dan bangunan sebanyak 1 (satu) dokumen senilai Rp71.192.500,00 yaitu DED Bangunan Rumah Sakit Umum.
- Jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 1 (satu) dokumen DED senilai Rp97.113.000,00 yaitu Instalasi gardu listrik lainnya.

4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi)

Jumlah reklasifikasi barang dan jasa ini sebanyak 7 (tujuh) dokumen DED gedung dan bangunan dalam pengerjaan dengan total nilai Rp447.903.125,00 yaitu dan DED jalan, irigasi, dan jaringan dalam pengerjaan sebanyak 1 (satu) dokumen senilai Rp23.429.375.

5) Dinas Pariwisata

Jumlah reklasifikasi barang dan jasa ini sebanyak 1 (satu) dokumen DED gedung dan bangunan senilai Rp99.648.000,00 yaitu penyusunan review DED Geosite Batu Bedil tahap II.

Rekapitulasi penambahan KDP dari reklasifikasi belanja barang dan jasa tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 100.**

Tahun 2024, tidak terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal untuk kelompok aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan, sehingga tidak perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penambahan aset tetap untuk kelompok aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan hanya bersumber dari belanja barang dan jasa.

Adapun rincian atas mutasi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan yang terjadi pada tahun 2024 senilai Rp396.780.725,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi antar kelompok aset tetap dengan total nilai Rp396.780.725,00

   Pengurangan ini akibat reklasifikasi antar kelompok aset tetap dilakukan karena aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan dikapitalisasi ke nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan (aset tetap definitif) dimana pengerjaan aset tersebut telah selesai dan memberikan manfaat sesuai tujuan perolehannya.

   Pengurangan dari klasifikasi ini terdapat pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (konsolidasi).

      Reklasifikasi ini dari kelompok KDP gedung dan bangunan dalam pengerjaan dengan total nilai Rp198.759.125,00 menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 3 (tiga) unit.

   b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

      Reklasifikasi ini dari kelompok KDP gedung dan bangunan senilai Rp99.797.100,00 menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 1 (satu) unit berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.

   c. Kecamatan Membalong.

      Reklasifikasi ini dari kelompok KDP gedung dan bangunan senilai Rp98.224.500,00 menjadi kelompok aset tetap gedung dan bangunan sebanyak 1 (satu) unit berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.

   Rekapitulasi reklasifikasi KDP antar aset tetap tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 101.**

Rincian aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 201 (dua ratus satu) KDP senilai Rp20.050.310.260,68 (dua puluh milyar lima puluh juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh koma enam puluh delapan rupiah). Dapat dilihat pada **Lampiran 102**.

5.3.1.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan).

Perubahan kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung. Perubahan kebijakan akuntansi penyusutan terkait dengan metode pendekatan perhitungan penyusutan di mana sebelumnya pendekatan perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan diubah menggunakan pendekatan perhitungan secara bulanan.

Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di awal tahun pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan, misalnya aset tetap yang diperoleh pada bulan Oktober maka penyusutan akan dihitung selama 3 (tiga) bulan sampai akhir periode akuntansi.

Aset yang pengadaannya diterima 100% (seratus persen) sampai dengan 31 Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan selama 1 (satu) bulan.

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024:

Tabel 96 Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	578.862.537.033,15
2	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	178.502.884.345,91
3	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	1.346.812.004.851,63
4	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	5.443.881.065,02
	Jumlah	2.109.621.307.295,71

Sumber: data BPKAD (diolah)

Apabila disandingkan dengan nilai perolehan aset tetap, maka akan diperoleh nilai buku untuk masing-masing aset tetap per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 97 Daftar Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan Aset Tetap	Nilai Buku (Rp.)
1	**Tanah**		370.676.122.840,53
2	**Peralatan dan Mesin**	720.367.617.851,82	
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(578.862.537.033,15)	
	Nilai buku aset tetap peralatan dan mesin		141.505.080.818,67
3	**Gedung dan Bangunan**	785.386.635.067,07	
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(178.502.884.345,91)	
	Nilai buku aset tetap gedung dan bangunan		606.883.750.721,16
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	2.175.527.297.933,24	
	Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan mesin	(1.346.812.004.851,63)	
	Nilai buku aset tetap jalan, irigasi dan jaringan		828.715.293.081,61
5	**Aset Tetap Lainnya**	67.445.072.900,35	
	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	(5.443.881.065,02)	
	Nilai buku aset tetap lainnya		62.001.191.835,33
6.	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**		20.050.310.260,68
	Total Nilai Buku Aset Tetap		**2.029.831.749.557,98**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai akumulasi penyusutan Tahun 2024 adalah **Rp2.109.621.307.295,71**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp163.735.283.973,74** atau **8,41%**, di mana nilai penyusutan Tahun 2023 sebesar **Rp1.945.886.023.322,30**. Kenaikan tersebut disebabkan penambahan akumulasi penyusutan dari beban penyusutan tahun 2024 sebesar **Rp168.224.757.931,41** dan koreksi penyusutan sebesar **Rp4.489.473.958,00.** Mutasi penyusutan aset tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 98 Mutasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
1	**SALDO AWAL**	532.718.860.868,65	162.271.693.141,00	1.245.492.165.063,63	5.403.304.249,02	1.945.886.023.322,30
2	**MUTASI TAMBAH**					
3	**Beban Penyusutan 2024**	50.627.260.955,50	16.231.191.204,91	101.325.728.955,00	40.576.816,00	168.224.757.931,41
4	**Jumlah mutasi tambah**	50.627.260.955,50	16.231.191.204,91	101.325.728.955,00	40.576.816,00	168.224.757.931,41
5	**MUTASI KURANG**					
6	Penyesuaian reklasifikasi Penambahan Aset Lainnya dari Aset Alat Besar dan Alat Angkutan per 30 Juni 2024 Dinas Pekerjaan Umum	476.760.000,00				476.760.000,00
7	Reklasifikasi Aset tetap menjadi aset Rusak Berat per 30 juni 2024 (Nilai Buku 3.209.934) Dinas Pemuda dan Olahraga	157.720.816,00				157.720.816,00
8	Penyesuaian atas penghapusan kendaraan tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tanpa lelang kepada mantan wakil bupati belitung	486.449.339,00				486.449.339,00
9	Penyesuaian atas penghapusan BMD atas tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan pada Sekretariat Daerah	177.649.000,00				177.649.000,00
10	Penyesuaian Aset Tetap-Kendaraan akibat ubah kondisi dari baik menjadi rusak berat pada Puskesmas Badau	10.000.000,00				10.000.000,00

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
11	Reklasifikasi Aset Tetap (Alat-alat angkutan) Ke Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94.438.000,00				94.438.000,00
12	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	138.215.000,00				138.215.000,00
13	Reklasifikasi Aset Tetap (Alat-alat Angkutan) ke Aset Lainnya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	90.049.700,00				90.049.700,00
14	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin (Mini Bus Nissan Grand Livina) ke Aset Lainnya-Dukcapil	174.452.000,00				174.452.000,00
15	Penyesuaian Koreksi Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Kendaraan Bermotor dan Alat Angkutan Darat DKPP Tahun 2024	197.965.000,00				197.965.000,00
16	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan ke Akumulasi Penyusutan aset lain-lain pada Dinas Lingkungan Hidup	235.651.513,00				235.651.513,00
17	Reklasifikasi Alat Rumah Tangga Lainny (Home Use) pada Dinas Pariwisata	99.910.000,00				99.910.000,00

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
18	Reklasifikasi sepeda motor menjadi aset rusak berat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59.075.400,00				59.075.400,00
19	Penyesuaian Pemusnahan Halte Bus Dinas Perhubungan Kab. Belitung	61.335.378,00				61.335.378,00
20	Reklasifikasi dari Aset Tetap Alat Angkutan Darat Bermotor ke Aset Lainnya pada Dinas Perhubungan	426.040.000,00				426.040.000,00
21	Reflasifikasi aset tetap ke aset lainnya Tahun 2024 pada Kec Selat Nasik	25.000.000,00				25.000.000,00
22	Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya Tahun 2024 pada Kec. Sijuk	91.646.000,00				91.646.000,00
23	Reklasifikasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024 pada Kelurahan Lesungbatang	11.000.000,00				11.000.000,00
24	Reklasifikasi alat angkutan ke aset lainnya (berubah kondisi baik ke rusak berat) pada Sekretariat Daerah	915.518.666,00				915.518.666,00
25	Penyesuaian Penghapusan Alat Tensimeter karena mengandung merkuri berdasarkan PP No 41 Tahun 2019; Permenkes No 41 Tahun 2019 pada Puskesmas Air Saga. Puskesmas Membalong. Puskesmas Perawas. Puskesmas Selat Nasik. Puskesmas Sijuk. Puskesmas Simpang Rusa. Puskesmas Tanjung Binga. Puskesmas Tanjungpandan	110.014.250,00				110.014.250,00

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
26	Penyesuaian Aset Tetap-Kendaraan akibat ubah kondisi dari baik menjadi rusak berat pada Puskesmas Simpang Rusa	342.785.000,00				342.785.000,00
27	Reklasifikasi aset kendaraan bermotor menjadi aset lainnya karena ubah kondisi rusak berat pada UPT RSUD Marsidi Judono	72.964.729,00				72.964.729,00
28	Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.560.000,00				14.560.000,00
29	Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Kendaraan tak bermotor angkutan barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	425.000,00				425.000,00
30	Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya Tahun 2024 pada SDN 3 Selat Nasik	13.960.000,00		5.889.167,00		19.849.167,00
32	**Jumlah mutasi kurang**	4.483.584.791,00	-	5.889.167,00	-	4.489.473.958,00
33	**SALDO PER 31 DESEMBER 2024**	578.862.537.033,15	178.502.884.345.91	1.346.812.004.851,63	5.443.881.065,02	2.109.621.307.295,71

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 103.**

Sedangkan barang-barang milik daerah yang tidak memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap (ekstrakomptabel) berjumlah total **Rp72.469.893.243.51** sebanyak **375.592** unit tersebar pada seluruh UPB. Rekapitulasi barang *ekstrakomptabel* per UPB sebagaimana terlampir pada **Lampiran 104** laporan keuangan ini.

Selain aset tetap yang disajikan di dalam neraca. Pemerintah Kabupaten Belitung juga memiliki cagar budaya (**Lampiran 105**) aset bersejarah (*heritage assets*) berupa bangunan bersejarah dan barang-barang peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

Aset bersejarah berupa situs/bangunan terdiri dari:

Tabel 99 Aset Bersejarah Tahun 2024

No	Nama Situs / Bangunan Bersejarah	Letak Administratif	Jumlah Unit	Fungsi Sekarang
1	Eks Kantor Pusat *Billiton Mij*	Jl. Veteran. Tg. Pandan	1	Barata Dept. Store
2	Eks *Chineesche Hospital*	Jl. Rumah Sakit. Tg. Pandan	1	Asrama Mhs Akper Bel
3	Eks *Europeesche Kliniek*	Jl. Melati. Tg. Pandan	1	RSUD Kab. Belitung
4	Rumah Kolonial	Jl. Veteran. Tg. Pandan	1	Rumah Dinas Danlanud
5	Rumah Kolonial	Jl. Veteran. Tg. Pandan	1	Rumah Dinas Dandim
6	Eks Hotel Juliana	Jl. Melati. Tg. Pandan	1	Museum Tg. Pandan
7	Eks *Societeit*	Jl. Gegedek. Tg. Pandan	1	Hotel & Club Billiton
8	Eks Hollands-Indische School	Jl. Sekolah. Tg. Pandan	1	SMPN 1 Tg. Pandan
9	Eks Gedung Landraad	Jl. Sekolah. Tg. Pandan	1	UPTD TK/SD Tg. Pandan
10	Eks Tuindienst	Jl. Sekolah. Tg. Pandan	1	Sekretariat PWRI
11	Eks Kantor Asisten Residen	Jl. Merdeka. Tg. Pandan	1	Dinas Pendidikan Kab. Bel
12	Situse Banteng Kuehn	Jl. Bukit. Tg. Pandan	1	Statiun RTVS Dinamika
13	Gedung Nasional	Jl. Yos Sudarso. Tg. Pandan	1	Gedung Nasional
14	Eks *Inlandsch-Chineesch School*	Jl. Sriwijaya. Tg. Pandan	1	SDN 1 dan 2 Tg. Pandan
15	Situs Kota Tanah Cerucuk	Desa Cerucuk. Kec. Badau	1	Makam KA Hatam & KA M. Saleh
16	Situs Ai' Labu Kembiri	Ai' Labu. Kembiri. Membalong	1	Makam KA Rahad
Jumlah			**16**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan barang-barang Peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan terdiri dari barang pecah belah (guci. mangkok. piring. teko. tempat air minum). keris. tombak. pedang. lukisan. gong dan lain-lain dengan jumlah 1.800 unit. secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 106.**

5.3.1.2.3 Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Pada tahun 2022 tidak terdapat pembentukan maupun pencairan Dana Cadangan.

5.3.1.2.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar. investasi jangka panjang. aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi tagihan jangka panjang. kemitraan dengan pihak ketiga. aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

5.3.1.2.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Pada tahun 2023 tidak terdapat tagihan jangka panjang.

5.3.1.2.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo aset lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp8.861.250.276.00** tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan saldo aset lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2023 (*audited*) senilai **Rp8.861.250.276.00**. Adapun rinciannya aset kemitraan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk menghasilkan pendapatan misalnya dalam bentuk sewa. kerjasama pemanfaataan. Bangun Serah Guna (BSG). Bangun Guna Serah (BGS). Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).

   Saldo aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk menghasilkan pendapatan per 31 Desember 2024 senilai **Rp905.885.276.00**. tidak mengalami kenaikan dan penurunan. sehingga sehingga saldo akhir 31 Desember 2024 senilai **Rp905.885.276.00**.

Tabel 100 Aset Yang Dikerjasamakan Tahun 2024

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
PT Hotel Usaha Karya Mandiri Utama (Tanah dan Bangunan)	369.529.276.00	369.529.276.00
PT Puncak Jaya Lestari	531.604.000.00	531.604.000.00
PT Telekomunikasi Indonesia	4.752.000.00	4.752.000.00
Jumlah	**905.885.276.00**	**905.885.276.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Informasi lain terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kabupaten Belitung telah menandantangani MoU dengan PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama Nomor: 181/06/PK/II/2007 dan 118/H-

UKM/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang berisikan Pengelolaan Bangunan Klub (*City Club*) seluas 1.964 m^2 di atas tanah seluas 4.225 m^2 di Jalan Depati Gegedek Nomor 50 Tanjungpandan. milik Pemerintah Kabupaten Belitung. MoU itu menjadi dasar hukum bagi PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama untuk melakukan pengelolaan atas aset *City Club* milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

Namun. pengelolaan *City Club* beralih kepada BUMD PT Belitong Mandiri berdasarkan Surat dari Bupati Belitung kepada Dirut PT. Belitong Mandiri Nomor: 028/0838/DPPKAD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal penyerahan pengelolaan aset *City Club* dan Surat Kuasa Nomor: 028/0758/DPPKAD/2010 tanggal 20 September 2010 mengenai pengelola aset *City Club* serta Surat dari Direktur Utama PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama Nomor: 020-dir-Bpt/9/10 tanggal 29 September 2010 perihal serah terima *City Club*.

Atas penyerahan tersebut. baik antara PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung. maupun antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BUMD PT. Belitong Mandiri belum dituangkan dalam bentuk BAST. sehingga pencatatannya tidak jelas.

Namun pada LK PT. Belitong Mandiri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 (*Audited*) nilai bangunan *City Club* sebesar Rp165.700.645.00 telah tercatat sebagai aset tetap BUMD di mana kantor PT. Belitong Mandiri juga terletak di Jalan Gegedek Nomor 50 (di *City Club*). Pencantuman aset gedung *City Club* sebagai aset tetap BUMD PT. Belitong Mandiri belum didasarkan pada perda mengenai penyertaan modal.

Selain itu. pada OPD Sekretariat Daerah. aset tetap yang masih tercatat pada KIB C Sekretariat Daerah yang berlokasi di Jalan Gegedek adalah berupa bangunan kolam renang seluas 1.760 m^2 diatas tanah 4.702 m^2 yang diperoleh tahun 1965 senilai Rp113.179.416.00 dan bangunan Eks Asrama Karyawan PT. Timah di atas tanah 576m^2 yang diperoleh tahun 2005 senilai Rp175.450.000.00.

2. Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Tabel 101 Aset Kerja Sama Tahun 2024

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
PT. Putra Ciptawahana Sejati (PT. Ranati)	-	-
PT. Belitung Golf & Resort	6.000.000.000.00	6.000.000.000.00
PT. Belitong Inti Permai	608.500.000.00	608.500.000.00
Yayasan Sejahtera Warga Bulog	1.346.865.000.00	1.346.865.000.00
Jumlah	**7.955.365.000.00**	**7.955.365.000.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pada tahun 2024 tidak terjadi kenaikan/penurunan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai

kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp150.000.000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1) PT. Belitung Inti Permai

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Belitung IntiPermai. Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan kedalam Perjanjian kerjasama nomor: 181/05/PK/II2010 dan nomor: 8001/BIP/PEJ/DIR/IV/2010 tanggal 15 April 2010. dokumen kepemilikan adalah Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor: 00003/Belitung. Desa Keciput tanggal 20 April 2010 an Pemerintah Kabupaten Belitung. Luas 121.700 m².

Atas pelaksanaan kerjasama tersebut. diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) yaitu Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai dengan luas 121.700 m².

Pemerintah Kabupaten Belitung telah memberikan beberapa surat peringatan untuk segera melakukan pembangunan kepada PT Belitung Inti Permai dengan surat terakhir nomor: 005/0819/III/2020 tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Peringatan ke-3.

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung IntiPermai tentang Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan *Billiton Beach Hotel* dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung nomor: 181/1003/PK/I/2021 dan nomor: 8002/PERJ/DIR-BIP/IX/2021 tanggal 10 November 2021.

Sampai dengan tahun 2023. tidak adanya itikad baik dari pihak PT. Belitung IntiPermai untuk pembangunan billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung tersebut.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Belitung menginisiasi untuk melakukan pengakhiran kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Belitung Inti Permai tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung nomor: 181/05/PK/II2010 dan nomor: 8001/BIP/PEJ/DIR/IV/2010. yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung nomor: 703KEP/BPKAD/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Atas pengakhiran kerjasama tersebut. dilakukan pemisahan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai dari total luas 121.700 m² dengan total nilai Rp608.500.000.00 menjadi yaitu:

a. Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput dengan luas 78.340 m². an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai

Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan. maka Nilai Jual objek pajak

(NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp608.500.000.00/121.700) adalah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Jadi perhitungan nilai perolehan saat perjanjian saat pemisahan adalah (78.340 m² x Rp.5000.00) adalah Rp394.500.000.00.

b. Hak Guna Bangunan No. 383/ Keciput dengan luas 42.800 m². an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai. melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh notaris Andrias Tjahya. S.H..M.Kn (Hak atas Tanah ini hapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Secara otomatis Hak Guna Bangunan No. 383/ Keciput dengan luas 42.800 m² kembali ke Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor: 00003/Belitung. Desa Keciput tanggal 20 April 2010 an Pemerintah Kabupaten Belitung.

Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan. maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp608.500.000.00/121.700) adalah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Jadi perhitungan nilai perolehan saat perjanjian saat pemisahan adalah (42.800 m² x Rp.5000.00) adalah Rp214.000.000.00.

Perlakuan untuk aset berupa tanah ini akan dilakukan penghapusan sebagian dari daftar aset kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah tahun 2024 senilai Rp214.000.000.00.

Perlakuan aset ini akan dilakukan reklasifikasi dan disajikan menjadi Aset tetap berupa tanah. Aset ini akan dilakukan pencatatan ulang sebagai aset tetap dan akan ditetapkan status penggunaan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung. Perhitungan nilai perolehan aset ini di neraca Pemerintah Kabupaten akan disesuaikan dengan Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku.

2) Yayasan Sejahtera Warga Bulog berkurang Rp150.000.000.00

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan *Memorandum of Understanding* dengan Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog. Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian kerjasama nomor: 181/14/MOU/II/2010 dan nomor: 03/MOU/BP-YTR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Wisma Yabinstra di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung. dengan luas 299.373 m². dengan nilai perolehan Rp1.496.865.000.00. dokumen kepemilikan adalah sebagai berikut:

a. Hak Pengelolaan (HPL) nomor 4/ Keciput. NIB. 04.03.04.20.00686. pemegang hak Pemerintah Kabupaten Belitung. tanggal 22 September

2008. NIB. 04.03.04.20.00686. tanggal 22 September 2008. luas 150.530 m². Surat Ukur No. 4/Keciput/2000 tanggal 3 Mei 2000.

b. Hak Pengelolaan (HPL) nomor 2/ Keciput. NIB. 04.03.04.20.00697. pemegang hak Pemerintah Kabupaten Belitung. tanggal 12 Oktober 2009. luas 148.843 m². Surat Ukur No. 5/Keciput/2000 tanggal 3 Mei 2000.

Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan. maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp1.496.865.000.00/299.373) adalah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Pemerintah Kabupaten Belitung memperoleh pemisahan Hak Pengelolaan (HPL) nomor 31/Kab. Belitung. NIB. 29.03.00.00.00232. an Pemerintah Kabupaten Belitung. Alamat Jalan Tanjung Kelayang Dalam. Surat Ukur 108/Belitung/2018. tanggal 12 Januari 2018. dengan luas 30.000 m². keterangan Pemisahan Hak Pengelolaan nomor: 00029/Belitung.

Jika dilakukan perhitungan. maka nilai perolehan saat perjanjian adalah (Rp5.000.00x 30.000) adalah 150.000.000.00.

Perlakuan untuk aset berupa tanah ini akan dilakukan penghapusan sebagian dari daftar aset kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp150.000.000.00 dari nilai tercatat awal saat perjanjian.

Aset ini telah dilakukan pencatatan ulang sebagai aset tetap berupa tanah dan juga telah ditetapkan status penggunaan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung tentang Penetapan Status Penggunaan Nomor : 188.45/464.A/KEP/BPKAD/2020 Tanggal: 31/8/2020. Hibah Dari Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yabinstra) dengan rincian tanah kosong yang sudah diperuntukkan. kode barang 1.3.1.01.002.002.002. register 11. alamat Desa Keciput Kecamatan Sijuk. dokumen kepemilikan sertifikat hak pengelolaan nomor 00031/Kab.Belitung tanggal 17 Januari 2018. NIB 29.03.00.00.00232. luas 30.000 m². keterangan pemisahan hak pengelolaan nomor: 0029/Belitung.

Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat ini adalah Rp48.000.00. Setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat ini adalah (Rp48.000 x 30.000 m) adalah sebesar Rp1.440.000.000.00.

Catatan lain terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga:

1. Kerjasama pengelolaan aset berupa satu unit gedung seluas 6.307m^2 di atas tanah seluas 10.314 m^2 di Jalan Veteran dan Depati Gegedek berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Istana Kawi Kencana tentang Perjanjian

Sewa Menyewa dan Penggunausahaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002 sebagaimana telah di-*addendum* pada tanggal 29 April 2002 Nomor: 028.8/00638/2002. telah mengalami perubahan luas objek yang dikerjasamakan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembatalan Sebagian Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Istana Kawi Kencana tentang Perjanjian Sewa Menyewa dan Penggunausahaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung nomor: 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002 sebagaimana telah di-*addendum* pada tanggal 29 April 2002 nomor: 028.8/00638/2002.

Adapun perubahan luas objek yang disewakan tersebut adalah gedung dari seluas 6.307 m^2 di atas tanah seluas 10.314 m^2 menjadi gedung seluas 3.111m^2 di atas tanah seluas 5.236 m^2.

Perubahan luasan tersebut disebabkan PT. Istana Kawi Kencana tidak mampu memaksimalkan luasan yang dikerjasamakan sebelumnya dan tidak ada kompensasi dalam bentuk tanah lain kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dengan adanya perubahan luasan objek yang dikerjasamakan tersebut. maka berakibat berubahnya jumlah kewajiban pihak PT. Istana Kawi Kencana (PT.IKK) kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dari Rp1.250.000.000.00 menjadi Rp625.000.000.00 sebagaimana yang telah disetorkan oleh pihak PT. Istana Kawi Kencana. sehingga tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan sisa pembayaran ke Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar Rp625.000.000.00. Dengan kata lain menurut PT. Istana Kawi Kencana. pembayaran untuk masa perjanjian sewa selama 30 tahun sudah dilunasi/ dibayar sesuai bagian yang menjadi hak mereka.

Perubahan objek pemanfaatan sebagaimana dimaksud di atas. tentunya tidak merubah status objek pemanfaatan sebagai barang milik daerah. Sehingga pada saat berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa maka seluruh aset yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa berikut pembangunan/ renovasi yang dilakukan oleh pihak PT. Istana Kawi Kencana dan PT. Barataguna Indoganesha.

Pada tahapan pengelolaan. gedung yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Istana Kawi Kencana selanjutnya dilaksanakan oleh PT. Barataguna Indoganesha dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Istana Kawi Kencana tentang Perjanjian Sewa Menyewa dan Penggunausahaan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung nomor 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002. yang menyebutkan bahwa pihak kedua (PT. Istana Kawi Kencana) diperkenankan untuk bekerjasama dengan pihak lain manapun juga dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk PT. Barataguna Indoganesha (PT. BI). dan pada praktiknya hal tersebut sudah dilaksanakan.

Secara teknis. Pihak Pemerintah Kabupaten Belitung tidak dapat terlibat secara langsung dalam perikatan kerjasama antara PT. Istana Kawi Kencana dengan PT. Barataguna Indoganesha. sehingga pada saat PT. Barataguna Indoganesha menyewakan sebagian tempat/ bangunan kepada pihak lain. maka tidak bisa langsung mendapatkan kontribusi dikarenakan memang tidak diatur dalam nota kesepahaman tentang pembagian kontribusi dalam hal dikerjasamakan kembali oleh PT. Barataguna Indoganesha dengan pihak lain.

Pada tahun 2007 pihak PT. Barataguna Indoganesha memang pernah membangun kios-kios sebanyak 9 kios dan 1 unit Bantuan Operasional Kesehatans Anjungan Tunai Mandiri (ATM). namun saat ini sudah dirobohkan dikarenakan tidak ada izin/ persetujuan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan pembangunannya. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk melakukan perubahan nota kesepahaman yang sudah ada antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Istana Kawi Kencana dengan alternatif langsung dikerjasamakan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Barataguna Indoganesha. sehingga lebih mudah dalam melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemanfaatan atas barang milik daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah berupaya mengirimkan surat kepada direktur/pimpinan PT. Istana Kawi Kencana. akan tetapi surat yang dikirimkan tersebut balik kembali karena alamat kantor yang dituju sudah tidak ditemukan keberadaannya.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tahun 2013. angka 4. Perjanjian Kerja Sama PT BI dan PT IKK Nomor 01/BRT/TPG/002 Lemah Secara Hukum dan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah oleh Yayasan Pendidikan Belitung Berehun (YPBB) Tanpa Perjanjian. di mana rekomendasi BPK RI yaitu memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengkaji kedudukan hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 01/BRT/TPG/002 tanggal 22 Januari 2002 antara PT. Istana Kawi Kencana (PT.IKK) dan PT. Barataguna Indoganesha (PT. BI). namun belum belum sampai pengakhiran perjanjian kerjasama dengan PT. Istana Kawi Kencana (PT.IKK). Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan kerjasama langsung dengan PT. Barataguna Indoganesha (PT. BI).

2. PT. Belitong Inti Permai

Pemerintah Kabupaten Belitung telah berupaya melakukan pengukuran bersama dengan pihak terkait seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung dihadiri oleh perwakilan dari Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Belitung. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Kecamatan Sijuk. unsur PT. Belitong Inti Permai dan unsur Pemerintah Desa Keciput berdasarkan Dokumen kepemilikan tanah tersebut adalah Hak Pengelolaan 0003/ Belitung. Desa Keciput tanggal 20 April 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pengukuran ini ditujukan untuk memastikan luasan atas luas lahan yang telah dikerjasamakan dan menindaklanjuti addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung Inti Permai tentang Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung tanggal 10 November 2022. Pemerintah Kabupaten Belitung bermaksud untuk mengambil kembali sebagian luasan lahan yang dikerjasamakan seluas ± 43.360 m². sedangkan sisa lahan seluas ± 78.340 m² tetap dikelola oleh PT Belitong Inti Permai.

Pemerintah Kabupaten Belitung menginisiasi untuk melakukan pengakhiran kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Belitung Inti Permai tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Billiton Beach Hotel dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung nomor: 181/05/PK/II2010 dan nomor: 8001/BIP/PEJ/DIR/IV/2010. yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung nomor: 703KEP/BPKAD/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Atas pengakhiran kerjasama tersebut. dilakukan pemisahan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai dari total luas 121.700 m² dengan total nilai Rp608.500.000.00 menjadi yaitu:

1) Hak Guna Bangunan No. 42/ Keciput dengan luas 78.340 m². an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai

   Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan. maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp608.500.000.00/121.700) adalah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Jadi perhitungan nilai perolehan saat perjanjian saat pemisahan adalah (78.340 m² x Rp.5000.00) adalah Rp394.500.000.00.

2) Hak Guna Bangunan No. 383/ Keciput dengan luas 42.800 m². an. Perseroan Terbatas Belitung Inti Permai. melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh notaris Andrias Tjahya. S.H..M.Kn (Hak atas Tanah ini hapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

   Secara otomatis Hak Guna Bangunan No. 383/ Keciput dengan luas 42.800 m² kembali ke Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) nomor: 00003/Belitung. Desa Keciput tanggal 20 April 2010 an Pemerintah Kabupaten Belitung.

   Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan. maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp608.500.000.00/121.700) adalah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Jadi perhitungan nilai perolehan saat perjanjian saat pemisahan adalah (42.800 m² x Rp.5000.00) adalah Rp214.000.000.00.

Perlakuan untuk aset berupa tanah ini akan dilakukan penghapusan sebagian dari daftar aset kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak

ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah senilai Rp214.000.000.00.

Perlakuan aset ini akan dilakukan reklasifikasi dan disajikan menjadi Aset tetap berupa tanah. Aset ini akan dilakukan pencatatan ulang sebagai aset tetap dan akan ditetapkan status penggunaan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung. Perhitungan nilai perolehan aset ini di neraca Pemerintah Kabupaten akan disesuaikan dengan Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku.

3. Yayasan Sejahtera Warga Bulog Rp1.346.865.000.00. belum pernah tercatat sebagai data aset tetap tanah. namun status kepemilikannya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

   Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan *Memorandum of Understanding* dengan Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog. Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian kerjasama nomor: 181/14/MOU/II/2010 dan nomor: 03/MOU/BP-YTR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Wisma Yabinstra di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung. dengan luas 299.373 m². dengan nilai perolehan Rp1.496.865.000.00. dokumen kepemilikan adalah sebagai berikut:

   1) Hak Pengelolaan (HPL) nomor 4/ Keciput. NIB. 04.03.04.20.00686. pemegang hak Pemerintah Kabupaten Belitung. tanggal 22 September 2008. NIB. 04.03.04.20.00686. tanggal 22 September 2008. luas 150.530 m². Surat Ukur No. 4/Keciput/2000 tanggal 3 Mei 2000.

   2) Hak Pengelolaan (HPL) nomor 2/ Keciput. NIB. 04.03.04.20.00697. pemegang hak Pemerintah Kabupaten Belitung. tanggal 12 Oktober 2009. luas 148.843 m². Surat Ukur No. 5/Keciput/2000 tanggal 3 Mei 2000.

   Jika dilakukan pembagian secara proporsional antara luas lahan dengan total nilai perolehan. maka Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat perjanjian (Rp1.496.865.000.00/299.373) adalah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

   Pemerintah Kabupaten Belitung memperoleh pemisahan Hak Pengelolaan (HPL) nomor 31/Kab. Belitung. NIB. 29.03.00.00.00232. an Pemerintah Kabupaten Belitung. Alamat Jalan Tanjung Kelayang Dalam. Surat Ukur 108/Belitung/2018. tanggal 12 Januari 2018. dengan luas 30.000 m². keterangan Pemisahan Hak Pengelolaan nomor: 00029/Belitung.

   Jika dilakukan perhitungan. maka nilai perolehan saat perjanjian adalah (Rp5.000.00x 30.000) adalah 150.000.000.00.

   Perlakuan untuk aset berupa tanah ini akan dilakukan penghapusan sebagian dari daftar aset kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk

memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp150.000.000.00 dari nilai tercatat awal saat perjanjian.

Aset ini telah dilakukan pencatatan ulang sebagai aset tetap berupa tanah dan juga telah ditetapkan status penggunaan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung tentang Penetapan Status Penggunaan Nomor : 188.45/464.A/KEP/BPKAD/2020 Tanggal: 31/8/2020. Hibah dari Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yabinstra) dengan rincian tanah kosong yang sudah diperuntukkan. kode barang 1.3.1.01.002.002.002. register 11. alamat Desa Keciput Kecamatan Sijuk. dokumen kepemilikan sertifikat hak pengelolaan nomor 00031/Kab.Belitung tanggal 17 Januari 2018. NIB 29.03.00.00.00232. luas 30.000 m². keterangan pemisahan hak pengelolaan nomor: 0029/Belitung.

Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat ini adalah Rp48.000.00. Setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan Nilai Jual objek pajak (NJOP) yang berlaku saat ini adalah (Rp48.000 x 30.000 m) adalah sebesar Rp1.440.000.000.00.

Daftar rekapitulasi aset yang dikerjasamakan dapat dilihat pada **Lampiran 107** dan daftar aset pinjam pakai dapat dilihat pada **Lampiran 108-109.**

5.3.1.2.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa. atau digunakan untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi kriteria aset. maka Aset Tak Berwujud harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas serta memiliki potensi manfaat ekonomi di masa mendatang.

Aset Tak Berwujud yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 dengan total nilai perolehan sebesar **Rp5.855.151.917.00** berupa *Software*/aplikasi yang terdapat pada OPD. baik yang diperoleh dengan cara membangun sendiri aplikasi maupun melalui pengadaan/pembelian. Nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan pada neraca sebesar nilai buku *(nilai perolehan dikurangi amortisasi*). Rincian Aset Tak Berwujud per OPD pada **Lampiran 110.**

Mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 102 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	**5.680.168.067.00**
Mutasi tambah tahun 2024:	
1. Aplikasi Pemeliharaan PJU	98.900.000.00
2. Software RFID	66.083.850.00
3. Aplikasi Pembelajaran Digital (BOS Reguler)	10.000.000.00
Mutasi kurang tahun 2024:	
Tidak ada	-
Saldo per 31 Desember 2024	**5.855.151.917.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 103 Rincian Aset Tak Berwujud Per OPD

OPD/Sekolah	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	187.685.600.00	187.685.600.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	626.809.700.00	626.809.700.00
Dinas Kesehatan	47.440.000.00	47.440.000.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	278.852.462.00	278.852.462.00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	257.526.400.00	257.526.400.00
BPKAD	209.130.000.00	209.130.000.00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	197.251.000.00	197.251.000.00
Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah. Perdagangan dan Tenaga Kerja	34.000.000.00	34.000.000.00
Sekretariat Daerah	334.030.350.00	334.030.350.00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.170.941.750.00	1.170.941.750.00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	78.500.000.00	78.500.000.00
Dinas Perhubungan	393.648.850.00	228.665.000.00
Dinas Komunikasi dan Informatika	152.090.716.00	152.090.716.00
Bappeda	356.052.000.00	356.052.000.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	96.500.000.00	96.500.000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.070.751.500.00	1.070.751.500.00
SMP Negeri 1 Badau	31.250.000.00	31.250.000.00
SMP Negeri 3 Badau	2.500.080.00	2.500.080.00
SMP Negeri 1 Tanjungpandan	31.420.080.00	31.420.080.00
SMP Negeri 2 Tanjungpandan	50.258.109.00	40.258.109.00
SMP Negeri 3 Tanjungpandan	34.453.000.00	34.453.000.00
SMP Negeri 4 Tanjungpandan	24.454.000.00	24.454.000.00
SMP Negeri 5 Tanjungpandan	24.454.000.00	24.454.000.00
SMP Negeri 6 Tanjungpandan	28.920.000.00	28.920.000.00
SMP Negeri 7 Tanjungpandan	24.454.000.00	24.454.000.00
SMP Negeri 2 Membalong	38.929.080.00	38.929.080.00
SMP Negeri 3 Membalong	2.500.080.00	2.500.080.00
SMP Negeri 4 Membalong	2.500.080.00	2.500.080.00
SMP Negeri 5 Membalong	2.500.080.00	2.500.080.00
SMP Negeri 1 Selat Nasik	36.429.000.00	36.429.000.00
SMP Negeri 2 Sijuk	28.920.000.00	28.920.000.00
Nilai Perolehan	**5.855.151.917.00**	**5.680.168.067.00**
Amortisasi	**(5.489.127.812.50)**	**(5.191.662.710.25)**
Nilai Buku	**366.024.104.50**	**488.505.356.75**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud berupa *software* menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun.

Penentuan masa manfaat untuk *software* mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP_316/PJ./2002 pasal 2 ayat 1 Perangkat lunak komputer merupakan harta tak berwujud (*intangible asset*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan termasuk dalam kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2024 adalah **Rp5.489.127.812.50**. sedangkan jumlah Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar **Rp5.191.662.710.25**. Terjadi kenaikan sebesar **Rp297.465.102.25**. kenaikan tersebut berasal dari beban amortisasi tahun 2024.

5.3.1.2.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokan ke dalam aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran. tuntutan perbendaharaan. tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah. Aset Lain-Lain yang disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp41.756.965.860.58** yang terdiri dari aset tetap yang rusak berat/hilang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap.

Aset Lain-Lain berupa aset tetap yang rusak berat/hilang sebesar **Rp41.756.965.860.58** yang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap.

	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
- Aset Rusak Berat	41.707.198.860.58	44.436.161.910.58
- Aset Hilang	49.767.000.00	49.767.000.00
Jumlah	**41.756.965.860,58**	**44.485.928.910.58**
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(23.614.889.410,60)	(26.356.786.356.60)

Rincian Aset Lain-Lain per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 111.**

Aset yang hilang terdiri dari:

Tabel 104 Daftar Aset Hilang Tahun 2024

No	OPD	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	Laptop	6.545.000.00
2.	Sekretariat DPRD	Kamera Digital	13.040.000.00
3.	Dinas Kesehatan	Motor Yamaha Alpa	3.000.000.00
4.	Kecamatan Membalong	Motor Yamaha YT. 115	10.500.000.00
5.	Inspektorat	Laptop Fujitsu lifebook LH 532 Core i3	7.755.000.00
6.	Inspektorat	Laptop Lenovo ideapad S410p	8.927.000.00
		Total	**49.767.000.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi Aset Rusak Berat pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 105 Mutasi Aset Rusak Berat Tahun 2024

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	**Saldo Awal**		**44.485.928.910.58**
2.	**Mutasi Tambah :**		
3.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94.438.000.00
4.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Aset Alat-alat Angkutan dan Alat Kantor Rumah Tangga ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	BPPRD	138.215.000.00
5.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Aset Alat-alat Angkutan ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	90.049.700.00
6.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Aset Alat-alat Angkutan berpenumpang (mini bus) ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.452.000.00
7.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Bermotor dan Alat Angkutan Darat ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	197.965.000.00
8.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Dinas Pariwisata	99.910.000.00
9.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Besar dan Alat Angkutan ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	476.760.000.00
10.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat kantor dan rumah tangga ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Dinas Pemuda dan Olahraga	160.930.750.00
11.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupakendaraan bermotor roda dua. alat rumah tangga dan instalasi air bersih ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.220.000.00
12.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor roda dua ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	DPPKBPMD	59.075.400.00
13.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor roda dua ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Dinas Perhubungan	426.040.000.00
14.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor angkutan barang ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Kecamatan Selat Nasik	25.000.000.00
15.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor beroda dua ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Kecamatan Sijuk	91.646.000.00
16.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor beroda dua ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Kelurahan Lesung Batang	11.000.000.00

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
17.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor beroda dua dan alat angkutan lainnya ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	Sekretariat Daerah	915.518.666.00
18.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor beroda dua dan alat angkutan lainnya ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	UPT. Puskesmas Badau Dinas Kesehatan Kab. Belitung	10.000.000.00
19.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor beroda dua dan alat angkutan lainnya ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	UPT. Puskesmas Simpang Rusa Dinas Kesehatan Kab. Belitung	342.785.000.00
20.	Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor beroda dua dan alat angkutan lainnya ke Aset Lainnya. kondisi Baik menjadi Rusak Berat	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	78.703.800.00
21.	Reklasifikasi aset peralatan dan mesin (alat-alat angkutan. alat pertanian dan peternakan. alat kantor dan alat rumah tangga) menjadi aset rusak berat	Dinas Lingkungan Hidup	321.502.600.00
22.	**Mutasi Kurang :**		
23.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat tindak lanjut lelang BMD berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(759.469.050.00)
24.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat tindak lanjut lelang BMD berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	(14.630.000.00)
25.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat tindak lanjut lelang BMD berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	(90.049.700.00)
26.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(174.452.000.00)
27.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	Dinas Kesehatan	(218.000.000.00)
28.	Penghapusan BMD berupa barang inventaris dan alat besar sesuai Keputusan Sekda Kab. Belitung Nomor : 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tanggal 29 November 2024 dan penghapusan BMD berupa Kendaraan Dinas Operasional sesuai Keputusan Sekda Kab. Belitung Nomor : 188.46/115/KEP/BPKAD/2024 tanggal 29 November 2024	Dinas Lingkungan Hidup	(2.817.217.600.00)
29.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(586.962.000.00)
30.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	Dinas Pemuda dan Olahraga	(160.930.750.00)

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
31.	Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat (SDN 10 Badau) berdasarkan SK 188.46/105/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 2 Sept 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(25.000.000.00)
32.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	DPPKBPMD	(59.075.400.00)
33.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	Dinas Perikanan	(51.000.000.00)
34.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	Kecamatan Selat Nasik	(25.000.000.00)
35.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2024	KECAMATAN SIJUK	(73.646.000.00)
36..	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2025	KELURAHAN LESUNG BATANG	(11.000.000.00)
37.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/115/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2025	Sekretariat Daerah	(821.793.666.00)
38.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2025	Puskesmas Badau Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(10.000.000.00)
39.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2025	UPT. Puskesmas Simpang Rusa Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(316.275.000.00)
40.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2026	Kelurahan Parit	(68.820.000.00)
41.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2027	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	(78.703.800.00)
42.	Penghapusan aset lainnya - aset rusak berat berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl. 29 November 2027	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(130.150.000.00)
	Saldo Akhir		**41.756.965.860.58**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat per 31 Desember 2024 sebesar **Rp(23,614,889,410.60)**. nilai tersebut merupakan akumulasi penyusutan aset tetap sebelum perubahan kondisi menjadi aset rusak berat yang di reklasifikasi pencatatannya ke akumulasi penyusutan aset rusak berat. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 111.**

Tabel 106 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Tahun 2024

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	**Saldo Awal**		**26.356.786.356.60**
2.	**Mutasi Tambah :**		
3.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dan alat kantor-alat kantor lainnya ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94.438.000.00
4.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua dan alat kantor-alat kantor lainnya ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	138.215.000.00
5.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-mini bus ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	174.452.000.00
6.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	90.049.700.00
7.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	197.965.000.00
8.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat rumah tangga lainnya (home use) ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Dinas Pariwisata	99.910.000.00
9.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Dinas Pemuda dan Olahraga	157.720.816.00
10.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset alat besar dan alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	476.760.000.00
11.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	DPPKBPMD	59.075.400.00
12.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Dinas Perhubungan	426.040.000.00
13.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Kecamatan Sijuk	91.646.000.00
14.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Kecamatan Selat Nasik	25.000.000.00
15.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Kelurahan Lesung Batang	11.000.000.00
16.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Sekretariat Daerah	915.518.666.00

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
17.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	UPT Puskesmas Badau Dinas Kesehatan Kab. Belitung	10.000.000.00
18.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	UPT Puskesmas Simpang Rusa Dinas Kesehatan Kab. Belitung	342.785.000.00
19.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono	72.964.729.00
20.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan ke akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/usang	Dinas Lingkungan Hidup	235.651.513.00
21.	Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya Tahun 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14,560,000.00
22.	Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya Tahun 2024	SDN 3 Selat Nasik	19,849,167.00
23.	**Mutasi Kurang :**		
24.	Penghapusan aset lain-lain rusak berat/usang atas tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan berupa barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Setda No. 188.46/110.1/KEP/BPKAD/2024 tgl 29 November 2024	Dinas Lingkungan Hidup	(1.822.269.000.00)
25.		Sekretariat Daerah	(1.000.000.00)
26.		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(174.452.000.00)
27.		UPT Puskesmas Badau Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(10.000.000.00)
28.		UPT Puskesmas Simpang Rusa Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(316.275.000.00)
29.		Kelurahan Parit	(68.820.000.00)
30.		Kelurahan Lesung Batang	(11.000.000.00)
31.		Dinas Kesehatan	(218.000.000.00)
32.		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(759.469.050.00)
33.		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(59.075.400.00)
34.		Dinas Perikanan	(51.000.000.00)

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
35.		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(130.150.000.00)
36.		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	(90.049.700.00)
37.		Kecamatan Sijuk	(73.646.000.00)
38.		Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	(14.630.000.00)
39.		Sekretariat Daerah	(820.793.666.00)
40.		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono	(72.964.729.00)
41.		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(586.962.000.00)
42.		Dinas Lingkungan Hidup	(927.220.576.00)
43.		Dinas Pemuda dan Olahraga	(157.720.816.00)
44.		Kecamatan Selat Nasik	(25.000.000.00)
45.	Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat (SDN 10 Badau) berdasarkan SK 188.46/105/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 2 Sept 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(5.000.000.00)
	Saldo Akhir		**23.614.889.410.60**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun aset tetap yang telah dicatat sebagai aset lain-lain (rusak berat) tidak disusutkan lagi.

1. Aset lain-lain berupa barang milik daerah senilai **Rp10.431.066.354.00** telah di hibahkan/diserahkan pihak ketiga sehingga nilai aset lain-lain yang merupakan reklasifikasi persediaan ke aset lain-lain per 31 Desember 2024 senilai **Rp0.00** Mutasi aset lain-lain berupa barang milik daerah dalam proses pemindahtanganan sebagai berikut :

Tabel 107 Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	**Saldo Awal**	**10.431.066.354.00**
2.	**Mutasi Tambah :**	
3.	**Tidak ada**	
4.	Mutasi Kurang	
5.	Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemindahtangan Dalam Bentuk Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan SK nomor: 188.46/084/KEP/BPKAD/2024	(10.411.781.354.00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
6.	Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan berupa gedung dan bangunan mushola tanjung kelayang kelompok aset lain-lain di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan SK nomor: 188.46/114/KEP/BPKAD/2024	(19.285.000.00)
7.	**Jumlah Mutasi Kurang**	**(10.431.066.354.00)**
8.	**Saldo akhir**	**0.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3.1.2.4.5 Dana Bagi hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Bagi Hasil (DBH) Treasury Deposit Facility (TDF) adalah dana yang bersumber dari DBH dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan ke daerah secara nontunai melalui fasilitas TDF. Pada Tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp.225.005.000,00. Realisasi ini merupakan penyesuaian kurang catat atas pembentukan dana TDF Bagi Hasil Pajak/SDA Tahun 2024.

5.3.1.2.5 Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan untuk masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dengan tujuan administratif
b. Dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan inventarisasi dan pencatatan tanah dan/ atau bangunan yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk memperoleh kenaikan nilai yang dapat dikategorikan sebagai properti investasi. Data awal yang bersumber dari daftar barang pengguna terdapat beberapa aset tanah dan/ atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal/ *idle.* Pada 31 Desember 2024 total nilai Properi Investasi adalah sebesar Rp3.575.471.000,00. Adapun jumlah tanah yang memenuhi kategori Properti Investasi adalah 6 (enam) bidang pada OPD sebagai berikut :

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan nilai Rp1.474.450.000,00 berupa Tanah Kawasan Industri.
- Sekretariat Daerah dengan total nilai Rp. 2.101.021.000 berupa:
- Tanah Bangunan Hotel/ Penginapan/ Motel (Penginapan dan Restoran (HARLIKA) senilai Rp47.415.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Stasiun Relay Mini) Rp157.950.000,00,
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Eks Tanah Bangunan STM, SMEA, SMA, SMP Yaperbel &SPG senilai Rp1.306.228.000,00,
- Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Barata Dept Store) senilai Rp515.700.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Eks. Asrama Karyawan Timah/SPM/STAIN) senilai Rp73.728.000,00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya. yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Akun ini menampung utang perhitungan pihak ketiga (PFK). pendapatan diterima dimuka dan utang belanja daerah yang belum dibayarkan pada tahun 2024. dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1. Utang PFK	178.536.273.00	177.871.265.00
2. Pendapatan Diterima Dimuka	1.088.438.935.42	1.476.111.398.75
3. Utang Belanja	12.615.732.245.00	9.890.946.598.00
4. Utang Jangka Pendek Lainnya	-	173.806.600.00
Jumlah	**13.882.707.453.42**	**11.718.735.861.75**

1. **Utang Perhitungan kepada Pihak Ketiga** per 31 Desember 2024 sebesar **Rp178.536.273.00** terdiri dari:

   1) Utang bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan sebesar Rp178.536.273.00 yang merupakan hak pihak ketiga dari tahun 2011 s.d tahun 2021 yang ditampung dalam rekening giro atas nama Bupati Belitung Nomor 146.30.10374 dan 146.30.10093 pada Bank Sumsel Cabang Tanjungpandan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 108 Rincian Hutang PFK Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bunga jamianan kesungguhan untuk 34 perusahaan	169.694.112,00
2	Jasa giro rekening 146.301.0374 untuk 34 perusahaan	8.302.105,00
3	Jasa giro rekening 146.301.0093	490.056,00
4	Saldo giro rekening 146.301.0093	50.000,00
	Total	**178.536.273,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Utang bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp177.643.765,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp892.508,00** dikarenakan penerimaan bunga pada rekening 146.30.10374.

Penjelasan lebih lanjut terkait jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan dapat dilihat pada penjelasan lain-lain di BAB ini.

2) Utang PFK pada Bendahara BOS tahun lalu sebesar Rp227.500,00 telah disetor ke Kas Negara pada tahun 2024 sehingga tidak terdapat utang pajak pada tahun 2024.

Tabel 109 Utang Pajak Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)				Jumlah (Rp)
		PPh ps 21	PPh ps 23	PPN	PFK lainnya	
1	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan pendapatan dari periode yang akan datang yang diterima dalam periode sekarang. Masa sewa dihitung sejak tanggal BA. perjanjian sewa. apabila perjanjian sewa terjadi pada pertengahan bulan maka perhitungan masa sewa mulai dihitung pada bulan tersebut (terhitung 1 bulan).

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.088.438.935.42** yang merupakan pendapatan sewa atas pemakaian kekayaan daerah.

Mutasi pendapatan diterima di muka sebagai berikut :

Tabel 110 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**Saldo Awal**	**1.476.111.398,75**
2	Mutasi Tambah :	
3	Pendapatan sewa diterima di muka berdasarkan perjanjian sewa tahun 2024	579.721.835,42
	Kelebihan pembayaran sewa tempat usaha dan jasa kebersihan bulan september dan oktober 2024 an. Nurhadi	1.433.000,00
4	Mutasi Kurang :	
5	Pendapatan sewa yang diterima pada tahun lalu namun baru diakui sebagai pendapatan-LO di tahun 2023	(968.827.268,75)
6	Koreksi atas kelebihan catat pendapatan diterima dimuka Sewa lahan tempat usaha dikawasan wisata pantai tanjungpendam tahun sebelumnya pada Dinas Pariwisata	(30,00)
7	**Saldo Akhir**	**1.088.438.935,42**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan sewa diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 111 Mutasi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Sewa Bangunan Petak Toko dikawasan Kave Senang Tanjungpandan	408.000.000,00	408.000.000,00
2	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik	14.457.666,67	14.457.666,67

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
	Pemkab Belitung di Kawasan Galeri KUKM Jln. Sriwijaya Tanjungpandan (PT. Bank Sumsel Babel)		
3	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Kave Senang Tanjungpandan (PT. Bank Sumsel Babel)	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Kave Senang Tanjungpandan (PT. Bank Rakyat Indonesia)	3.333.333,33	3.333.333,33
5	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Galeri KUKM Jln. Sriwijaya Tanjungpandan (PT. BSI Cab. Tanjungpandan)	11.666.666,67	-
6	Sewa lahan di lokasi pasar Berehun Tg.Pandan	2.475.000,00	-
7	Sewa lahan bagian samping kanan petak/toko milik Pemkab. Belitung di lokasi pasar ikan Tg.Pandan	67.668,75	67.668,75
8	Sewa Bangunan Petak Toko dikawasan Pasar Berehun Tanjungpandan	17.100.000,00	19.650.000,00
9	Sewa Sebagaian Tanah seluas 299 m2 dan 1 (satu) Unit bangunan Cold Storage seluas 126 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung di jalan DOK kelurah Kota Kecamatan Tanjungpandan. (PT. Cahaya Bahari Belitung)	-	47.000.000,00
10	Sewa Sebagaian Tanah seluas 359 m2 dan 1 (satu) Unit bangunan Cold Storage seluas 359 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung di jalan DOK kelurah Kota Kecamatan Tanjungpandan. (PT.Belitung Berkah Mandiri)	87.500.000,00	162.500.000,00
11	Sewa sebagian bidang tanah seluas 137 m2 dan bangunan gedung bengkel seluas 75 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang terletak di Jln. Dok Kelurahan Kota Kec. Tanjungpandan. (sdr. Sandy Sumbadji)	4.031.666,67	13.707.666,66
12	Sewa sebagian bidang tanah seluas 299 m2 dan Unit bangunan Cold Storage seluas 126 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung di jalan DOK kelurah Kota Kecamatan Tanjungpandan. (PT. Laskar Gemilang Serumpun – Wara Prasiddha Swastika)	39.343.500,00	-
13	Pendapatan Sewa Lahan ATM di RSUD	18.456.000,00	18.456.000,00
14	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di kawasan Kantor Bupati Belitung di Jln Jend. A Yani Nomor 001 Tg. Pandan	18.422.000,00	-
15	Sewa sebagian bidang tanah seluas 4.284 m2 yang berlokasi di Pebuhan penyeberangan Tanjung RU' Desa Pegantungan	259.515.000,00	519.030.000,00
16	Sewa lahan tempat usaha dikawasan wisata pantai tanjungpendam	42.600.566,67	56.416.996,67
17	Sewa GOR Non Komersil	1.500.000,00	48.000.000,00
18	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sudirman Kantor	61.666.666,67	81.666.666,67

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
	BPKAD Kabupaten Belitung		
19	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sriwijaya Kantor BPPRD Kabupaten Belitung	51.970.200,00	68.825.400,00
20	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sriwijaya Kantor BPPRD Kabupaten Belitung	29.900.000,00	-
21	Kelebihan pembayaran sewa tempat usaha dan jasa kebersihan bulan september dan oktober 2024 an. Nurhadi	1.433.000,00	
	Total	**1.088.438.935,42**	**1.476.111.398,75**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian perhitungan pendapatan sewa diterima di muka dapat dilihat pada **Lampiran 113.**

3. Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja operasional yang masih menjadi kewajiban OPD yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar **Rp12.615.732.245,00** terdiri dari utang belanja pegawai **Rp6.887.850.127,00** utang belanja barang dan jasa **Rp5.727.882.118,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112 Rincian Utang Belanja Tahun 2024

Uraian		Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Utang Belanja			
1	**Utang Belanja Pegawai**	6.887.850.127,00	6.911.574.656,00
	- Utang belanja pegawai pada BLUD berupa Jasa layanan Rumah Sakit Umum Daerah	6.776.385.847,00	6.819.134.987,00
	- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	109.423.280,00	66.660.299,00
	- Biaya Upah Pungut Retribusi Daerah	2.041.000,00	25.779.370,00
2	**Utang belanja barang dan jasa**	5.727.882.118,00	2.979.371.942,00
	- Utang jasa tanaga kesehatan	152.348.040,00	186.940.180,00
	- Utang belanja jasa telepon	55.340.890,00	58.499.974,00
	- Utang belanja jasa air	18.753.212,00	24.770.012,00
	- Utang belanja jasa listrik	501.547.673,00	581.674.537,00
	- Utang belanja jasa surat kabar	995.000,00	400.000,00
	- Utang belanja jasa Kawat/Faksimili/ Internet	74.942.979,00	72.027.620,00
	- Utang Barang Pakai Habis-alat/Bahan untuk kegiatan kantor -Alat Tulis Kantor	-	244.000,00
	- Utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman	237.000,00	-
	- Utang belanja perjalanan dinas	21.337.360,00	-
	- Utang belanja dan jasa BLUD	4.902.379.964,00	2.054.815.619,00
	Jumlah	**12.615.732.245,00**	**9.890.946.598,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. Utang jangka pendek lainnya

Pada tahun 2024 tidak terdapat utang jangka pendek lainnya. adapun utang jangka pendek tahun 2023 sebesar Rp173.806.600,00 yang tahun lalu tercatat pada RKUD berupa setoran pengembalian dana BOS dan dana BOP. telah disetorkan melalui proses pemindah bukuan ke RKUN pada tanggal 11 Juni 2024 sebesar Rp74.705.000,00 dan pada tanggal 5 September 2024 sebesar Rp99.101.600,00.

Rincian utang belanja dapat dilihat pada **Lampiran 114-115.**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2024 tidak terdapat utang jangka panjang.

5.3.3 Ekuitas

5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp2.265.137.100.521,02.**

5.4 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO. beban. transfer. dan pos-pos luar biasa. Struktur Laporan Operasional pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih. Munculnya hak tagih pada saat ditetapkannya surat ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau pada saat direalisasi artinya bahwa hak yang telah diterima tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Realisasi pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 959.800.476.982,32** yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 113 Rincian Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2024

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli daerah - LO	194.473.628.698,82	190.694.062.752,40	3.779.565.946,42	1,98
Pendapatan Transfer – LO	743.282.740.996,00	878.191.589.062,00	(134.908.848.066,00)	(15,36)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.044.107.287,50	141.453.568.952,08	(119.409.461.664,58)	(84,42)
Jumlah	**959.800.476.982,32**	**1.210.339.220.766,48**	**(250.538.743.784,16)**	**(20,70)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Ketetapan Retribusi (SKR)/surat ketetapan lainnya yang terdiri dari:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak - LO

Realisasi pendapatan pajak daerah yang disajikan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar **Rp97.654.261.782,25** merupakan pendapatan pajak daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/surat ketetapan lainnya yang diakui sebagai hak pemerintah daerah. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp1.246.089.052,55** atau **1,29%** di mana pendapatan pajak LO pada tahun 2023 sebesar **Rp96.408.172.729,70**.

Secara rinci pendapatan pajak yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 114 Rincian Pendapatan Pajak - LO

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel - LO	-	9.400.128.220,07	(9.400.128.220,07)	(100,00)
Pajak Restoran - LO	-	11.489.931.147,81	(11.489.931.147,81)	(100,00)
Pajak Hiburan - LO	-	440.195.500,30	(440.195.500,30)	(100,00)
Pajak Reklame - LO	1.135.602.219,85	995.366.968,62	140.235.251,23	14,09
Pajak Penerangan Jalan - LO	-	15.278.250.761,00	(15.278.250.761,00)	(100,00)
Pajak Parkir - LO	-	642.689.900,00	(642.689.900,00)	(100,00)
Pajak Air Tanah - LO	138.988.668,00	125.441.980,80	13.546.687,20	10,80
Pajak Sarang Burung Walet – LO	115.970.000,00	147.216.000,00	(31.246.000,00)	(21,22)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	25.845.285.183,00	32.760.292.505,05	(6.915.007.322,05)	(21,11)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	10.582.062.510,00	10.178.754.331,00	403.308.179,00	3,96
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	21.371.176.637,00	14.949.905.415,05	6.421.271.221,95	42,95)
Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT) - LO	38.465.176.564,40	-	38.465.176.564,40	100,00
Jumlah	**97.654.261.782,25**	**96.408.172.729,70**	**1.246.089.052,55**	**1,29**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan pajak daerah yang disajikan pada Laporan Operasional (LO) apabila disandingkan dengan pendapatan pajak pada LRA terdapat perbedaan sebesar **Rp1.920.932.285,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 115 Rincian Selisih Pendapatan Pajak LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	5.983.562,00
2. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak PBB P2	1.972.399.899,00
3. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Hotel	(51.313.795,00)
4. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Restoran	(4.334.381,00)
5. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Air Tanah	(1.803.000,00)
Total	**1.920.932.285,00**

Sumber: DATA BPKAD (DIOLAH)

Selisih tersebut dikarenakan adanya pengakuan pendapatan pajak pada LO yang telah ditetapkan namun belum diterima pembayarannya/penyetorannya sampai dengan akhir tahun 2024 (Piutang) dan penyesuaian pelunasan piutang pajak tahun lalu.

Adapun pendapatan pajak-LO diperoleh sebagaimana berikut ini:

Tabel 116 Mutasi Perolehan Pendapatan Pajak LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Pajak (LRA)	95.733.329.497,25
Dikurangi :	
Pelunasan piutang pajak tahun 2023 dan tahun sebelumnya	(1.562.892.721,00)
Ditambah :	
Pengakuan piutang pajak tahun 2024	3.483.825.006,00
Jumlah Pendapatan Pajak-LO	**97.654.261.782,25**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi - LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah yang disajikan pada Laporan Operasional TA 2024 sebesar **Rp41.311.650.044,33** merupakan pendapatan retribusi daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR)/surat ketetapan lainnya yang diakui sebagai hak pemerintah daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp29.453.146.017,33** atau **248,37%** di mana pendapatan retribusi LO pada tahun 2022 sebesar **Rp11.858.504.027,00**.

Secara rinci pendapatan retribusi yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 117 Rincian Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	31.677.099.973,00	1.423.348.100,00	30.253.751.873,00	2.125,53
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	793.916.000,00	702.203.000,00	91.713.000,00	13,06
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	132.360.000,00	129.180.000,00	3.180.000,00	2,46
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.282.191.000,00	1.282.277.833,33	(86.833,33)	(0,01))
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	115.750.000,00	(115.750.000,00)	(100,00)

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	0,00	17.200.000,00	(17.200.000,00)	(100,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	86.000.000,00	74.800.000,00	11.200.000,00	14,97
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	0,00	41.806.000,00	(41.806.000,00)	(100,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.296.011.358,33	1.773.486.191,67	(477.474.833,34)	(22,43)
Retribusi Terminal – LO	54.910.000,00	81.160.000,00	(26.250.000,00)	(32,34)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	207.227.000,00	214.115.000,00	(6.888.000,00)	(3,22)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa - LO	73.350.000,00	44.950.000,00	28.400.000,00	63,18
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	114.715.000,00	113.770.000,00	945.000,00	0,83
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	435.323.800,00	326.902.200,00	108.421.600,00	33,17
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	2.415.021.200,00	2.152.612.000,00	262.409.200,00	12,19
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	1.555.177.950,00	1.744.063.100,00	(188.885.150,00)	(2,87)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah daerah-LO	446.332.180,00	0,00	446.332.180,00	100,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	72.581.000,00	0,00	72.581.000,00	100,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	1.570.880.602,00	(1.570.880.602,00)	(100,00)
Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol - LO	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00))
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	669.433.583,00	0,00	669.433.583,00	100,00
Jumlah	**41.311.650.044,33**	**11.858.504.027,00**	**29.453.146.017,33**	**248,37**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan retribusi yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan retribusi pada LRA sebesar **Rp28.328.411.252,00** terdapat perbedaan sebesar **Rp12.983.238.792,33**.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan retribusi pada LO per 31 Desember 2024. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118 Rincian Selisih Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan non kapitasi BPJS tahun 2024	234.381.600,00
2. Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2024	14.860.000,00
3. Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan pasar (Los)	4.340.000,00
4. Penyesuaian pendapatan retribusi pelayanan pasar dari pendapatan sewa kios yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2024 (KUKM)	427.650.000,00
5. Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	12.260.995.039,00

6. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pendapatan tanah dan bangunan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2024 (Cold Storage-Dinas Perikanan)	131.676.000,00
7. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pendapatan tanah dan bangunan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2024 (Lahan ATM-KUKM)	32.858.668,75
8. Penyesuaian penambahan piutang retribusi Pemanfaatan Aset daerah atas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 2024	41.230.000,00
9. Penyesuaian penambahan piutang retribusi tempat khusus parkir tahun 2024	36.370.000,00
10. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2024 (lahan tanjung ru – dishub)	259.515.000,00
11. Penyesuaian penambahan piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2024	143.395.492,00
12. Penyesuaian penambahan piutang retribusi penjualan hasil produksi pemerintah daerah tahun 2024	255.280.020,00
13. Penyesuaian pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2024 (Sewa Gedung Olahraga)	48.000.000,00
14. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan atas pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2023	(152.119.600,00)
15. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum atas pelunasan piutang retribusi parkir ditepi jalan umum tahun 2023	(20.730.000,00)
16. Penyesuaian penngurangan piutang retribusi pelayanan pasar (Los)	(12.460.000,00)
17. Penyesuaian pendapatan retribusi pelayanan pasar atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2023	(425.208.751,00)
18. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan pendidikan atas pelunasan piutang retribusi pelayanan pendidikan tahun 2023	(2.044.546,00)
19. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan pemakaian kekayaan daerah atas pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023	(972.000,00)
20. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi tempat khusus parkir atas pelunasan piutang retribusi tpelayanan tempat khusus parkir tahun 2023	(27.090.000,00)
21. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2024 (lahan ATM – KUKM)	(47.000.335,42)
22. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2024 (cold storage – Dinas Perikanan)	(39.343.500,00)
23. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi Pemanfaatan Aset daerah atas pelunasan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 2024	(24.800.000,00)
24. Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pendapatan tanah dan bangunan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2024 (Lahan ATM-Sekretariat Daerah)	(18.422.000,00)
25. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga atas pelunasan piutang retribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2023	(8.800.000,00)
26. Penyesuaian pendapatan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2024 (sewa gor oleh KPU – dispora)	(1.500.000,00)
27. Penyesuaian pengurangan pendapatan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atas pendapatan diterima dimuka akibat adanya kelebihan bayar	(1.433.000,00)

28. Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah atas pelunasan piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2023	(125.389.295,00)
Total	**12.983.238.792,33**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun pendapatan retribusi-LO diperoleh sebagaimana berikut ini:

Tabel 119 Mutasi Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Retribusi (LRA)	28.328.411.252,00
Dikurangi :	
Penyesuaian pendapatan retribusi atas pelunasan piutang retribusi tahun lalu	(375.905.441,00)
Penyesuaian pendapatan retribusi yang diterima dimuka pada tahun berjalan	(531.407.586,42)
Ditambah :	
Penyesuaian pengakuan piutang retribusi yang telah ditetapkan namun belum diterima sampai dengan akhir tahun 2024	12.990.852.151,00
Pendapatan retribusi yang terima di muka tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan periode tahun 2023	899.699.668,75
Jumlah Pendapatan Retribusi - LO	**41.311.650.044,33**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pendapatan bagi hasil laba/dividen diterima oleh kas daerah dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

Tabel 120 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	5.566.654.063,95	6.035.003.956,00	(468.349.892,05)	(7,76)
Jumlah	**5.566.654.063,95**	**6.035.003.956,00**	**(468.349.892,05)**	(7,76)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LO merupakan pembagian dividen tahun buku 2022 berdasarkan hasil RUPS pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 121 Rincian Dividen 2024

Nama BUMD/Perusahaan Milik Daerah	Dividen
PT. Bank Sumsel Babel	5.566.654.063,95
Jumlah	**5.566.654.063,95**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Lain-Lain PAD yang Sah yang disajikan pada Laporan Operasional TA 2024 sebesar **Rp49.941.062.808,29** merupakan pendapatan yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK. pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar **Rp26.451.319.231,41** atau **34,63%** di mana Lain-Lain PAD yang Sah - LO pada tahun 2023 sebesar **Rp76.392.382.039,70**.

Secara rinci Lain-lain PAD yang Sah yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 122 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	55.346.600,00	46.598.936,66	8.747.663,34	18,77
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	15.695.957,00	12.874.782,00	2.821.175,00	21,91
Jasa Giro-LO	2.522.185.887,00	3.358.998.830,00	(836.812.943,00)	(24,91)
Pendapatan Bunga-LO	1.804.931.928,00	1.723.561.643,84	81.370.284,16	4,72
Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain-LO	3.429.707.340,01	2.826.978.463,72	602.728.876,29	21,31
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	792.560.866,99	477.354.083,78	315.206.783,21	66,03
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	18.845.669,00	35.011.560,00	(16.165.891,00)	(46,17))
Pendapatan dari Pengembalian-LO	286.082.588,00	1.187.573.442,00	(901.490.854,00)	(75,91)
Pendapatan dari BLUD-LO	41.015.705.972,29	66.723.430.297,70	(25.707.724.325,41)	(38,53)
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	-	-	-	-
Jumlah	**49.941.062.808,29**	**76.392.382.039,70**	**(26.451.319.231,41)**	**(34,63)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah yang disajikan pada Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LRA sebesar **Rp55.404.647.823,13** terdapat perbedaan sebesar **Rp5.463.585.014,84**.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LO per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123 Rincian Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan pendapatan hasil kerja sama daerah akibat penambahan piutang hasil kerja sama daerah	1.920.000,00
2. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum 2024	161.200,00

Uraian	Jumlah (Rp)
3. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2023	5.302.261,00
4. Koreksi kurang catat pendapatan BLUD akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	331.800,00
5. Penyesuaian Pengembalian BPJS Kesehatan Tahun 2020-2023	141.994.833,00
6. Penyesuaian hasil sewa ruang ATM atas pendapatan diterima dimuka pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	18.456.000,00
7. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini (sewa ATM –BPPRD)	36.855.200,00
8. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini (ATM – Tj Kelayang)	13.816.400,00
9. Penyesuaian pelunasan piutang piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD	(2.051.250,00)
10. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(415.500,00)
11. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(257.400,00)
12. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olah raga (pemakaian tempat usaha)	(0,00)
13. Penyesuaian atas kurang bayar pendapatan bunga deposito dari Bank Sumsel	(8.218.797,84)
14. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan BLUD	(5.623.123.761,00)
15. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka tahun 2024 (sewa ATM –Sekretariat DPRD)	(29.900.000,00)
16. Penyesuaian pendapatan BLUD atas pendapatan yang terima di muka tahun berjalan pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	(18.456.000,00)
Total	**5.463.585.014,84**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi lain-lain PAD - LO diperoleh dari :

Tabel 124 Rincian Mutasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah (LRA)	**55.404.647.823,13**
Dikurangi :	
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(257.400,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(415.500,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan BLUD	(5.623.123.761,00)
Penyesuaian pelunasan piutang piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD (kontribusi sewa kios PT. Puncak Jaya Lestari) tahun 2024	(2.051.250,00)
Penyesuaian pendapatan BLUD atas pendapatan yang terima di muka tahun berjalan pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	(18.456.000,00)
Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	(29.900.000,00)
Penyesuaian atas kurang bayar pendapatan bunga deposito dari Bank Sumsel	(8.218.797,84)
Ditambah :	
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	161.200,00
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian tempat usaha (UPT. Taman Hiburan)	5.302.261,00
Penyesuaian penambahan piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD (kontribusi sewa kios PT. Puncak Jaya Lestari)	1.920.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian hasil sewa ruang ATM atas pendapatan diterima dimuka pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	18.456.000,00
Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini (sewa ATM –BPPRD)	36.855.200,00
Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini (ATM – Tj Kelayang)	13.816.400,00
Koreksi kurang catat pendapatan BLUD akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	331.800,00
Penyesuaian Pengembalian BPJS Kesehatan Tahun 2020-2023	141.994.833,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO	**49.941.062.808,29**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan BLUD sebesar **Rp41.015.705.972.29** diperoleh dari:

Tabel 125 Rincian Mutasi Pendapatan BLUD

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan BLUD (LRA)	**46.496.503.100,29**
Dikurangi :	
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono tahun lalu	(5.623.123.761,00)
Penyesuaian pendapatan BLUD atas pendapatan yang terima di muka tahun berjalan pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	(18.456.000,00)
Ditambah :	
Penyesuaian pendapatan sewa ruangan untuk ATM di lokasi BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono yang terima di muka tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan periode tahun 2022.	18.456.000,00
Koreksi kurang catat pendapatan BLUD akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	331.800,00
Penyesuaian Pengembalian BPJS Kesehatan Tahun 2020-2023	141.994.833,00
Jumlah Pendapatan BLUD - LO	**41.015.705.972,29**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil. Realisasi rincian pendapatan transfer sebagai berikut:

Tabel 126 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana Perimbangan				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	80.960.067.654,00	136.611.970.768,00	(55.651.903.114,00)	(40,74)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	485.393.500.051,00	469.430.528.687,00	15.962.971.364,00	3,40
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	10.766.768.288,00	69.464.145.429,00	(58.697.377.141,00)	(84,50)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	84.237.114.249,00	84.872.962.908,00	(635.848.659,00)	(0,75)

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - lainnya				
Dana Insentif Daerah-LO	-	41.029.718.000,00	(41.029.718.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Fiskal-LO	15.976.321.000,00	-	15.976.321.000,00	100,00
Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	61.977.343.754,00	70.068.895.770,00	(8.091.552.016,00)	(11,55)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.971.626.000,00	6.713.367.500,00	(2.741.741.500,00)	(40,84)
Jumlah	**743.282.740.996,00**	**878.191.589.062,00**	**(134.908.848.066,00)**	**(15,36)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan transfer yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan transfer pada LRA sebesar **Rp781.559.645.246,00** terdapat selisih sebesar **Rp38.276.904.250,00**. Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan transfer pada LO per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127 Selisih Pendapatan Transfer LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan dana desa yang berdasarkan kebijakan Akuntansi tidak diakui di pendapatan-LO	(41.477.591.670,00)
2. Penyesuaian atas pelunasan piutang bagi hasil pajak provinsi tahun lalu yang diterima tahun ini	(12.091.797.198,00)
3. Piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2024.	12.780.415.013,00
4. Penyesuaian kurang catat atas pembentukan dana TDF Bagi Hasil Pajak/SDA Tahun 2024	225.005.000,00
5. Koreksi kurang catat bagi hasil pajak provinsi atas *over* target penerimaan TW.I s.d TW. IV berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/33/BAKUDA/2025 Tanggal 27 Februari 2025	2.287.064.605,00
Total	**(38.276.904.250,00)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi Pendapatan Transfer - LO diperoleh dari :

Tabel 128 Mutasi Pendapatan Transfer LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Transfer (LRA)	781.559.645.246,00
Ditambah :	
Piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2024	12.780.415.013,00
Penyesuaian kurang catat atas pembentukan dana TDF Bagi Hasil Pajak/SDA Tahun 2024	225.005.000,00
Koreksi kurang catat bagi hasil pajak provinsi atas *over* target penerimaan TW.I s.d TW. IV berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 188.4/33/BAKUDA/2025 Tanggal 27 Februari 2025	2.287.064.605,00
Dikurangi :	
Pelunasan piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun sebelumnya	(12.091.797.198,00)
Pendapatan dana desa yang berdasarkan kebijakan Akuntansi tidak diakui di pendapatan-LO	(41.477.591.670,00)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO	**743.282.740.996,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer yang terdiri dari pendapatan hibah. pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO pada tahun 2024 sebesar **Rp22.044.107.287,50** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah -LO	11.266.690.519,50	130.783.721.746,08	(119.517.031.226,58)	(91,39)
2. Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.777.416.768,00	10.669.847.206,00	107.569.562,00	1,01
Jumlah	**22.044.107.287,50**	**141.453.568.952,08**	**(119.409.461.664,58)**	**(84,42)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah berupa uang atau barang yang tidak perlu dibayar kembali yang antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah lainnya. maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat. serta bantuan keuangan dari pemda lainnya. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima. dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh. maka dicatat berdasarkan nilai wajar. Rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

Tabel 130 Rincian Pendapatan Hibah LO

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	6.898.399.716,97	103.178.742.028,75	(96.280.342.311,78)	(93,31)
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	4.167.553.302,53	6.386.642.527,33	(2.219.089.224,80)	(34,75)
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	166.037.500,00	67.564.800,00	98.472.700,00	145,75
4. Pendapatan Hibah dari	0,00	13.862.608.390,00	(13.862.608.390,00)	(100,00)

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO				
5. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	34.700.000,00	7.288.164.000,00	(7.253.464.000,00)	(99,52)
Jumlah	**11.266.690.519,50**	**130.783.721.746,08**	**(119.517.031.226,58)**	**(91,39)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan hibah yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan hibah pada LRA sebesar **Rp0,00** terdapat selisih sebesar **Rp11.266.690.519,50**. Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian penerimaan pendapatan hibah pada LO per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 131 Selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementrian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa sepeda motor dan tenda Penetapan Status berdasarkan Keputusan Bupati Belitung No 100.3.4/241/KEP/BPKAD/2024 kepada BPBD	91.800.000,00
2. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Barang Pakai Habis—dari Kementrian Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa BMHP . Buku KIA dan KIA Bayi kepada Dinas Kesehatan	23.307.000,00
3. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementrian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berdasarkan Surat No. 000.3.3/2208/BAK dan No. 900/0.12.UST-Barang/POL-PP/2024 berupa tenda kepada Satuan Polisi Pamong Praja	36.395.000,00
4. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa dengan Pemerintah Kabupaten Belitung buku kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77.015.843,97
5. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian PUPR berupa aset Gedung dan bangunan. Aset jalan . jaringan dan irigasi dan bahan pakai habis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.982.172.938,00
6. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/507/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 dan SK No. 100.3.4/351/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 beruba jalan dan bangunan air kepada DPUPR	4.687.708.935,00
7. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Propinsi Babel tahun 2024 kepada DPPKBPMD	258.741.759,00
8. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat program. obat buffer dan vaksin dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung	3.908.811.543,53
9. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Komite SDN 47 Tanjungpandan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No 001/BAST/KOMITE/ SD 47 TP/2024 berupa Musholla	120.000.000,00
10. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset	46.037.500,00

Uraian	Jumlah (Rp)
antara Komite SDN 38 Tanjungpandan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No 035/HIBAH KOMITE/ SD 38 TP/2024 berupa Alat Musik Drumband	
11. Penyesuaian pendapatan hibah berupa barang (CSR Foodcourt tematik UMKM) dari PT. Bank Sumsel Babel	34.700.000,00
Total	**11.266.690.519,50**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi pendapatan hibah - LO diperoleh dari :

Tabel 132 Mutasi Pendapatan Hibah LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Lain-lain pendapatan yang sah (LRA)	**0,00**
Ditambah :	
1. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat karena adanya hibah berupa aset tetap	6.898.399.716,97
2. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya karena adanya hibah berupa obat-obatan dan vaksin	4.167.553.302,53
3. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri berupa aset tetap	166.037.500,00
4. Penyesuaian pendapatan hibah berupa barang (CSR Foodcourt tematik UMKM) dari PT. Bank Sumsel Babel	34.700.000,00
Dikurangi :	
Tidak ada	
Jumlah Pendapatan hibah – LO	**11.266.690.519,50**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

Tabel 133 Subrincian Pendapatan Hibah LO Per OPD

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
A.	**Hibah dari Pemerintah Pusat**		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementrian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa sepeda motor dan tenda Penetapan Status berdasarkan Keputusan Bupati Belitung No 100.3.4/241/KEP/BPKAD/2024 kepada BPBD	Badan Penanggulan bencana Daerah	91.800.000,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Barang Pakai Habis dari Kementrian Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa BMHP . Buku KIA dan KIA Bayi kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	23.307.000,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementrian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berdasarkan Surat No. 000.3.3/2208/BAK dan No. 900/0.12.UST-Barang/POL-PP/2024 berupa tenda kepada Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi pamong Praja	36.395.000,00
4.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa dengan Pemerintah Kabupaten Belitung buku kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77.015.843,97

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
5.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian PUPR berupa aset Gedung dan bangunan. Aset jalan . jaringan dan irigasi dan bahan pakai habis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.982.172.938,00
6.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/507/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 dan SK No. 100.3.4/351/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 beruba jalan dan bangunan air kepada DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.687.708.935,00
B.	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO**		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Propinsi Babel tahun 2024 kepada DPPKBPMD	DPPKBPMD	258.741.759,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat program. obat buffer dan vaksin dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung	Dinas Kesehatan	3.908.811.543,53
C.	**Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan – LO**		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Komite SDN 47 Tanjungpandan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No 001/BAST/KOMITE/ SD 47 TP/2024 berupa Musholla	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.000.000,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Komite SDN 38 Tanjungpandan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan BAST No 035/HIBAH KOMITE/ SD 38 TP/2024 berupa Alat Musik Driumband	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	46.037.500,00
D.	**Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO**		
1	Pendapatan hibah berupa barang (CSR Foodcourt tematik UMKM) dari PT. Bank Sumsel Babel	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	34.700.000,00
	Total		**11.266.690.519,50**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 134 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	10.777.416.768,00	10.669.847.206,00	107.569.562,00	1,01
Jumlah	**10.777.416.768,00**	**10.669.847.206,00**	**107.569.562,00**	**1,01**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penganggaran pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sejak tahun 2023 hal ini berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Selain pendapatan tersebut diatas, terdapat pendapatan atas kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang diklaim ke BPJS Kesehatan namun belum dianggarkan dalam DPA masing-masing Puskesmas senilai Rp256.377.000,00. Atas pendapatan tersebut telah dibelanjakan seluruhnya. Sejak tahun 2025, Puskesmas di Belitung telah menjadi BLUD dan Pendapatan atas kegiatan Prolanis telah dianggarkan dalam Pendapatan BLUD masing-masing Puskesmas.

5.4.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang terdiri dari beban pegawai. beban barang dan jasa. beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135 Rincian Beban LO

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	475.497.347.943,00	447.279.183.240,00	28.218.164.703,00	6,31
Beban Barang dan Jasa	347.045.862.133,99	339.697.639.732,74	7.348.222.401,25	2,16
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	638.399.797,00	644.159.628,00	(5.759.831,00)	(0,89)
Beban Hibah	61.847.287.249,00	106.619.730.912,50	(44.772.443.663,50)	(41,99)
Beban Bantuan Sosial	235.972.000,00	204.411.000,00	31.561.000,00	-
Beban Penyisihan Piutang	2.219.208.425,00	1.903.987.323,50	315.221.101,50	16,56
Beban Penyusutan dan Amortisasi	168.522.223.033,66	180.867.518.583,35	(12.345.295.549,69)	(6,83)

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Transfer	66.371.628.700,00	67.127.157.000,00	(755.528.300,00)	(1,13)
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	**1.122.377.929.281,65**	**1.144.343.787.420,09**	**(21.965.858.138,44)**	**(1,92)**

Sumber: Data BPKAD (Diolah)

Pada tahun 2024. nilai beban pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebesar **Rp1.122.377.929.281,65** terjadi penurunan sebesar **Rp 21.965.858.138,44 atau 1,92%** jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp1.144.343.787.420,09**.

5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai terdiri beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Realisasi beban pegawai untuk tahun 2024 adalah sebesar **Rp475.497.347.943,00** dengan rincian beban pegawai sebagai berikut:

Tabel 136 Rincian Realisasi Beban Pegawai

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	233.074.193.679,00	219.210.759.123,00	13.863.434.556,00	6,32
Beban Tambahan Penghasilan ASN	155.968.439.956,00	142.762.506.862,00	13.205.933.094,00	9,25
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.819.681.029,00	41.044.846.105,00	1.774.834.924,00	4,32
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.869.165.644,00	13.156.912.652,00	(287.747.008,00)	(2,19)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	446.691.471,00	760.138.532,00	(313.447.061,00)	(41,24)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	784.800.000,00	765.600.000,00	19.200.000,00	2,51
Beban Pegawai BLUD	29.534.376.164,00	29.578.419.966,00	(44.043.802,00)	(0,15)
Jumlah	**475.497.347.943,00**	**447.279.183.240,00**	**28.218.164.703,00**	**6,31**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban pegawai yang disajikan pada laporan operasional apabila disandingkan dengan belanja pegawai pada LRA sebesar **Rp475.569.482.472,00** terdapat selisih sebesar **Rp72.134.529,00**. Selisih tersebut merupakan selisih antara mutasi tambah dan mutasi kurang pada pencatatan beban pegawai pada laporan operasional. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 137 Mutasi Selisih Beban Pegawai

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.852.617,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada UPT PUSKESMAS BADAU	231.379,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada UPT	431.299,00

Uraian	Jumlah (Rp)
PUSKESMAS TANJUNG BINGA	
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada Dinas Perikanan	33.758.178,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada BPKAD	655.860,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Keluarga PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada Dinas Perikanan	9.015.280,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada Dinas Perikanan	7.030.000,00
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	30.448.667,00
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	5.000.000,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024	4.462.101.308,00
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan ASN atas pembayaran utang belanja pegawai tahun 2023 pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(60.806.869,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PPPK tahun 2023 pada BKPSDM	(265.989,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS atas pembayaran utang Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS tahun 2023 pada DPPKBPMD	(1.129.522,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS atas pembayaran utang Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS tahun 2023 pada DLH	(278.135,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional PPPK atas pembayaran utang Tunjangan Fungsional PPPK tahun 2023 pada DPMPTSPP	(1.080.000,00)
Penyesuaian Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga atas pembayaran utang insentif tahun 2023 pada Dinas Pariwisata	(23.738.370,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS tahun 2023 pada UPT Puskesmas Selat Nasik	(1.575.144,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS tahun 2023 pada UPT Puskesmas Membalong	(1.524.640,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pelunasan utang belanja pegawai tahun 2023 pada RSUD	(4.504.850.448,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD karena adanya mutasi aset pada tahun 2024	(48.410.000,00)
Total	**(72.134.529,00)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun jumlah beban pegawai yang disajikan pada LO diperoleh sebagai berikut:

Tabel 138 Mutasi Beban Pegawai

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai (LRA)	475.569.482.472,00
Ditambah :	
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.852.617,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada UPT PUSKESMAS BADAU	231.379,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada UPT	431.299,00

Uraian	Jumlah (Rp)
PUSKESMAS TANJUNG BINGA	
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada Dinas Perikanan	33.758.178,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada BPKAD	655.860,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Keluarga PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada Dinas Perikanan	9.015.280,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada Dinas Perikanan	7.030.000,00
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	30.448.667,00
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024 pada UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	5.000.000,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2024	4.462.101.308,00
Dikurang:	
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan ASN atas pembayaran utang belanja pegawai tahun 2023 pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(60.806.869,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PPPK tahun 2023 pada BKPSDM	(265.989,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS atas pembayaran utang Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS tahun 2023 pada DPPKBPMD	(1.129.522,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS atas pembayaran utang Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS tahun 2023 pada DLH	(278.135,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional PPPK atas pembayaran utang Tunjangan Fungsional PPPK tahun 2023 pada DPMPTSPP	(1.080.000,00)
Penyesuaian Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga atas pembayaran utang insentif tahun 2023 pada Dinas Pariwisata	(23.738.370,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS tahun 2023 pada UPT Puskesmas Selat Nasik	(1.575.144,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS tahun 2023 pada UPT Puskesmas Membalong	(1.524.640,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pelunasan utang belanja pegawai tahun 2023 pada RSUD	(4.504.850.448,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD karena adanya mutasi aset pada tahun 2024	(48.410.000,00)
Jumlah Beban Pegawai	**475.497.347.943,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa.

Realisasi beban barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp347.045.862.133,99** termasuk di dalamnya terdapat beban barang dan jasa pada BLUD.

Beban barang dan jasa dirinci sebagai berikut:

Tabel 139 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
a. Beban Barang	64.390.139.281,81	60.998.362.405,19	3.391.776.876,62	5,56
b. Beban Jasa	130.454.386.454,00	130.758.365.774,00	(303.979.320,00)	(0,23)
c. Beban Pemeliharaan	38.226.922.178,78	32.543.615.514,00	5.683.306.664,78	17,46
d. Beban Perjalanan Dinas	45.468.814.256,00	41.237.885.997,00	4.230.928.259,00	10,26
e. Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat	9.111.098.400,00	15.195.031.344,00	(6.083.932.944,00)	(40,04)
f. Beban Barang dan Jasa BOS	18.323.838.139,00	19.269.939.248,00	(946.101.109,00)	(4,91)
g. Beban Barang dan Jasa BOSP	546.965.460,00	-	546.965.460,00	100,00
h. Beban Barang dan Jasa BLUD	40.523.697.964,40	39.694.439.450,55	829.258.513,85	2,09
Jumlah	**347.045.862.133,99**	**339.697.639.732,74**	**7.348.222.401,25**	**2,16**

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. **Beban Barang** pada periode pelaporan tahun 2024 sebesar **Rp64.390.139.281,81** terdiri dari:

Tabel 140 Beban Barang

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	64.390.139.281,81	60.998.362.405,19	3.391.776.876,62	5,56
Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-
Jumlah	64.390.139.281,81	60.998.362.405,19	3.391.776.876,62	**5,56**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Secara rinci beban barang terdiri dari :

Tabel 141 Rincian Beban Barang

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis		
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.268.600,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.530.865.441,62
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.540.531.366,00
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	365.018.775,00
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	20.025.000,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	77.939.695,00
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6.430.500,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	190.038.131,00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.537.500,00
8.1.02.01.01.0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	116.328.000,00
8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.896.695.914,00

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.354.720.720,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.864.485.817,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	102.362.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.104.000,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	701.212.340,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.546.918.423,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	819.991.500,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	750.651.490,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.362.172.842,70
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	664.981.745,08
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.730.417.634,41
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	960.718.350,00
8.1.02.01.01.0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	33.200.436,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	2.351.343,00
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	224.061.000,00
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	219.770.000,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.742.821.751,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.039.058.900,00
8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	43.200.000,00
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.437.546.835,00
8.1.02.01.01.0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	7.991.700,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.257.832.332,00
8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	13.000.000,00
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	142.000.000,00
8.1.02.01.01.0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	103.500.000,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	784.003.000,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	503.138.000,00
8.1.02.01.01.0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	84.500.000,00
8.1.02.01.01.0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	14.950.000,00
8.1.02.01.01.0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	26.400.000,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	1.225.000,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	193.225.000,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	339.935.000,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	1.250.670.500,00
8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	247.402.700,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
8.1.02.01.04.0122	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.940.000,00
Jumlah		**64.390.139.281,81**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang diperoleh dari:

Tabel 142 Mutasi Beban Barang

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**LRA**	**62.654.241.648,00**
2	**Ditambah :**	
3	Penyesuaian beban persediaan awal 1 Januari 2024	13.592.637.179,83
4	Penerimaan Hibah BMHP SKRINING HIPOTIROID dari Kemenkes BAST NO BJ.01.04/PPK4.2/BASTP/9.1/2024 TGL 17 DESEMBER 2024 Dinas Kesehatan	3.549.000,00
5	Penerimaan HIBAH PERSEDIAAN BUKU KIA DAN KIA BAYI DARI KEMENTRIAN KESEHATAN BAST NP : BJ.01.04/PPK4.2/BASTP/2024 TGL 22&25 NOVEMBER 2024 Dinas Kesehatan	19.758.000,00
6	Penerimaan Hibah Obat Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2024	3.908.811.543,53
7	Penerimaan Hibah obat-obatan Lainnya dari Provinsi untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	258.741.759,00
8	Penerimaah Hibah Aset Tetap KIB C dan KIB D di SDN 3 Selat Nasik Hibah dari Kementerian PUPR berdasarkan SK Bupati Belitung No: 100.3.4/550/KEP/BPKAD/2024 tgl. 04-11-2024.	9.888.065,82
9	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap	1.343.298.740,00
10	Reklasifikasi dari Beban Transfer keuangan Daerah dan Desa Menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.050.000,00
11	**Dikurang :**	
12	Penyesuaian beban persediaan akhir 31 Desember 2024	(11.342.909.719,37)
13	Penyesuaian reklasifikasi beban barang menjadi aset tetap	(1.462.006.097,00)
14	Reklasifikasi dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Pembangunan Jalan Mess Perumahan Polres Belitung)	(651.847.000,00)
15	Reklasifikasi dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Rumah Layak Huni)	(577.584.000,00)
16	Reklasifikasi dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM) per 31 Desember 2024	(1.046.016.000,00)
17	Reklasifikasi Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Penyesuaian Hibah Tanah Ke Provinsi (Pemeliharaan Jalan Provinsi)	(1.641.012.000,00)
18	Reklasifikasi Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya ke Beban Barang dan Jasa BLUD (Pengalihan Obat dari Dinkes Ke RSUD dr. Marsidi Judono Tahun 2024)	(703.217.838,00)
19	Penyesuaian pengurangan hutang jasa pengiriman per 31 desember 2024 di BPPRD	(244.000,00)
20	**Jumlah Beban Barang**	**64.390.139.281,81**

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. **Beban Jasa** pada periode pelaporan tahun 2024 sebesar **Rp 130.454.386.454,00** terdiri dari:

Tabel 143 Beban Jasa

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	86.137.641.097,00	90.679.877.729,00	(4.542.236.632,00)	(5,01)
Beban Iuran Jaminan /Asuransi	33.252.595.612,00	30.692.198.839,00	2.560.396.773,00	8,34
Beban Sewa Tanah	4.000.000,00	-	4.000.000,00	100,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.405.622.126,00	2.363.983.600,00	41.638.526,00	1,76
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.007.354.000,00	1.286.822.500,00	(279.468.500,00)	(21,72)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	88.560.000,00	85.590.000,00	2.970.000,00	3,47
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.195.970.984,00	1.520.609.162,00	675.361.822,00	44,41
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.143.267.710,00	783.657.863,00	359.609.847,00	45,89
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	16.074.000,00	2.997.000,00	13.077.000,00	436,34
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.378.777.596,00	1.045.218.943,00	333.558.653,00	31,91
Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.523.394.134,00	2.040.195.007,00	483.199.127,00	23,68
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	269.136.103,00	238.207.131,00	30.928.972,00	12,98
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	31.993.092,00	19.008.000,00	12.985.092,00	68,31
Jumlah	**130.454.386.454,00**	**130.758.365.774,00**	**(303.979.320,00)**	**(0,23)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban jasa berasal dari:

Tabel 144 Mutasi Beban Jasa

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**LRA**	**134.969.943.948,00**
2	**Ditambah :**	
3	Penyesuaian beban jasa telepon. air. listrik. langganan surat kabar jasa kawat/faksimili/internet. paket/kiriman. jasa tenaga kerja Kesehatan dan jasa pelaksanaan transaksi keuangan yang masih harus dibayar (utang beban)	804.164.794,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Penyesuaian Pelunasan Piutang Retribusi Kios 2024 - KOPUKMPT	7.500,00
5	Penyesuaian Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis - Dinas Kesehatan	2.500,00
6	**Dikurang :**	
7	Penyesuaian pelunasan utang beban jasa telepon. air. listrik. jasa kawat/faksimili/internet. honor tim pelaksana. jasa pemasangan telpon. listrik. dan jasa tenaga teknisi tahun lalu.	(924.312.323,00)
8	Penyesuaian Persediaan Akhir dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung menjadi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya (Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung) - Dinas PUPR	(98.990.000,00)
9	Penyesuaian Persediaan Akhir dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung menjadi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya (Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung) - Dinas PUPR	(99.456.000,00)
10	Penyesuaian Persediaan Akhir dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya(Pembuatan DED renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Kabupaten Belitung) - Dinas PUPR	(99.420.000,00)
11	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan menjadi Gedung angunan Gedung Instalasi - Dinas Kesehatan	(49.728.000,00)
12	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan menjadi Gedung angunan Gedung Instalasi - Dinas Kesehatan	(1.248.000,00)
13	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik menjadi Jaringan Listrik Lainnya - Dinas Kesehatan	(24.900.000,00)
14	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan menjadi Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Kendaraan Bermotor Khusus, Sumber Tenaga - Dinas Kesehatan	(3.744.000,00)
15	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dariBelanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya ke aset tetap bangunan dan KDP - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(496.325.500,00)
16	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Aset tetap bangunan gedung - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(240.524.200,00)
17	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa Menjadi Bangunan Air dan Instalasi Air di PKM Tanjun Binga dan Sijuk	(1.248.000,00)
18	Reklasifikasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum - DED Batu Bedil - Dinas Pariwisata	(99.648.000,00)
19	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat SAR-Alat SAR Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal - Dinas Perhubungan	(464.267.500,00)
20	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan	(331.200.000,00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Listrik Menjadi Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Dinas Perhubungan	
21	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Tagihan Listrik menjadi Jaringan Distribusi - Dinas Perhubungan	(332.250.000,00)
22	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Menjadi Jaringan Distribusi - Dinas Perhubungan	(345.118.200,00)
23	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural menjadi Aset tetap Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya - Dinas PUPR	(99.844.500,00)
24	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Aset Tetap Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya - Dinas PUPR	(139.926.600,00)
25	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi menjadi Aset tetap Jalan - Dinas PUPR	(396.419.100,00)
26	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu - Dinas PUPR	(79.750.000,00)
27	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah - Dinas PUPR	(692.794.065,00)
28	Reklasifikasi Beban Jasa Menjadi Aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah - Dinas PUPR	(298.618.300,00)
29	**Jumlah Beban Jasa**	**130.454.386.454,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perolehan beban jasa berdasarkan klasifikasi rincian objek sebagai berikut:

Tabel 145 Rincian Beban Jasa

Uraian	Belanja Jasa	Penambahan (Penyesuaian/ reklas)	Pengurangan (Penyesuaian/kapitalisasi)	Realisasi 2024 (Rp)
Beban Jasa Kantor	87.297.486.826,00	804.174.794,00	(1.964.020.523,00)	86.137.641.097,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	33.252.595.612,00			33.252.595.612,00
Belanja Sewa Tanah	4.000.000,00			4.000.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.405.622.126,00			2.405.622.126,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.007.354.000,00			1.007.354.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	88.560.000,00			88.560.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.551.682.749,00		(3.355.711.765,00)	2.195.970.984,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.143.267.710,00			1.143.267.710,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availaibility Payment)	16.074.000,00			16.074.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.378.777.596,00			1.378.777.596,00

Uraian	Belanja Jasa	Penambahan (Penyesuaian/ reklas)	Pengurangan (Penyesuaian/kapitalisasi)	Realisasi 2024 (Rp)
Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.523.394.134,00			2.523.394.134,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	269.136.103,00			269.136.103,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	31.993.092,00			31.993.092,00
Jumlah	**134.969.943.948,00**	**804.174.794,00**	**(5.319.732.288,00)**	**130.454.386.454,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. **Beban Pemeliharaan** aset tetap dan barang inventaris dalam rangka mengembalikan pada kondisi awal pada periode pelaporan tahun 2024 sebesar **Rp38.226.922.178,78** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 146 Beban Pemeliharaan

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	-	77.400.000,00	(77.400.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.453.471.125,00	12.764.560.207,00	4.688.910.918,00	36,73
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.278.517.517,06	8.038.364.635,00	1.240.152.882,06	15,43
Beban Pemeliharaan Jalan. Irigasi. dan Jaringan	11.286.463.849,72	11.663.290.672,00	(376.826.822,28)	(3,23)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	208.469.687,00	-	208.469.687,00	100,00
Total	**38.226.922.178,78**	**32.543.615.514,00**	5.683.306.664,78	**17,46**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban pemeliharaan diperoleh dari :

Tabel 147 Mutasi Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja pemeliharaan	46.966.615.074,78
2.	**Ditambah :**	
3.	Beban Persediaan awal	-
4.	Penyesuaian reklasifikasi aset tetap menjadi beban pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	76.370.858,00
5.	**Dikurang :**	
6.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya (Rehabilitasi Rumah Dinas Komandan Lanud H.AS.Hanandjoeddin) menjadi Aset tetap Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II (Rehabilitasi Rumah Dinas Komandan Lanud H.AS.Hanandjoeddin) - Dinas PUPR	(303.174.700,00)
7.	Penyesuaian Persediaan Akhir dari Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan menjadi Suku Cadang Alat Laboratorium - Dinas Perikanan	(175.000,00)
8.	Penyesuaian Reklasifikasi antar Beban dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Menjadi	(5.670.000,00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	BebanBeban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya menjadi Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(5.800.000,00)
10.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya menjadi Alat Kantor Lainnya - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(15.900.000,00)
11.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan menjadi Aset Tetap Peralatan Proses/Produksi menjadi Gas-Liquid Separation Equipment - Dinas Perikanan	(2.415.000,00)
12.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor menjadi Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(199.122.265,00)
13.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor menjadi Bangunan Gedung Kantor - BPKAD	(109.557.000,00)
14.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan menjadi Bangunan Kesehatan - UPT Puskesmas Selat Nasik (Dinas Kesehatan)	(394.809.880,00)
15.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung menjadi Terminal/Pelabuhan/Bandara menjadi Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara - Dinas Perhubungan	(39.798.000,00)
16.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya menjadi Rumah Negara Golongan II - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(183.492.800,00)
17.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor menjadi Alat Kantor Lainnya - DPMPTSPP	(4.999.500,00)
18.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor menjadi Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - BPKAD	(3.052.500,00)
19.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten menjadi Jalan Kabupaten - Dinas PUPR	(6.410.041.079,00)
20.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten menjadi Jalan Desa - Dinas PUPR	(919.347.900,00)
21.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa menjadi Jalan Khusus - Dinas PUPR	(197.082.000,00)
22.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban pemeliharaan menjadi Aset tetap dari Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya menjadi Jaringan Listrik Lainnya - Dinas Kesehatan	(21.626.130,00)
23.	**Jumlah Beban Pemeliharaan**	**38.226.922.178,78**

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. **Beban Perjalanan Dinas** dalam rangka koordinasi dalam pelaksanaan tugas pada periode pelaporan tahun 2024 sebesar **Rp45.468.814.256,00.**

Tabel 148 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	45.468.814.256,00	41.237.885.997,00	4.230.928.259,00	10,26

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban Perjalanan Dinas diperoleh dari :

Tabel 149 Mutasi Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas	45.481.646.714,00
2.	**Ditambah :**	
3.	Penyesuaian Beban Utang Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 - Dinas Kesehatan	21.337.360,00
4.	**Dikurang :**	
5.	Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas menjadi Aset Tetap dari Beban Perjalanan Dinas Biasa menjadi Bangunan Gedung Instalasi - Dinas Kesehatan	(4.508.782,00)
6.	Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas menjadi Aset Tetap dari Beban Perjalanan Dinas Biasa menjadi Kendaraan Bermotor Beroda Dua,Kendaraan Bermotor Khusus, Sumber Tenaga - Dinas Kesehatan	(11.793.319,00)
7.	Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas menjadi Aset Tetap dari Beban Perjalanan Dinas Biasa menjadi Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air dan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(17.867.717,00)
8.	**Jumlah Beban Perjalanan Dinas**	**45.468.814.256,00**

3. **Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat** merupakan beban dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi pada periode pelaporan tahun 2024 sebesar **Rp9.111.098.400,00**

   Beban uang/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat diperoleh dari :

Tabel 150 Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja uang/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.460.102.500,00
2.	**Ditambah :**	
3.	-	-
4.	**Dikurang :**	
5.	Penyesuaian Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat menjadi Persediaan	(6.546.563.000,00)
6.	Penyesuaian Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap	(355.972.100,00)
7.	Reklasifikasi Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat menjadi Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	(384.832.000,00)
8.	Reklasifikasi Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(61.637.000,00)
9.	**Jumlah Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**	**9.111.098.400,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. **Beban Barang dan Jasa BOS** pada periode pelaporan tahun 2024 sebesar **Rp18.323.838.139,00** yang terdiri dari:

Tabel 151 Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dana BOS	18.323.838.139,00	19.269.939.248,00	946.101.109,00	4,91

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang dan jasa Dana BOS diperoleh dari :

Tabel 152 Mutasi Beban Barang dan Jasa BOS

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BOS (LRA)	18.304.974.839,00
2.	**Ditambah :**	
3.	Reklasifikasi aset tetap ke beban barang dan jasa BOS	71.225.000,00
4.	**Dikurang :**	
5.	Kapitalisasi beban barang dan jasa BOS APBN Reguler ke aset tetap	(52.361.700,00)
6.	**Jumlah Beban barang dan jasa Dana BOS**	**18.323.838.139,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5. **Beban Barang dan Jasa BOSP** pada periode pelaporan tahun 2024 sebesar **Rp546.965.460,00** yang terdiri dari:

Tabel 153 Beban Barang dan Jasa BOSP

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dana BOS	546.965.460,00	-	546.965.460,00	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang dan jasa Dana BOS diperoleh dari :

Tabel 154 Mutasi Beban Barang dan Jasa BOSP

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BOSP (LRA)	560.715.460,00
2.	**Ditambah :**	
3.	Reklasifikasi aset tetap ke beban barang dan jasa BOSP	1.400.000,00
4.	**Dikurang :**	
5.	Kapitalisasi beban barang dan jasa BOSP APBN Reguler ke aset tetap	(10.250.000,00)
6.	Reklasifikasi beban barang dan jasa BOSP ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(4.900.000,00)
7.	**Jumlah Beban barang dan jasa Dana BOS**	**546.965.460,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

6. **Beban Barang dan Jasa BLUD** pada periode pelaporan tahun 2024 sebesar **Rp40.523.697.964.40**. yang terdiri dari:

Tabel 155 Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	40.523.697.964,40	39.694.439.450,55	829.258.513,85	2,09

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh dari:

Tabel 156 Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BLUD (LRA)	37.921.999.336,00
2.	**Mutasi tambah :**	
3.	Penyesuaian beban persediaan awal BLUD	5.606.783.128,05
4.	Penyesuaian utang beban barang dan jasa BLUD tahun berjalan yang masih harus dibayar	4.902.379.964,00
5.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD dari beban sewa dibayar dimuka	25.530.913,97
6.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD atas pelunasan/penghapusan piutang	44.400,00
7.	Koreksi beban barang dan jasa BLUD berupa biaya adm. Klaim BPJS	331.800,00
8.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD atas penerimaan persediaan obat-obatan dari Dinkes Kab. Belitung	703.217.838,00
9.	**Mutasi kurang :**	
10.	Penyesuaian beban persediaan akhir BLUD	(6.103.477.965,78)
11.	Kapitalisasi beban barang dan jasa BLUD menjadi aset tetap bangunan	(284.964.750,00)
12.	Kapitalisasi beban barang dan jasa BLUD menjadi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan	(165.445.500,00)
13.	Penyesuaian pelunasan utang beban tahun lalu	(2.054.815.619,00)
14.	Penyesuaian atas beban dibayar dimuka tahun 2024	(27.885.580,84)
15.	**Jumlah Beban barang dan jasa BLUD**	**40.523.697.964,40**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Subsidi pada Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp638.399.797,00** yang merupakan subsidi biaya bunga kredit dan biaya jaminan notarial bagi Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebesar **Rp1.500.000,00** dan beban subsidi kepada BUMD yaitu pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sebesar **Rp636.899.797,00**.

Tabel 157 Rincian Beban Subsidi

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Subsidi kepada BUMD	636.899.797,00	643.409.628,00	(6.509.831,00)	1,01
Beban Subsidi kepada Koperasi	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
Total	638.399.797,00	644.159.628,00	(5.759.831,00)	0,89

Sumber: data BPKAD (diolah)

Subsidi kepada PDAM Kabupaten Belitung yang digunakan untuk menutup tarif rata-rata yang lebih kecil dibandingkan biaya yang dibutuhkan (*cost recovery*).

5.4.2.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah pada Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp61.847.287.249,00** berupa hibah kepada pemerintah pusat. hibah kepada organisasi kemasyarakatan, hibah kepada pihak ketiga/masyarakat, dan hibah kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 158 Beban Hibah

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
a. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	22.701.415.600,00	12.378.362.400,00	10.323.053.200,00	83,40
b. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.133.869.052,00	65.464.683.867,50	(64.330.814.815,50)	(98,27)
c. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	13.098.809.354,00	1.324.729.068,00	12.573.131.286,00	949,11
d. Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	799.051.000,00	-		100,00
e. Beban Hibah Uang/barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.093.903.552,00	3.715.763.892,00	8.378.139.660,00	225,48
f. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	5.651.874.436,00	(5.651.874.436,00)	(100,00)
g. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.027.579.900,00	3.837.015.770,00	190.564.130,00	(4,97)
h. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	3.958.215.000,00	4.671.853.000,00	(713.638.000,00)	(15,28)

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kemasyarakatan				
i. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	99.900.000,00	5.813.098.200,00	(5.713.198.200,00)	(98,28)
j. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.565.340.041,00	2.428.625.279,00	136.714.762,00	(5,63)
k. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.369.203.750,00	1.333.725.000,00	35.478.750,00	2,66
Total	**61.847.287.249,00**	**106.619.730.912,50**	**(44.772.443.663,50)**	**(41,99)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban Hibah diperoleh dari:

Tabel 159 Mutasi Beban Hibah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja hibah	**46.220.077.443,00**
2	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Aset lainnya dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jembatan Cerucuk Ruas Jalan Junction Membalong (2002) Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024) - Dinas PUPR	5.000.000,00
3	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Aset lainnya dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Belanja Modal Tanah untuk Pelebaran Jalan Sriwijaya Kota Tanjungpandan (2008) Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024) - Dinas PUPR	6.024.049.288,00
4	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Aset lainnya dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Hibah Tanah Jln Prov.Ganti Rugi Bangunan yg terkena Peningkatan dan Pelebaran Jl. Tanjungpandan-Simpang Empat (2018) Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024) - Dinas PUPR	2.519.765.991,00
5	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Aset lainnya dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Ganti Rugi Bagunan yang Terkena Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction Membalong (2019) Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024) - Dinas PUPR	880.759.134,00
6	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Aset lainnya dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Jalan Junction Desa Bantan - Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024) - Dinas PUPR	676.624.941,00
7	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Aset lainnya dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah menjadi Beban Hibah	305.582.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembebasan Lahan untuk Kegiatan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction Desa Bantan - Desa Simpang Rusa Kec. Membalong (2020) Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024) - Dinas PUPR	
8	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Ganti rugi Bangunan an.ERDIANSYAH mewakili warga Desa Pelepak Pute yg terkena pemeliharaan berkala Jl SP-Empat Sijuk-Buding Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024) - Dinas PUPR	140.031.000,00
9	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembayaran ganti rugi bangunan an.SUHANDI mewakili warga Desa Bantan yg terkena Pembebasan bangunan tuk kegiatan pelebaran Jalan Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024) - Dinas PUPR	292.788.000,00
10	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembayaran Ganti rugi bangunan an.SYAMSUL BASRONI mewakili warga Desa Cerucuk yg terkena pembebasan bangunan untuk kegiatan pelebaran Jalan Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024) - Dinas PUPR	132.795.000,00
11	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembayaran ganti rugi bgn an.YAHYA mewakili warga Desa Perawas yang terkena pembebasan bangunan untuk kegiatan pelebaran Jalan Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024) - Dinas PUPR	421.671.000,00
12	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembayaran ganti rugi bangunan an.NASRI mewakili warga Desa Sijuk yg terkena pemeliharaan Berkala Jl.SP.Empat (Sijuk)-Buding Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024) - Dinas PUPR	302.537.000,00
13	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembayaran ganti rugi bangunan an.SYAMSUL BASRONI mewakili warga Desa Cerucuk yang terkena Pembebasan bangunan untuk kegiatan pelebaran Jalan Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024) - Dinas PUPR	214.209.000,00
14	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembayaran ganti rugi bangunan an.HAIRIL mewakili warga Desa Buluh Tumbang untuk Keg.Pelebaran Jln Perawas-Buding & Long Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024) - Dinas PUPR	136.981.000,00
15	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Penyesuaian Hibah Pembangunan Jalan Mess Perumahan Polres Belitung BAST Nomor : 030/151/DPUPR.V/2024 tanggal 2 Januari 2024) - Dinas PUPR	651.847.000,00
16	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Aset tetap Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dan Bangunan Kesehatan menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Penyesuaian Hibah Tanah dan Bangunan UPT Puskesmas Tanjung Pandan Ke RRI Sesuai Keputusan	97.190.052,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	KEP SETDA NO: 188.46/952.I/KEP/BPKAD/2024 TGL 30 JULI 2024)	
17	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (jasa konsultan Paud Swasta) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.940.000,00
18	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Aset Bangunan Gedung Pendidikan Permanen TK Stannia) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.956.400,00
19	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 1.1) An. KOMALASARI. BAST Nomor : 01/BAST/PERB.RLH.1.1/APBD/2024 28 November 2024) - Dinas PUPR	66.782.000,00
20	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 1.2) An. SUWARMI. BAST Nomor 01/BAST/PERB.RLH.1.2/APBD/2024 28 November 2024) - Dinas PUPR	66.088.000,00
21	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 2.1) An. ANISA. BAST Nomor 02/BAST/PERB.RLH.2.1/APBD/2024 28 November 2024) - Dinas PUPR	64.223.000,00
22	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 2.2) An. CHUI THIN. BAST Nomor 02/BAST/PERB.RLH.2.2/APBD/2024 28 November 2024) - Dinas PUPR	68.557.000,00
23	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 3.1) An. MEDIAGUSTINO.BAST No: 03/BAST/PERB.RLH.3.1/APBD/2024 28 November 2024) - Dinas PUPR	66.296.000,00
24	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 3.2) SITI An. SALMA. BAST Nomor 03/BAST/PERB.RLH.3.2/APBD/2024 28 November 2024) - Dinas PUPR	66.152.000,00
25	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket Kepulauan1) An. SATIN. BAST No:04/BAST /PERB.RLH.4.1/APBD/2024 28 November 2024) - Dinas PUPR	89.994.000,00
26	Reklasifikasi antar Beban dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat menjadi Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket Kepulauan2) An.LATIP BAST No:04/BAST/PERB. RLH.4.2/APBD/2024 28 November 2024) - Dinas PUPR	89.492.000,00
27	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban	199.206.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 3) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023) Naskah Hibah Nomor : 030/1520/DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024) - Dinas PUPR	
28	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023) Naskah Hibah Nomor : 030/1517/DPUPR.IV/2024 31 Desember 20240 - Dinas PUPR	198.735.000,00
29	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 9) (Sisa Dana Insentif FIskal 2023) Naskah Hibah Nomor : 030/1518/DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024) - Dinas PUPR	135.797.000,00
30	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Gunung Riting Kec.Membalong (PAMSIMAS) (DIF 2024) Naskah Hibah Nomor : 030/1522/DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024) - Dinas PUPR	156.753.000,00
31	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Sungai Samak Kec.Badau (PAMSIMAS) (DIF 2024) Naskah Hibah Nomor : 030/1519/DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024) - Dinas PUPR	156.776.000,00
32	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pengembangan JaringanPerpipaan SPAM (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023) Naskah Hibah Nomor :030/1521/DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024) - Dinas PUPR	198.749.000,00
33	Reklasifikasi Antar Beban dari Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Penyesuaian Hibah (Pembangunan - Dinas PUPR Pagar Politeknik Belitung Naskah Hibah Nomor : 030/1515/DPUPR.IV/2024 30 Desember 2024)	199.842.000,00
34	Reklasifikasi Antar Beban dari Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Penyesuaian Hibah (Penyesuaian Hibah Pembangunan Pagar Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tanjungpandan Naskah Hibah Nomor : 030/1516/DPUPR.IV/2024 30 Desember 2024) - Dinas PUPR	184.990.000,00
35	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Bangunan Air Kotor Lainnya menjadi Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 1)(DIF 2024) Naskah Hibah Nomor : 030/1508-d/DPUPR.IV/2024 27 Desember 2024) - Dinas PUPR	79.814.000,00
36	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Bangunan Air Kotor Lainnya menjadi Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 1)(SDIF 2023) Naskah Hibah Nomor: 030/1508-f/DPUPR.IV/2024) - Dinas PUPR	159.820.000,00
37	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Bangunan Air Kotor Lainnya menjadi Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 2) (DIF 2024) Naskah Hibah Nomor: 030/1508-e/DPUPR.IV/2024) - Dinas PUPR	79.922.000,00
38	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Bangunan Air Kotor Lainnya menjadi Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air	159.827.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 2) (SDIF 2023) Naskah Hibah Nomor: 030/1508-c/DPUPR.IV/2024) - Dinas PUPR	
39	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Bangunan Air Kotor Lainnya menjadi Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 3)(SDIF 2023) Naskah Hibah Nomor: 030/1508-b/DPUPR.IV/2024) - Dinas PUPR	159.813.000,00
40	Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Beban Hibah dari Bangunan Air Kotor Lainnya menjadi Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya (Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 4) (SDIF 2023) Naskah Hibah Nomor: 030/1508-a/DPUPR.IV/2024) - Dinas PUPR	159.855.000,00
	Total	**61.847.287.249,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. Beban hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar **Rp22.701.415.600,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160 Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/ 2024 M dan Pengamanan Natal 2024 serta Tahun Baru 2025 NPHD No. 100.3.4/111/KEP/BKBP/2024 Tanggal 26 Februari 2024	325.000.000,00	Belanja Hibah
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk KPU Kab. Belitung) dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada NPHD No. 100.3.4/611/KEP/BKBP/2023 Tanggal 30 Oktober 2023	13.194.640.800,00	Belanja Hibah
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk BAWASLU Kab. Belitung) dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada NPHD No. 100.3.4/610/KEP/BKBP/2023 30 Oktober 2023	4.885.402.800,00	Belanja Hibah
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) dalam rangka Pengamanan Pilkada NPHD No. 100.3.4/149/KEP/BKBP/2024 22 Maret 2024	3.106.682.000,00	Belanja Hibah
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Komando Distrik Militer 0414/Belitung) dalam rangka Pengamanan Pilkada NPHD No.100.3.4/148/KEP/BKBP/2024 22 Maret 2024	1.189.690.000,00	Belanja Hibah
	Total		**22.701.415.600,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.133.869.052,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 161 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembangunan Jalan Mess Perumahan Polres Belitung BAST Nomor : 030/151/DPUPR.V/2024 tanggal 2 Januari 2024	651.847.000,00	Belanja Hibah
2	Dinas Kesehatan	Penyesuaian Hibah Tanah dan Bangunan UPT Puskesmas Tanjung Pandan Ke RRI Sesuai Keputusan KEP SETDA NO: 188.46/952.I /KEP/BPKAD/2024 TGL 30 JULI 2024	97.190.052,00	Belanja Hibah
3	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembangunan Pagar Politeknik Belitung Naskah Hibah Nomor : 030/1515/DPUPR.IV /2024 30 Desember 2024	199.842.000,00	Belanja Hibah
4	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembangunan Pagar Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tanjungpandan Naskah Hibah Nomor : 030/1516/ DPUPR.IV/2024 30 Desember 2024	184.990.000,00	Belanja Hibah
	Total		**1.133.869.052,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

3. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp13.098.809.354,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jembatan Cerucuk Ruas Jalan Junction Membalong (2002) Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/ BPKAD/2024 tgl 26 April 2024	5.000.000,00	Belanja Hibah
2	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Belanja Modal Tanah untuk Pelebaran Jalan Sriwijaya Kota Tanjungpandan (2008) Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024	6.024.049.288,00	Belanja Hibah
3	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Tanah Jln Prov.Ganti Rugi Bangunan yg Terkena Peningkatan dan Pelebaran Jl. Tanjungpandan-Simpang Empat (2018) Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024	2.519.765.991,00	Belanja Hibah
4	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Ganti Rugi Bagunan yang terkena Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction Membalong (2019) Hibah Barang	880.759.134,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
		Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024		
5	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Jalan Junction Desa Bantan - Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024	676.624.941,00	Belanja Hibah
6	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembebasan Lahan untuk Kegiatan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction Desa Bantan - Desa Simpang Rusa Kec. Membalong (2020) Hibah Barang Milik Daerah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No : 188.46/084/KEP/BPKAD/2024 tgl 26 April 2024	305.582.000,00	Belanja Hibah
7	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Ganti rugi Bangunan an.ERDIANSYAH mewakili warga Desa Pelepak Pute yg terkena pemeliharaan berkala Jl SP-Empat Sijuk-Buding Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024	140.031.000,00	Belanja Hibah
8	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembayaran ganti rugi bangunan an.SUHANDI mewakili warga Desa Bantan yg terkena Pembebasan bangunan tuk kegiatan pelebaran Jalan Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024	292.788.000,00	Belanja Hibah
9	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembayaran Ganti rugi bangunan an.SYAMSUL BASRONI mewakili warga Desa Cerucuk yg terkena pembebasan bangunan untuk kegiatan pelebaran Jalan Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024	132.795.000,00	Belanja Hibah
10	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembayaran ganti rugi bgn an.YAHYA mewakili warga Desa Perawas yang terkena pembebasan bangunan untuk kegiatan pelebaran Jalan Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024	421.671.000,00	Belanja Hibah
11	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembayaran ganti rugi bangunan an.NASRI mewakili warga Desa Sijuk yg terkena pemeliharaan Berkala Jl.Simpang Empat (Sijuk)-Buding Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP /BPKAD/2024 Tanggal 26 April 2024	302.537.000,00	Belanja Hibah
12	Dinas Pekerjaan	Penyesuaian Hibah Pembayaran ganti rugi bangunan an.SYAMSUL	214.209.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	Umum	BASRONI mewakili warga Desa Cerucuk yang terkena Pembebasan bangunan untuk kegiatan pelebaran Jalan Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD /2024 Tanggal 26 April 2024		
13	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembayaran ganti rugi bangunan an.HAIRIL mewakili warga Desa Buluh Tumbang untuk Keg.Pelebaran Jln Perawas-Buding & Long Sesuai dengan KEP. Sekda Nomor :188.46/084/KEP/BPKAD/ 2024 Tanggal 26 April 2024	136.981.000,00	Belanja Hibah
14	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 3) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023) Naskah Hibah Nomor : 030/1520/DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024	199.206.000,00	Belanja Hibah
15	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023) Naskah Hibah Nomor : 030/1517/DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024	198.735.000,00	Belanja Hibah
16	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 9) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023) Naskah Hibah Nomor : 030/1518/DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024	135.797.000,00	Belanja Hibah
17	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Gunung Riting Kec.Membalong (PAMSIMAS) (DIF 2024) Naskah Hibah Nomor : 030/1522/DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024	156.753.000,00	Belanja Hibah
18	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Sungai Samak Kec.Badau (PAMSIMAS) (DIF 2024) Naskah Hibah Nomor : 030/1519/DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024	156.776.000,00	Belanja Hibah
19	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal 2023) Naskah Hibah Nomor :030/1521/ DPUPR.IV/2024 31 Desember 2024	198.749.000,00	Belanja Hibah
	Total		**13.098.809.354,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp799.051.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 163 Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas	Penyesuaian Hibah Pembangunan	79.814.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	Pekerjaan Umum	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 1)(DIF 2024) Naskah Hibah Nomor : 030/1508-d/DPUPR.IV/ 2024 27 Desember 2024		
2	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 1)(SDIF 2023) Naskah Hibah Nomor: 030/1508-f/DPUPR.IV/2024	159.820.000,00	Belanja Hibah
3	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 2) (DIF 2024) Naskah Hibah Nomor: 030/1508-e/DPUPR.IV /2024	79.922.000,00	Belanja Hibah
4	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 2) (SDIF 2023) Naskah Hibah Nomor: 030/1508-c/DPUPR.IV/2024	159.827.000,00	Belanja Hibah
5	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 3)(SDIF 2023) Naskah Hibah Nomor: 030/1508-b/DPUPR.IV/2024	159.813.000,00	Belanja Hibah
6	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (Paket 4) (SDIF 2023) Naskah Hibah Nomor: 030/1508-a/DPUPR.IV/2024	159.855.000,00	Belanja Hibah
	Total		**799.051.000,00**	

5. Beban Hibah Uang/ barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar **Rp12.093.903.552,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 164 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan/Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah Uang kepada DPD KNPI Kab. Belitung Naskah Hibah Nomor:400.4.8/01/NPHD/DISPORA/2024 Tanggal 29 Januari 2024	199.887.200,00	Belanja Hibah
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah Uang kepada Pramuka Kab. Belitung Naskah Hibah SK Bupati No.100.3.4/032/KEP/DISPORA/2024 Tanggal 29 Januari 2024	323.697.403,00	Belanja Hibah
3	Dinas Pemuda	Belanja Hibah Uang kepada KONI Kab. Belitung Naskah Hibah SK Bupati No.	800.000.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	dan Olahraga	100.3.4/088/KEP/DISPORA/2024 Tanggal 12 Februari 2024		
4	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kab.Belitung Naskah Hibah Keputusan Bupati Belitung No: 100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	5.743.006.512,00	Belanja Hibah
5	Dinas Kesehatan	Belanja Hibah Uang kepada PMI Kab. Belitung Naskah Hibah No. 440/107/NPHD/DINKES/2024 tanggal 24 Februari 2024	1.199.509.600,00	Belanja Hibah
6	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Ikatan Da'i Indonesia Kab.Belitung Naskah Hibah Keputusan Bupati Belitung No: 100.3.4/023/KEP/II/2024	200.000.000,00	Belanja Hibah
7	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional Kab.Belitung Naskah Hibah Keputusan Bupati Belitung No: 100.3.4/023/KEP/II/2024	380.000.000,00	Belanja Hibah
8	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Majelis Ulama Indonesia Kab.Belitung NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	126.566.837,00	Belanja Hibah
9	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Tarbiyatul Athfal Air Malik Desa Bantan Kec.Membalong Naskah Hibah Keputusan Bupati Belitung No: 100.3.4/023/KEP/II/2024	150.000.000,00	Belanja Hibah
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada BOP SMP Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 400.2.5/82/KEP/DISDIKBUD/2024	48.780.000,00	Belanja Hibah
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada BOP SD Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 400.2.5/85/KEP/DISDIKBUD/2024	101.460.000,00	Belanja Hibah
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada BOP Reg PAUD Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 462/P/2023	799.490.000,00	Belanja Hibah
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada BOP Kinerja PAUD Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 211/P/2024	45.000.000,00	Belanja Hibah
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada BOP Kesetaraan Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 462/P/2023	290.670.000,00	Belanja Hibah
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada BOP Kesetaraan PKBM - Semester 1 Naskah Hibah No. 900.1.15.5/81/KEP/DISDIKBUD/2024	37.125.000,00	Belanja Hibah
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada BOP SD Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 400.2.5/85/KEP/DISDIKBUD/2024	101.700.000,00	Belanja Hibah
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada BOP SMP Swasta - Semester 1 Naskah Hibah No. 400.2.5/82/KEP/DISDIKBUD/2024	48.780.000,00	Belanja Hibah
18	Dinas	Belanja Hibah Uang kepada BOP	37.125.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	Pendidikan dan Kebudayaan	Kesetaraan PKBM - Semester 2 Naskah Hibah No. 900.1.15.5/81/KEP/DISDIKBUD/2024		
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada BOP Reg PAUD Swasta - Semester 2 Naskah Hibah No. 462/P/2023	795.146.000,00	Belanja Hibah
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada BOP Kesetaraan Swasta - Semester 2 Naskah Hibah No. 462/P/2023	268.495.000,00	Belanja Hibah
21	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Padang Arafah Desa Keciput	200.000.000,00	Belanja Hibah
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah Uang kepada Gerakan Pramuka Kwarcab Belitung	197.465.000,00	Belanja Hibah
		Total	**12.093.903.552,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

6. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar **Rp4.027.579.900,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 165 Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Muara Baro Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Naskah Hibah No. 01-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	143.000.000,00	Belanja Hibah
2	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Suak Parak Mangrove Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Naskah Hibah No. 500.4.1/633/NPHD-PKPIK/PERIK.III/2024	34.196.000,00	Belanja Hibah
3	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Camar Laut Desa Membalong Kecamatan Membalong Naskah Hibah No. 01-BK/PPTK-PKSUPT/PERIK.II/2024	34.650.000,00	Belanja Hibah
4	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Karang Suge Desa Pegantungan Kecamatan Badau Naskah Hibah No. 01-JK/PPTK-PKSUPT/PERIK.II/2024	92.000.000,00	Belanja Hibah
5	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Karang Teregak Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Naskah Hibah No. 01-JI/PPTK-PKSUPT/PERIK.II/2024	75.000.000,00	Belanja Hibah
6	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Suak Parak Mangrove Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Naskah Hibah No. 500.4.1/633/NPHD-PKPIK/PERIK.III/2024	5.000.000,00	Belanja Hibah
7	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Suak Parak Mangrove Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Naskah Hibah No. 500.4.1/633/NPHD-PKPIK/PERIK.III/2024	1.000.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Barang kepada TK Stannia Tanjungpandan Kabupaten Belitung (Uang Muka 30% Rehab Bangunan) Naskah Hibah No. 000.2.6.1/030/PERSEDIAAN/ DISDIKBUD	202.677.000,00	Belanja Hibah
9	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Tengkuyong Desa Pegantungan Kecamatan Badau Naskah Hibah No. 000.2.6.1/05-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	150.000.000,00	Belanja Hibah
10	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Karang Timbul Desa Pegantungan Kecamatan Badau Naskah Hibah No. 000.2.6.1/04-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	150.000.000,00	Belanja Hibah
11	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Telok Baran Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik Naskah Hibah No. 000.2.6.1/03-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	120.000.000,00	Belanja Hibah
12	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Batu Dinding Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik Naskah Hibah No. 000.2.6.1/02-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	150.000.000,00	Belanja Hibah
13	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Bina Pangkalan Kapor Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk Naskah Hibah No.000.2.6.1/01-FF/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	34.400.000,00	Belanja Hibah
14	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada UB Kerapu Sunok Desa Tanjung Tinggi Kecamatan Sijuk Naskah Hibah No. 000.2.6.1/03-FF/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	94.600.000,00	Belanja Hibah
15	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Intan Samudra Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk Naskah Hibah No. 000.2.6.1/02-FF/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	86.000.000,00	Belanja Hibah
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Barang kepada TK Stannia Tanjungpandan (Pembayaran termin pertama sebesar 50% dikurangi uang muka sebesar 15% dari Rehabilitasi Bangunan) Naskah Hibah No. 000.2.6.1/030/PERSEDIAAN/ DISDIKBUD	236.456.500,00	Belanja Hibah
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Barang kepada TK Stannia Tanjungpandan (Pembayaran termin pertama sebesar 50% dikurangi uang muka sebesar 15% dari Rehabilitasi Bangunan) Naskah Hibah No. 000.2.6.1/030/PERSEDIAAN/ DISDIKBUD	236.456.500,00	Belanja Hibah
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Poltekkes D.III Keperawatan Pangkal Pinang (Kampus Belitung) BAST No.400.11.26/001/BAST-GENRE/DPPKBPMD/ 2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 3 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/002/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 7 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/003/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 5 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/004/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 4 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/005/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMP PGRI I Tanjungpandan BAST No.400.11.26/006/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMK Negeri 1 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/007/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMK Negeri 3 Tanjungpandan BAST No.400.11.26/008/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Direktur Politeknik Belitung BAST No.400.11.26/009/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMA Negeri 1 Membalong BAST No.400.11.26/010/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 1 Membalong BAST No.400.11.26/011/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 2 Membalong BAST No.400.11.26/012/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMK Negeri 1 Sijuk BAST No.400.11.26/013/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
31	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMA Negeri 1 Sijuk BAST No.400.11.26/014/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
32	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Keciput BAST No.400.11.26/015/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 3 Sijuk BAST No.400.11.26/016/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Sijuk BAST No.400.11.26/017/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Tanjung Tinggi BAST No.400.11.26/018/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
36	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Tanjung Binga BAST No.400.11.26/019/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
37	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Cerucuk BAST No.400.11.26/020/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
38	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Badau BAST No.400.11.26/021/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
39	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Air Batu Buding BAST No.400.11.26/022/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
40	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada SMP Negeri 2 Badau BAST No.400.11.26/023/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
41	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Suak Gual BAST No.400.11.26/024/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
42	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Petaling BAST No.400.11.26/025/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
43	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Pegantungan BAST No.400.11.26/026/BAST-GENRE/DPPKBPMD/2024	4.980.000,00	Belanja Hibah
44	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUB Patin Desa Pegantungan Kecamatan Badau Naskah Hibah No.000.2.6.1/06-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	150.000.000,00	Belanja Hibah
45	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada KUpB Patin Desa Pegantungan Kecamatan Badau Naskah Hibah No.000.2.6.1/06-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2024	150.000.000,00	Belanja Hibah
46	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Gapoktan Serba Usaha BAST No. 000.2.6.1/938/BAST-CABAI 2024/DKPP/2024	40.500.000,00	Belanja Hibah
47	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Maju BAST No. 000.2.6.1/939/BAST-CABAI INSENTIF 2024/DKPP/2024	81.775.000,00	Belanja Hibah
48	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Maju Suga Ketakong Makmur BAST No. 000.2.6.1/940/BAST-PADI/DKPP/2024	6.035.000,00	Belanja Hibah
49	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Tani BAST No. 000.2.6.1/940.a/BAST-PADI/DKPP/2024	2.717.500,00	Belanja Hibah
50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Manda Maju Bersama BAST No. 000.2.6.1/941/BAST-PADI/DKPP/2024	9.052.500,00	Belanja Hibah
51	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Bersama BAST No. 000.2.6.1/942/BAST-PADI/DKPP/2024	5.435.000,00	Belanja Hibah
52	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Bakul BAST No. 000.2.6.1/943/BAST-PADI/DKPP/2024	37.718.750,00	Belanja Hibah
53	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Licin BAST No. 000.2.6.1/938/BAST-CABAI 2024/DKPP/2024	5.435.000,00	Belanja Hibah
54	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Betik BAST No. 000.2.6.1/945/BAST-PADI/DKPP/2024	21.740.000,00	Belanja Hibah
55	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sri Rezeki BAST No. 000.2.6.1/946/BAST-PADI/DKPP/2024	2.717.500,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
56	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kelekak Titang Sejahtera BAST No. 000.2.6.1/947/BAST-PADI/DKPP/2024	37.718.750,00	Belanja Hibah
57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sejahtera Bersama BAST No. 000.2.6.1/948/BAST-PADI/DKPP/2024	2.717.500,00	Belanja Hibah
58	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia BAST No. 000.2.6.1/949/BAST-PADI/DKPP/2024	6.943.750,00	Belanja Hibah
59	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suka Makmur BAST No. 000.2.6.1/950/BAST-PADI/DKPP/2024	6.035.000,00	Belanja Hibah
60	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Iding-iding Bahagia BAST No. 000.2.6.1/951/BAST-PADI/DKPP/2024	15.087.500,00	Belanja Hibah
61	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia Kawan BAST No. 000.2.6.1/952/BAST-PADI/DKPP/2024	15.087.500,00	Belanja Hibah
62	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Mengkanang BAST No. 000.2.6.1/953/BAST-PADI/DKPP/2024	5.435.000,00	Belanja Hibah
63	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Ibul Makmur BAST No. 000.2.6.1/954/BAST-PADI/DKPP/2024	5.435.000,00	Belanja Hibah
64	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Simpor BAST No. 000.2.6.1/955/BAST-PADI/DKPP/2024	2.717.500,00	Belanja Hibah
65	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Agro Kenupu BAST No. 000.2.6.1/956/BAST-PADI/DKPP/2024	22.631.250,00	Belanja Hibah
66	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Fajar Rezeki BAST No. 000.2.6.1/957/BAST-PADI/DKPP/ 2024	2.717.500,00	Belanja Hibah
67	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sawah Harapan Baru BAST No. 000.2.6.1/958/BAST-PADI/DKPP/2024	5.435.000,00	Belanja Hibah
68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompramukaok Tani Bina Usaha BAST No. 000.2.6.1/1357/BAST-PBT/DKPP/ 2024	3.332.000,00	Belanja Hibah
69	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Bersama BAST No. 000.2.6.1/1358/BAST-PBT/DKPP/2024	3.332.000,00	Belanja Hibah
70	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Millineal BAST No. 000.2.6.1/1359/BAST-PBT/DKPP/2024	3.332.000,00	Belanja Hibah
71	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Gapoktan Karya Mandiri BAST No. 000.2.6.1/1361/BAST-PBT/DKPP/2024	94.590.000,00	Belanja Hibah
72	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia Kawan BAST No. 000.2.6.1/952/BAST-PADI/DKPP/ 2024	139.257.500,00	Belanja Hibah
73	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Medang BAST No. 000.2.6.1/1362/BAST-PBT/DKPP/ 2024	107.727.500,00	Belanja Hibah
74	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sijuk Bersatu BAST No. 000.2.6.1/1363/BAST-PBT/DKPP/ 2024	126.120.000,00	Belanja Hibah
75	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Laskar Hijrah BAST No. 000.2.6.1/1364/BAST-PBT/DKPP/2024	84.080.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
76	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Gendang BAST No. 000.2.6.1/1365/BAST-PBT/DKPP /2024	78.825.000,00	Belanja Hibah
77	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Terang Jaya Abadi BAST No. 000.2.6.1/1366/BAST-PBT/DKPP/2024	82.000.000,00	Belanja Hibah
78	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Harapan Bersama BAST No. 000.2.6.1/1011/BAST-PUPUK HAYATI/2024	2.500.000,00	Belanja Hibah
79	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Gapoktan Panca Sakti BAST No. 000.2.6.1/1012/BAST-PUPUK HAYATI/2024	7.500.000,00	Belanja Hibah
80	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Gapoktan Tunas Baru BAST No. 000.2.6.1/1013/BAST-PUPUK HAYATI/2024	7.500.000,00	Belanja Hibah
81	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sawah Harapan Baru BAST No. 000.2.6.1/1014/BAST-PUPUK HAYATI/2024	2.000.000,00	Belanja Hibah
82	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Fajar Rezeki BAST No. 000.2.6.1/1015/BAST-PUPUK HAYATI/2024	1.500.000,00	Belanja Hibah
83	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Agro Kenupu BAST No. 000.2.6.1/1016/BAST-PUPUK HAYATI/2024	8.000.000,00	Belanja Hibah
84	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Simpor BAST No. 000.2.6.1/1017/BAST-PUPUK HAYATI/2024	3.000.000,00	Belanja Hibah
85	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Mengkanang BAST No. 000.2.6.1/1018/BAST-PUPUK HAYATI/2024	2.500.000,00	Belanja Hibah
86	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Telinsing Jaya BAST No. 000.2.6.1/1019/BAST-PUPUK HAYATI/2024	1.250.000,00	Belanja Hibah
87	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suga Ketakong Makmur BAST No. 000.2.6.1/1020/BAST-PUPUK HAYATI/2024	1.500.000,00	Belanja Hibah
88	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Manda Maju Bersama BAST No. 000.2.6.1/1021/BAST-PUPUK HAYATI/2024	2.500.000,00	Belanja Hibah
89	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Tani BAST No. 000.2.6.1/1022/BAST-PUPUK HAYATI/2024	3.000.000,00	Belanja Hibah
90	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Bakul BAST No. 000.2.6.1/1023/BAST-PUPUK HAYATI/2024	15.000.000,00	Belanja Hibah
91	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Licin BAST No. 000.2.6.1/1024/BAST-PUPUK HAYATI/ 2024	6.000.000,00	Belanja Hibah
92	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Gapoktan Bertuah BAST No. 000.2.6.1/1025/BAST-PUPUK HAYATI/2024	17.500.000,00	Belanja Hibah
93	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia BAST No. 000.2.6.1/1026/BAST-PUPUK HAYATI/ 2024	4.500.000,00	Belanja Hibah
94	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kelekak Titang Sejahtera BAST No. 000.2.6.1/1027/BAST-PUPUK HAYATI/2024	6.500.000,00	Belanja Hibah
95	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sejahtera Bersama BAST No. 000.2.6.1/1028/BAST-PUPUK HAYATI/2024	1.250.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reklasifikasi Kontruksi Dalam Pengerjaan menjadi aset tetap bangunan dan beban hibah (jasa konsultan Paud Swasta) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.940.000,00	Reklas Aset
97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reklasifikasi Aset Bangunan Gedung Pendidikan Permanen TK Stannia	7.956.400,00	Reklas Aset
98	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 1.1) An. KOMALASARI. BAST Nomor : 01/BAST/PERB.RLH.1.1/APBD/2024 28 November 2024	66.782.000,00	Belanja Hibah
99	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 1.2) An. SUWARMI. BAST Nomor 01/BAST/PERB.RLH.1.2/APBD/2024 28 November 2024	66.088.000,00	Belanja Hibah
100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 2.1) An. ANISA. BAST Nomor 02/BAST/PERB.RLH.2.1/APBD/2024 28 November 2024	64.223.000,00	Belanja Hibah
101	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 2.2) An. CHUI THIN. BAST Nomor 02/BAST/PERB.RLH.2.2/APBD/2024 28 November 2024	68.557.000,00	Belanja Hibah
102	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 3.1) An. MEDIAGUSTINO.BAST No: 03/BAST/PERB.RLH.3.1/APBD/2024 28 November 2024	66.296.000,00	Belanja Hibah
103	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket 3.2) SITI An. SALMA. BAST Nomor 03/BAST/PERB.RLH.3.2/APBD/2024 28 November 2024	66.152.000,00	Belanja Hibah
104	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket Kepulauan1) An. SATIN. BASTNo:04/BAST/PERB.RLH.4.1/APBD/2024 28 November 2024	89.994.000,00	Belanja Hibah
105	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Hibah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Paket Kepulauan2) An. LATIP. BASTNo:04/BAST/PERB.RLH.4.2/APBD/2024 28 November 2024	89.492.000,00	Belanja Hibah
	Total		**4.027.579.900,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

7. Beban Hibah uang/barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar **Rp3.958.215.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 166 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Albarkah Piakair Desa Sijuk Kecamatan Sijuk NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	243.710.000,00	Belanja Hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
2	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Atthohiroh Bebute Desa Terong Kecamatan Sijuk Naskah Hibah Keputusan Bupati Belitung No: 100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	200.000.000,00	Belanja Hibah
3	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Mesjid Al Jariah Membalong Kab.Belitung NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	250.000.000,00	Belanja Hibah
4	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Anni'mah Batu Itam Kecamatan Sijuk Kab.Belitung NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	150.000.000,00	Belanja Hibah
5	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Amanah Jabal Nur Pangkallalang Tanjungpandan Kab.Belitung NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	250.000.000,00	Belanja Hibah
6	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Alikhlash Belitung Desa Aik Rayak Tanjungpandan NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	250.000.000,00	Belanja Hibah
7	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Nurul Huda Gunungriting Desa Gunungriting Kecamatan Membalong NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	300.000.000,00	Belanja Hibah
8	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Fathul Khair Peduli Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	100.000.000,00	Belanja Hibah
9	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Alhilal Aik Kalak Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk NPHD No.100.3.4/023/ KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	300.000.000,00	Belanja Hibah
10	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Misbahul Khoir Kel Paal Satu Kec Tanjungpandan NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	150.000.000,00	Belanja Hibah
11	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Al Ikhlas Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	188.650.000,00	Belanja Hibah
12	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Hidayah Nurul Iman Desa Lassar Kecamatan Membalong NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/ 2024 Tanggal 19 Januari 2024	300.000.000,00	Belanja Hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
13	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Nurul Hidayah Air Nangka Desa Simpangrusa Membalong NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/ 2024 Tanggal 19 Januari 2024	200.000.000,00	Belanja Hibah
14	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Khoirulhuda Rejomulyo Membalong NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	199.880.000,00	Belanja Hibah
15	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Nurul Jannah Sabong Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong NPHD No.100.3.4/ 023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	200.000.000,00	Belanja Hibah
16	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Sabilul Falah Perawas Kecamatan Tanjungpanda NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	200.000.000,00	Belanja Hibah
17	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Air Seruk Kecamatan Sijuk NPHD No.100.3.4/023/KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	250.000.000,00	Belanja Hibah
18	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Huria Kristen Batak Protestan NPHD No.100.3.4/023/ KEP/II/2024 Tanggal 19 Januari 2024	225.975.000,00	Belanja Hibah
	Total		**3.958.215.000,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah

8. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar **Rp99.900.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 167 Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Air Seruk Kec. Sijuk BAST No. 400.11.26/001/BAST-UPPKA/ DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Pelepak Pute Kec. Sijuk BAST No. 400.11.26/002/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk BAST No. 400.11.26/003/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Kelurahan Parit Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/004/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Kelurahan Kota Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/005/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/006/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Buluh Tumbang Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/007/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Dukong Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/008/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan BAST No. 400.11.26/009/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Juru Seberang Kec. Tanjungpandan No. 400.11.26/010/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Petaling Kec. Selat Nasik BAST No. 400.11.26/011/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Padang Kandis Kec. Membalong BAST No. 400.11.26/012/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Membalong Kec. Membalong BAST No. 400.11.26/013/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Tanjung Rusa Kec. Membalong BAST No. 400.11.26/014/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Badau Kec. Badau BAST No. 400.11.26/015/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Pegantungan Kec. Badau BAST No. 400.11.26/016/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Cerucuk Kec. Badau BAST No. 400.11.26/017/BAST-UPPKA/ DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Cerucuk Kec. Badau BAST No. 400.11.26/018/BAST-UPPKA/ DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Ibul Kec. Badau BAST No. 400.11.26/019/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Hibah Barang kepada Desa Sungai Samak Kec. Badau BAST No. 400.11.26/020/BAST-UPPKA/DPPKBPMD/2024	4.995.000,00	Belanja Hibah
	Total		**99.900.000,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah

9. Beban hibah dana BOS yang diterima Satdikdas Swasta

Tabel 168 Beban Hibah Dana BOS yang Diterima Satdikdas Swasta

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	BOS Reguler SD Swasta	1.560.844.513,00	belanja hibah
2	Dinas Pendidikan	BOS Reguler SMP Swasta	911.995.528,00	belanja hibah
3	Dinas Pendidikan	BOS Kinerja SD Swasta	22.500.000,00	belanja hibah
4	Dinas Pendidikan	BOS Kinerja SMP Swasta	70.000.000,00	belanja hibah
	Total		**2.565.340.041,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

10. Beban hibah kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 169 Beban Hibah Kepada Partai Politik

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/ 2024 tanggal 04 April 2024	217.530.000,00	Belanja hibah
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Nasdem NPHD No. 100.3.4/173/KEP/ BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	107.763.750,00	Belanja hibah
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Persatuan Pembangunan NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	107.831.250,00	Belanja hibah
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Gerindra NPHD No. 100.3.4/173/KEP/ BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	67.511.250,00	Belanja hibah
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Hanura NPHD No. 100.3.4/173/KEP/ BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	108.213.750,00	Belanja hibah
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Amanat Nasional NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	62.730.000,00	Belanja hibah
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Golongan Karya NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	118.361.250,00	Belanja hibah
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Kebangkitan Bangsa NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	90.472.500,00	Belanja hibah
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Keadilan Sejahtera NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	61.053.750,00	Belanja hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Demokrat NPHD No. 100.3.4/173/KEP/BKBP/2024 tanggal 04 April 2024	58.826.250,00	Belanja hibah
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Bulan Bintang NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	24.075.000,00	Belanja hibah
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Nasional Demokrat NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	40.878.750,00	Belanja hibah
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Hati Nurani Rakyat NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	34.215.000,00	Belanja hibah
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Golongan Karya NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	38.835.000,00	Belanja hibah
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Demokrat NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	24.067.500,00	Belanja hibah
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Solidaritas Indonesia NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	11.403.750,00	Belanja hibah
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Solidaritas Indonesia NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	18.363.750,00	Belanja hibah
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Persatuan Pembangunan NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	30.742.500,00	Belanja hibah
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Keadilan Sejahtera NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	26.790.000,00	Belanja hibah
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai amanat Nasional NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	26.013.750,00	Belanja hibah
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Kebangkitan Bangsa NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	38.126.250,00	Belanja hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2024 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NPHD No. 100.3.4/457/KEP/BKBP/2024	55.398.750,00	Belanja hibah
	Total		**1.369.203.750,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dapat berupa pengeluaran konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat/perorangan. Pada tahun anggaran 2024 pemberian bantuan sosial berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia terlantar. Realisasi beban bantuan sosial pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp235.972.000,00** yang terdiri dari:

Tabel 170 Realisasi Beban Bantuan Sosial

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	23.500.000,00	-	23.500.000,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	212.472.000,00	196.911.000,00	15.561.000,00	7,90
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	-	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
Jumlah	**235.972.000,00**	**204.411.000,00**	**31.561.000,00**	**15,44**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan beban bantuan sosial sebagai berikut:

1. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia dan anak terlantar, pengadaan alat bantu/aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paket bantuan spesifik korban kekerasan pada perempuan, paket bantuan pemulihan kesehatan.
2. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga berupa bantuan sembako.
3. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia terlantar.

5.4.2.6 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Realisasi beban penyusutan pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp168.224.757.931,41** yang terdiri dari:

Tabel 171 Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50.627.260.955,50	50.313.827.104,60	313.433.850,90	0,62
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.231.191.204,91	16.268.469.890,00	(37.278.685,09)	(0,23)
Beban Penyusutan jalan. Irigasi dan Jaringan	101.325.728.955,00	113.821.243.883,00	(12.495.514.928,00)	(10,98)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	40.576.816,00	154.058.066,00	(113.481.250,00)	(73,66)
Jumlah	**168.224.757.931,41**	**180.557.598.943,60**	**(12.332.841.012,19)**	**(6,83)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi beban penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **lampiran 117.**

5.4.2.7 Beban Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Realisasi amortisasi pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp297.465.102,25**

Tabel 172 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	297.465.102,25	309.919.639,75	(12.454.537,50)	(4,02)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan beban amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran 110.**

5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang pada Pemerintah Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 adalah sebesar **Rp2.219.208.425,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 173 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan piutang pendapatan				
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.008.129.759,25	1.697.081.455,75	311.048.303,50	(18,33)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	166.089.472,50	159.502.817,50	6.586.655,00	4,13
Beban Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah	44.989.193,25	47.403.050,25	(2.413.857,00)	(5,09)
Beban Penyisihan piutang transfer	-	-	-	-
Beban Penyisihan piutang lainnya				
Beban Penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-
Beban Penyisihan bagian lancar tuntutan ganti rugi	-	-	-	-
Jumlah	**2.219.208.425,00**	**1.903.987.323,50**	**315.221.101,50**	**16,56**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.9 Beban Transfer

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2024 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp66.371.628.700,00**. Realisasi beban transfer seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan keuangan ke desa yang terdiri dari:

Tabel 174 Beban Transfer

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.774.242.924,00	8.079.725.000,00	694.517.924,00	8,60
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	978.814.876,00	1.052.096.000,00	(73.281.124,00)	(6,97)
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	-	57.995.336.000,00	(57.995.336.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	56.618.570.900,00	-	56.618.570.900,00	100,00
Total	**66.371.628.700,00**	**67.127.157.000,00**	**(755.528.300,00)**	**(1,13)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.10 Beban Lain-lain

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2024 tidak terdapat realisasi atas beban lain-lain.

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan. Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2024 berdasarkan realisasi pendapatan sebesar **Rp959.800.476.982,32** dan realisasi beban operasi **Rp1.122.377.929.281,65** maka Pemerintah Kabupaten Belitung mengalami Defisit dari kegiatan operasi sebesar **Rp(162.577.452.299,33)**.

5.4.4 Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional merupakan kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pada tahun 2024 nilai Surplus/Defisit Non Operasional adalah sebesar **Rp2.254.833.871,20** seluruhnya berasal dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2024 adalah sebesar (**Rp39.285.000,00)** yang berasal dari penghapusan aset tetap dan aset lainnya.

Tabel 175 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Rincian	Nilai
Penghapusan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya dan Alat Besar per 31 Desember 2024	19.285.000,00
Penghapusan Bangunan Gedung kondisi rusak berat SDN 10 Badau	20.000.000,00
Total	**39.285.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.4.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2024 adalah sebesar **Rp2.215.548.871,20** yang berasal dari rincian sebagai berikut:

Tabel 176 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Rincian	Nilai
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
- Penyesuaian atas penghapusan kendaraan tindak lanjut pemindahtanganan dalam bentuk penjualan tanpa lelang kepada mantan Wakil Bupati Belitung	183.415.324,00

Rincian	Nilai
- Penghapusan Aset Hewan Piaraan Lainnya-Induk Kerapu Dinas Perikanan	4.900.000,00
- Penyesuaian Penghapusan aset lainnya UPT RSUD dr. Marsidi Judono	5.739.071,00
- Penghapusan BMD berupa barang inventaris dan alat besar Dinas Lingkungan Hidup	67.728.024,00
- Pemusnahan Halte Bus Dinas Perhubungan Kab. Belitung	23.126.452,21
- Penyesuaian Penghapusan aset lainnya Dinas Pemuda dan Olahraga	3.209.934,00
- Penyesuaian nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD karena penurunan nilai kekayaan bersih akibat akumulasi kerugian pada BUMD	1.574.931.339,25
- Koreksi nilai penyertaan modal pada PT. Belitung Mandiri karena penurunan nilai kekayaan bersih akibat akumulasi kerugian tahun berjalan	352.498.726,74
Jumlah Defisit	**2.215.548.871,20**
Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**2.215.548.871,20**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.5 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi atas beban luar biasa atau beban tidak terduga.

5.4.6 Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 yaitu sebesar (**Rp164.832.286.170,53)**

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan jumlah penerimaan bruto dari Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 177 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	95.733.329.497,25	94.099.943.027,70
Penerimaan Retribusi Daerah	28.328.429.252,00	12.144.891.525,60

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.566.654.063,95	6.035.003.956,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	54.319.752.323,13	74.235.879.986,50
Penerimaan Dana Bagi Hasil	80.735.062.654,00	136.611.970.768,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	485.393.500.051,00	469.430.528.687,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	10.766.768.288,00	69.464.145.429,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	47.359.587.685,00	46.903.175.088,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	41.029.718.000,00
Penerimaan Dana Insentif Fiskal	15.976.321.000,00	-
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	59.001.661.334,00	71.558.916.815,00
Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan	3.971.626.000,00	6.713.367.500,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	-	-
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Jumlah	**887.152.692.148,33**	**1.028.227.540.782,80**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi termasuk pendapatan BLUD sebesar **Rp63.825.962.314,29** yang disajikan pada penerimaan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan untuk pendapatan dana BOS/BOP, pendapatan dana Kapitasi JKN dan pendapatan dana BOK Puskesmas serta penerimaan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat tidak termasuk dalam laporan arus kas dikarenakan transaksi pendapatan tersebut tidak melalui kas daerah. Pencatatan pada LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pencatatan penerimaan dana desa berdasarkan daftar SP2DD Penyaluran dana desa dari KPPN Tanjungpandan.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah selama tahun berjalan sesuai nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 178 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Pembayaran Pegawai	475.592.481.642,00	445.563.763.177,00
Pembayaran Barang	328.060.841.961,78	326.447.594.565,00
Pembayaran Subsidi	638.399.797,00	644.159.628,00
Pembayaran Hibah	41.600.053.850,00	35.208.309.870,00
Pembayaran Bantuan Sosial	235.972.000,00	204.411.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.753.057.800,00	9.131.821.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	56.618.570.900,00	57.995.336.000,00
Pembayaran Tak terduga	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah	**912.499.377.950,78**	**875.195.395.240,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi termasuk pengeluran kas BLUD berupa belanja pegawai sebesar **Rp29.625.535.304,00** dan belanja barang sebesar **Rp37.921.999.336,00**. sedangkan pengeluaran kas dana BOS/BOP. BOK dan pengeluaran kas Dana Kapitasi JKN pada FKT-+P serta pengeluaran bagi hasil pendapatan lainnya berupa Dana Desa (DD) tidak termasuk dalam laporan arus kas. Pencatatan belanja pada LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pencatatan penerimaan dana desa berdasarkan daftar SP2DD Penyaluran dana desa dari KPPN Tanjungpandan

Arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. dengan total arus kas bersih sebesar **Rp(25.346.685.802,45)**.

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset merupakan jumlah penerimaan bruto dari pelepasan sumber daya ekonomi seperti penjualan aset dan pencairan dana cadangan. pada tahun 2024 jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar **Rp1.084.877.500,00** yang berasal dari hasil lelang BMD berupa material sisa bongkaran gedung dan bangunan. barang inventaris peralatan dan mesin. dan limbah padat (*scrap*) dengan kandungan besi tua.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan jumlah pengeluaran kas bruto dalam rangka memperoleh sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah seperti perolehan aset tetap. perolehan aset lainnya dan penyertaan modal pemerintah. jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 179 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	4.135.660.290,00	1.098.020.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	22.585.890.296,00	59.377.750.991,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	18.418.277.038,62	38.123.739.705,00
Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan	14.696.115.290,00	46.774.899.000,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	62.000.000,00	23.773.000,00
Perolehan Aset Lainnya	164.983.850,00	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah	**63.062.926.764,62**	**145.398.183.096,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi termasuk pengeluran kas BLUD berupa belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp396.600.000,00** dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar **Rp6.946.027.000,00**.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar **Rp(61.978.049.264,62)** diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurang pengeluaran kas untuk membiayai pengadaan aset tetap.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Pemerintah Kabupaten Belitung tidak terdapat arus kas masuk maupun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas Transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan. beban. dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan. penerimaan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris meliputi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan. penerimaan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran dari bendahara pengeluaran.

Tabel 180 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	43.905.049.808,00	45.908.143.900,00
Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan	2.901.350.952,00	4.878.165.698,00
Penerimaan Pengembalian Belanja Dana BOS/BOP	-	173.806.600,00
Penerimaan Pengembalian sisa kas bendahara penerimaan tahun lalu	-	362.000,00
Jumlah	**46.806.400.760,00**	**50.960.478.198,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan sebesar Rp2.901.350.952,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181 Rincian Pengembalian Belanja Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengembalian belanja pegawai	22.999.170,00
Pengembalian belanja barang	207.720.523,00
Pengembalian belanja hibah	144.117.448,00
Pengembalian sisa uang persediaan	2.526.513.811,00
Total	2.901.350.952,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas Transitoris meliputi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan pemberian uang persediaan bendahara pengeluaran.

Tabel 182 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	43.905.049.808,00	45.908.365.079,00
Pengeluaran Pengembalian Pendapatan	173.806.600,00	-
Pemberian Uang Persediaan	2.526.513.811,00	4.785.988.592,00
Jumlah	**46.605.370.219,00**	**50.694.353.671,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar **Rp201.030.541,00**.

Dari jumlah total arus kas bersih. baik itu dari aktivitas operasi. aktivitas investasi. aktivitas pendanaan serta aktivitas transitoris diperoleh penurunan kas sebesar **Rp(87.123.704.526,07)** dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 183 Rincian Penurunan Saldo Kas

Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(25.287.290.802,45)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(62.037.444.264,62)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	201.030.541,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(87.123.704.526,07)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dengan adanya kenaikan kas tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan saldo kas daerah yang dikelola oleh BUD dan BLUD di mana saldo awal kas per 1 Januari 2024 sebesar **Rp184.111.969.511,77** dikurang penurunan kas **Rp87.123.704.526,07** sehingga saldo akhir Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar **Rp96.988.264.985,70** yang terdiri dari:

Tabel 184 Rincian Saldo Akhir Kas

Rekening Kas	Jumlah (Rp)
Kas Di Kas Daerah	74.510.560.075,04
Kas di BLUD	22.477.704.910,66
Total	96.988.264.985,70

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selain itu terdapat saldo kas di bendahara SKPD yang terdiri dari:

1. Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh OPD. terdiri dari:
   a. Kas dana kapitasi JKN di bendahara pengelola dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp221.461.13,00.
   b. Kas pada bendahara Dana BOS/BOP sebesar Rp211.800.588,00 yang terdiri dari:

Saldo kas BOS Reguler	Rp	209.998.812,00
Saldo kas BOS Kinerja	Rp	1.801.776,00

Saldo kas BOP	Rp	0.00

2. Kas pada bendahara BOK sebesar Rp1.603.135.798,00

Total saldo akhir kas pada laporan arus kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp99.024.662.502,70**.

Jika dibandingkan dengan SiLPA sebesar **Rp99.023.375.881,70**. terdapat selisih saldo akhir kas pada LAK dengan SiLPA sebesar **Rp1.286.621,00**. selisih tersebut berasal dari :

Tabel 185 Selisih Saldo Akhir Kas Pada LAK dengan SiLPA

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo kas BOS dikarenakan sekolah buka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021.	150.000,00
Penyesuaian penambahan Kas BOS (SDN 25 Tanjungpandan) yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023	1.357.800,00
Kelebihan setoran pot. PFK dari kasda ke RKUN	(221.179,00)
Total	**1.286.621,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekonsiliasi saldo kas di Neraca dengan saldo kas di LAK sebagai berikut:

Tabel 186 Rekonsiliasi Saldo Kas di Neraca dengan Saldo Kas di LAK

No.	Uraian	Saldo Kas Neraca (Rp)	Saldo kas LAK (Rp)	Selisih
1.	Kas di Kas Daerah	14.510.560.075,04	14.510.560.075,04	-
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
4.	Kas di BLUD	22.477.704.910,66	22.477.704.910,66	-
5.	Kas di Bendahara BOS	211.800.588,00	211.800.588,00	-
6.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	221.461.131,00	221.461.131,00	-
7.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.603.135.798,00	1.603.135.798,00	
8.	Setara Kas	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-
9.	Kas lainnya (Kas yang di batasi penggunaannya)	178.536.273,00	-	178.536.273,00
	Total	**99.203.198.775,70**	**99.024.662.502,70**	**178.536.273,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selisih saldo kas yang di sajikan pada neraca dengan saldo kas pada LAK sebesar **Rp178.536.273,00**. selisih tersebut merupakan kas yang dibatasi penggunaannya berupa bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan yang merupakan hak pihak ketiga yang tercatat pada rekening 146.30.10374 dan 146.30.10093 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung namun bukan merupakan bagian kas dari pemerintah Kabupaten Belitung.

5.6 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas

Komponen perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

5.6.1 Ekuitas awal

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah sebesar **Rp2.397.705.035.838,05**.

5.6.2 Surplus/Defisit (LO)

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah surplus sebesar **Rp(164.832.286.170,53)** Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas lainnya. Pada tahun 2024 Koreksi ekuitas yaitu sebesar **Rp32.264.350.853,50** dengan rincian sebagai berikut:

a. **Koreksi Nilai Persediaan** senilai Rp0,00.

Pada tahun 2024 tidak terdapat koreksi nilai persediaan.

b. **Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap** senilai Rp0,00**.**

Pada tahun 2024 tidak terdapat koreksi selisih revaluasi aset tetap.

c. **Koreksi Ekuitas Lainnya**

Koreksi ekuitas lainnya **s**ebesar **Rp32.264.350.853,50** merupakan koreksi nilai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 187 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	Uraian	Jumlah
	Mutasi Tambah :	
1	Penyesuaian atas pelunasan piutang tidak tertagih yang dibayarkan di tahun 2023	321.566.039,50
2	Penyesuaian atas pengalihan tanah kosong yang sudah diperuntukkan (jalan pantai Tg kelayang desa keciput) yang semula tecatat di kelompok aset lainnya-kemitraan pihak ketiga menjadi aset tetap pada sekretariat daerah kabupaten belitung	19.859.200.000,00
3	Penyesuaian pencatatan bangunan kesehatan puskesmas pembantu berlokasi di desa Lesung Batang	79.008.000,00
4	Penyesuaian penetapan status tanah untuk bangunan tempat kerja di puskesmas selat nasik	76.945.000,00

No.	Uraian	Jumlah
5	Penyesuaian penambahan Aset Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan Tahun 2024 kecamatan sijuk	11.000.000.000,00
6	Reklasifikasi Aset Extra Bangunan Garasi menjadi Aset Intra pada SDN 3 Selat Nasik dikarenakan ada rehab bantuan dari PUPR sehingga menambah nilai Aset Bangunan Garasi.	3.780.000,00
7	Koreksi atas kelebihan catat pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya	30
8	Koreksi kurang catat atas hibah pengadaan bangunan dan srana prasarana PAUD Percontohan tahun 2019, berdasarkan hasil inventarisasi BMD aset tersenut belum tercatat pada aset dins pendidikan dan kebudayaan	1.074.596.000,00
9	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan kendaraan angkutan tak berpenumpang pada dinas pendidikan dan kebudayaan	425.000,00
10	**Jumlah Mutasi Tambah**	**32.415.520.069,50**
11	**Mutasi Kurang :**	
12	Koreksi pelunasan piutang akibat adanya cash program dari KPKNL	(9.174.382,00)
13	Penyesuaian saldo rek bank dana bos SD Negeri 5 Tanjungpandan karena koreksi kredit bunga bulan April 2023 belum disetor ke RKUD	(1,00)
14	Penyesuaian Pengembalian BPJS Kesehatan Tahun 2020-2023	(141.994.833,00)
15	**Jumlah Mutasi Kurang**	**(151.169.216,00)**
16	**Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya**	**Rp32.264.350.853,50**

Sumber: data BPKAD (diolah

5.6.4 Ekuitas akhir

Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Belitung tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp2.265.137.100.521,02** dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas akhir tahun 2023 sebesar **Rp2.397.705.035.838,05** mengalami penurunan sebesar **Rp(132.567.935.317,03)** atau sebesar **5,53%**.

Penjelasan Lain-lain

Terdapat kas dan setara kas di luar rekening kas milik daerah berupa:

1. Jaminan Reklamasi atas nama Pemda Kab. Belitung

Jaminan reklamasi yang ditampung dalam rekening Giro Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan a.n. Dana Jaminan Reklamasi. Lainnya dengan nomor rekening 146.301.0093 dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.000,00 dan Deposito atas nama Pemda Kab. Belitung dengan saldo dana jaminan reklamasi per 31 Desember 2023 senilai Rp786.081.549,00 sehingga total jaminan reklamasi atas nama Pemda Kab. Belitung per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp786.131.549,00 rincian pada **Lampiran 118**.

2. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor.

700/0026/ESDM tanggal 13 Januari 2020 Hal : Pemindahan Rekening Jaminan. maka rekening Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pasca Tambang dan/atau Jaminan Kesungguhan dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor dalam bentuk deposito berjangka. Adapun jaminan

yang telah dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Jaminan reklamasi yang semula dalam bentuk 3 (tiga) deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp313.500.000,00 (pokok deposito) telah dipindahkan per tanggal 23 Nopember 2020 menjadi 11 (sebelas) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp473.009.620,00 (pokok lama senilai Rp312.800.000,00 + bunga deposito senilai Rp160.209.620,00). sedangkan sisa pokok lama senilai Rp700.000,00 masih dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut (rekening 146.411.4720).

b. Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp2.256.675.498,00 telah dipindahkan per tanggal 28 Oktober 2022 menjadi 60 (enam puluh) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp2.925.744.308,00 (pokok lama senilai Rp1.820.652.500,00 + bunga deposito senilai Rp1.105.091.808,00). sedangkan sisa pokok lama senilai Rp436.022.998.00 masih dalam bentuk 2 (dua) deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut yaitu rekening 146.411.5222 senilai Rp425.272.998,00 (pokok lama) dan rekening 146.411.5322 senilai Rp10.750.000,00 (pokok lama).

   Sebagai tindaklanjut Kesepakatan hasil rapat tanggal 24 Agustus 2023 tentang pemindahan nama rekening jaminan reklamasi (JAMREK) dari Pemerintah Kabupaten Belitung QQ. Bupati Belitung ke pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung QQ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung maka Pemerintah Kabupaten Belitung kembali mengajukan permohonan perubahan nama rekening deposito jaminan reklamasi an. Gubernur kepulauan Bangka Belitung QQ Penambang menyesuaikan dengan nominal pokok deposito baru sebagaimana surat Nomor : 900.1.15.5/1865/BPKAD tanggal 30 Agustus 2023 dengan total deposito senilai Rp2.987.237.082,00 (pokok lama senilai Rp2.925.744.308,00 + bunga deposito senilai Rp61.492.774,00).

c. Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp1.450.000.000,00 telah dipindahkan per tanggal 29 November 2022 menjadi 106 (seratus enam) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp2.223.318.603,00 (pokok lama senilai Rp1.397.000.000,00 + bunga deposito senilai Rp826.318.603,00). sedangkan sisa pokok lama senilai Rp53.000.000,00 masih dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut yaitu rekening 146.412.7422 senilai Rp53.000.000,00 (pokok lama).

   - Jaminan reklamasi yang semula ditampung dalam bentuk giro pada rekening 146.301.0093 senilai Rp477.550.000,00 per tanggal 23 Nopember 2020 telah dipindahkan menjadi 12 (dua belas) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk

deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp543.922.404,00 (pokok lama senilai Rp477.500.000,00 + bunga giro senilai Rp66.422.404,00) sedangkan sisa senilai Rp50.000,00 masih terdapat direkening 146.301.0093 karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut.

- Terdapat 13 (tiga belas) deposito jaminan kesungguhan dengan total Rp352.500.000,00 yang semula atas nama Pemda Kab. Belitung. per tanggal 23 November 2020 telah dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor dalam bentuk deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp527.537.177,00 (pokok lama senilai Rp352.500.000,00 + bunga deposito senilai Rp175.037.177,00). rincian pada **Lampiran 118**.

3. Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengalihkan jaminan reklamasi menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor senilai Rp4.007.952.500,00 atau sebesar 89% dari total jaminan reklamasi yang ada sedangkan sisanya senilai Rp489.722.998,00 masih atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi dimaksud. Jaminan reklamasi yang telah dialihkan tersebut belum diserahkan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung karena sebagian deposito tersebut masih dalam proses penandatangan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Bank Sumsel Babel.

Informasi Tambahan

Di samping informasi utama tersebut. perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

a. Tersebut batas minimal aset yang masuk dalam neraca adalah: **Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset.**

Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi

- Peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp1.000.000,00.
- Gedung dan Bangunan minimal nilai per unitnya Rp10.000.000,00.
- Jalan dan Jembatan. Bangunan Air (Irigasi). Jaringan. dan Instalasi tidak ada batasan nilai.
- Aset tetap lainnya berupa hewan/ternak/tanaman minimal nilai per unitnya Rp1.000.000,00. Sedangkan koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian dan kebudayaan/olah raga tidak ada batasan nilai.

b. Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*ekstrakomptable*) yang dari aset neraca yang sampai dengan tahun pelaporan senilai **Rp68.003.526.921,43.**

c. Selain itu juga terdapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan kepada satuan pendidikan dasar baik sekolah negeri maupun swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang berasal dari APBN kepada SD/SMP Negeri maupun swasta yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD/SMP Negeri telah dikonsolidasi pada LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung.

Jumlah alokasi dan penggunaan dana BOS yang disalurkan kepada satuan pendidikan dasar swasta adalah sebagai berikut:

Tabel 188 Alokasi dan Penggunaan Dana BOS Satdikdas Swasta

No	Nama Sekolah	Saldo Awal Kas 1 Januari 2024	Penerimaan		Pengeluaran		Saldo Akhir Kas 31 Desember 2024
			Transferan Bos &Setoran	Bunga Bank	Belanja Bos	Biaya Bank	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	SD Regina Pacis T.Pandan	1.731.241,63	268.815.560,00	207.626,00	268.126.260,00	974.427,63	1.653.740,00
2	SD Muhammadiyah T.Pandan	2.343.030,00	125.560.600,00	-	127.479.010,00	63.630,00	360.990,00
3	SD Anugrah T.Pandan	7.137.645,00	243.337.553,00	174.642,00	249.770.771,00	609.840,00	269.229,00
4	SD IT Bina Insani T.Pandan	683.660,00	372.240.000,00	315.125,00	372.210.000,00	998.785,00	30.000,00
5	SD Keluarga Universal T.Pandan	9.362.213,00	404.250.800,00	337.341,00	412.009.010,00	1.290.354,00	650.990,00
6	SD Muhammadiyah 2 T.Pandan	654.103,00	101.520.000,00	98.880,00	101.520.000,00	710.483,00	42.500,00
7	SD Alam AQILA	-	45.120.000,00	-	38.744.500,00	-	6.375.500,00
8	SMP PGRI 1 T.Pandan	803.955,00	78.201.300,00	59.550,00	78.638.000,00	404.805,00	22.000,00
9	SMP PGRI 2 T.Pandan	204.169,00	93.278.100,00	62.278,00	93.411.800,00	64.547,00	68.200,00
10	SMP Regina Pacis T.Pandan	774.413,00	161.634.328,00	147.599,00	161.694.139,00	676.340,00	185.861,00
11	SMP Yaperbel T.Pandan	2.467.609,00	51.885.000,00	389.891,00	54.635.000,00	22.500,00	85.000,00
12	SMP Muhammadiyah T.Pandan	555.206,00	51.100.000,00	30.077,00	51.197.000,00	385.283,00	103.000,00
13	SMP Anugrah T.Pandan	5.248.669,00	162.555.000,00	137.601,00	167.580.000,00	214.091,00	147.179,00
14	SMP Keluarga Universal T.Pandan	422.327,00	200.523.300,00	191.380,00	200.543.200,00	497.007,00	96.800,00
15	SMP IT Bina Insani T.Pandan	94.495,00	112.818.500,00	77.722,00	112.850.000,00	130.717,00	10.000,00
TOTAL SD & SMP SWASTA		**32.482.735,63**	**2.472.840.041,00**	**2.229.712,00**	**2.490.408.690,00**	**7.042.809,63**	**10.100.989,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah darat kurang lebih 2.293.69 km^2/sq.km Keberadaan pulau yang jauh dari pulau induk ini menjadi pertimbangan utama dalam meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap penyediaan prasarana dasar yang dibangun Pemerintah Kabupaten Belitung.

Wilayah Kabupaten Belitung terdiri dari 42 desa dan 7 kelurahan. dengan Kantor Pemerintah Kabupaten yang terletak di Jalan Jendral A. Yani Nomor 001 Tanjungpandan. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. desa-desa khususnya di wilayah Kecamatan Tanjungpandan telah dimekarkan menjadi beberapa kelurahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan status Desa yaitu Paal Satu menjadi Kelurahan Paal Satu. Desa Tanjungpendam menjadi Kelurahan Tanjungpendam. Desa Lesung Batang menjadi Kelurahan Lesung Batang. Desa Pangkallalang menjadi Kelurahan Pangkallalang diwilayah Kecamatan Tanjungpandan. Pemekaran desa ini diharapkan selain dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. juga peningkatan kualitas pelayanan publik.

6.1 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah Tipe A;
2) Sekretariat DPRD Tipe C;
3) Inspektorat Daerah Tipe A;

A. Dinas Daerah. terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
3. Dinas Pariwisata Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

4. Dinas Kesehatan Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
5. Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. dan Perlindungan Anak Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pendudukan dan keluarga berencana. dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
9. Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah. Perdagangan. dan Tenaga Kerja Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi. usaha kecil dan menengah. urusan pemerintahan bidang perdagangan. dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
12. Dinas Perhubungan Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
15. Dinas Perikanan Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

B. Badan Daerah. terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B. melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian. pendidikan. dan pelatihan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A. melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A. melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A. melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A. menyelenggarakan urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A. menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.

C. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Tanjungpandan Tipe A;
2. Kecamatan Membalong Tipe A;
3. Kecamatan Sijuk Tipe A;
4. Kecamatan Badau Tipe A; dan
5. Kecamatan Selat Nasik Tipe A.

Pada Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terdiri atas :
   a. UPT Satuan Pendidikan SD. yang meliputi :
      1) Kecamatan Tanjungpandan
      2) Kecamatan Selat Nasik
      3) Kecamatan Badau
      4) Kecamatan Sijuk
      5) Kecamatan Membalong
   b. UPT Satuan Pendidikan SMP. yang meliputi :
      1) Kecamatan Tanjungpandan terdiri atas :
         a) UPT Pendidikan SMPN 1 Tanjungpandan

b) UPT Pendidikan SMPN 2 Tanjungpandan
c) UPT Pendidikan SMPN 3 Tanjungpandan
d) UPT Pendidikan SMPN 4 Tanjungpandan
e) UPT Pendidikan SMPN 5 Tanjungpandan
f) UPT Pendidikan SMPN 6 Tanjungpandan
g) UPT Pendidikan SMPN 7 Tanjungpandan

2) Kecamatan Badau. meliputi :
a) UPT Pendidikan SMPN 1 Badau
b) UPT Pendidikan SMPN 2 Badau
c) UPT Pendidikan SMPN 3 Badau

3) Kecamatan Sijuk. meliputi :
a) UPT Pendidikan SMPN 1 Sijuk
b) UPT Pendidikan SMPN 2 Sijuk
c) UPT Pendidikan SMPN 3 Sijuk
d) UPT Pendidikan SMPN 4 Sijuk

4) Kecamatan Membalong. meliputi :
a) UPT Pendidikan SMPN 1 Membalong
b) UPT Pendidikan SMPN 2 Membalong
c) UPT Pendidikan SMPN 3 Membalong
d) UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong
e) UPT Pendidikan SMPN 5 Membalong

5) Kecamatan Selat Nasik. meliputi :
a) UPT Pendidikan SMPN 1 Selat Nasik
b) UPT Pendidikan SMPN 2 Selat Nasik
c) UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Belitung
d) UPT Museum.

2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. meliputi :
a. UPT Laboratorium Kesehatan
b. UPT Puskesmas. yang meliputi :
1) Puskesmas Tanjungpandan
2) Puskesmas Perawas
3) Puskesmas Air Saga
4) Puskesmas Sijuk

5) Puskesmas Badau
6) Puskesmas Selat Nasik
7) Puskesmas Tanjung Binga
8) Puskesmas Simpang Rusa
9) Puskesmas Membalong

c. UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono

3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. yang meliputi :
   a. UPT Pengelolaan Air Minum
   b. UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan. Perbekalan dan Laboratorium
4. Pada Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yaitu UPT Perbenihan dan Pembibitan.
5. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung yaitu UPT Perikanan Budidaya
6. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung yaitu UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan
7. Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung. yang meliputi :
   a. UPT Laboratorium Lingkungan
   b. UPT Pengelolaan Sampah.
8. Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Perdagangan dan Tenaga Kerja yaitu UPT Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar.

Tabel 189 Daftar Organisasi Perangkat Daerah untuk TA. 2024

No	OPD TA. 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	UPT. Sanggar Kegiatan Belajar
	UPT. Negeri 1 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 2 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 3 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 4 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 5 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 6 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 7 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 1 Membalong
	UPT. SMP Negeri 2 Membalong
	UPT. SMP Negeri 3 Membalong
	UPT. SMP Negeri 4 Membalong
	UPT. SMP Negeri 5 Membalong
	UPT. SMP Negeri 1 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 2 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 3 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 4 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 1 Badau
	UPT. SMP Negeri 2 Badau
	UPT. SMP Negeri 3 Badau

No	OPD TA. 2024
	UPT. SMP Negeri 1 Selat Nasik
	UPT. SMP Negeri 2 Selat Nasik
2	Dinas Kesehatan
	UPT. RSUD dr. H. Marsidi Judono
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Sosial
6	Dinas Lingkungan Hidup
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Dinas Perhubungan
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah. Perdagangan dan Tenaga Kerja
12	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
13	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	Dinas Perikanan
16	Dinas Pariwisata
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
24	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung
25	Kecamatan Tanjungpandan
	UPT. Kelurahan Kota
	UPT. Kelurahan Parit
	UPT. Kelurahan Pangkal Lalang
	UPT. Kelurahan Tanjung Pendam
	UPT. Kelurahan Paal Satu
	UPT. Kelurahan Kampong Damai
	UPT. Kelurahan Lesung Batang
26	Kecamatan Membalong
27	Kecamatan Sijuk
28	Kecamatan Badau
29	Kecamatan Selat Nasik
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: data BPKAD (diolah)

6.2 Pemimpin Lembaga Eksekutif dan Legislatif

6.2.1 Pemimpin Lembaga Eksekutif

Pada periode pelaporan.terhitung sejak tanggal 31 Desember 2023 Jabatan Bupati Belitung dijabat oleh **Yuspian. S.Sos.. M.I.R.** beliau adalah Kepala Biro Umum dan Akademik Institut Teknologi Kalimantan yang dilantik sebagai Penjabat Bupati Belitung pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6620 Tahun 2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 31 Desember 2023. namun pada bulan Agustus 2024 pejabat Bupati Belitung digantikan oleh **Mikron Antariksa** . beliau adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilantik sebagai Pejabat Bupati Belitung pada tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3306 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 8 Agustus 2024. dan pada bulan Februari 2025 seiring dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025-2030 maka masa jabatan Pejabat Bupati Belitung berakhir. Saat disusunnya laporan keuangan ini pemerintah kabupaten belitung dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

Pada tanggal 28 Januari 2025 Bupati dan Wakil Bupati terpilih **Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos** dan **Syamsir, S.I.Kom** disahkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Dan dilantik secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025.

6.2.2 Pimpinan Lembaga Legislatif

Pada periode pelaporan keuangan ini masa jabatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hasil pemilu tahun 2019 masa jabatan 2019 – 2024 telah berakhir pada bulan September 2024 dan telah diresmikan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilu tahun 2024 masa jabatan 2024 – 2029 dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/497/I/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan diketuai oleh **Vina Cristyn Ferani, S.E** Wakil Ketua I **Hilman** dan Wakil Ketua II **Joko Prianto** sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/523/I/2024. tanggal 14 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan Tahun 2024 -2029.

BAB VII

PENUTUP

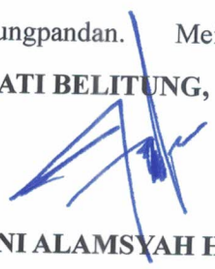
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Daerah disajikan bersama-sama laporan keuangan daerah lainnya adalah merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan secara jelas. yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. sehingga CaLK ini berfungsi pula untuk menghindari kesalahpamaham dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CaLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas, dan penyajian – penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berupa pengungkapan pengungkapan lainnya yang memadai dan diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan tentang laporan-laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang transparan akuntabel, bertanggung jawab dan bertanggung gugat.

Tanjungpandan. Mei 2025

BUPATI BELITUNG,



DJONI ALAMSYAH HIDAYAT